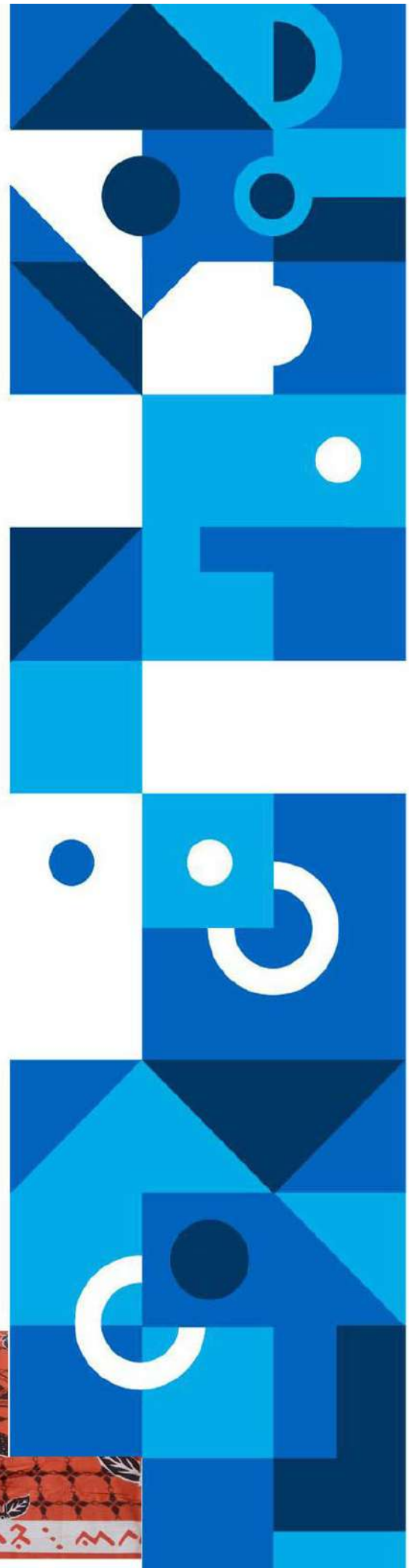
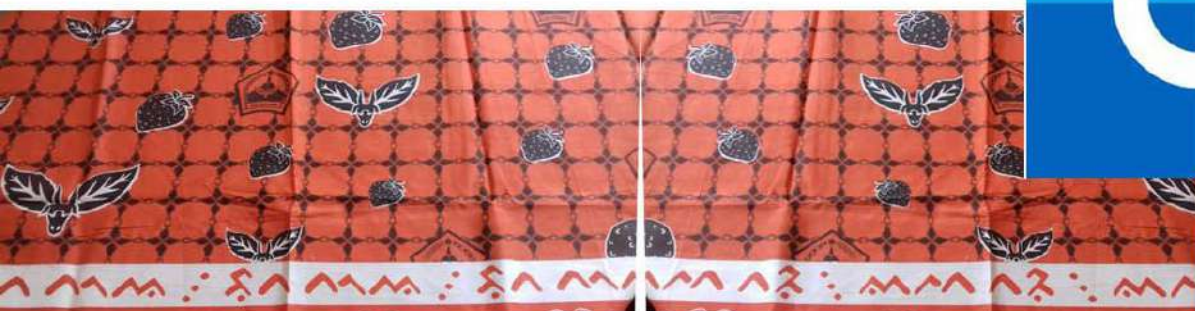




PERATURAN BUPATI

NO. 23 TAHUN 2023

tentang rencana
kerja pemerintah
daerah tahun 2024





BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja MLenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

- (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut RPD Kabupaten Bantaeng adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 – 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2024.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahun 2024 Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini bahwa RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 - 2026 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai :
 - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan Daerah;
 - c. sebagai dasar penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; dan
 - d. untuk melakukan penyusunan RKA bagi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD
Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Uraian sistematika RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV
LAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 7 Juli 2023


BUPATI BANTAENG,

ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 23



KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan titik awal dari suatu proses kegiatan/aktivitas dimana hal tersebut akan memberikan efisiensi dan optimalisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sederhananya, perencanaan dapat dimaknai sebagai fungsi awal dalam manajemen pemerintah daerah sebelum melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan daerah. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan kabupaten Bantaeng merupakan perencanaan yang disusun secara berkesinambungan dimana terlebih dahulu menyusun RPJMD dan RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 memiliki tantangan yang cukup kompleks dimana isu global terkait resesi dan menjadi tahun politik terkait pelaksanaan pemilihan umum Kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak ditahun 2024. Memahami dinamika tersebut, tahun 2024 prioritas pembangunan harus memperhatikan kondisi permasalahan yang sedang terjadi, kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan pusat (Nasional) sehingga pembangunan daerah diharapkan mampu mendukung pencapaian pembangunan nasional ditahun 2024 ini.

Selanjutnya, penyusunan RKPD Tahun 2024 pada tahun ini mengacu pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026. RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Renja-Perangkat Daerah dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu dalam upaya menciptakan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, maka RKPD menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I.10
1.4 Maksud dan Tujuan	I.11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I.12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II.2
2.2 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng	II.74
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	II.97
2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II.106
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah	II.123
2.6 Isu Strategis Pembangunan Daerah	II.130
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.17
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng	IV.2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	IV.4
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V.1
5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2024	V.1
BAB VI KINERJA PENEYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI.1
6.1 Indikator Makro Pembangunan Daerah	VI.2
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	VI.2
6.3 Indikator Kinerja Kunci	VI.3
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI.37
6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals	VI.38
BAB VII PENUTUP	VII.1
7.1 Kaidah Pelaksanaan	VII.1
7.2 Kesimpulan	VII.2



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	I.4
Gambar I.2	Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	I.10
Gambar I.3	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	I.11
Gambar II.1	Peta Wilayah Kabupaten Bantaeng	II.3
Gambar II.2	Peta Struktur Ruang, Peta Pola Ruang Dan Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bantaeng	II.14
Gambar II.3	Peta Rawan Bencana Kabupaten Bantaeng	II.15
Gambar IV.1	Sasaran dan target pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2024	IV.5
Gambar IV.2	Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	IV.16



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2022	II.4
Tabel II.2	Nama Sungai, Panjang Sungai dan Kecamatan Yang Dilintasi Kabupaten Bantaeng	II.5
Tabel II.3	Statistik Klimatologi Kabupaten Bantaeng Tahun 2022	II.5
Tabel II.4	Luas Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Peruntukan Rakyat Kabupaten Bantaeng Tahun 2012	II.7
Tabel II.5	Klasifikasi dan Luas Wilayah terdampak Beberapa Jenis Bencana yang terjadi di Kabupaten Bantaeng	II.15
Tabel II.6	Jumlah Penduduk, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2022	II.17
Tabel II.7	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantaeng, Tahun 2018-2022	II.21
Tabel II.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantaeng, Tahun 2018-2022	II.23
Tabel II.9	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.27
Tabel II.10	Angka Partisipasi Kasar(APK) Kabupaten Bantaeng, Tahun 2018 – 2022	II.40
Tabel II.11	Angka Partisipasi Murni(APM) Kabupaten Bantaeng, Tahun 2017 – 2022	II.40
Tabel II.12	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar(APK)Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022	II.40
Tabel II.13	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA)Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 – 2021	II.41
Tabel II.14	Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 – 2021	II.42
Tabel II.15	Indikator Pelayanan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2022	II.43
Tabel II.16	Kondisi Pelayanan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Kabupaten Bantaeng Tahun 2019–2022	II.44
Tabel II.17	Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022	II.46
Tabel II.18	Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2022	II.46
Tabel II.19	Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, Kabupaten Bantaeng Tahun 2022	II.48
Tabel II.20	Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.51
Tabel II.21	Indeks Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.51
Tabel II.22	Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.53
Tabel II.23	Indikator terkait Urusan Pertanahan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2021	II.54
Tabel II.24	Indikator terkait Urusan Pertanahan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2021	II.54
Tabel II.25	Kondisi 3 (Tiga) Indikator LH Tahun 2018-2022	II.56



Tabel II.26	Fasilitas Perhubungan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022	II.56
Tabel II.27	Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 – 2021	II.57
Tabel II.28	Perkembangan Investasi Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 – 2022	II.57
Tabel II.29	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.59
Tabel II.30	Capaian Pembangunan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021	II.61
Tabel II.31	Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Tahun Kabupaten Bantaeng, 2017-2021	II.62
Tabel II.32	Capaian Pembangunan Perekonomian Sektor Perdagangan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.63
Tabel II.33	Capaian Pembangunan Perekonomian Sektor Perindustrian Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.63
Tabel II.34	Capaian SAKIP Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.65
Tabel II.35	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.67
Tabel II.36	Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/ Barang Pengguna Terminal Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022	II.69
Tabel II.37	Surat Izin Usaha Yang Keluar Tahun 2017-2021	II.71
Tabel II.38	Waktu untuk Memproses Perizinan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021	II.72
Tabel II.39	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2022	II.74
Tabel II.40	Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2022	II.92
Tabel II.41	Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2022	II.98
Tabel II.42	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2022	II.99
Tabel II.43	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Renstra) Kabupaten Bantaeng Tahun 2022	II.101
Tabel II.44	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Evaluasi RKPD 2022) Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 (masuk lampiran)	II.105
Tabel II.45	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2022	II.106
Tabel II.46	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2022 (Permendagri No. 59/2021)	II.107
Tabel II.47	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng, 2018 – 2022 (Permendagri No. 59/2021)	II.108
Tabel II.48	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Bantaeng, 2018 – 2022 (Permendagri No. 59/2021)	II.108
Tabel II.49	SPM Urusan Ketentramandan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantaeng, 2018 – 2022 (Permendagri No. 59/2021)	II.108
Tabel II.50	Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2022 (Permendagri No.	II.109



	59/2021)	
Tabel II.51	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bantaeng Tahun 2022	II.110
Tabel II.52	Permasalahan Pembangunan Daerah dan Upaya Penyelesaiannya Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	II.125
Tabel III.1	Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022	III.8
Tabel III.2	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantaeng, Tahun 2018-2022	III.10
Tabel III.3	Indikator Kinerja Makro Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024	III.16
Tabel III.4	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2025 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 (Juta Rupiah)	III.22
Tabel III.5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2024 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 (Juta Rupiah)	III.28
Tabel III.6	Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bantaeng di tahun 2024	III.29
Tabel III.7	Kapasitas Riil Keuangan Daerah Program Prioritas Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	III.32
Tabel III.8	Proyeksi Pagu Belanja Perangkat daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	III.37
Tabel III.9	Analisis Pembiayaan Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2025	III.39
Tabel III.10	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2025 (dalam Jutaan)	III.40
Tabel III.11	Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Pagu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2025 (dalam Jutaan)	III.41
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	IV.2
Tabel IV.2	Isu Strategi, Permasalahan, strategi dan Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng Tahun 2024	IV.7
Tabel IV.3	Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	IV.13
Tabel IV.4	Tabel Sandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	IV.15
Tabel IV.5	Keselarasan Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	IV.16
Tabel IV.6	Prioritas Pembangunan, Program Prioritas, indikator, target dan Pagu Indikatif Tahun 2024 Kabupaten Bantaeng	IV.21
Tabel V.1	Rincian Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng 2024 dan Prognosis 2025	V.1
Tabel V.2	Program Prioritas Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	V.2
Tabel V.3	Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	V.8



Tabel VI.1	Target Indikator Makro Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	VI.1
Tabel VI.2	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	VI.3
Tabel VI.4	Target Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	VI.30
Tabel VI.5	Target Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bantaeng 2024	VI.37



DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.16
Grafik II.2	Piramida Penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2022	II.18
Grafik II.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantaeng, 2018-2022 (Milyar Rupiah)	II.20
Grafik II.4	Kontribusi Struktur Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2022	II.24
Grafik II.5	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Bantaeng, 2018-2022 (Juta Rupiah)	II.25
Grafik II.6	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Juta Rupiah)	II.26
Grafik II.7	Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2022 (Kondisi Maret)	II.28
Grafik II.8	Indeks Gini Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022	II.29
Grafik II.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.30
Grafik II.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2022	II.32
Grafik II.11	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.33
Grafik II.12	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.34
Grafik II.13	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.35
Grafik II.14	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.36
Grafik II.15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2022	II.37
Grafik II.16	Angka Melek Huruf (%) Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021	II.39
Grafik II.17	Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.49
Grafik II.18	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021	II.50
Grafik II.19	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2021	II.52
Grafik II.20	Rata-rata lama Wisata (Hari) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.60
Grafik II.21	Perkembangan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng, Tahun 2017 – 2021	II.60
Grafik II.22	Nilai SAKIP (Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.65
Grafik II.23	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022	II.69
Grafik II.24	Jumlah Kasus Kriminalitas Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021	II.71
Grafik II.25	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+ Tahun) menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2022	II.75



Grafik III.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024	III.11
Grafik III.2	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024 (Juta Rupiah)	III.13
Grafik III.3	Indeks Gini Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024	III.14
Grafik III.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024	III.15
Grafik III.5	Tingkat Pengangguran Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024	III.16



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan, sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Peran pemerintah daerah disini, bertindak sebagai fasilitator dan activator dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan SDM, Ekonomi, Sosial, dan lingkungan. Dengan berbagai potensi dan kekayaan Sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Bantaeng harus mampu mengelola dan memperkaya, sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah harus diselenggarakan dengan terarah, efektif, efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian perlu adanya perumusan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Dalam Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) untuk jangka 20 Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk jangka 5 Tahunan, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk jangka tahunan. Secara beruntun RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD dalam 4 (empat) tahapan pembangunan tiap 5 Tahun. Begitu juga dengan RPJMD dilaksanakan melalui RKPD dalam 5 (lima) tahap pembangunan tiap 1 (satu) tahun. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta



rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan instruksi Menteri dalam negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, menyatakan bahwa penyusunan RKPD 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran tujuan, sasaran dan kebijakan Kabupaten Bantaeng yang penyusunannya berpedoman Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bantaeng, dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Tahun 2024. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Bantaeng 2024 merupakan pelaksanaan agenda pembangunan tahun ke 1 (pertama) dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Dengan pelaksanaan pembangunan beberapa tahun sebelumnya, berbagai capaian pembangunan telah dapat dilihat dan dirasakan masyarakat Bantaeng. Capaian pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan ditahun mendatang. Dengan capaian yang sudah ada juga dapat menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja, dan sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja dan mencapai capaian pembangunan yang ditargetkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 disusun berdasarkan pendekatan:

- 1) Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- 2) Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya



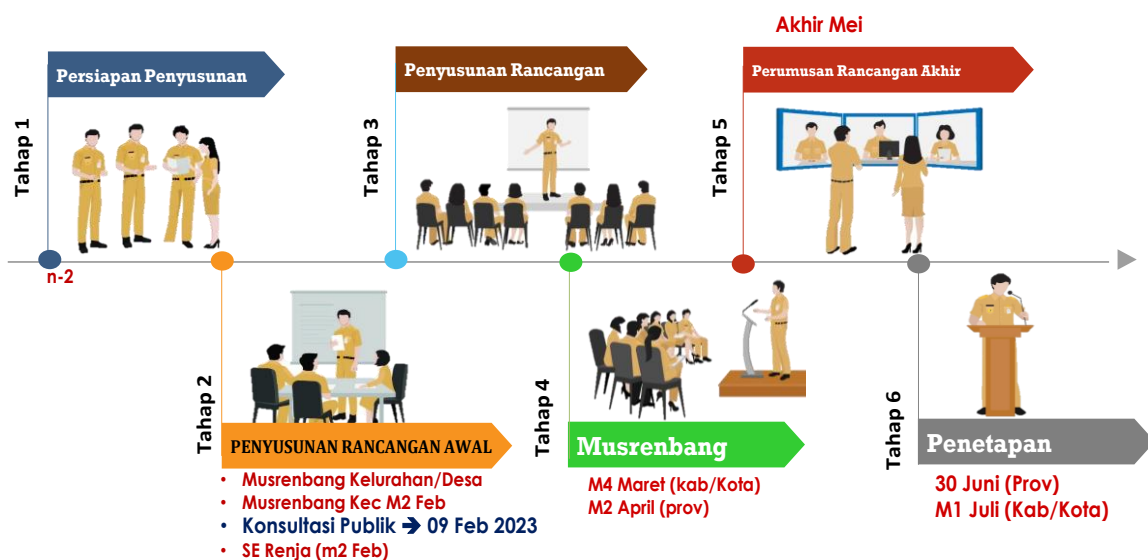
transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;

- 3) Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD; dan
- 4) Atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan.

Menindaklanjuti Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 10, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan pendekatan spasial. Dengan pendekatan ini pembangunan diharapkan akan lebih terarah, tepat sasaran dan dapat dilaksanakan dengan maksimal melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan dari tiap OPD. Sehingga *output*, *outcome* dan *impact* yang dihasilkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026. Selanjutnya, rumusan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024. Selain itu, RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tiap akhir tahun.

RKPD menjadi jembatan antara perencanaan strategis daerah dan Perangkat Daerah dan penganggaran tahunan. Selanjutnya, RKPD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Dalam menyusun RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan, pada gambar sebagai berikut:

Gambar I.1
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan perkembangan isu global, capaian pembangunan, permasalahan daerah serta kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng. Menindaklanjuti hal tersebut, maka sasaran, prioritas pembangunan dan program serta kegiatan pembangunan Kabupaten Bantaeng tahun 2024 akan berfokus pada pembangunan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-



Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata



Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan



Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun



- 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 2041);
39. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Berita Daerah Nomor 23);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2); dan
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang



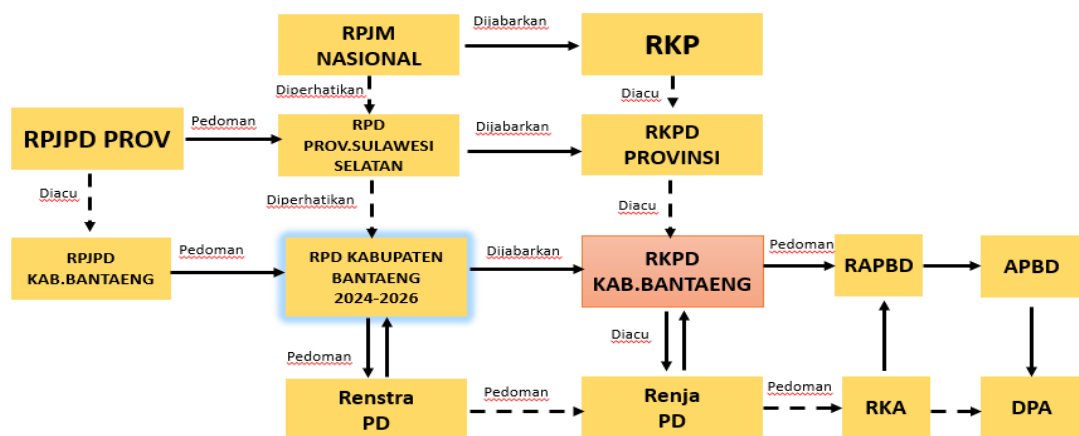
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026, RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2024, dan RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

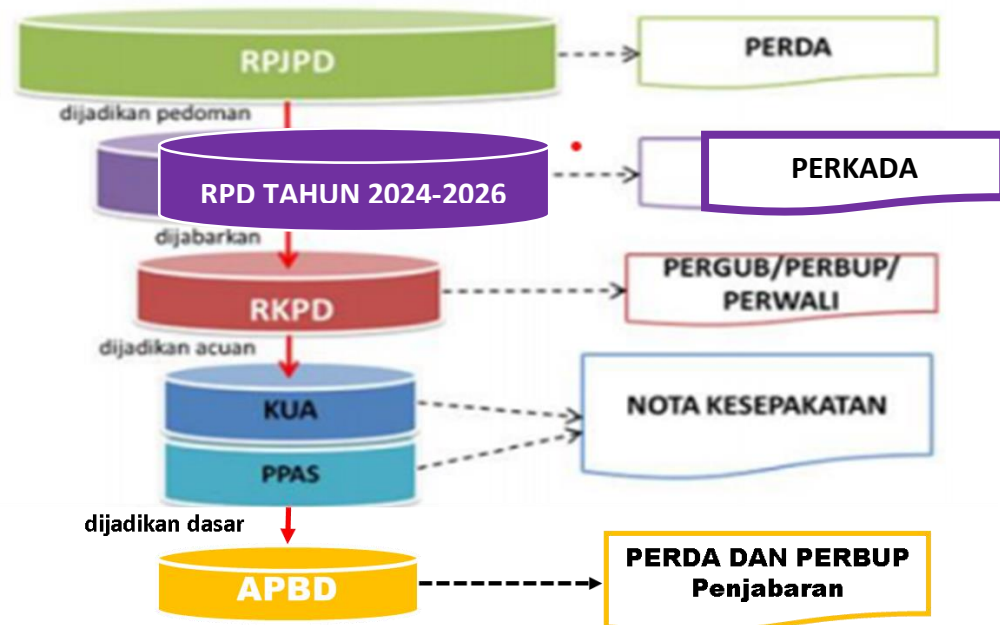
Gambar I.2
Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024



RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026 dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RKPD juga diselaraskan dengan RKP Tahun 2024 yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja OPD dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bantaeng.

Gambar I.3
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 1. Penjabaran dan pelaksanaan dari RPD Kabupaten Bantaeng 2024-2026;
 2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
 3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- b. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, yaitu:
 1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
 2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;



3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bantaeng.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu



juga memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. Penutup

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan Kabupaten Bantaeng pada tahun 2024 merupakan pembangunan periode pertama pada pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng periode 2024-2026. Pada pembangunan tahun 2024 ini diupayakan untuk mengimplementasikan tahapan awal pada perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng sebagai kunci suksesnya pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah. Dalam upaya menyukseskan pembangunan daerah tersebut, maka dirumuskanlah berbagai kebijakan pembangunan di tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Kabupaten Bantaeng tahun 2024-2026 dengan beberapa perubahan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Sebagai salah satu wilayah administrasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi melimpah sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, potensi yang dimiliki Kabupaten Bantaeng akan dioptimalkan penggunaannya untuk melaksanakan pembangunan daerah yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024, maka perlu ditelaah kembali berbagai potensi daerah, termasuk capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun atau periode sebelumnya sebagai bentuk evaluasi dan pengendalian akan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Pembangunan Kabupaten Bantaeng tahun 2024 ini memiliki hierarki dalam implementasi setiap kebijakan yang diturunkan sehingga setiap program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan menjadi spesifik untuk mencapai target tertentu. Namun secara keseluruhannya, kebijakan yang ditetapkan secara terintegrasi berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan tahunan yang terangkum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 akan disusun untuk merealisasikan target pembangunan. Pada perencanaan pembangunan tahun 2024 tersebut, dirumuskan berbagai kebijakan untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode berjalan. Oleh karena itu, selain dibutuhkan gambaran umum kondisi



daerah, juga harus memperhatikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, realisasi RPJMD, permasalahan hingga isu strategis pembangunan daerah.

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

Data dan informasi pembangunan merupakan potret hasil pembangunan periode sebelumnya yang terangkum dalam gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bantaeng. Gambaran umum kondisi daerah terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut diturunkan menjadi fokus-fokus pembangunan daerah sebagai bagian dari capaian kinerja pembangunan daerah. Dalam menganalisis gambaran umum untuk peningkatan kualitas perencanaan RPD Bantaeng, maka indikator yang dianalisis merupakan indikator yang relevan dalam membentuk permasalahan dan kebijakan pembangunan daerah. Untuk memahami lebih lanjut berbagai potensi dan kinerja pembangunan tersebut, berikut gambaran umum Kabupaten Bantaeng dari berbagai aspek.

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi merupakan informasi spasial dan mendasar dalam menganalisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bantaeng. Penjabaran aspek geografi dalam dokumen perencanaan pembangunan akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Bantaeng berperan pada pembangunan daerah baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana.

2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

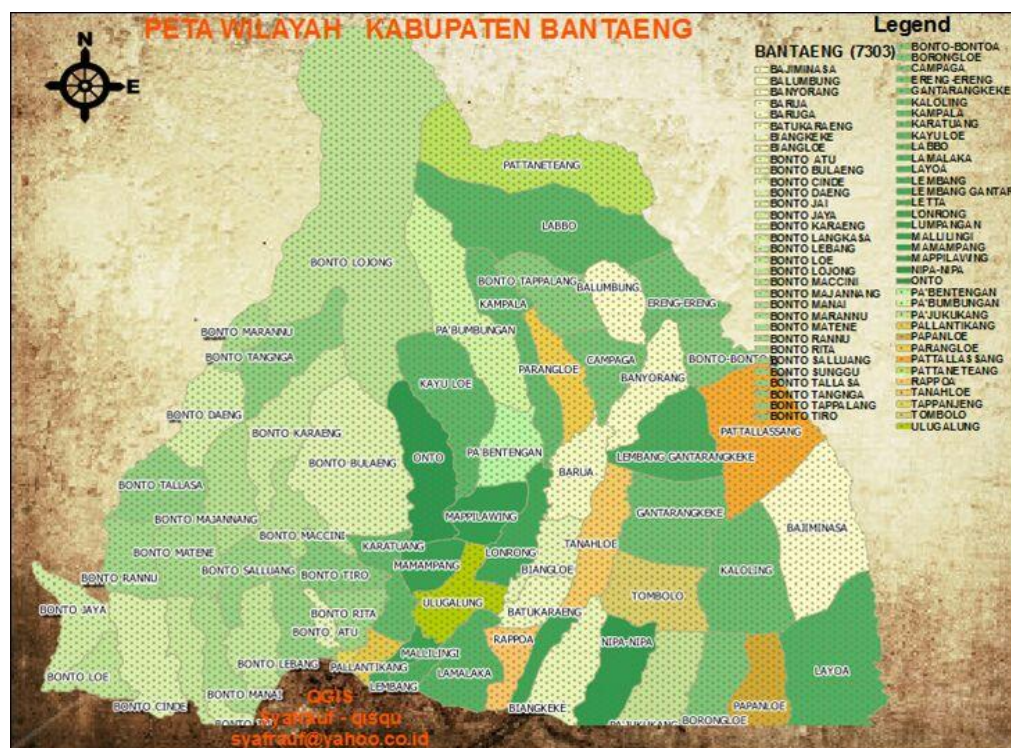
a. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota yang berada di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 46 Desa. Luas wilayah daratan mencapai 395.83 km² dan luas wilayah perairan mencapai 144 km².

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai
Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
Sebelah Selatan : Laut Flores
Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

**Gambar II.1
Peta Wilayah Kabupaten Bantaeng**



Sumber Data : Bappeda Kabupaten Bantaeng, Tahun 2018

Luas wilayah Kabupaten Bantaeng 395,83 km² sedangkan yang terluas adalah Kecamatan Tompobulu dengan luas 76,99 km² (19,45%) sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Bantaeng dengan luas wilayah 28,85 km² (7,29%) dari luas wilayah Kabupaten dengan rincian pembagian proporsi luas wilayah seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Tabel II.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daratan (km2)	Persentase Luas Wilayah (%)
Bissappu	Bonto Lebang	32,84	8,30
Uluere	Bonto Marannu	67,29	17,00
Sinoa	Bonto Maccini	43,00	10,86
Bantaeng	Pallantikang	28,85	7,29
Eremerasa	Ulugalung	45,01	11,37
Tompobulu	Banyorang	76,99	19,45
Pajukukang	Nipa-nipa	48,90	12,35
Gantarangeke	Gantarangeke	52,95	13,38
Total		395,83	100,00

Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023

b. Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21'13"-5°35'26" Lintang Selatan dan 119°51'42"-120°05'27"Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut.

c. Topografi

Berada di kaki Gunung Lompobattang, Kabupaten Bantaeng memiliki Topografi yang terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Wilayah daerah pesisir 59,33 km²atau sekitar 14,99% dengan kemiringan 0-2 meter, 168,75 km²atau sekitar 42,64% dari luas wilayahnya merupakan daratan yang landai dengan kemiringan 2-15 meter, 81,86 km²atau sekitar 20,68% dari luas wilayahnya merupakan daratan dengan kemiringan 15-40 meter sedangkan 83,80 km²atau sekitar 21,17% sisanya merupakan daerah daratan dengan kemiringan lebih dari 40 meter.

d. Hidrologi

Sebagai daerah dengan luas yang relatif terbatas atau hanya kurang lebih 0,8% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng hanya memiliki 11 sungai yang melintasi beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Adapun sungai dimaksud antara lain:



Tabel II.2
Nama Sungai, Panjang Sungai dan Kecamatan Yang Dilintasi
Kabupaten Bantaeng

Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Kecamatan yang Dilintasi
Pamosa	1,75	Pajukukang
Turung Asu	7,40	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Balang Sikuyu	10,80	Uluere, Sinoa, Bissappu
Panaikang	11,75	Uluere, Sinoa, Bissappu
Kalamassang	14,20	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Lemoa	14,45	Uluere, Bissappu
Kaloling	17,10	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Biangkeke	20,45	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Calendu	20,70	Uluere, Bantaeng
Bialo	43,30	Uluere, Tompobulu
Nipa-Nipa	25,15	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang

Sumber Data : RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032

e. Klimatologi

Letak geografi Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai. Dengan dua musim dan perubahan iklim setiap tahunnya yang dikenal di daerah ini dengan nama musim barat antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim timur antara bulan April sampai bulan September.

Rata-rata suhu udara di Kabupaten Bantaeng berada pada range cukup tinggi dengan besaran 27,2^oC-29,5^oC. Udara di Kabupaten Bantaeng juga cukup lembab dengan rata-rata kelembaban udara mencapai 87,7 persen pada bulan Januari dan terendah mencapai 69,4 persen pada bulan Agustus. Sedangkan tekanan udara berada pada kisaran 1.007,9 mb – 1.009,8 mb.

Iklim di Kabupaten Bantaeng tergolong iklim tropis basah. Curah hujan di Kabupaten Bantaeng cukup fluktuatif di setiap bulan dalam setahun. Jumlah hari hujan juga sangat ekstrim perbedaan antara musim penghujan dan musim kemarau dimana range hari hujan antara 8 hari hingga 30 hari dengan jumlah hari hujan sebanyak 208 hari dalam setahun.

Tabel II.3
Statistik Klimatologi Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

Bulan	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	27,6	84,0	3,5	1.009,3	669,7	21
Februari	27,5	84,4	3,8	1.008,5	834,2	24
Maret	28,3	81,3	3,8	1.008,2	324,2	17
April	28,9	78,7	4,4	1.008,1	134,7	13
Mei	29,0	79,9	4,0	1.008,3	340,9	14
Juni	28,2	81,2	3,7	1.008,4	198,7	20
Juli	28,9	75,5	3,8	1.008,3	34,4	8



Bulan	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Agustus	29,3	69,7	3,9	1.008,6	74,3	9
September	29,0	75,8	3,8	1.009,1	154,9	13
Oktober	28,3	81,4	3,3	1.008,5	355,0	23
November	28,1	81,2	3,2	1.008,7	567,2	24
Desember	27,4	84,2	3,5	1.007,8	962,7	23

Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Merujuk pada strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bantaeng menyongsong peradaban baru maka strategi pengembangan potensi wilayah harus mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembangunan harus selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan tata ruang dan pengelolaan aspek pertanahannya;
- b. Tata ruang dan infrastruktur (dalam bingkai wilayah maritim, agraris dan niaga) sesuai dengan program Nawa Cita yang mencakup hubungan sinergis antara fungsi ruang darat dan laut, dengan bertumpu pada kerjasama niaga antar wilayah yang mengandalkan potensi darat dan laut;
- c. Implementasi ekonomi hijau: keberlanjutan ekologis & desentralisasi tata kelola lingkungan;
- d. Efektifitas kontrol lingkungan dalam skala komunitas lokal yang langsung memiliki interdependensi terhadap alam sekitar kehidupan mereka.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 - 2032, kawasan budidaya di Kabupaten Bantaeng terdiri dari:

➤ Kawasan Hutan Produksi

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Bantaeng diantaranya adalah:

- a Melestarikan kawasan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan papan, energi dan pangan;
- b Mengembangkan hutan produksi untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan



- kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
- c. Mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan produksi;
 - d. Mempertahankan fungsi kawasan hutan.

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Bantaeng diarahkan pada:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi dan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas.
- b. Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Uluere, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 1.971,56 hektar.
- c. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 1.098,78 hektar.

Tabel II.4
Luas Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas
Dan Hutan Peruntukan Rakyat Kabupaten Bantaeng Tahun 2012

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	HUTAN PRODUKSI	
	Kecamatan Uluere dan Kecamatan Eremerasa (I – IV/A)	1.971,56
2	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	
	Kecamatan Uluere, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Eremerasa (I – IV/A)	1.098,78
3	HUTAN PERUNTUKAN RAKYAT	
	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Uluere, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Gantarangkeke, dan Kecamatan Tompobulu	6.900

Sumber Data : RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032

➤ **Kawasan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi lahan basah dan lahan kering. Kebijakan pada kawasan pertanian lahan basah meliputi:

- a. Melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;

- b. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Kebijakan pada kawasan pertanian lahan kering diantaranya adalah:

- a. Melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
- b. Mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi;
- c. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum.

Penetapan peruntukan kawasan pertanian di Kabupaten Bantaeng diarahkan sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bantaeng, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
2. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarangkeke dengan luas kurang lebih 33.500 (tiga puluh tiga ribu lima ratus) hektar.
3. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, terdiri dari:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarangkeke dengan luas kurang lebih 14.500 (empat belas ribu lima ratus) hektar; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayuran ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang,

sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinoa dengan luas kurang lebih 4.000 (empat ribu)hektar.

4. Kawasan peruntukan perkebunan merupakan kawasan perkebunan terdiri dari:
 - a. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas kurang lebih 9.046 (sembilan ribu empat puluh enam)hektar;
 - b. Kawasan peruntukan perkebunan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) hektar;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Uluere, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar; dan
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) hektar.
5. Kawasan peruntukan peternakan, berupa kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dan unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah

Kecamatan Gantarangkeke dengan luas kurang lebih 16.044 (enam belas ribu empat puluh empat) hektar.

6. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luas lebih kurang 15.480 hektar.
7. Penetapan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantaeng diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
8. Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di Kecamatan Bantaeng, Uluere, Bissappu, Pa'jukukang, Gantarangkeke, Eremerasa, Sinoa dan Tompobulu.

➤ **Kawasan Perikanan**

Kebijakan peruntukan kawasan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 - c. Kawasan pengolahan ikan; dan
 - d. Pelabuhan pendaratan ikan.
2. Kawasan peruntukan perikanan tangkap, ditetapkan pada wilayah perairan Laut Flores yang meliputi kawasan pesisir Kecamatan Bissappu, kawasan pesisir Kecamatan Bantaeng, dan kawasan pesisir Kecamatan Pa'jukukang dengan luas 8.591 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) hektar.
3. Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdiri dari:
 - a. Kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di kawasan pesisir Kecamatan Bissappu, kawasan pesisir Kecamatan Bantaeng dan kawasan pesisir Kecamatan Pa'jukukang dengan luas kurang lebih 2.458 (dua ribu empat ratus lima puluh delapan) hektar;
 - b. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dengan luas kurang lebih 80 hektar; dan
 - c. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di

sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Uluere, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hektar.

4. Kawasan pengolahan ikan, merupakan kawasan industri pengolahan ikan yang akan dikembangkan di kawasan pesisir Kampung Bakara Kecamatan Pa'jukukang; dan
5. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), terdiri dari PPI Birea di Kecamatan Pa'jukukang dan PPI Kaili di Kecamatan Bissappu.

➤ **Kawasan Pertambangan**

Kebijakan peruntukan kawasan pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral, terdiri atas:
 - a. Wilayah usaha pertambangan; dan
 - b. Wilayah usaha pertambangan rakyat.
3. Wilayah usaha pertambangan, meliputi:
 - a. Wilayah usaha pertambangan komoditas pasir besi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang;
 - b. Wilayah usaha pertambangan komoditas batu apung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Uluere; dan
 - c. Wilayah usaha pertambangan komoditas andesit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu dan sebagian Kecamatan Bantaeng.
4. Wilayah usaha pertambangan rakyat, berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang; dan
5. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, merupakan kawasan peruntukan pertambangan minyak Blok Karaengta di wilayah perairan Laut Flores ditetapkan di

sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang.

➤ **Kawasan Industri**

Kebijakan peruntukan kawasan Industri adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
 - a Kawasan peruntukan industri besar;
 - b Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c Kawasan peruntukan industri rumah tangga.
2. Kawasan peruntukan industri besar ditetapkan di Kawasan industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang;
3. Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengolahan ditetapkan di Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Bissappu;
4. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa Kawasan Aglomerasi Industri Rumah Tangga ditetapkan di PKL, dan PPK.

1. Kawasan Industri Di Kabupaten Bantaeng

A. Industri Besar

Kawasan Agroindustri yang terpadu dengan pelabuhan, pergudangan, industri dan perdagangan yang memanfaatkan lalu lintas di Selat Makassar yang direncanakan sebesar 3.128,94 Ha. Kawasan Argo industri meliputi:

- Kawasan Industri Kampung Bakara Kecamatan Pa'jukukang(I/1);
- Kawasan Industri Kampung Papan Loe Kecamatan Pa'jukukang(I/2);
- Kawasan Industri Kampung Baruga Kecamatan Pa'jukukang(I/2);
- Kawasan Industri Kampung Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang(I/2).

B. Industri Sedang

Industri pengolahan tetap;

- Kecamatan Pa'jukukang;

- Kecamatan Eremerasa;
- Kecamatan Bantaeng; dan
- Kecamatan Bissappu.

C. Industri Rumah Tangga

Industri rumah tangga:

- Kawasan Perkotaan Bantaeng di Kecamatan Bantaeng;
- Kawasan Perkotaan Bonto Manai di Kecamatan Bisappu;
- Kawasan Perkotaan Banyorang di Kecamatan Tompobulu; dan
- Kawasan Perkotaan Tanetea di Kecamatan Pa'jukukang.

➤ **Kawasan Pariwisata**

Kebijakan peruntukan Kawasan Wisata adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
- Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
- Kawasan peruntukan pariwisata buatan.

2. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas:

- Kawasan Rumah Adat Balla Lompoa di Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Gantarangkeke;
- Kawasan situs Kuburan Belanda di Kecamatan Bantaeng;
- Kawasan Balla Bassia dan Masjid Tua Tompong di Kecamatan Bantaeng;
- Kawasan Makam Raja La Tenri Rawa di Kecamatan Bantaeng;
- Kawasan Makam Tua Parrang-Parring di Kecamatan Uluere; dan
- Kawasan Makam Datuk Pakkalimbungan di Kecamatan Bissappu.

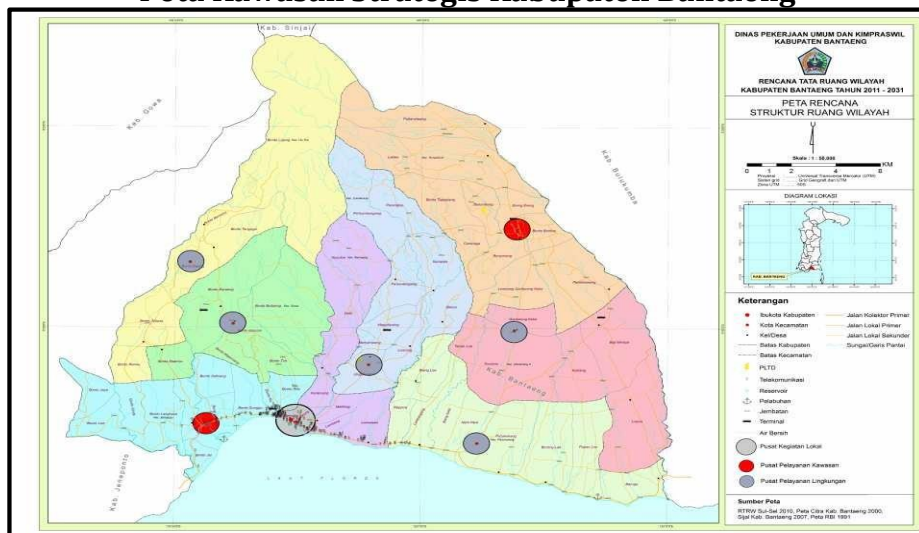
3. Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas:

- Kawasan Air Terjun Bissappu di Kecamatan Bissappu;
- Kawasan Air Terjun Cinayya di Kecamatan Uluere;
- Kawasan Air Terjun Biallo di Kecamatan Tompobulu;
- Kawasan Permandian Alam Eremerasa di Kecamatan Eremerasa;
- Kawasan Permandian Alam Calendu di Kecamatan Bantaeng.

4. Kawasan peruntukan pariwisata buatan, terdiri atas:

- Kawasan Hutan Wisata Gunung Loka di Kecamatan Uluere;
 - Kawasan Agrowisata di Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Uluere, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Pa'jukukang.
5. Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Bantaeng diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Gambar II.2
Peta Struktur Ruang, Peta Pola Ruang Dan
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bantaeng



Sumber Data : RTRW Bantaeng Tahun 2012-2032

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 telah diidentifikasi potensi bencana yang dapat terjadi. Identifikasi tersebut meliputi 11 (sebelas) jenis potensi bencana, yaitu bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, tsunami serta kebakaran hutan dan lahan. Terdapat sekitar 10 (sepuluh) jenis bencana tersebut yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, akan tetapi wilayah yang berpotensi terjadi tersebut perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan pengkajian risiko bencana di tingkat kabupaten. Kedepannya diharapkan masyarakat diberikan edukasi mendalam tentang mitigasi bencana atau pra-bencana. Adapun hasil pengkajian bahaya untuk setiap potensi bencana khususnya yang terjadi di Kabupaten Bantaeng dijabarkan sebagai berikut.



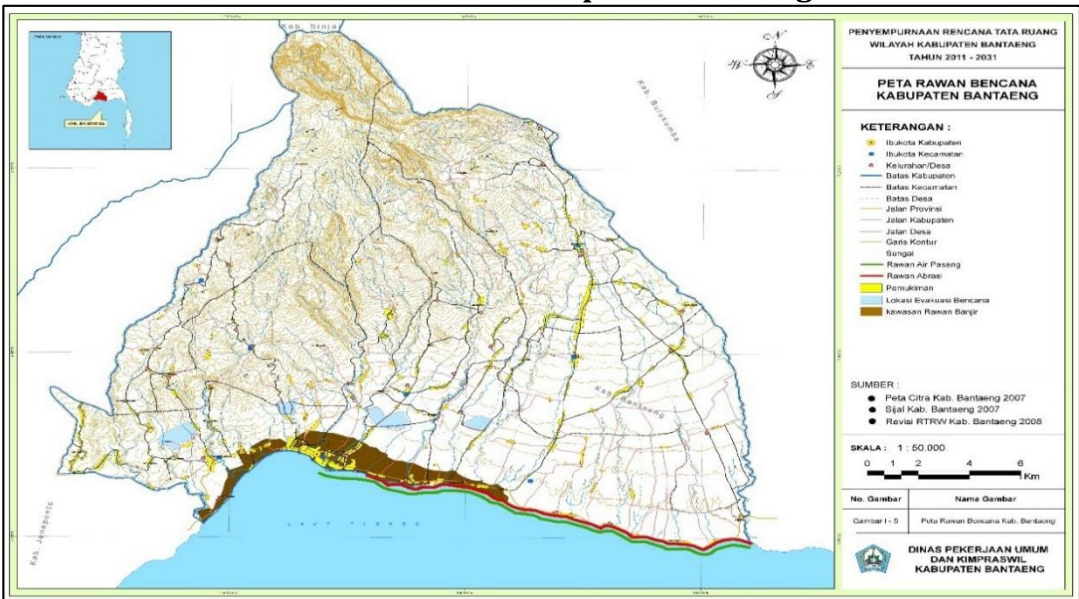
Tabel II.5
Klasifikasi dan Luas Wilayah terdampak Beberapa Jenis Bencana yang terjadi di Kabupaten Bantaeng

No	Jenis Bencana	Klasifikasi Bahaya	Luas Wilayah Terdampak (Ha)
1	Banjir	Sedang	15.932
2	Kekeringan	Sedang	39.583
3	Cuaca Ekstrem	Sedang	37.114
4	Tanah Longsor	Tinggi	13.625
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	551
6	Gempa Bumi	Rendah	39.583
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah	642
8	Tsunami	Tinggi	1.426
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	7.110
10	Banjir Bandang	Tinggi	487

Sumber Data: Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Potensi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bantaeng adalah rawan terjadinya bencana banjir. Lokasi potensi kawasan rawan terjadinya banjir berdasarkan indentifikasi sebaran kawasan rawan bencana banjir berdasarkan tingkat resiko banjir, yang dilakukan melalui analisis kondisi fisik dasar, yaitu analisis kerawanan banjir setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan beberapa aspek-aspek.

Gambar II.3
Peta Rawan Bencana Kabupaten Bantaeng



Sumber Data: KLHS RPJMD Bantaeng, Tahun 2018

Beberapa daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Pa’jukukang yang mendapatkan limpahan air berlebih sehingga berpotensi menyebabkan banjir pada

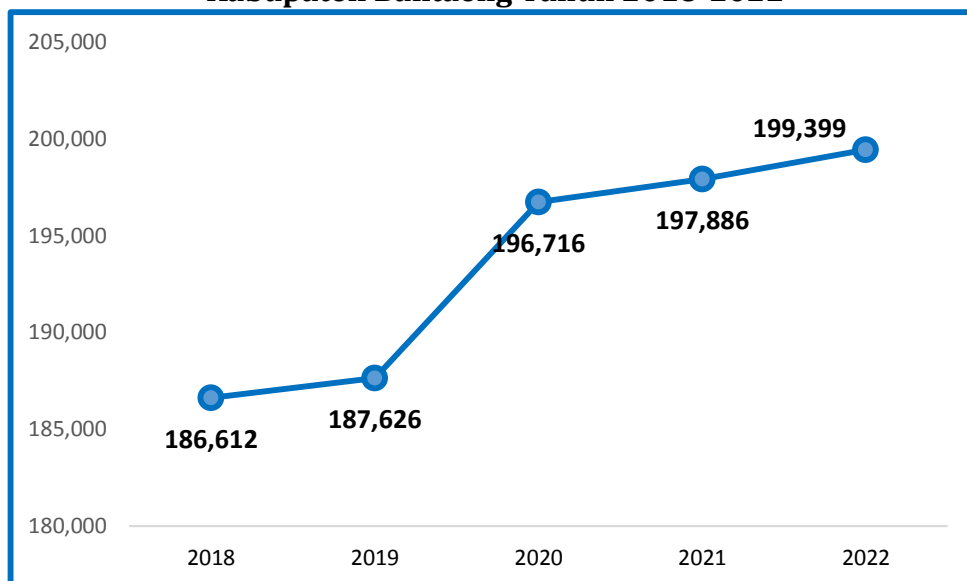


saat curah hujan tinggi. Selain itu, kerusakan hutan yang terjadi di Kecamatan Sinoa yang didominasi oleh pengaruh dari *human interest* dengan implementasinya berupa *human activities* merupakan salah satu pemicu terjadinya banjir yang hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Bantaeng, khususnya Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Bissappu.

2.1.1.4. Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Grafik II.1
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng, Tahun 2023

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantaeng secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan Pemerintah dalam upaya menekan laju



pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran serta meningkatkan mobilitas penduduk. Beberapa upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program Keluarga Berencana. Jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan secara konsisten dalam waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk mencapai 199,39 jiwa dengan pertumbuhan penduduk dari 2021-2022 sebesar 0,76 persen.

Tabel II.6
Jumlah Penduduk, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Bissappu	36.018	18,06	1.096,77	97,91
2	Uluere	11.628	5,83	172,80	100,69
3	Sinoa	13.181	6,61	306,53	98,98
4	Bantaeng	39.886	20,00	1.382,53	98,40
5	Eremerasa	21.684	10,87	481,76	98,60
6	Tompobulu	25.068	12,57	325,60	95,47
7	Pajukukang	32.774	16,44	670,22	98,02
8	Gantarangkeke	19.160	9,61	361,85	95,49
Kabupaten Bantaeng		199.399	100,00	503,75	97,90

Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023

Secara administratif, Kabupaten Bantaeng terbagi atas 8 wilayah kecamatan dengan 21 kelurahan dan 46 desa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 sebanyak 199.399 jiwa yang terdiri dari laki-laki 98.641 jiwa dan perempuan 100.758 jiwa.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Bantaeng berdomisili di Kecamatan Bantaeng yang merupakan Ibukota Kabupaten Bantaeng dengan jumlah penduduk sebesar 39.886 jiwa. Jumlah tersebut sebanding dengan kepadatan penduduk sebesar 1.382 jiwa/km² yang mengindikasikan bahwa di setiap km² Kecamatan Bantaeng terdapat 1.382 penduduk yang menghuninya.

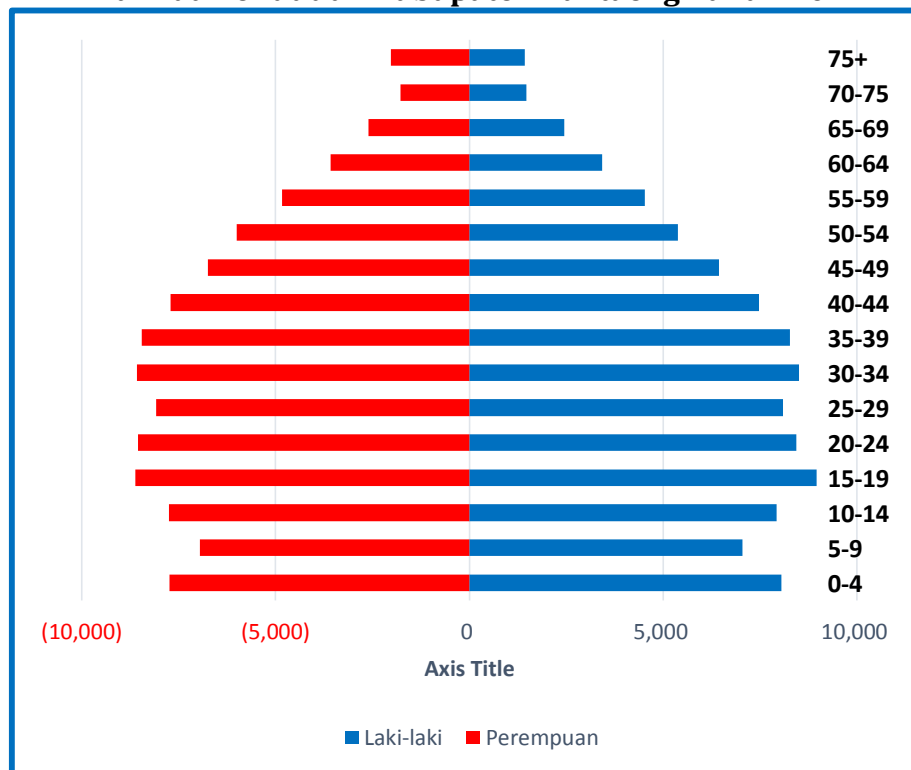
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. *Sex ratio* Kabupaten Bantaeng sebesar 97,90 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 97-98 penduduk laki-laki. Kecamatan dengan *sex ratio* tertinggi adalah Kecamatan Uluere dengan *sex ratio*



sebesar 100,69, sedangkan kecamatan dengan *sex ratio* terendah adalah Tompobulu dengan *sex ratio* sebesar 95,47.

Dalam analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).

Grafik II.2
Piramida Penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2022



Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023 (diolah)

Jika dilihat dari persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dalam bentuk piramida penduduk, penduduk Kabupaten Bantaeng yang berada pada usia muda cukup banyak, dimana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi, mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk usia anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya program yang mengarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya

manusia dalam mewujudkan visi pembangunan (utamanya jangka panjang).

Jika dilihat dari angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bantaeng, maka terlihat bahwa rasio ketergantungan masyarakat Bantaeng sebesar 40,27. Angka ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang penduduk yang memiliki usia produktif akan menanggung sebanyak 40-41 penduduk berusia non produktif baik usia muda maupun usia lanjut.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olahraga. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng.

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Bantaeng utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Bantaeng. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Bantaeng antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi



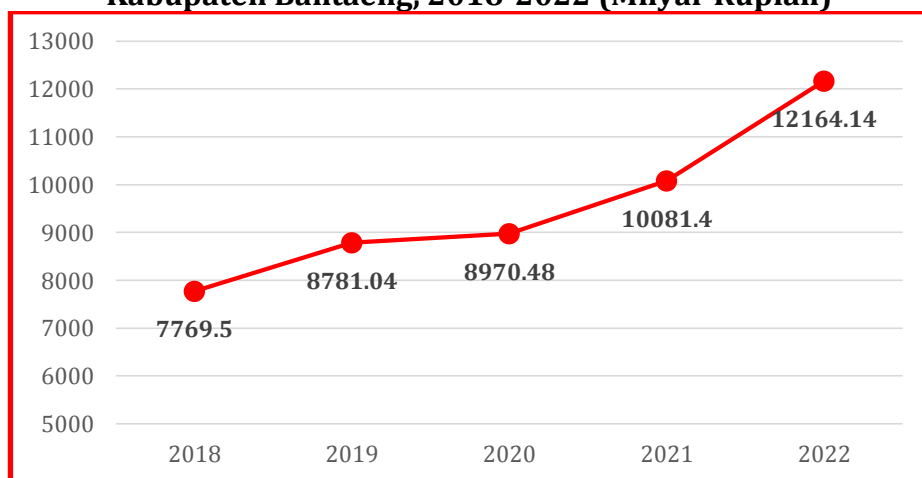
salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, *income* per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau *region* dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Relevansi data-data tersebut akan membantu pengambilan kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan terarah. Angka PDRB dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.

Grafik II.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Bantaeng, 2018-2022 (Milyar Rupiah)



Sumber Data: Kabupaten Bantaeng Dalam Angka Tahun 2022

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan secara signifikan di



setiap tahunnya dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Kondisi ini terlihat dari gambar di bawah, dimana pada tahun 2018 Kabupaten Bantaeng memiliki nilai tambah produk bruto sebesar Rp.7.769,50 milyar meningkat tajam sebesar 4,40 trilyun hingga mencapai Rp.12.164,14 milyar pada tahun 2022.

Sebagai wilayah agraris, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Bantaeng tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya, hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan pembentukan PDRB Bantaeng. Kontribusi sektor lapangan usaha terbesar pada perekonomian Bantaeng pada tahun 2022 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Meskipun mengalami penurunan, namun masih mendominasi hingga mencapai 23,72 persen. sektor lain yang mendominasi perekonomian Bantaeng adalah sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi masing-masing 16,83 persen dan 18,47 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang minim kontribusi terhadap perekonomian daerah adalah sektor jasa perusahaan (0,14%) dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,06%).

Tabel II.7
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,4	28,5	28,37	27,08	23,72
B	Pertambangan dan Penggalian	3,6	3,4	3,63	3,5	3,21
C	Industri Pengolahan	5,1	7,70	6,91	9,76	18,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1	0,11	0,18	0,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,1	0,07	0,06	0,06
F	Konstruksi	18,1	17,8	17,79	18,3	16,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,8	15,0	14,65	14,25	13,52
H	Transportasi dan Pergudangan	1,1	1,1	1,05	1,06	1,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,9	0,9	0,9	0,85	0,83
J	Informasi dan Komunikasi	2,2	2,2	2,49	2,37	2,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,4	2,2	2,41	2,34	2,11
L	Real Estate	4,8	4,6	4,85	4,54	4,06
M,N	Jasa Perusahaan	0,2	0,2	0,15	0,15	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6,9	7,0	6,93	6,27	5,2



Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
	Wajib					
P	Jasa Pendidikan	5,1	5,0	5,2	4,84	4,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,6	2,5	3	2,97	2,69
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,7	1,6	1,49	1,48	1,38
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber Data: Kabupaten Bantaeng Dalam Angka Tahun 2023

Salah satu tolak ukur pembangunan suatu daerah yaitu dengan mengamati laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itu, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor lapangan usaha yang potensial.

Laju pertumbuhan ekonomi di Bantaeng mengalami peningkatan secara bertahap dalam kurun waktu empat tahun terakhir dengan pola perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Bantaeng mencapai 8,13 persen, angka tersebut meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 10,75 persen. Peningkatan ini tidak bertahan pada tahun 2020 dimana terjadi perlambatan yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 0,52 persen pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang menyerang di setiap sendi-sendi perekonomian dan berdampak negatif pada hampir seluruh sektor pembangunan daerah. Kemudian, sebagai hasil dari upaya penanganan dan pemulihan perekonomian daerah selama masa Pandemi COVID-19, maka pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dengan capaian 8,86 persen dan 15,45 persen yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel II.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,1	4,5	-0,06	4,36	0,35
B	Pertambangan dan Penggalian	9,9	5,0	6,41	6,22	4,6
C	Industri Pengolahan	18,0	68,8	-9,50	43,76	122,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,1	49,6	-2,36	69,30	127,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,9	5,9	3,70	0,11	4,17
F	Konstruksi	9,1	8,0	0,23	11,04	4,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,9	10,7	-2,40	7,33	9,54
H	Transportasi dan Pergudangan	10,0	8,4	-4,19	6,79	12,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,2	8,2	5,06	4,72	14,95
J	Informasi dan Komunikasi	9,9	9,9	17,69	6,51	7,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,3	4,7	8,08	6,15	1,52
L	Real Estate	4,9	7,2	6,77	4,92	4,61
M,N	Jasa Perusahaan	10,2	6,6	-3,20	3,76	11,85
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,4	12,3	-0,84	0,83	-0,48
P	Jasa Pendidikan	6,5	9,1	3,81	4,69	4,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,5	8,1	16,98	7,86	7,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	13,3	9,2	-8,82	9,06	9,16
Laju Pertumbuhan Ekonomi		8,13	10,75	0,52	8,86	15,45

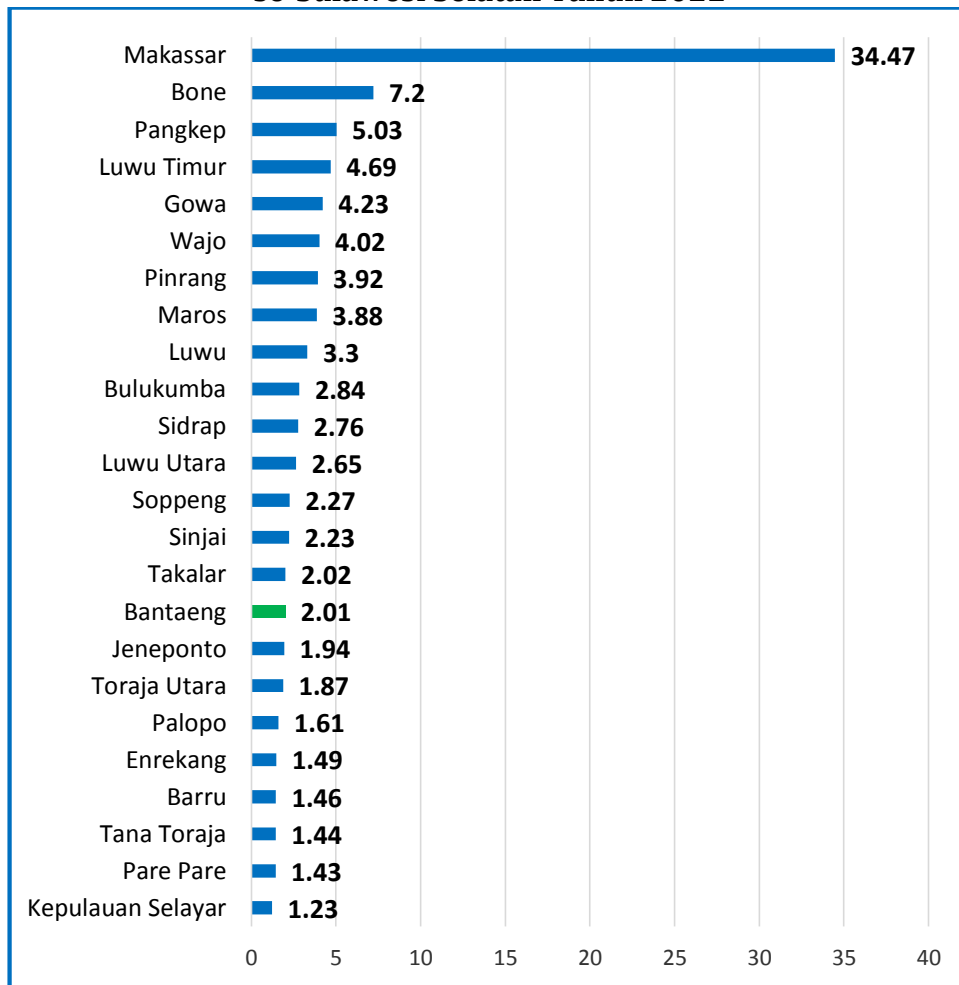
Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka Tahun 2023

Pada tahun 2021 dan 2022, penanganan dan pemulihan dampak Pandemi terhadap perekonomian Bantaeng terus dilakukan. Progres positif dialami hampir seluruh kategori lapangan usaha dalam pergerakan bidang di sektor pembangunan masing-masing. Sebagai sektor yang terdampak cukup berat pada tahun 2020, kategori industri pengolahan mampu bangkit dari keterpurukan dengan capaian pertumbuhan ekonomi sektoral tahun 2022 mencapai 122,89 persen. Adapun pada sektor dominan lainnya yakni pertanian dan konstruksi memiliki pertumbuhan ekonomi sektoral sebesar 0,35 persen dan 4,6 persen di bawah pertumbuhan ekonomi Bantaeng.

Daya saing perekonomian Bantaeng dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan masih tergolong minim. Hal ini terlihat dari minornya dominasi struktur perekonomian Sulawesi Selatan yang terbentuk dari perekonomian Bantaeng. Terlihat kontribusi perekonomian Bantaeng terhadap Sulawesi Selatan hanya sebesar 2,01 persen berada di peringkat ke tujuh terbawah.



Grafik II.4
Kontribusi Struktur Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
se-Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2023

b. PDRB per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

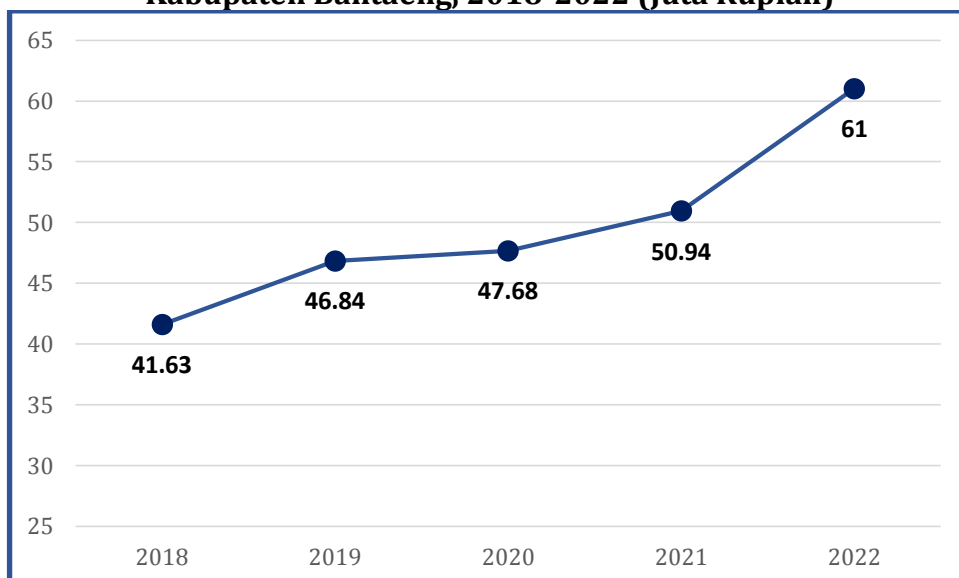
PDRB per kapita di Bantaeng mengalami peningkatan signifikan yang mengindikasikan tingginya peningkatan PDRB yang



tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2018, PDRB per kapita Bantaeng sebesar Rp.41,63 juta dan meningkat dalam waktu empat tahun mencapai Rp.61,00 juta pada tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan target PDRB per Kapita pada dokumen RPJMD, maka capaian PDRB per Kapita tahun 2022 sudah jauh di atas target RPJMD sehingga tingkat capaian mencapai lebih dari 100 persen dengan status capaian “Sangat Tinggi”.

Grafik II.5
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Bantaeng, 2018-2022 (Juta Rupiah)

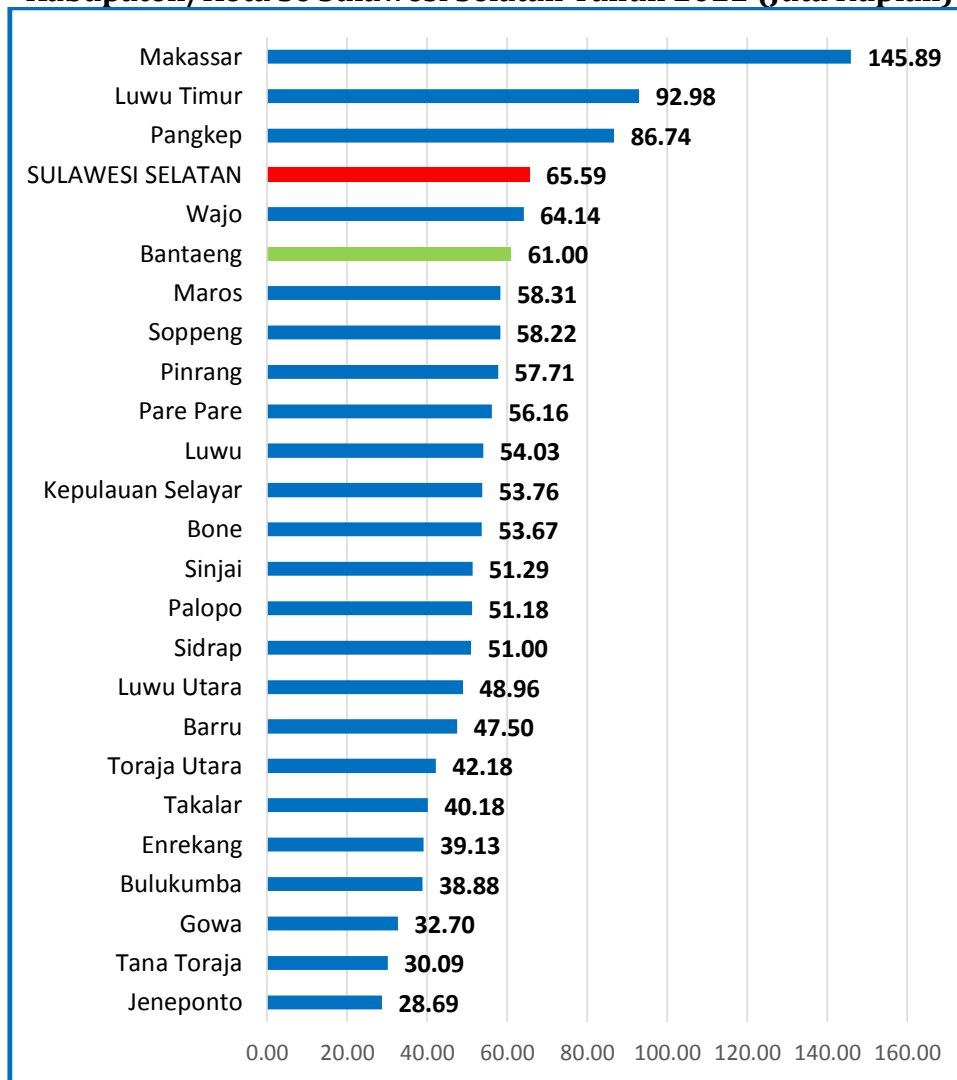


Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023 (diolah)

Angka PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bantaeng memiliki capaian yang cukup rendah dibandingkan daerah sekitar, meskipun begitu, dikarenakan jumlah penduduknya yang tidak banyak dibanding yang lain, maka PDRB per Kapita pun juga memiliki angka yang cukup tinggi dibanding wilayah sekitar yakni mencapai 61,00 juta rupiah. Hal yang sama juga terlihat dari PDRB per Kapita atas dasar harga konstan yang mencapai 35,62 juta rupiah dan memiliki capaian lebih baik dibanding wilayah sekitarnya.



Grafik II.6
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Juta Rupiah)



Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023 (diolah)

c. Angka Kemiskinan

Salah satu indikator berhasilnya Pemerintah yaitu ketika Pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantaeng mengalami penurunan pada tahun 2022 setelah tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Angka kemiskinan Bantaeng pada tahun 2018 mencapai 9,23 persen mengalami penurunan secara kontinyu hingga



tahun 2020 mencapai 8,95 persen. Adapun pada tahun 2021, angka kemiskinan mengalami kenaikan, khususnya karena pandemi COVID-19 pada gelombang kedua. Namun pada tahun 2022, sebagai hasil dari upaya pemulihan perekonomian daerah dan penanganan COVID-19, angka kemiskinan dapat diturunkan kembali menjadi 9,07 persen.

Tabel II.9
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan
		Jumlah (ribu)	Persentase	
2018	260.263	17,20	9,23	1,74
2019	309.357	16,91	9,03	1,35
2020	340.890	16,84	8,95	0,97
2021	363.342	17,78	9,41	1,23
2022	394.116	17,22	9,07	1,32

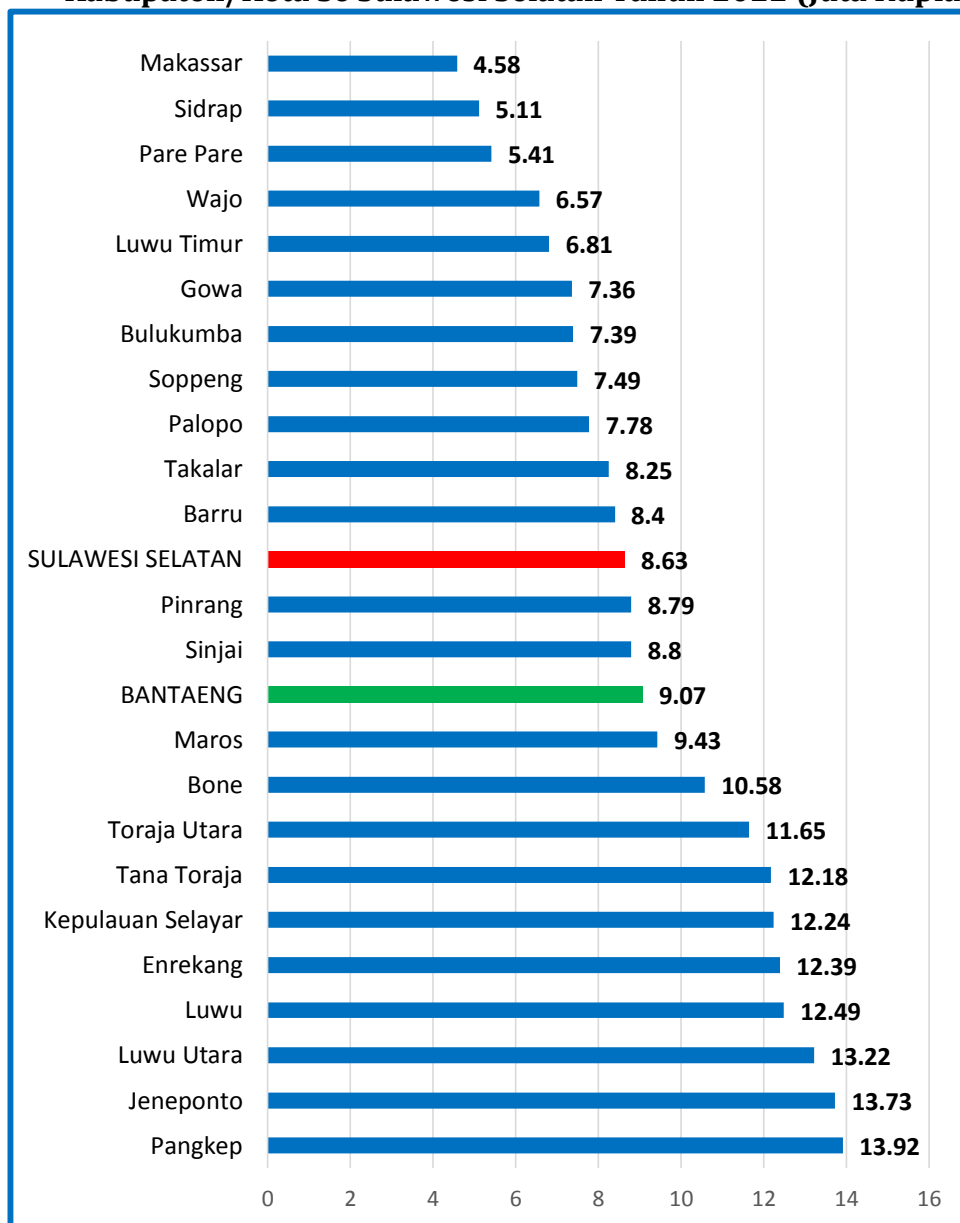
Sumber Data : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2022

Secara umum, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Bantaeng mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 menurun hingga mencapai 0,97 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,23 dengan peningkatan kembali di tahun 2022 mencapai 1,32. Angka ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan semakin menurun hingga tahun 2020, namun meningkat kembali di tahun 2021 dan 2022.

Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 berada di atas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 8,63 persen. Meskipun berada pada peringkat pertengahan, tingkat kemiskinan di Bantaeng mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan berada di bawah 2021. Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian bagi pada stakeholder untuk terus mengupayakan program pengentasan kemiskinan baik dari sisi mutu maupun pemerataannya terlebih mandat presiden terkait pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.



Grafik II.7
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Juta Rupiah)



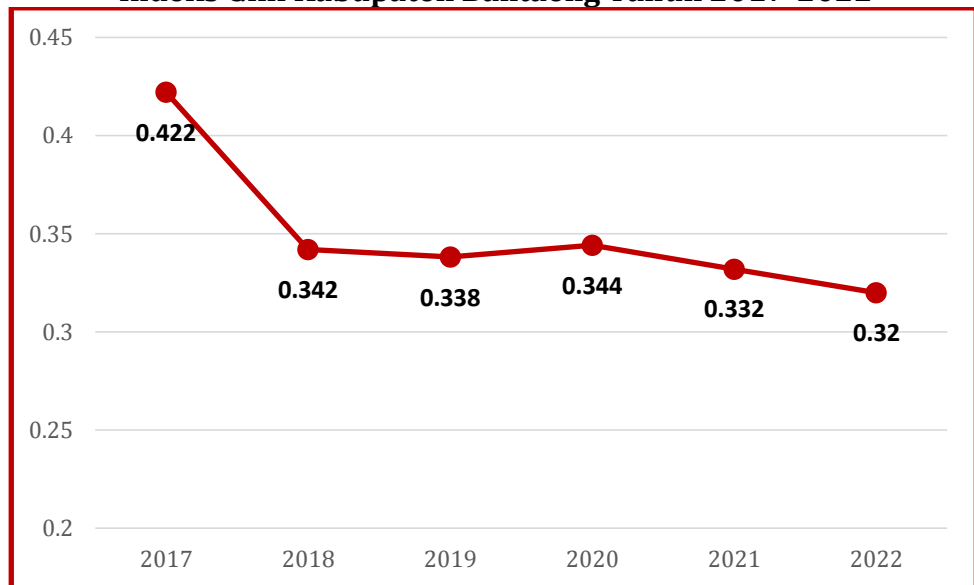
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

d. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain kesempatan, kualitas pendidikan, dan lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah

“rasio gini”, rasio ini menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1, maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Grafik II.8
Indeks Gini Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng, 2022

Pemerataan kesejahteraan di Bantaeng masih fluktuatif dan tergolong belum merata secara baik yang terlihat pada tingginya angka indeks gini sebesar 0,342 pada tahun 2018 dan menurun kembali pada tahun 2019 menjadi sebesar 0,338. Meskipun meningkat di tahun 2020 sebesar 0,344 dikarenakan COVID-19, namun indeks gini mulai menurun di tahun 2021 mencapai 0,332 hingga tahun 2022 menjadi 0,320.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Bantaeng dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Bantaeng.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

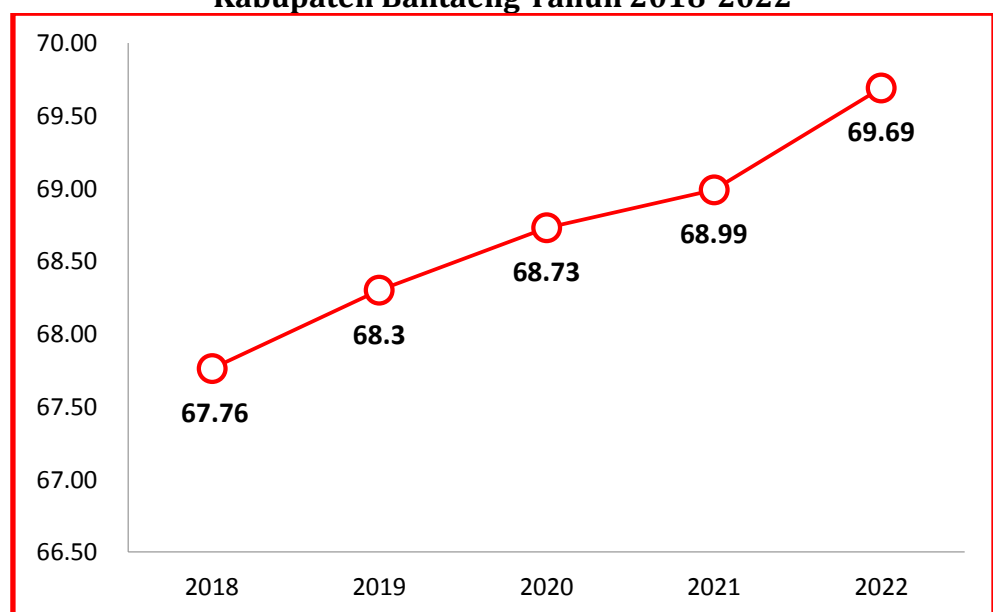
Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan



horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programmes (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis pembandingan pencapaian pembangunan manusia antarwilayah. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Grafik II.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng 2023

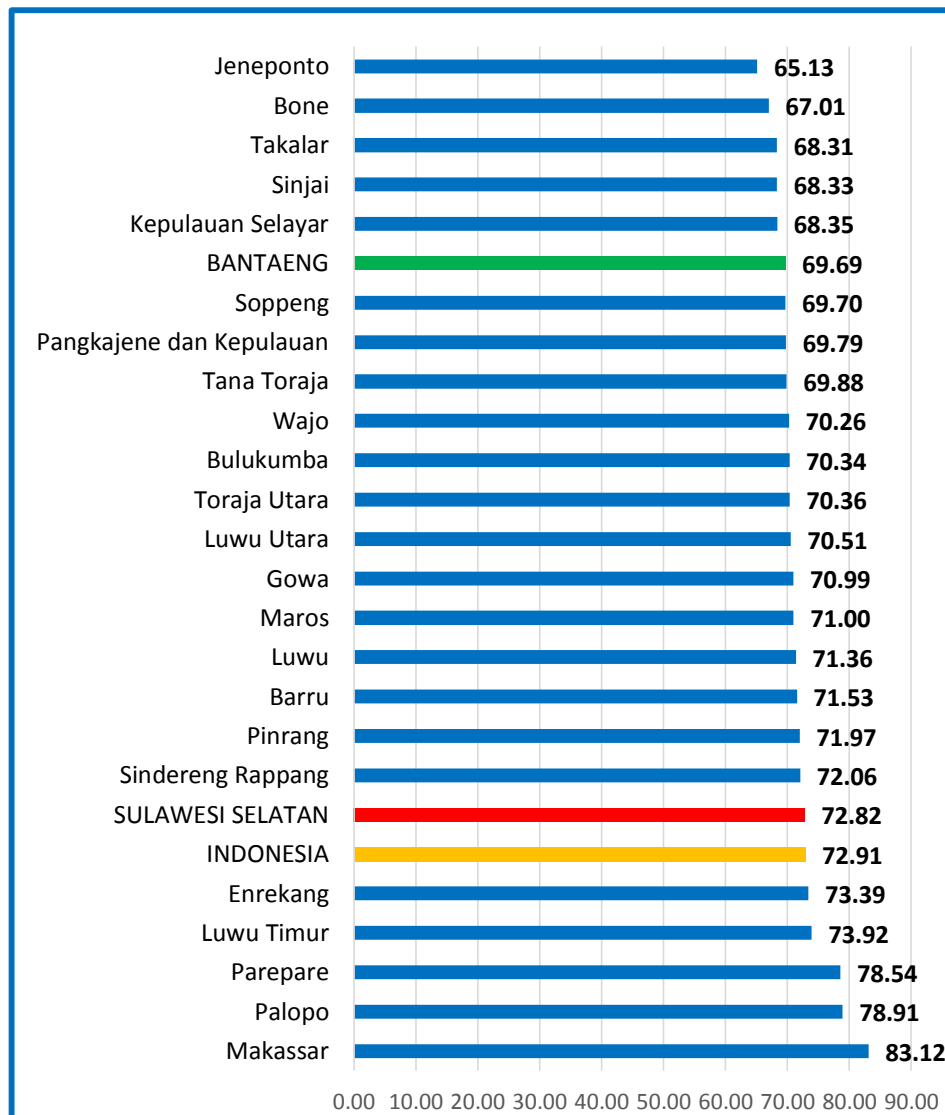


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantaeng mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai angka 69,69 pada tahun 2022. Capaian positif ini dikarenakan seluruh komponen penyusun IPM Bantaeng mengalami peningkatan secara kontinyu. Komponen pendidikan yakni angka rata-rata lama sekolah memiliki capaian selama 6,81 tahun dan harapan usia lama sekolah selama 12,30 tahun. Pada komponen kesehatan, capaian komponen IPM yakni angka harapan hidup memiliki progress sebesar 70,88 tahun dan komponen perekonomian yakni paritas daya beli memiliki capaian sebesar 12.133 ribu/tahun.

Jika dilihat dari perbandingan antar wilayah, IPM Bantaeng masih belum optimal dimana capaian 69,69 pada tahun 2022 masih cukup jauh dibandingkan dengan capaian Sulawesi Selatan (72,82) dan angka Nasional (72,91). Adapun peringkat Bantaeng berada pada urutan ke 19 diantara kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian khusus bagi pelaksana bidang pemerintahan khususnya pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM Bantaeng yang berkualitas.



Grafik II.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

b. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

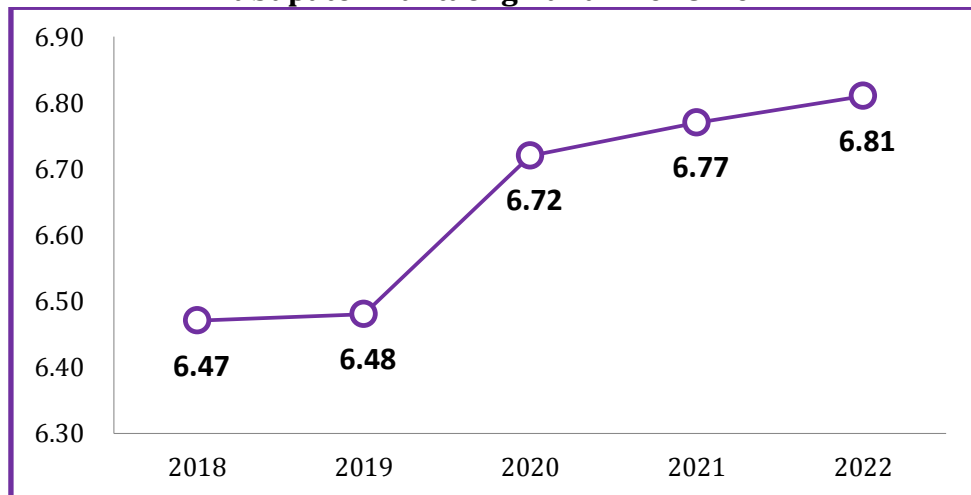
- **Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang



telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Grafik II.11
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng 2023

Berdasarkan rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan kualitas pendidikan dari 6,47 tahun menjadi 6,81 tahun di tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Bantaeng yang berumur 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 6,81 tahun atau telah menduduki Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 1.

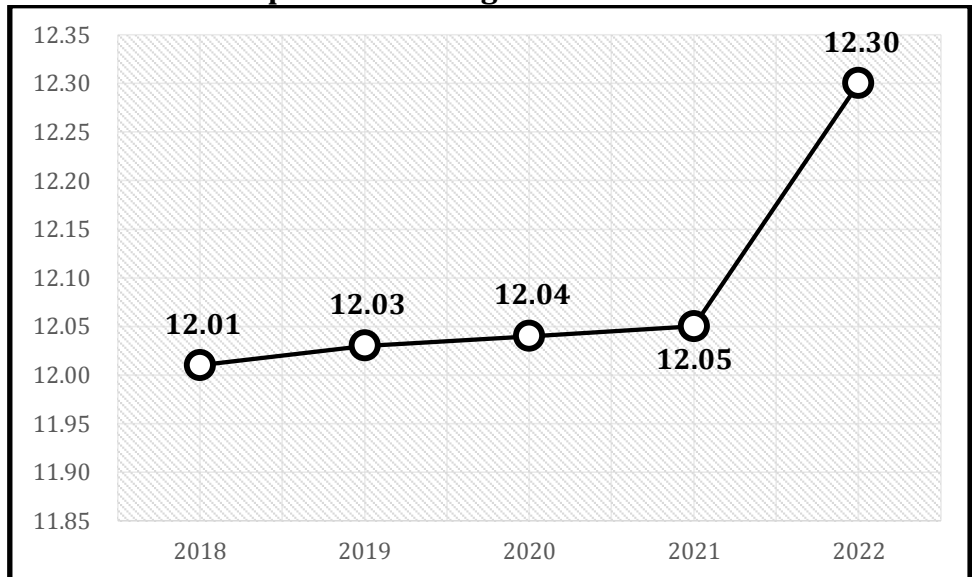
- **Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat



menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Grafik II.12
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng, 2023

Peningkatan HLS terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2018 HLS sebesar 12,01 tahun dan pada 2022 meningkat hingga mencapai 12,30 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 (tujuh) tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan masuk awal pendidikan perguruan tinggi. Angka HLS Kabupaten Bantaeng masih dibawah Rata-rata angka Provinsi Sulawesi Selatan bahkan berada pada peringkat terbawah.

Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya sarana dan prasarana maupun infrastruktur sarana pendidikan di Kabupaten Bantaeng sehingga perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan yang lebih baik.

c. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

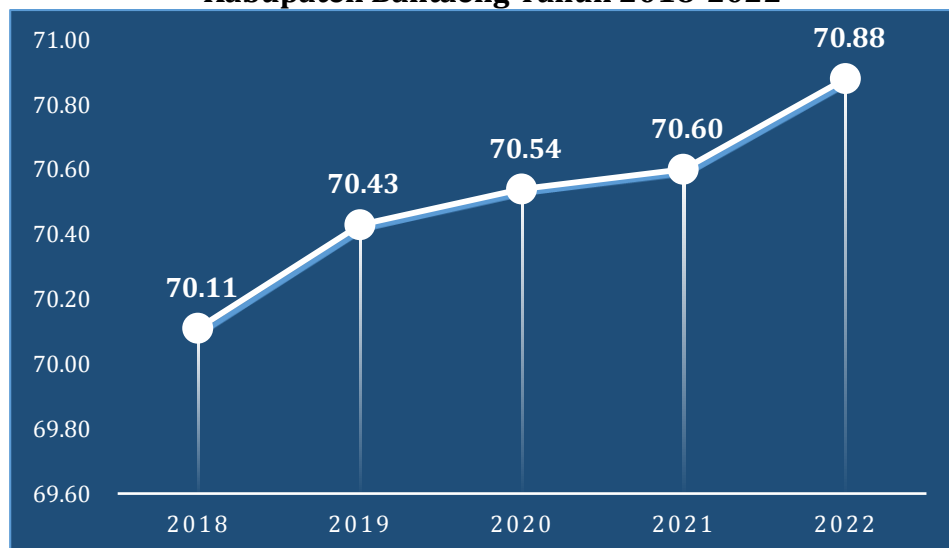


AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu 2018-2022 menunjukkan peningkatan dari sebesar 70,11 tahun pada tahun 2018 menjadi selama 70,88 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap bayi yang baru lahir pada tahun 2022 akan memiliki harapan hidup hingga mencapai kisaran usia 70-71 tahun.

Peran sektor kesehatan sangat mempengaruhi masyarakat sehingga perlu adanya upaya pemerintah secara serius untuk menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Grafik II.13
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng 2023

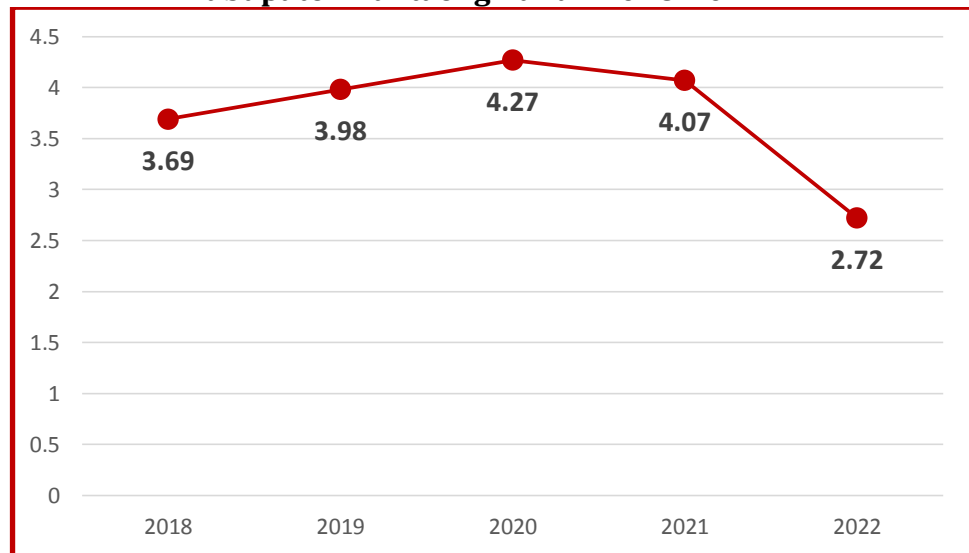
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantaeng memiliki *tren fluktuatif* naik turun dalam setiap periodenya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan.

Ketiadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta telah diterima bekerja,

namun belum mulai bekerja. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran.

Grafik II.14
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022



Sumber Data : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2023

Perlu digarisbawahi bahwa pengangguran di Kabupaten Bantaeng mengalami kenaikan hingga mencapai 4,27 persen pada tahun 2020 dimana tahun tersebut merupakan terjadinya pandemi COVID-19. Namun pada tahun berikutnya, pengangguran mengalami penurunan cukup signifikan hingga mencapai 2,72 persen pada tahun 2022. Angka ini merupakan titik terendah tingkat pengangguran dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

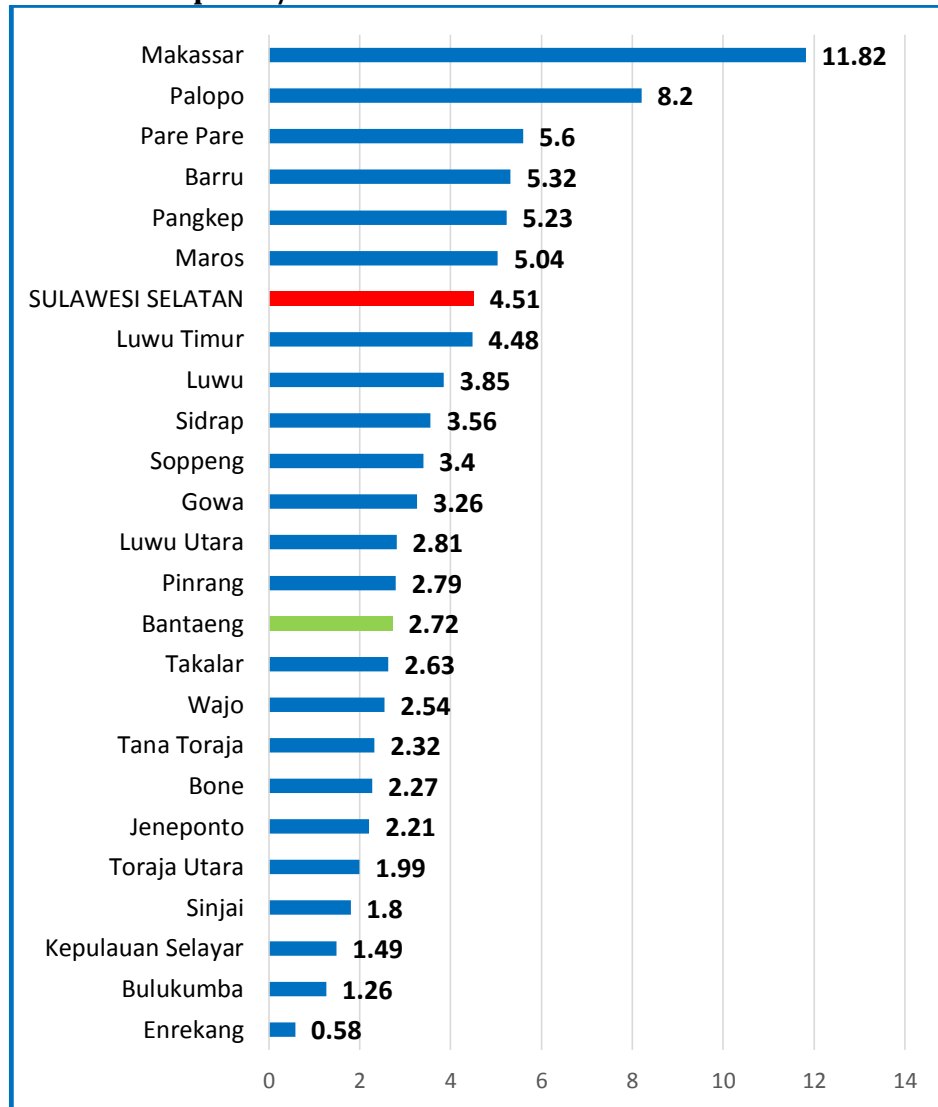
Kondisi penurunan angka pengangguran ini sangat terlihat dari meningkatnya penduduk dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri dimana pada tahun 2021 sebanyak 13 ribu penduduk dan meningkat pesat di tahun 2022 menjadi 18 ribu penduduk. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dimana pada tahun 2022 mencapai 29 ribu. Kondisi ini juga terlihat dari meningkatnya perekonomian pada beberapa sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja cukup tinggi di Kabupaten Bantaeng seperti industri pengolahan, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, hingga sektor jasa.

Angka pengangguran di Bantaeng memang termasuk rendah jika dibandingkan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Angka pengangguran provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 4,51 persen



lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran Bantaeng yang sebesar 2,72 persen. Bahkan angka Bantaeng ini berada di peringkat 11 se-kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Grafik II.15
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber Data : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2023

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah ini mencakup bidang urusan pemerintahan yang terkait langsung dengan indikator kinerja

utama pembangunan 2024-2026 atau yang memiliki daya ungkit tinggi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan

Dasar

Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan wajib memiliki dua urusan dalam pembangunan daerah, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut.

a. Angka Melek Huruf

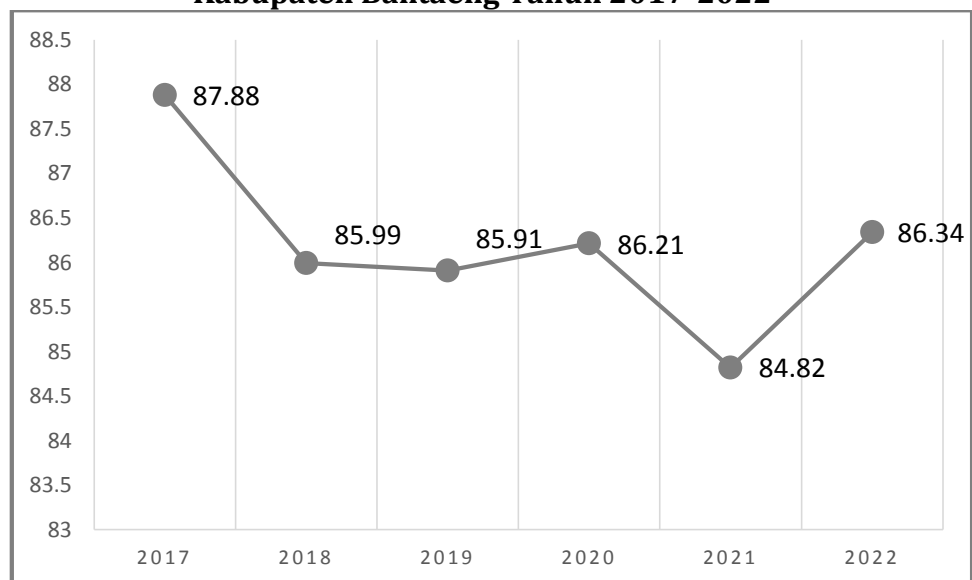
Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, khususnya yang ada di wilayah perdesaan.

Secara umum, terjadi fluktuasi angka melek huruf dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dimana capaian angka melek huruf sempat berada di angka 87,88 persen dan menurun hingga mencapai 86,34 persen di tahun 2022. Dalam hal ini menunjukkan



bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan meningkatkan kemampuan membaca bagi masyarakat masih perlu dioptimalkan. Sehingga perlu adanya keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam sektor pendidikan, untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang lebih baik.

Grafik II.16
Angka Melek Huruf (%)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022



Sumber Data : Dinas Pendidikan Bantaeng, 2023

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Target dan realisasi indikator kinerja sasaran terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan sejumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan formal tanpa melihat batasan umur usia sekolahnya.

APK SMP sederajat Kabupaten Bantaeng secara umum mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sedangkan APK SD sederajat secara umum mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Secara rinci, APK Kabupaten Bantaeng dapat terlihat pada tabel berikut.



Tabel II.10
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	APK SD/MI	100,82	97,24	101,102	102,35	115,35
2	APK SMP/MTs	90,10	96,45	97,63	112,48	79,07

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2023

Target dan realisasi indikator kinerja sasaran tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan dengan memperhatikan inklusifitas baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni (APM) mengindikasikan jumlah penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan tertentu sesuai batasan usia sekolah.

APM Kabupaten Bantaeng secara umum mengalami peningkatan di setiap tahunnya baik SD maupun SMP sederajat. Secara rinci, APM Kabupaten Bantaeng dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.11
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2017 - 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	APM SD/MI	97,24	95,39	98,43	99,98	99,98
2	APM SMP/MTs	82,15	90,43	93,99	97,06	71,52

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2022

Jika diperbandingkan dengan angka provinsi Sulawesi Selatan menggunakan data BPS, maka terlihat beberapa capaian partisipasi sekolah di provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Kabupaten Bantaeng. Secara rinci, perbandingan tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.12
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

No	Indikator	Bantaeng		Sulawesi Selatan	
		APM	APK	APM	APK
1	SD/MI	99,98	115,35	98,41	106,71
2	SMP/MTs	71,52	79,07	77,42	86,19

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

B. Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan hal tersebut, bidang kesehatan sendiri juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah.

Target Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI/MMR), Angka kematian Balita (AKB/CMR) dan Jumlah Balita Bawah Garis Merah (BGM) selalu mendapatkan perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Terlihat kasus kematian balita mengalami penurunan, namun angka kematian ibu maupun bayi memiliki pola kenaikan. Kondisi harus menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan, agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dengan berkualitas.

Tabel II.13
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 – 2022

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	kasus	1	1	1	5	2	2,4
2	Angka Kematian Balita per 1000 KH	kasus	-	2	2	0	0	2,4
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	1	19	2	3	2	2.28
4	Angka Kelahiran Hidup	jiwa	3.370	3.682	3.334	3.413	na	na

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2022

C. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sarana infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan terutama pelayanan terhadap masyarakat

akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Bantaeng relatif dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.14
Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kabupaten	%	53,30	53,30	53,26	54,51	77,00
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	53,30	53,30	53,26	54,51	77,00
3	Panjang Jalan						
	Jalan Nasional	Km	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
	Jalan Provinsi	Km	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76
	Jalan Kabupaten	Km	602,159	602,159	602,159	602,159	602,159
4	Panjang Jalan Kabupaten menurut jenis permukaan						
	Aspal	Km	522,49	552,58	518,16	542,66	542,66
	Kerikil	Km	59,34	30,26	29,885	21,690	21,690
	Tanah	Km	20,33	20,24	27,780	21,150	21,150
5	Kondisi jalan Kabupaten						
	Baik	Km	386,19	320,95	320,72	328,22	365,8
	Sedang	Km	46,263	60,770	66,570	68,374	94,59
	Rusak Ringan	Km	45,948	109,31	177,85	190,44	56,54
	Rusak Berat	Km	123,75	111,12	37,015	15,120	85,26
6	Perkembangan kondisi jembatan Kabupaten						
	Baik	buah	206	na	na	na	136
	Sedang	buah	25	na	na	na	116
	Rusak	buah	20	na	na	na	28
7	Jaringan Irigasi						
	Baik	%	29,73	28,70	27,04	35,8	42,9
	Rusak	%	70,23	71,21	72,96	64,2	57,1

Sumber Data : Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2022

Namun, bukan berarti infrastruktur yang telah dibangun memberikan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Jika melihat kondisi jalan di Kabupaten Bantaeng, maka masih terdapat jalanan yang rusak hingga mencapai 56,54 km kondisi jalan rusak ringan dan 85,26 km rusak berat. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan pengawasan penggunaan jalan agar kondisi jalanan yang rusak dapat diminimalisir.

Jika dilihat dari tabel di atas, maka panjang Jalan Kabupaten menurut jenis permukaan dan kondisi jembatan masih belum



memiliki data terupdate sehingga belum optimal analisis capaian urusan tersebut.

D. Perumahan dan Permukiman

Salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk dirasakan seluruh masyarakat Bantaeng adalah rumah layak huni. Rumah merupakan salah satu sarana tempat tinggal masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa perumahan rakyat dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdapat permasalahan masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.

Rasio rumah layak huni di Kabupaten Bantaeng meningkat secara perlahan dimana pada tahun 2022 mencapai rasio 0,145 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun berkebalikan dengan permukiman layak huni dimana rasionya menurun sejak tahun 2021 dan 2021 dengan capaian masing-masing 0,912 dan 0,916.

Adapun secara rinci terkait perumahan masyarakat Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.15
Indikator Pelayanan Perumahan dan Permukiman
di Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,14	0,142	0,143	0,145	0,145
2	Rasio Permukiman Layak Huni	0,98	0,993	0,997	0,912	0,916
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	61,73	60,64	61,40	62,50	62,84
4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	2,18	4,33	6,16	8,82	10,60
5	Persentase Permukiman Yang Tertata	98,31	99,35	99,68	91,18	91,64
6	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,09	0,04	0,02	0,03	0,01
7	Persentase Luasa Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	7,06	64,08	82,52	16,90	83,30
8	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan.	6,54	5,09	10,49	9,51	9,42
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Psu	35,48	39,39	39,39	45,45	45,45

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2022

E. Ketertiban dan Ketentraman Umum

Salah Satu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan daerah (Perda). Di Kabupaten Bantaeng pelayanan ini dilaksanakan oleh Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kondisi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.16
Kondisi Pelayanan Ketertiban dan Ketentraman Umum
di Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2022

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Org/RT	1,04	1,04	1,04	na
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	90	91,67	97,2	100%
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	83,34	83,34	83,34	83,34%
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	60,79	78,38	90,74	90.74
5	Persentase Penegakan PERDA	%	92,5	99,95	97,12	100%
6	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100%
7	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban	%	54	100	100	100%
8	Terlaksananya dukungan kelancaran pemilihan umum	%	0	100	100	100%
9	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100%
10	Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban	%	100	100	100	100%
11	Persentase anggota linmas yang dapat diberdayakan untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	%	61		80,23	0
12	Persentase kejadian	%	0	0	0	0



No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
	gangguan keamanan Pemilu yang tertangani oleh Linmas					
13	Persentase bencana kebakaran yang tertangani	%	100	100	100	100%
14	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, kентraman, dan Keindahan)	%	90	91,67	97,2	100%
15	Indeks Resiko Bencana	Indeks		102,54*	102,2	
16	Persentase bidang dalam SKPD yang terlayani administrasi perkantornya	%	beda permend agri	60*	60	60
17	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	beda permend agri	60*	60	60
18	Persentase bencana kebakaran, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	beda permend agri	60*	60	60

Sumber Data : Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022

F. Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Salah satu capaian yang menjadi kunci dalam pelayanan sosial demi pemeratakan kesejahteraan masyarakat adalah indikator Standar Pelayanan Minimal dimana Kabupaten Bantaeng memiliki capaian 100 persen yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.17
Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial
Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	na	na	100,00	100,00	100	100
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	na	na	100,00	100,00	100	100
3	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	na	na	100,00	100,00	100	100
4	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	na	na	110,00	100,00	100	100
5	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	na	na	103,33	100,00	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, 2022

Tabel II.18
Capaian Indikator Urusan Sosial
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2022

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Fasilitas umum yang ramah divabel	%	18	48	65	88.50
2	Jumlah Divabel yang menerima pelayanan	%	17	41	66	90.50
3	Jumlah anak terlantar yang di rehabilitasi	%	24	48	65	85.50
4	Jumlah Lajut Usia terlantar yang direhabilitasi	%	20	40	60	80.00
5	Jumlah gelandangan dan pengemis yang di rehabilitasi	%	18	41	63	85.50
6	Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi	%	18	41	64	87.00



No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
7	Jumlah keluarga MBR yang ditingkatkan kualitas SDMnya	%	18	41	64	87.00
8	Jumlah fakir miskin yang di tingkatkan kesejahteraannya	%	23	47	64	84.50
9	Peningkatan Kualitas pemeliharaan fasilitas Taman Makam Pahlawan, Peningkatan Kualitas Peringatan Hari-hari besar kepahlawanan, Restorasi nilai-nilai kepahlawanan	%	18	41	64	87.00
10	Prosentase Jaminan Sosial Keluarga	%	17	42	67	92.00
11	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	18	48	66	90.00
12	Persentase rehabilitasi dan pembinaan sosial pada anak	%	24	48	66	87.00
13	Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia	%	20	40	60	80.00
14	Persentase pembinaan dan rehabilitas korban sosial	%	18	40	62	84.00
15	Cakupan perlindungan korban bencana alam	%	18	41	64	87.00
16	Cakupan Ketersediaan rambu evakuasi dan papan informasi publik diwilayah berisiko bencana	-	3	10	15	21.00
17	Prosentase perlindungan dan jaminan sosial	%			60	80.00
18	Prosentase pemberdayaan sosial	%			60	80.00
19	Prosentase pelayanan rehabilitasi sosial	%			60	80.00
20	Prosentase penagnan korban bencana	%			60	80.00
21	Prosentase Kondisi TMP Baik	%			60	80.00

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Berikut analisis singkat data

dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

a. Pendidikan Angkatan Kerja

Sebagian besar angkatan di Kabupaten Bantaeng memiliki jenjang pendidikan Tidak Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat SD sebanyak 54.869 tenaga kerja. Angka ini disusul oleh pekerja yang memiliki jenjang pendidikan SMA sebanyak 19.774 tenaga kerja dan tamatan SMP sebanyak 14.284 tenaga kerja.

Tabel II.19
Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		
	Bekerja (2022)	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja
Tidak Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat SD	54.869	1.784	56.653
SMP	14.284	87	14.371
SMA	19.774	2.093	21.867
Perguruan Tinggi	11.731	522	12.253
Jumlah	100.658	4.486	105.144

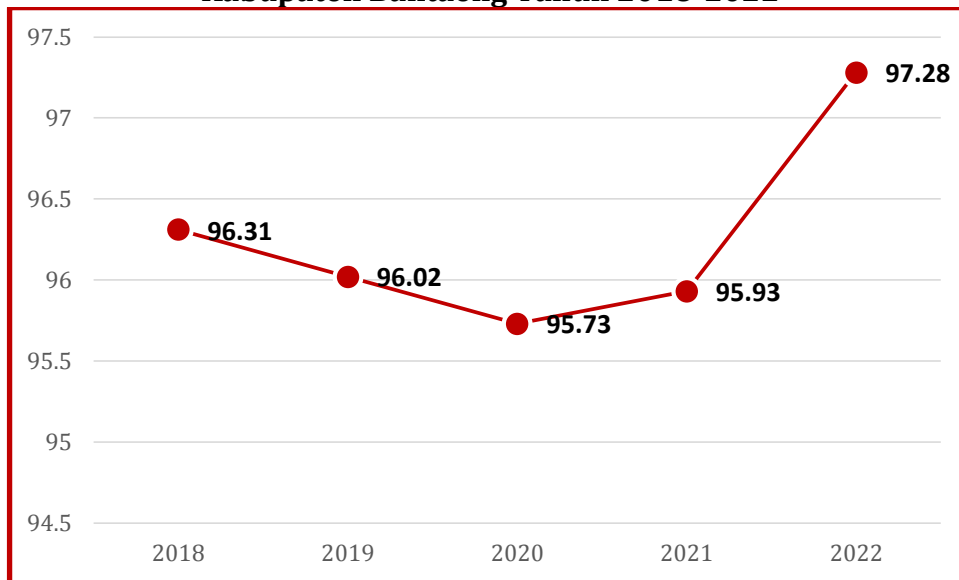
Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng, 2023

b. Jumlah Penduduk yang bekerja

Jumlah Penduduk yang bekerja pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga mencapai 97,28 persen dari angkatan kerja, dimana tahun sebelumnya sempat mencapai 95,73 persen dan 95,93 persen selama masa Pandemi COVID-19. Baiknya progress pada tahun 2021 ini merupakan dampak pemulihan perekonomian dari Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantaeng.



Grafik II.17
Tingkat Kesempatan Kerja (%)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

- c. Jumlah Tenaga Kerja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Untuk tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebanyak 480 orang dengan rincian peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) sebanyak 144 orang dan peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat (PBM) sebanyak 336 orang dan untuk tahun 2017, jumlah tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebanyak 156 orang dengan rincian peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 96 orang dan peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat (PBM) sebanyak 60 orang. Sedangkan untuk tahun 2013-2017 belum ada tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya disebabkan karena Kabupaten Bantaeng belum memiliki Balai Latihan Kerja.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

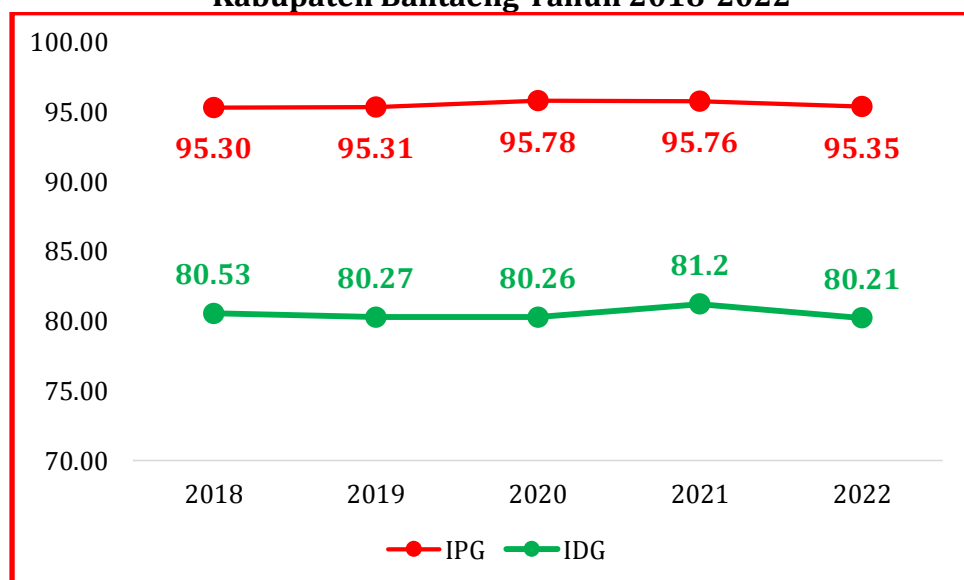


kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Capaian pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantaeng mengalami sedikit fluktuasi dimana pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) Bantaeng tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 0,48 poin menjadi 96,38 dibanding tahun 2014 sebesar 96,86 dan menurun kembali hingga pada tahun 2017 sebesar 95,28. Pada tahun 2018, angka IPG mengalami kenaikan 0,02 poin sehingga mencapai besaran 95,30 hingga dilanjutkan meningkat kembali 0,01 poin menjadi 95,31 di tahun 2019 dan meningkat 0,47 poin menjadi 95,78 pada tahun 2020. Namun di tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 0,02 poin menjadi 95,76 dan menurun kembali di tahun 2022 menjadi 95,35.

Jika dilihat dari indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), maka setiap tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 mencapai nilai sebesar 79,24. Namun pada tahun 2017, IDG Bantaeng mengalami penurunan menjadi 77,74. Pada tahun 2018, IDG meningkat kembali dengan capaian cukup tinggi yakni sebesar 80,53. Namun pada tahun 2019, terjadi penurunan IDG kembali hingga mencapai 80,27 dan tahun 2020 mencapai 80,26. Namun pada tahun 2021, terjadi kenaikan kembali IDG menjadi 81,20 dan tahun 2022 menjadi sebesar 80,21.

Grafik II.18
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022



Sumber Data : BPS RI tahun 2023



Pada tahun 2021 dan 2022, indeks pembangunan gender mengalami penurunan. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh semakin meningkatnya gap diantara beberapa komponen penyusun indeks pembangunan gender, khususnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang semakin memiliki gap cukup tinggi di setiap tahunnya. Selain itu, dari sisi kesehatan pada indikator angka harapan hidup juga semakin tinggi gapnya meskipun harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Secara rinci dalam kaitannya penyusunan IPG dan IDG, komponen penyusun kedua indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.20
Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup (Laki)	Tahun	68,15	68,4	68,45	68,45	68,72
	Angka Harapan Hidup (Perempuan)	Tahun	72,02	72,33	72,46	72,53	72,82
2	Harapan Lama Sekolah (Laki)	Tahun	11,78	11,81	11,82	11,83	12,1
	Harapan Lama Sekolah (Perempuan)	Tahun	12,36	12,37	12,38	12,4	12,43
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Laki)	Tahun	7,16	7,17	7,18	7,23	7,27
	Rata-Rata Lama Sekolah (Perempuan)	Tahun	6,4	6,41	6,69	6,74	6,75
4	Pengeluaran Perkapita (Laki)	Juta/Rp	11.445	11937	12040	12.286	12.614
	Pengeluaran Perkapita (Perempuan)	Juta/Rp	8.979	9.315	9.326	9.452	9.683
5	Indeks Pembangunan Manusia (Laki)	%	68,93	69,48	69,61	69,88	70,61
	Indeks Pembangunan Manusia (Perempuan)	%	65,69	66,22	66,67	66,92	67,33
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		-	95,30	95,31	95,78	95,76	95,35

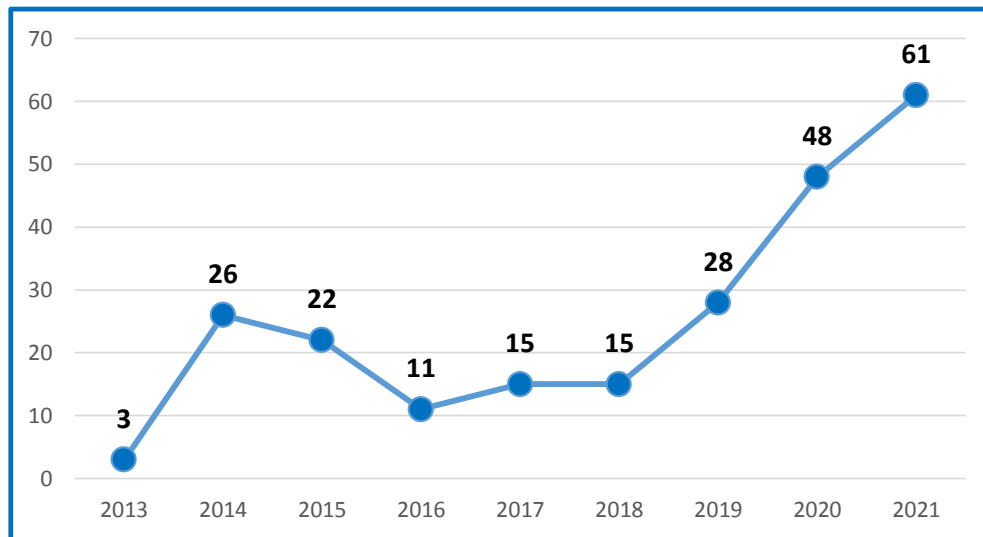
Sumber Data :BPS RI, 2023

Tabel II.21
Indeks Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pemberdayaan Gender		-	80,53	80,27	80,26	81,20	80,21
1	Keterlibatan perempuan di parlemen	%	33,33	32,00	32,00	32,00	32,00
2	Perempuan sebagai tenaga manajer, professional administrasi, teknis	%	54,97	56,43	56,18	52,32	61,81
3	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	36,73	36,84	36,99	37,19	37,05

Sumber Data : BPS RI, 2023

Grafik II.19
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak
Dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2021



Sumber Data : Dinas PMD,PP-PA tahun 2022

Jika menilik pada kasus terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, maka terlihat fluktuasi kasus di setiap tahunnya namun memiliki pola peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2013 sebanyak 3 kasus penyelesaian pengaduan dan meningkat menjadi 61 kasus pada tahun 2021. Peningkatan ini bisa mengindikasikan meningkatnya kesadaran perempuan terkait haknya dalam melaporkan tindak kekerasan yang merupakan fenomena gunung es dalam pembangunan.

C. Pangan

Kedaulatan Pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Padi masih merupakan bahan pokok pangan bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Secara umum, ketersediaan pangan mengalami peningkatan dari 42 ton pada tahun 2015 menjadi 57 ton pada tahun 2020. Meskipun sempat mengalami fluktuasi kenaikan pada tahun 2016, namun capaian kembali menurun di angka 55-56 ton. Hal tersebut juga didukung dengan

peningkatan pencapaian skor Pola Pangan Harapan yang terus meningkat di setiap tahunnya hingga tahun 2021 sebesar 90,8.

Tabel II.22
Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan pangan utama	ton	55	56	57	57	58
2	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	nilai	88,8	90,5	90,6	90,8	91,5

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan 2023

D. Pertanahan

Pemerintah Kabupaten Bantaeng, sebagai daerah otonom melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan permasalahan yang biasa terjadi di lapangan:

- Masih adanya permasalahan di bidang pertanahan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan dan senantiasa memberikan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan.
- Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu pengawasan lebih mendalam dalam hal perizinan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.

Terlihat capaian pada urusan pertanahan dimana jumlah dan luas tanah bersertifikat mengalami kenaikan yang mengindikasikan semakin baiknya administrasi agrarian di Bantaeng. Lebih rinci, capaian urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.23
Indikator terkait Urusan Pertanahan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2021

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	40,99	46,4*	58,11
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	50*	
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100*	100
4	Persentase sengketa tanah diselesaikan	%	72	76	42,9
5	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah dipenuhi	%	72	76	20
6	Persentase tanah kosong dikelola	%	72	76	0%
7	Persentase tanah ditata sesuai penggunaan	%	72	76	0%

Sumber : Data Pertanahan 2021

E. Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disusun agar mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. Pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional. Pengelolaan sampah ini meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah, yang berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan.

Tabel II.24
**Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	Sat	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase cakupan area pelayanan	%	3,51	3,54	3,54	3,90	3,90
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	20,48	20,72	20,53	26,83	32,86
3	Perusahaan yang memiliki IPAL	%	20,36	31,58	39,62	39,62	57,14
4	Persentase luas RTH publik per luas wilayah kota	%	10,09	10,09	10,9	10,09	10,09



No	Uraian	Sat	2018	2019	2020	2021	2022
5	Persentase jalan yang mempunyai PJU	%	34,3	41,4	44,27	Na	Na
6	Volume Produksi Sampah	Ton	40.642	43.470	44.170	44.044	29.562
7	Jumlah Tempat Pengolahan Akhir	Unit	1	1	1	1	1
8	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Unit	2	2	2	2	2
9	Sistim Pembuangan Air Limbah Domestik Secara Terpusat	Unit	17	21	26	30	34
10	Laboratorium Penelitian Lingkungan	Unit	1	1	1	1	1
11	Jumlah Kasus Lingkungan Yang Diselesaikan Pemda	Kasus	1	-	1	10	5
12	Jumlah Penghijauan Wil. Rawan Longsor & Sumber Mata Air	Ha	-	-	5,15	5,2	7.04

Sumber Data : Dinas LH 2023

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan pengrusakan lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam ini akan menimbulkan beban kepada masyarakat dan pemerintah itu sendiri karena mereka juga yang akan menanggung beban pemulihannya. Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggungjawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Kondisi lingkungan hidup suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun capaian IKLH hingga tahun 2020 mengalami peningkatan hingga sebesar 82,56, namun paa tahun 2021 terjadi perubahan formulasi yang menyebabkan capaian IKLH terkesan mengalami penurunan.



Tabel II.25
Kondisi 3 (Tiga) Indikator LH Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Sat	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air	-	79,21	76,35	83,14	60,00	56
2	Indeks Kualitas Udara	-	96,22	94,72	94,11	94,38	95,61
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	54,59	73,47	73,47	32,55	32,55
IKLH			74,47	80,71	82,56	67,91	66,91

Sumber Data : Dinas LH Tahun 2023

F. Perhubungan

Sektor perhubungan mempunyai sasaran pembangunan untuk meningkatkan layanan publik terutama dalam hal penataan sistem transportasi dan peningkatan aksesibilitas masyarakat di pedesaan. Sasaran pembangunan tersebut, memiliki 2 (dua) indikator besar yakni *load factor* Penumpang Angkutan Umum Perkotaan dan Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi. Di Kabupaten Bantaeng sendiri, fasilitas perhubungan diupayakan untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun secara jumlah. Di Bantaeng terdapat 1 terminal tipe B dan 3 terminal tipe C serta 1 pelabuhan laut. Namun capaian jumlah KIR mobil angkutan umum mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebanyak 1.453 dibanding tahun sebelumnya yang mencapai angka 2 ribu.

Tabel II.26
Fasilitas Perhubungan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022

No	Uraian	Sat	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Term. Tipe- B	Unit	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Term. Tipe C	Unit	3	3	3	3	3	3
3	Jumlah Uji Kir Mobil Angkutan Umum	Kali	2,482	2805	2808	1796	2054	1.453
4	Rasio ijin trayek	Per 1.000	0,73	0	0	0,41	0,48	0,45
5	Jumlah Pelabuhan laut	unit	1	1	1	1	1	1
6	Pemasangan Rambu-rambu	buah	120	0	0	0	189	189

Sumber Data : Dinas Perhubungan 2022

G. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Meskipun belum sepenuhnya berkembang, namun koperasi di Kabupaten Bantaeng masih



menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan perekonomian mikro daerah.

Tabel II.27
Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif	%	74,05	75,13	76,21	77,00	78
2	Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif.	%	6,20	0,54	1,08	4,00	1,1
3	Jumlah koperasi	Unit	185,00	185	185	185	187
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,67	99,67	99,90	11,37	98,7
5	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UKM	9.144	9.174	9.849	11.371	11.549

Sumber Data :Dinas Koperasi UKM 2022

H. Penanaman Modal

Iklim investasi di Kabupaten Bantaeng menunjukkan “*trend positif*”. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar Kabupaten Bantaeng untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Kemudahan berinvestasi di Kabupaten Bantaeng tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk menyederhanakan pelayanan perijinan serta mengedepankan pelayanan yang bersih dan bebas pungli.

Terlihat secara umum terjadi penurunan perkembangan investasi daerah dimana pada tahun 2017 realisasi investasi sempat mencapai 2.5 trilyun rupiah namun memiliki tren penurunan hingga mencapai 738 milyar rupiah di tahun 2020. Adapun capaian tahun 2021 mulai mengalami peningkatan sebagai dampak dari pemulihan ekonomi pasca pandemi hingga tahun 2022 meningkat kembali cukup tajam dengan realisasi total investasi sebesar 1,7 trilyun rupiah.

Tabel II.28
Perkembangan Investasi
Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 - 2022

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Investasi PMA	Rp.	1,1 T	1,1 T	586 M	646 M	751 M	1,7 T
2	Realisasi Investasi PMDN	Rp.	1,4T	96 M	190 M	91 M	154 M	
3	Total Realisasi Investasi	Rp.	2,5T	1,2 T	776 M	738 M	905 M	1,7 T

Sumber Data : PM dan KTSP 2022

I. Statistik

Di Kabupaten Bantaeng terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng mempublikasikan buku Bantaeng Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Bantaeng sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya perwujudan pembangunan daerah

J. Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Setiap Bangunan Cagar Budaya merupakan satu kesatuan filosofis dan sejarah yang dalam pelestariannya perlu dipertimbangkan sehingga ada keseimbangan arkeologis, historis dan kekhasan masing-masing kawasan cagar budaya. Cagar budaya di Bantaeng cukup melimpah dimana terdapat 40 bangunan cagar budaya dengan 5.637 benda cagar budaya. Selain itu terdapat 2 kawasan cagar budaya dan 35 situs cagar budaya pada tahun 2020.

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan Pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Bantaeng.

A. Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten Bantaeng terus dipacu pengembangannya, oleh karena itu pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk pengembangan pariwisata daerah menjadikan Kabupaten Bantaeng tampil sebagai destinasi kunjungan wisata. Obyek wisata yang dikembangkan mencakup obyek wisata pantai antara lain wisata kuliner Pantai Lamalaka, wisata kuliner Pantai seruni dan wisata bahari Pantai Marina Korong Batu, selain itu telah dikembangkan wisata agro pada kawasan zona III (pegunungan) termasuk kebun apel dan strawberi.



Kegiatan sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri. Selain itu diharapkan secara langsung sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha. Jika dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, maka terjadi fluktuasi pada jumlah wisatawan dimana tertinggi pada tahun 2015 (80.016 wisawatan) menurun hingga mencapai 73.699 wisatawan pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah wisatawan meningkat kembali hingga mencapai 76.971 wisatawan dan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 87.630 kunjungan wisatawan.

Tabel II.29
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kecamatan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022

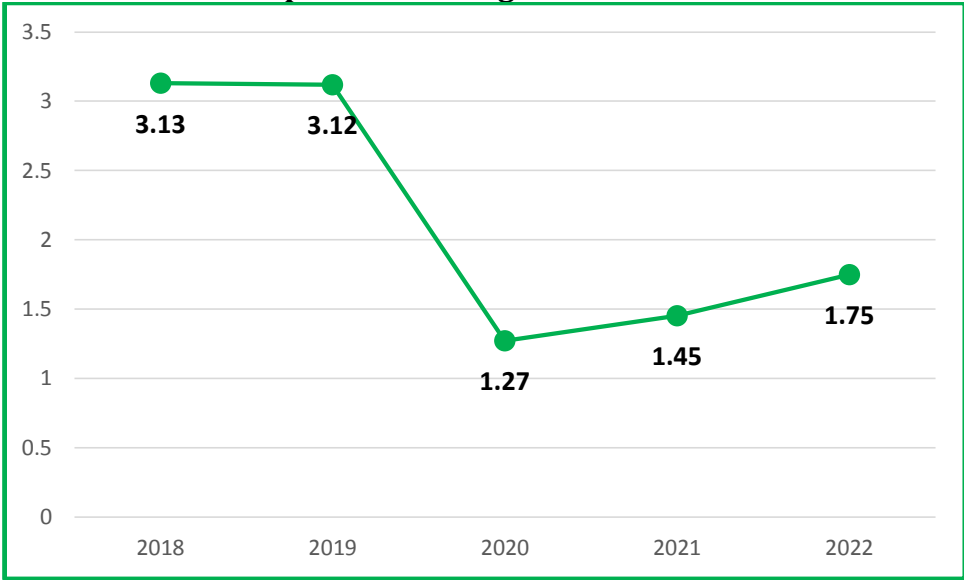
No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Eremerasa	137	145	124	114	96.96
2	Bissappu	51	41	124	55	125.74
3	Pajukukang	58	54	22	24	30.04
Total		246	240	270	193	252.74

Sumber Data : Dinas Pariwisata Tahun 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah wisatawan di tahun 2017 sejumlah 209 orang meningkat menjadi 246 orang di tahun 2018, kemudian terjadi penurunan kembali di tahun 2019 menjadi 240 dan meningkat menjadi 270 orang di tahun 2020. Tetapi di tahun 2021 kembali terjadi penurunan jumlah wisatawan menjadi 193 orang atau yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Faktor pandemic dan kebijakan PPKM di tahun 2021 menyebabkan terbatasnya mobilisasi dan penutupan beberapa Kawasan di Kabupaten Bantaeng.



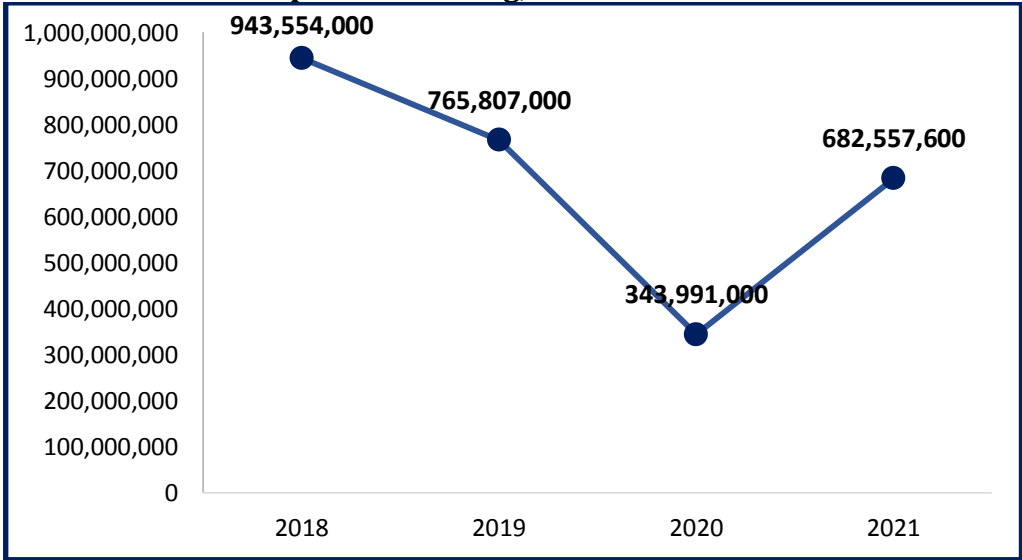
Grafik II.20
Rata-rata lama Wisata (Hari)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Tahun 2023

Dari sekian banyak wisatawan yang menikmati fasilitas pariwisata di Bantaeng, pada tahun 2018 mereka memiliki rata-rata lama menginap selama 3,13 hari. Angka ini mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir menjadi 1,27 hari dan kemudian meningkat sedikit menjadi 1,45 hari di tahun 2021. Adanya wabah covid-19 yang disertai dengan kebijakan pembatasan PPKM menyebabkan beberapa obyek wisata harus di tutup dan masyarakat enggan untuk bepergian. sehingga perlu adanya peningkatan daya tarik wisata sekaligus fasilitas penunjangnya.

Grafik II.21
Perkembangan PAD Sektor Pariwisata
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2017 - 2021



Sumber Data : Dinas Pariwisata Tahun 2022

Jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, terjadi penurunan secara berkala dimana pada tahun 2017 PAD sektor pariwisata mencapai Rp. 974,35 Juta dan menurun hingga pada tahun 2020 sebesar Rp.343,99 Juta. Dampak Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan berbagai sektor ekonomi, tak terkecuali sektor pariwisata. Namun adanya pemulihan ekonomi di tahun 2021 menyebabkan kenaikan kembali geliat pariwisata daerah yang terlihat dari kenaikan PAD menjadi Rp.682,58 juta.

B. Pertanian

Pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi padi, palawija dan hortikultura. Peningkatan produksi padi dilakukan melalui program dalam bentuk insus dan inum serta ditunjang dengan pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai. Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Bantaeng didominasi sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, selanjutnya sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Sedangkan pola tanam pertanian tanaman pangan adalah padi-padi-palawija.

Tabel II.30
Capaian Pembangunan Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	31,83	30,39	28,53	28,37	28,94
2	Produktivitas padi sawah dan ladang	ton/ha	5,73	5,08	5,08	5,06	5,10
3	Produksi padi	ton	94.699	91.159	73.405	75.194	69.880
4	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	5,59	5,08	4,54	5,25	5,29
5	Jumlah produksi daging (sapi, kambing)	Ton	324,29	489,72	272,86	314,39	331.692
6	Jumlah produksi daging ayam/unggas	Ton	1.273,44	1.255,02	1.266,96	1.216,74	1.291,91
7	Jumlah produksi pengolahan hasil ternak	Unit	9	9	5	7	8

Sumber Data : Dinas Pertanian Tahun 2022

C. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bantaeng terletak dipinggir pantai dan berpotensi serta menguntungkan pada sub sektor perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut. Potensi perikanan laut di Kabupaten Bantaeng masih memiliki peluang yang teramat besar untuk dioptimalkan. Potensi cukup menjanjikan pada subsektor kelautan dan perikanan adalah produksi rumput laut yang mencapai 86.378 ton pada tahun 2021. Selain itu, dari produksi perikanan tangkap juga terlihat adanya peningkatan capaian produksi di setiap tahunnya. Pengelolaan kedua komoditi perikanan ini dapat dioptimalkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Bantaeng.

Tabel II.31
Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Tahun
Kabupaten Bantaeng, 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)					
Produksi Rumput Laut basah	83.454	84.076	84.805	86.288	86.378
Produksi Ikan Bandeng	177,5	186,42	188,5	110,92	155,6
Produksi Udang	39,3	39,85	53,33	34,82	218,7
Produksi Ikan Air Tawar	33,4	33,31	38,00	42,79	47,2
Produksi Keramba	1,1	0	0	0	0
PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)					
Produksi Ikan Laut	5.706,5	5745,2	6.054,1	6060,9	6256,4

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2022

D. Perdagangan

Perdagangan memiliki dominasi pada struktur perekonomian Bantaeng yang cukup tinggi dengan kontribusi pembangunan perekonomian sebesar 14,25 persen. Kondisi ini juga semakin terlihat dengan pertumbuhan ekonomi sektoral yang cukup tinggi pula hingga mencapai 7,33 persen di tahun 2021 dan 9,54 persen pada tahun 2022. Adapun pada tahun 2020 perekonomian mengalami kontraksi, disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan sektor perdagangan sedikit bergejolak.

Tabel II.32
Capaian Pembangunan Perekonomian Sektor Perdagangan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan speeda motor	%	14,8	15,0	14,65	14,25	13,52
2	Laju pertumbuhan ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan speeda motor	%	9,9	10,7	-2,40	7,33	9,54

E. Perindustrian

Sebagai upaya peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor primer yang ada di Kabupaten Bantaeng, termasuk didalamnya peningkatan kualitas usaha mikro kecil khususnya industri mikro kecil, maka Kabupaten Bantaeng memiliki program kebijakan khusus dalam pengembangan perindustrian daerah. Upaya peningkatan kapasitas perindustrian juga terlihat dari adanya antusiasme masyarakat dalam mengelola barang dan jasanya sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih bernilai tinggi.

Kondisi ini terlihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi sektoral perindustrian yang mencapai 43,76 persen pada tahun 2021, setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi di angka -9,50 persen. Angka ini juga meningkat tajam di tahun 2022 hingga mencapai pertumbuhan ekonomi sektoral sebesar 122,89 persen. Adapun pada struktur ekonomi wilayah, perindustrian semakin mendominasi kontribusi terhadap PDRB hingga mencapai 18,47 persen pada tahun 2022.

Tabel II.33
Capaian Pembangunan Perekonomian Sektor Perindustrian
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan	%	5,1	7,70	6,91	9,76	18,47
2	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Industri Pengolahan	%	18,0	68,8	-9,50	43,76	122,89

F. Penunjang Urusan

a. Penyelenggaraan Pemerintah

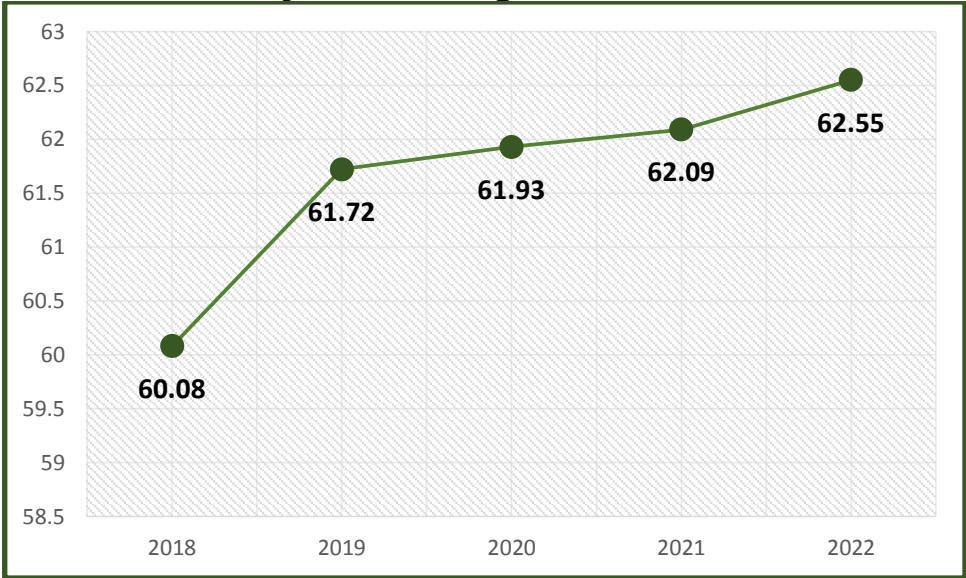
Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng beserta seluruh elemen yang tergabung di dalamnya memiliki peran utama untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dalam melaksanakan kinerja pemerintahan, setiap unsur Pemerintah Daerah memiliki tugas dan fungsi yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan baik dari segi capaian teknis maupun administrasi.

Reformasi birokrasi yang telah diupayakan untuk diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah mulai menampilkan hasil positif pada beberapa daerah, tak terkecuali Kabupaten Bantaeng. Pencapaian reformasi birokrasi di Kabupaten Bantaeng memiliki progress yang positif dimana terlihat pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat dari 41,35 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 48,86 pada tahun 2017. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 39,33 atau memiliki kategori C. Indeks Reformasi Birokrasi kembali meningkat meskipun tidak signifikan pada tahun 2021 menjadi sebesar 40,21 dengan kategori C.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan instrumen yang digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan tersebut, disusun suatu laporan yang disebut LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan).



Grafik II.22
Nilai SAKIP (Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022



Sumber Data: Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2023

Hasil dari nilai pelaporan SAKIP Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2018, Kabupaten Bantaeng hanya mendapatkan nilai LAKIP 60,08 dengan predikat B dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 memiliki nilai SAKIP 62,55 (B). Adapun dari penilaian tersebut, Kabupaten Bantaeng memiliki capaian Perjanjian Kerja dari indikator LAKIP sebesar 89,36 persen pada tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan target kategori menjadi BB.

Tabel II.34
Capaian SAKIP
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022

LAKIP	2018	2019	2020	2021	2022
Target	na	B	B	B	BB (70-80)
Realisasi	60,08 (B)	61,72 (B)	61,93 (B)	62,09 (B)	62,55 (B)
Capaian	na	100%	100%	100%	89,36%

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantaeng, 2023

Selain dari LAKIP, dalam melihat kinerja Pemerintah dapat terlihat dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP sendiri adalah proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam mengevaluasinya, maka dirumuskan suatu indikator yakni Indeks Maturitas SPIP yang dapat melihat tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Pada tahun 2017, Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Bantaeng sudah mencapai level 2,66 sehingga masuk kategori berkembang. Berkembang disini dalam artian Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasikan dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung dari individu dan belum melibatkan seluruh unit organisasi. Selain itu, efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan meredam kesempatan untuk melakukan tindak kasus korupsi dimana pada tahun 2017 di Bantaeng terdapat 2 kasus korupsi. Hal ini tentu saja menjadi perhatian pemerintah mengingat salah satu keinginan dilaksanakan reformasi birokrasi adalah menjadi pemerintahan yang bersih. Selain itu, terdapat pula Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (penilaian mandiri) dimana SPBE merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun capaian Indeks SPBE Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 mencapai 2,28 dengan status kategori “cukup”. Belum optimalnya capaian indeks SPBE ini disebabkan karena penerapan arsitektur SPBE belum dilaksanakan secara maksimal.

b. Keuangan

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi tidak bisa dilepaskan dari faktor keuangan daerah karena suatu Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu keuangan dapat



menjadi kriteria dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara itu, untuk dapat memiliki sendiri keuangan yang memadai daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

Dari uraian diatas, dapat diambil kata kunci bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Daerah mempunyai hak untuk mencari sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan Pemerintah di daerah.

Salah satu kriteria dalam rencana program otonomisasi daerah adalah kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi suatu daerah atau PAD merupakan indikator tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Dalam melihat kinerja administrasi keuangan daerah, indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kinerja pengelolaan keuangan. Pada tahun 2021, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Bantaeng mencapai 74,726. Selain itu, indikator Opini BPK dapat memperlihatkan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kabupaten Bantaeng telah meraih Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian” selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2022.

Tabel II.35
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data: BPKD 2021

c. Pelayanan Publik

Dalam menjalankan kehidupan kesehariannya, masyarakat tidak akan pernah terlepas dari peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan. Berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan telah dilaksanakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantaeng yang mencapai nilai 75,05 pada tahun 2017 yang artinya pelayanan Pemerintah termasuk dalam kategori “Baik”. Dan kemudian meningkat menjadi 86,04 di tahun 2020 dan sedikit menurun di Tahun 2021 menjadi 82,13, di tahun 2022 IKM Kabupaten Bantaeng tercapai dengan predikat “Baik”.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

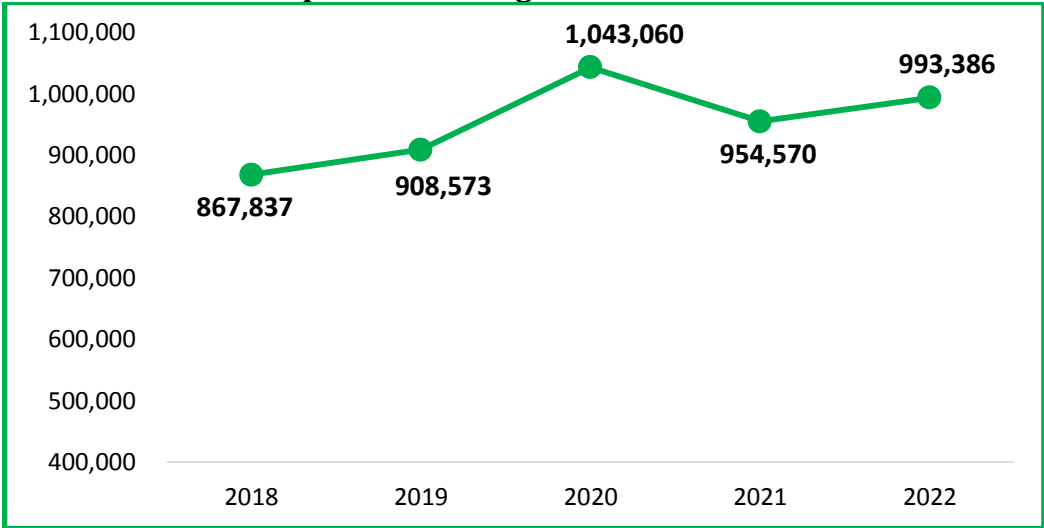
a. **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Data menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami perubahan cenderung meningkat dari Rp.867.837,-/bulan, pada tahun 2018 menjadi Rp.993.386,-/bulan pada tahun 2022.



Grafik II.23
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng 2023

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Bantaeng. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan pembangunan.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap jumlah kendaraan semakin bertambah sehingga kepadatan kendaraan semakin bertambah. Pertumbuhan jumlah orang dan barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun secara umum cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2022 berjumlah 315.360 orang dan 3,204 ton barang.

Tabel II.36
Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/ Barang Pengguna Terminal
Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km/kend)	0,042	0,032	0,020	0,018	17,43	17,43
2	Jumlah orang melalui terminal per tahun	759.750	554.630	642.800	387.483	262.900	315.360
3	Jumlah barang melalui terminal per tahun	8.528.100	4.670.560	3.242.000	3.298.160	3.210.320	3.204.000

Sumber Data :Dinas Perhubungan 2022

c. Iklim Berinvestasi

- **Keamanan dan Ketertiban**

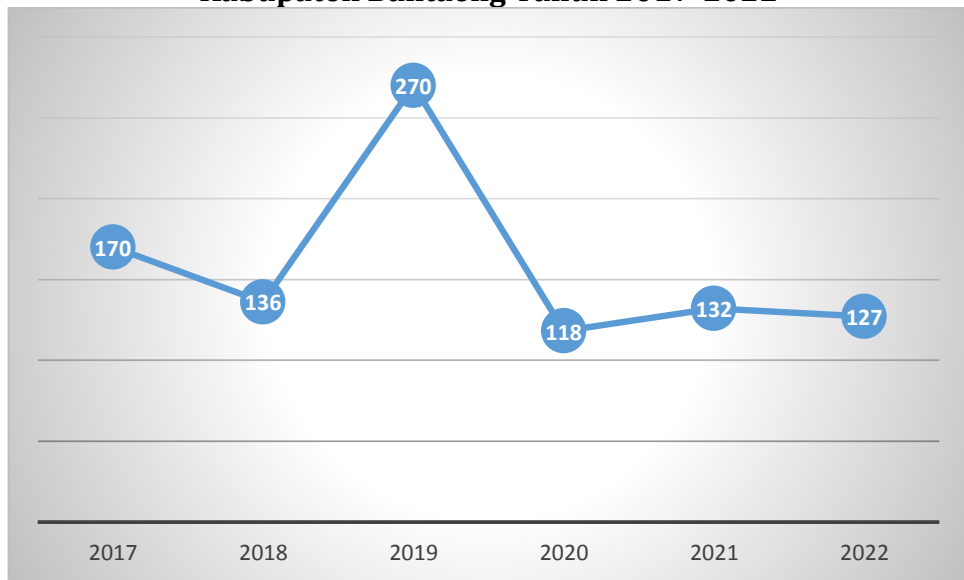
Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Dari sisi keamanan dan ketertiban, menurunnya jumlah kriminalitas dan maupun pelanggaran perda K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Bantaeng.

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Bantaeng, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Salah satu faktor penting juga adalah terkait minimalisir angka kriminalitas dimana kasus kejahatan masih sangat fluktuatif terjadi di Kabupaten Bantaeng.

Terjadi kenaikan kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2015 terjadi sebanyak 122 kasus kriminalitas dan semakin meningkat hingga mencapai 270 kasus kriminalitas pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah tindak pidana mengalami penurunan kembali menjadi 118, namun meningkat pada tahun 2021 menjadi 132 kasus yang didominasi di Kecamatan Bissappu dan Bantaeng. Kenaikan ini tentu harus menjadi perhatian bagi kepolisian resort setempat dan juga pemerintah daerah dalam membina dan menyosialisasikan pentingnya kondusivitas wilayah bagi pembangunan daerah. 127



Grafik II.24
Jumlah Kasus Kriminalitas
Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022



Sumber Data : Polres Bantaeng, 2023

- Perizinan

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian.

Secara umum, terlihat adanya penurunan aktivitas perijinan usaha seperti kepengurusan SITU (Surat Izin Tempat Usaha), IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), maupun TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

Tabel II.37
Surat Izin Usaha Yang Keluar Tahun 2017-2021

Tahun	IMB	SITU	IUJK	SIUP	TDI	BBM	TDP	TDG
2017	283	411	23	356	47	-	253	17
2018	497	466	42	422	20	-	301	4
2019	507	193	30	241	12	-	33	4
2020	247	-	24	186	1	-	275	9
2021	573	-	14	108	11	-	1696	3

Sumber : Data PM dan PTSP Tahun 2022

Selain itu untuk meningkatkan jumlah investasi yang masuk kedalam Kabupaten Bantaeng, Telah dibuat beberapa Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha, yaitu:



1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Adapun Waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.38
Waktu untuk Memproses Perizinan
di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021

No.	Nama Izin	Waktu
1.	Izin Operasional Pendidikan Non Farmal	5 Hari 1 Jam 30 Menit
2.	Izin Operasional Pendidikan SD,SMP dan Sederajat	2 Hari 1 Jam 28 Menit
3.	Izin Agreditasi Sekoah SD,SMP dan Sederajat	-
4.	Izin Operasional Pendidikan Non Farmal	5 Hari 1 Jam 30 Menit
5.	Izin Operasional Pendidikan SD,SMP dan Sederajat	2 Hari 1 Jam 28 Menit
6.	Izin Praktek Tenaga Kesehatan	-
	a. Prakter Dokter	3 Hari 1 Jam 50 Menit
	b. Praktek Bidang	3 Hari 1 Jam 20 Menit
	c. Praktek Perawat	3 Hari 1 Jam
7.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Layanan Kesehatan.	3 Hri 1 Jam 50 Menit
8.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D	5 Hari 1 Jam 29 Menit
9.	Izin Klinik	5 Hari 2 Jam
10.	Izin Apotek	3 Hari 2 Jam 25 Menit
11.	Izin Toko Obat	2 Hari 1 Jam 20 Menit
12.	Izin Toko Alat Kesehatan	4 Hari 1 Jam 10 Menit
13.	Izin Optikal	3 Hari 1 Jam 55 Menit
14.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT)	-
15.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	1 Hari 1 Jam 40 Menit
16.	Laik Higene Sanitasi	2 Hari 1 Jam 30 Menit
17.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	1 Hari 1 Jam 40 Menit
18.	Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	1 Hari 1 Jam 40 Menit
19.	Izin Produksi Makanan dan Minuman	3 Hari 1 Jam 30 Menit
20.	Izin Prinsip Daerah	4 Jam
21.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2 Hari 1 Jam 50 Menit
22.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	-
23.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)	4 Hari 1 Jam 30 Menit
24.	Izin Penggunaan pemanfaatan tanah	2 Jam 30 Menit
25.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2 Hari 1 Jam 50 Menit
26.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Hari 1 Jam 50 Menit
27.	Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah	2 Hari 2 Jam



No.	Nama Izin	Waktu
28.	Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing)	1 Hari 1 Jam 10 Menit
29.	Izin Lokasi	2 hari 1 jam 50 Menit
30.	Izin Membuka Tanah	-
31.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	2 jam 30 menit
32.	Izin Lingkungan	4 Jam
33.	Izin Penyimpanan Sementara LB3 (Limbah Bahan Berbahaya Beracun)	4 Jam
34.	Izin Trayek Lokal	1 hari 1 Jam 45 Menit
35.	Analisa Dampak Lalu Lintas	3 hari 1 Jam 30 Menit
36.	Izin Usaha Simpan Pinjam	2 Hari 2 jam
37.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	55 Menit
38.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	2 hari 1 jam 50 Menit
39.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 Hari 2 Jam
40.	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (IPPR)	2 hari 2 jam
41.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	2 Hari 2 Jam
32.	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	2 Hari 2 Jam
43.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	5 Hari 1 jam 50 Menit
44.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	55 Menit
45.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	2 Hari 1 Jam 50 Menit
46.	Izin Usaha Perikanan (IUP) Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Hari 2 Jam
47.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	3 Hari 1 Jam 30 Menit
48.	Izin Usaha Pertanian	2 Hari 2 Jam
49.	Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Pakan	2 Hari 2 Jam
50.	Izin Usaha Tempat Pemeliharaan Hewan	2 Hari 2 Jam
51.	Izin Rumah Sakit Hewan	2 Hari 2 Jam
52.	Izin Pasar Hewan	2 Hari 2 Jam
53.	Izin Rumah Potong Hewan	2 Hari 2 Jam
54.	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	2 Hari 2 Jam
55.	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	2 Hari 2 Jam 10 Menit
56.	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah	2 Hari 2 Jam
57.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	2 Hari 2 Jam
58.	Izin Pengembangan Kawasan Industri (IPKI)	2 Hari 2 Jam
59.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-
60.	Izin Penelitian	4 Jam
61.	Persetujuan Pembuatan Andalin	-
62.	Pendaftaran Izin	10 Menit
63.	Pencetakan Izin	10 Menit
64.	Penomoran Izin	5 Menit

Sumber : Dinas PM dan PTSP tahun 2022

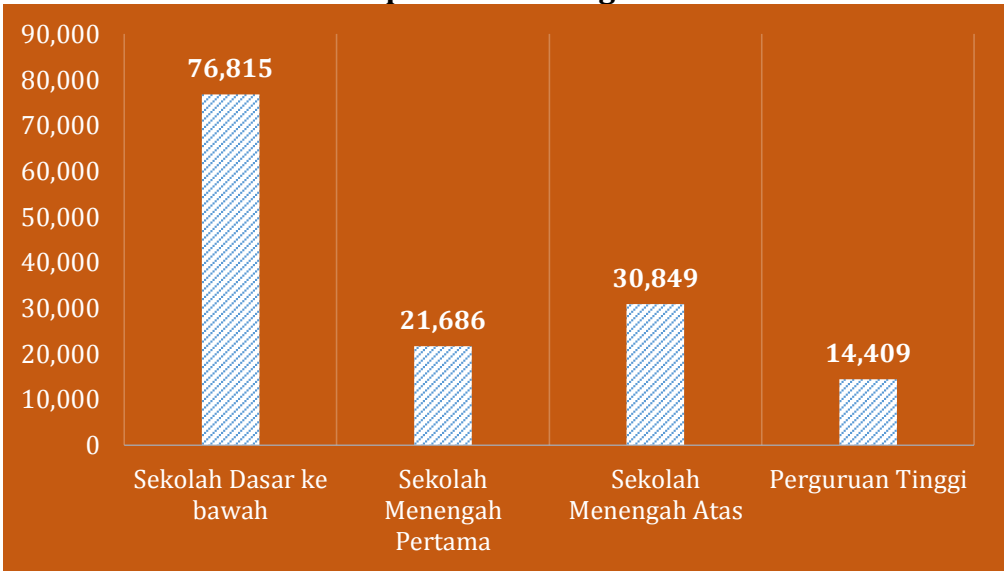
d. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan usia kerja yang merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja baik sebagai angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa kualitas penduduk usia kerjadi Kabupaten Bantaeng sampai dengan tahun 2022 ini didominasi penduduk dengan lulusan



SD ke bawah (baik tidak sekolah maupun tidak lulus SD) yaitu berjumlah 76.815 Orang. Selain itu, penduduk yang sudah memiliki kualitas cukup memadai adalah penduduk yang memiliki pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi yakni sebanyak 14.409 orang. Jika melihat kondisi ini, maka perlu dilakukan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan kerja sebagai modal dalam persaingan pasar kerja.

Grafik II.25
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+ Tahun) menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2022



Sumber : BPS Kabupaten Bantaeng, Tahun 2023

2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Berikut indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan sebelumnya berdasarkan aspek pembangunan daerah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.39
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2022

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
I	ASPEK KESEJAHTERAAN					
A	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI, SOSIAL SERTA BUDAYA DAN OLAHRAGA					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	10,75	0,52	8,86	15,45
2	PDRB Per Kapita	Juta	46,8	47,59	50,94	61
3	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	9,03	8,95	9,41	9,07
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,98	4,27	4,07	2,72
5	Laju Inflasi (pendekatan dengan	%	2,25	2,3	0,7	4,12



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
	Bulukumba)					
6	Indeks Gini	%	0,338	0,344	0,332	0,320
7	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	%	68,3	68,73	68,99	69,69
8	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	56	90,5	90,8	
9	Penanganan daerah rawan pangan	Indeks	8	8	8	
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71,78	78,85*	70,71	73,14
11	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,02	95,73	95,93	95,73
12	Angka melek huruf	%	85,91	86,21	84,82	86,34
13	Angka rata-rata lama sekolah	%	6,48	6,72	6,77	6,82
14	Harapan lama Sekolah	Tahun	12,03	12,04	12,05	12,30
15	Indeks Pendidikan	Indeks	55,02	55,84	56,4	56,87
16	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,42	70,54	70,6	70,88
17	Indeks Kesehatan	Indeks	77,57	77,75	77,85	78,28
18	Prevalensi balita gizi kurang	%	3,4	3,8	3,3	
19	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	28,5	28,37	27,08	23,72
20	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	3,4	3,63	3,5	3,21
21	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	%	7,7	6,91	9,76	18,47
22	Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik	%	0,1	0,11	0,18	0,34
23	Kontribusi Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan	%	0,1	0,07	0,06	0,06
24	Kontribusi Sektor Konstruksi	%	17,8	17,79	18,3	16,83
25	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	%	15	14,65	14,25	13,52
26	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan	%	1,1	1,05	1,06	1,08
27	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,9	0,9	0,85	0,83
28	Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi	%	2,2	2,49	2,37	2,13
29	Kontribusi Sektor Jasa Keuangan	%	2,2	2,41	2,34	2,11
30	Kontribusi Sektor Real Estate	%	4,6	4,85	4,54	4,06
31	Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan	%	0,2	0,15	0,15	0,14
32	Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	7	6,93	6,27	5,2
33	Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan	%	5	5,2	4,84	4,24
34	Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan	%	2,5	3	2,97	2,69
35	Kontribusi Sektor Jasa lainnya	%	1,6	1,49	1,48	1,38
36	Opini BPK terhadap hasil laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
37	PDRB ADHB	milyar	8.781,04	8.970,48	10.081,40	12.164,14
38	PDRB ADHK	milyar	5.621,52	5.650,54	6.151,45	7.102,04
39	Paritas daya beli/ Pengeluaran Perkapita	Juta	11.592	11.632	11.829	12.133
40	Jumlah Penduduk	Jiwa	187.626	196.716	197.886	199.399
41	Pertumbuhan Penduduk	%	0,54	4,84	0,59	0,76
42	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Event	9	0		
43	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	4	4		
44	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,65	84	82,13	
45	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	64,32	65,24*		
46	Produksi sektor pertanian	Ton	91.702,0	73.405	69.880,00	70.388



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR					
1	PENDIDIKAN					
1	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%	83,57	80,59	83,99	92,39
2	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	63,32		63,96	
3	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	%	42,64		49,1	
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97,24	102,35	102,35	115,35
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	95,39	98,43	99,98	99,98
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	96,45	112,48	112,48	79,07
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90,43	93,99	97,06	71,52
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	114,72		110,36	
9	Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	na		96,37	
10	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	%	na		46,19	
11	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,43		0,07	
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	92,9		96,57	
13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,52		0,3	
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,69		92,73	
15	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	96,55	94,91	97,17	
16	Jumlah kurikulum yang dikembangkan	Kurikulum	0,9	0,9*	1	
17	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan memenuhi standar	%	na	75*	96,37	
2	KESEHATAN					
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	1	5	2	2,4
2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	100	100	100	
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Rasio	2	0	0	2,4
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Rasio	6	15	5	
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Rasio	2	3	2	2,28
6	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	1,81	1,94	2,44	
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0.2	0.2	0.2	
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0.004	0.004	0.009	
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,0005	0,0003	0,0003	
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,002	0,002	0,006	
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	98	100	100	
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	73,1	92,5	92,5	



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100,6	101	100	
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rasio	0	0	0	
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100	
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	279	259	249	
20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	0	0	0	
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	90	89	
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	100	100	100	
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	
24	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	
25	Angka kejadian Malaria	Kasus	-	-	-	
26	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	
27	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	
28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	100	100	100	
29	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	
30	Cakupan kunjungan bayi	%	99,3	99,3	100	
31	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	
32	Cakupan pembantu puskesmas	%	100	100	100	
33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	92,7	94,1	100	
34	Cakupan pelayanan nifas	%	96,9	102	100	
35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	
36	Cakupan pelayanan anak balita	%	63,7	78,1	100	
37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	
38	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	56,6	75,5	40,1	
39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	
40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	
41	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	
42	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Kesehatan	%	100	100	100	
43	Cakupan Sarana dan Prasarana yang Refresentatif	%	90	90	95	
44	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Saranan Industri Rumah Tangga	%	90	90	100	
45	Prevalensi Penyakit Menular Dapat di Tekan	%	95	100	100	



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
46	Cakupan Saranan Pelayanan Memenuhi Standar	%	95	95	100	
47	Cakupan Saranan Pelayanan kesehatan yang Refresentatif	%	90	90	100	
48	Cakupan Obat dan Alkes terpenuhi di Sarana Pelayanan	%	90	90	100	
49	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui yang Terlayani	%	100	100	100	
50	Tercapainya prosentase sarana rumah sakit yang memadai	%	100	100	100	
51	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	%	81	85	90	
52	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM	%	100	100	100	
53	Persentase pemenuhan Farmasi, Alkes Dan Mamin	%	81	85	90	
54	Persentase keberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	82	85	90	
	RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu					
1	Cakupan Obat dan Alkes terpenuhi di Sarana Pelayanan	%		90%	100%	
2	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui yang Terlayani	%			100%	
3	Tercapainya prosentase sarana rumah sakit yang memadai	%	95,08%	97,97%	99,81%	
4	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	%	95,50%	99,80%	99,40%	
5	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM	%	99,85%	81,92%	93,50%	
6	Persentase pemenuhan Farmasi, Alkes Dan Mamin	%	81	85	100	
	RSUD BANYORANG					
1	Cakupan Obat dan Alkes Terpenuhi Di sarana Pelayanan	%				
	Obat Vaksin		-	-	18,72%	
	Alkes		-	-	97,45%	
2	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil Dan Ibu Menyusui Yang Terlayani	%	-	-	72%	
3	Tercapainya Presentase sarana rumah sakit yang memadai	%	-	-	73,47%	
4	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan & upaya kesehaatan masyarakat	%	-	-	88,97%	
5	Persentase peningkatan kapasitas SDM	%	-	-	26,02%	
6	Persentase pemenuhan Farmasi, Alkes dan Mamin	%	-	-	55,02	
3	PEKERJAAN UMUM					
1	Persentase panjang jalan kondisi mantab (%)	%	64,32	76	77	
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	92	92,79	93,41	
3	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	85	86	87	
4	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	74	74,5	76	



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	60	62	63	
6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	50	60	62	
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	74	74,5	67	
8	berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Ha)	Ha				
9	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%			76	
10	Prosentase Tersedianya 4 Layananan Data Infrastruktur	%	60	70	75	
11	Prosentase Peningkatan Akuntabilitas kinerja	%	100	100		
12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak Jaringan Perpipaan (JP)	%	Na	85*	40	
13	Persentase rumah tangga yang menempati huniandengan akses air minum laya Jaringan Bukan Perpipaan (JBP)	%	Na	85*	44	
14	Prosentase rumah tangga yang memiliki layanan SPAL Domestik	%	Na	85*	77	
15	Prosentase luas genangan yang tertangani	%	Na	85*	Na	
16	Prosentase Pengurangan Kawasan Kumuh	%	Na	85*	85	
17	Prosentase Bangunan Gedung Yang Memiliki IMB	%	Na	85*	Na	
18	Prosentase Bangunan Gedung Yang Memiliki SLF	%	Na	85*	Na	
19	Rasio Panjang Jalan Kabupaten yang mendukung kawasan Strategis	%	Na	100*	100	
20	Cakupan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Irigasi	%	Na	90*	Na	
	PENATAAN RUANG					
21	Persentase luas RTH publik per luas wilayah kota	%			30	
22	Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	%			85	
23	Persentase bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB	%			100	
24	Prosentase bangunan ber-IMB	%				
25	Persentase Rencana Tata Ruang yang Di Tetapkan	%	90	100*		
4	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,142	0,143	0,145	0,145
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,993	0,997	0,912	0,916
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	60,64	61,40	62,50	62,84
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	4,33	6,16	8,82	10,60
5	Persentase pemukiman yang tertata	%	99,35	99,68	91,18	91,64
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,04	0,02	0,03	0,01
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	64,08	82,52	16,90	83,30
8	Proporsi rumah tangga kumuh	%	5,09	10,49	9,51	9,42



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
	perkotaan					
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	39,39	39,39	45,45	45,45
10	Jumlah wilayah perumahan/pemukiman sehat	%			33	
11	Permukiman yang tertata	%			2158,6	
12	Persentase pemenuhan Perumahan	%		87*	2,44	
13	Persentase pengelolaan kawasan Permukiman	%		87*		
14	Persentase pengelolaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	%		87*	6,44	
15	Persentase pemenuhan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	%		87*		
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Org/RT	1,04	1,04	1,04	
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan	%	90	91,67	97,2	100%
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	83,34	83,34	83,34	83,34%
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	60,79	78,38	90,74	90.74
5	Persentase Penegakan PERDA	%	92,5	99,95	97,12	100%
6	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100%
7	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban	%	54	100	100	100%
8	Terlaksananya dukungan kelancaran pemilihan umum	%	0	100	100	100%
9	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100%
10	Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban	%	100	100	100	100%
11	Persentase anggota linmas yang dapat diberdayakan untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	%	61		80,23	0
12	Persentase kejadian gangguan keamanan Pemilu yang tertangani oleh Linmas	%	0	0	0	0
13	Persentase bencana kebakaran yang tertangani	%	100	100	100	100%
14	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, kententraman, dan Keindahan)	%	90	91,67	97,2	100%
15	Indeks Resiko Bencana	Indeks		102,54*	102,2	
16	Persentase bencana tertanggulangi	%				
17	Persentase bidang dalam SKPD yang terlayani administrasi perkantornya	%	beda permendagri	60*	60	60
18	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	beda permendagri	60*	60	60
19	Persentase bencana kebakaran, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	beda permendagri	60*	60	60
6	SOSIAL					



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Fasilitas umum yang ramah divabel	%	18	48	65	88.50
2	Jumlah Divabel yang menerima pelayanan	%	17	41	66	90.50
3	Jumlah anak terlantar yang di rehabilitasi	%	24	48	65	85.50
4	Jumlah Lajut Usia terlantar yang direhabilitasi	%	20	40	60	80.00
5	Jumlah gelandangan dan pengemis yang di rehabilitasi	%	18	41	63	85.50
6	Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi	%	18	41	64	87.00
7	Jumlah keluarga MBR yang ditingkatkan kualitas SDMnya	%	18	41	64	87.00
8	Jumlah fakir miskin yang di tingkatkan kesejahteraannya	%	23	47	64	84.50
9	Peningkatan Kualitas pemeliharaan fasilitas Taman Makam Pahlawan, Peningkatan Kualitas Peringatan Hari-hari besar kepahlawanan, Restorasi nilai-nilai kepahlawanan	%	18	41	64	87.00
10	Prosentase Jaminan Sosial Keluarga	%	17	42	67	92.00
11	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	18	48	66	90.00
12	Persentase rehabilitasi dan pembinaan sosial pada anak	%	24	48	66	87.00
13	Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia	%	20	40	60	80.00
14	Persentase pembinaan dan rehabilitas korban sosial	%	18	40	62	84.00
15	Cakupan perlindungan korban bencana alam	%	18	41	64	87.00
16	Cakupan Ketersediaan rambu evakuasi dan papan informasi publik diwilayah berisiko bencana	-	3	10	15	21.00
17	Prosentase perlindungan dan jaminan sosial	%			60	80.00
18	Prosentase pemberdayaan sosial	%			60	80.00
19	Prosentase pelayanan rehabilitasi sosial	%			60	80.00
20	Prosentase penagnan korban bencana	%			60	80.00
21	Prosentase Kondisi TMP Baik	%			60	80.00
III	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR					
1	TENAGA KERJA					
1	Rasio angkatan kerja lulusan S1/S2/S3	Rasio	8.51%	7.32%	9.27%	3.70%
2	Pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi	%	38.30%	29.70%	28.14%	
3	Presentase Kegiatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	0	100%	50	
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	%	93.30%	48.67%	5.89%	
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	95,31	95,78	95,76	95,35
2	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	80,27	80,26	81,20	81,21



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
3	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)	Tingkat	Madya	Madya	Madya	Madya
4	persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	(27,7%) 10	(27,7%) 10	Na	
5	jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan PUG	Desa/Kel	67	67	67	
6	ratio perempuan & anak korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,018	0,018	na	
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	Kasus	28	45	61	
8	Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan	Layanan	9	22	25	
9	Cakupan PD yang mengelola Sistem data gender dan anak	%	92,7	97	25	
10	Cakupan lembaga yang menyediakan layanan pemenuhan hak anak	%	5	20	0	
11	Cakupan lembaga yang melakukan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	%	72,9	76	0	
3	PANGAN					
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	56	90,5	90,8	
2	Konsumsi Energi (Kkal)	Kkal	1815	1822,3	1812,2	
3	Sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan (sertifikat)	Sertifikat	1	14	2	
4	Kategori Pengujian	Jenis	2	2	2	
5	produk olahan pangan lokal	Produk	16	17	18	
6	Cadangan beras pemerintah kabupaten	Ton	20	20	0	
7	Analisis SKPG	Kecamatan	1	8	8	
8	Rasio Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Ton	56,263	57.388		
9	Tersedianya Pangan lokal	Komoditi	7	7	7	
10	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan	Kecamatan	8	8	8	
11	Stabilitas Harga pangan strategis (CV = Koefisien Keragaman)	Jumlah	CV 13,57	CV 12,53	CV 23,68	
12	Terwujudnya swasembada dan stabilitas pangan di Kabupaten Bantaeng (3 ton/ha)	Ton/Ha	na		1	
13	Jumlah Desa yang Masuk dalam Kategori Mandiri Pangan	Desa	0	0	1	
14	Terlaksananya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	%	99	100	100	
15	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan	8	8	8	
16	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	penanganan	10	12	12	
4	PERTANAHAN					
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	40,99	46,4*	58,11	
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	50*		
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100*	100	
4	Persentase sengketa tanah diselesaikan	%	72	76	42,9	
5	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah dipenuhi	%	72	76	20	



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
6	Persentase tanah kosong dikelola	%	72	76	0%	
7	Persentase tanah ditata sesuai penggunaan	%	72	76	0%	
5	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	na		Tidak	
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	na		Tidak	
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Dokumen	na		Ya	
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Nilai	76,35		60	
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	µg/m3	94,72		94,38	
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Nilai	73,47		32,55	
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%			30	
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	-	na		0	
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	Ada		Ada	
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	na		100	
11	Persentase kinerja pengelolaan persampahan	%	20,72		56,4	
12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	7,3		20,18	
13	Persentase cakupan area pelayanan	%	3,54		3,9	
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	20,72		36,22	
15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	na		75,22	
16	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	80,71		67,91	
17	Status pencemaran air sungai	Status	76,35		Cemar Ringan	
18	Status pencemaran udara	Status	94,72		Memenuhi Baku Mutu	
19	Tutupan Lahan	%	73,47		32,55	
20	Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	Juta Ton	0,86	0,95*		
21	Terintegrasinya RPPL dan KLHS dalam Rencana Pembangunan	%	90	100*	na	
22	Persentase kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditangani	%	90	100	100	
23	Persentase RTH yang dikelola	%	11,48	12,25*	12,25	
24	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	%	90	100	100	
25	Proposrsi Limbah B3 yang diolah sesuai Prosedur	%	90	100	85	



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
26	Persentase MHA terkait PPLH yang diakui	%	90	100	na	
27	Persentase Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan	%	90	100	na	
28	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	90	100	100	
29	Persentase kinerja pengelolaan persampahan Kab. Bantaeng	%	19,35	20*	56,4	
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	93,32	99,42	100	
2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	76,49	93,86	98,56	
3	Rasio pasangan berakte nikah	%	12,8	14,18	15,2	
4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Dokumen	tersedia	tersedia*	tersedia	
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	KTP	Sudah	Sudah	Sudah	
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	93,32	99,42	100	
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	76,49	93,86	98,56	
8	% Terwujudnya Tertib Administrasi Pendaftaran penduduk	%	90	100	100	
9	% Terwujudnya Tertib Administrasi pencatatan sipil	%	90	100	100	
10	% Tersedianya Informasi Kependudukan yang lengkap, Akurat dan Up to date untuk Kepentingan Publik dan Pembangunan	%	90	100	100	
11	Persentase profil kependudukan dikelola	%	90	100	100	
7	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,54	0,53	0,51	0,59
2	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,4	2,03	1,75	
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100	100	100	
4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	74,63	72,77	72,61	
5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	41,7	50,31	36,14	
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,8	13,93	13,97	
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	6,53	8,6	11,22	
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	83,89	60,86	56,76	
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	87	68,78	60,72	
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	74,36	60,54	57,82	
11	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	31	31	31	



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
12	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	19	20	20	
13	Penurunan Angka Kelahiran	%	5	5*	0,28	
14	Penekanan Angka Kelahiran	%	5	5*	0,95	
15	Prosentase partisipasi masyarakat dalam ketahanan keluarga	%	81	90*	22,25	
8	PERHUBUNGAN					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	642.8	387.483	262.9	
2	Rasio izin trayek	Rasio	0	0,41	0,48	0,45
3	Jumlah Uji KIR angkutan umum	Trayek	2,808	1,796	2,054	1.453
4	Jumlah Pelabuhan Laut	Pelabuhan	1	1	1	1
5	Jumlah Terminal Bus Tipe B	Terminal	1	1	1	1
	Jumlah Terminal Bus Tipe C	Terminal	3	3	3	3
6	Persentase layanan angkutan darat	%	0,053	0,089	0,131	
7	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	100	86	119	
8	Pemasangan rambu – rambu	Jumlah	0	187	189	189
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,02	0,018	17,43	17,43
10	Jumlah orang terangkut angkutan umum	Orang	642800	387483	262900	315.360
11	Jumlah barang terangkut angkutan umum	Kg	3242000	3298160	3210320	3.204.00 0
12	Jumlah orang melalui dermaga :	Orang	201	544	445	
13	Jumlah barang melalui dermaga :	Kg	285110	801550	308000	
14	Panjang jalan kondisi baik (Km)	Km	602159	602159	602159	
15	Persentase Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Terpasang dan Dalam Kondisi Baik	%	40%	60%	72,71%	
16	Persentase Kelayakan Terminal Angkutan	%	40%	60%	80%	
9	KOMUNIKASI DAN INFORMASI					
1	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Telah Terkoneksi Dengan Jaringan Internet	Spot	50/39	40	41	
2	Penilaian Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik oleh PPID Pusat	Nilai	Peringkat 5 Besar tingkat Prov.	Peringkat 5 Besar Tk.Prov	Peringkat 1 Kategori Cukup Informatif Tk.Prov Sulsel	
3	Jumlah Ruang Publik dan OPD yang terkoneksi dengan jaringan internet	Lokasi	21	49	48	
4	Persentase meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Masyarakat	%	86	95		
10	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Persentase koperasi aktif	%			78,00%	
2	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	90,00	100	16 (11%)	
3	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	90,00	100	43 (30%)	
4	Persentase Koperasi Dalam Keadaan Sehat	%	90,00	100	43 (30%)	
5	Persentase Pendidikan dan Latihan bagi Koperasi	%	90,00	100	60%	



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
6	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Koperasi	%	86,00	95,00	43 (30%)	
7	Persentase Pemberdayaan UMKM	%	86,00	95,00	110 UKM (100%)	
8	Persentase Pengembangan UMKM	%	90,00	100	126 UKM (100%)	
11	PENANAMAN MODAL					
1	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek		10	5	
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp		2 Trilyun	905.185.668. 130	
3	Rasio daya serap tenaga kerja	%		10*	27% (Kenaikan)	
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar		700 Milyar	67% (Kenaikan)	
5	Nilai Investasi	Milyar		2,75*	905.185.668. 130	1,7 T
6	Jumlah fasilitasi kerjasama investasi antar pemerintah	Kesepakatan		1*	4	
7	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Perusahaan		15*	19	
8	Kajian pemetaan potensi sektor prioritas	Dokumen		2*	-	
9	jumlah izin yang diterbitkan sesuai SOP	Izin		6000*	3059	
10	LPE PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	%		1,00*	-	
11	Kajian Pemetaan Potensi Sektor Prioritas, Profil Proyek yang siap Ditawarkan	%		80	-	
12	Jumlah Minat Investasi	%		80	82%	
13	jumlah izin yg diterbitkan sesuai SOP	%		80	100%	
14	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%		80	11%	
15	Cakupan Jumlah Izin yg diterbitkan	%		80	100%	
12	PEMUDA DAN OLAHRAGA					
1	Persentase wirausaha muda	%	na	10	45,00	
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	57	55	85	
3	Cakupan pembinaan atlet muda	%	618	310	315	
4	Jumlah atlet berprestasi	Orang	128	50	75	
5	Jumlah prestasi olahraga	Orang	71	55	90	
6	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelatihan kepemudaan setiap tahun	Kegiatan	2	6	12	
7	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	117	121	124	
8	Jumlah Prasarana olahraga masyarakat dan pendidikan	Bangunan	27	31	33	
9	% organisasi kepemudaan aktif	%	72%	80*	80%	
10	Ratio prestasi olahraga pendidikan, olahraga unggulan dan olahraga rekreasi yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional	%	72%	80*	80%	
11	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keprmuksaan	Kegiatan	0%	50*	50	
13	STATISTIK					
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Dokumen	Tersedia	Tersedia*	Tersedia	Tersedia
2	Buku "PDRB Kabupaten Bantaeng"	Dokumen	Tersedia	Tersedia*	Tersedia	Tersedia



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
3	Persentase tersedianya Data Statistik Daerah Yang Lengkap Dan Akurat	%	72%	80*	85%	
14	PERSANDIAN					
1	Jumlah berita sandi yang diamankan	Dokumen	965	540*	1325	
15	KEBUDAYAAN					
1	Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	%			94,74	
2	Nilai Sejarah dan Karya Budaya yang dilaktualisasikan ke dalam Masyarakat	%			100	
3	Cagar Budaya yang dilestarikan	%			100	
4	Persentase kebudayaan dikembangkan	%	72	80*	100	
5	Persentase kesenian tradisional dilestarikan	%	72	80*	100	
6	Persentase cagar budaya dikelola	%	72	80*	100	
7	Persentase museum dikelola	%	72	80*	100	
16	PERPUSTAKAAN					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	90	80	90	
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp	25	25.5	26	
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit	1	1	1	
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/ tahun	Org	8.697	9	9.8	
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	9.533	10.915		
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Org	1	1	1	
7	Terlaksananya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	75	80	85	
17	ARSIP					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	40	40	40	
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	4	4	4	
3	SKPD yang melakukan Pengelolaan Administrasi Kearsipan Yang Baik	%	6	6	6	
4	Jumlah Dokumen / Arsip Yang Bernilai Guna	%	136	136	491	
5	Sarana dan Prasana Kearsipan dalam Kondisi Baik	%	5	5	5	
6	Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan	%	32	32	32	
7	Bertambahnya Tenaga Kearsipan Yang Profesional	%	4	4	4	
8	Persentase arsip dikelola	%	75	80	40	
9	Persentase dokumen kearsipan diamankan	%	70	80	75	
10	Persentase izin penggunaan arsip tercatat	%	70	80	70	
	URUSAN PILIHAN					
1	PARIWISATA					
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	87.626	90.000*	70.687	
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	240	250*	193	
3	PAD sektor pariwisata	Juta Rp	765,81	612,65*	682,56	



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
4	Persentase Kegiatan pada Program Pengembangan Desitinasi Pariwisata	%	16,67	17*	8	
5	Persentase Kegiatan pada Program Kemitraan Pariwisata	%	11,11	20*	8	
6	Jumlah objek wisata yang berdaya saing	Objek	2,7	3*	3	
7	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	na	67731	96601	97412
8	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia / Kepariwisataaan	Kegiatan	4,5	5*	280	
9	Rata-rata Lama Kunjungan	Hari	3,12	1,27	1,45	1,75
2	PERTANIAN					
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	28,53	28,37	28,94	
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	2,91	2,93	2,32	
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	950	1140	1161	
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%			113,68	
5	Cakupan bina kelompok petani	-	950	1140	1161	
6	LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	4,54	5,24	2,84	
7	Meningkatnya Produktifitas komoditas pertanian/perkebunan di Kabupaten Bantaeng (55 Ku/ha)	Ku/Ha	55	54	53,16	
8	Terwujudnya ternak yang sehat dan bebas dari penyakit (90%)	%	90	91,24	92,25	
9	Meningkatnya Populasi Ternak di Kabupaten Bantaeng (20%)	%	30	32	33	
10	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Usaha Pertanian/Perkebunan yang berorientasi teknologi (10%)	%	25	30	25	
11	Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing SDM Penyuluh Pertanian/Perkebunan (80%)	%	75	82	85,25	
12	Meningkatnya Kemandirian dan Kapabilitas Petani (80%)	%	75,25	79,64	80,63	
13	Mengingkatnya Pangsa Pasar Produk Unggulan Pertanian/Perkebunan (30%)	%	28	34,25	39,71	
14	Meningkatnya jaringan pemasaran hasil produksi peternakan (30%)	%	28,32	34,25	39,71	
15	LPE subsektor pertanian tanaman pangan	%	0	1,01	1,18	
16	Produktivitas Pertanian Per Hektar/Tahun	%		78,62	79,68	
17	% Pembangunan Prasarana Pertanian	%		73,24	74,65	
18	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	%		68,45	69,36	
19	% Penurunan Kejadian dan Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular	%		78,36	79,84	
20	% Pengendalian Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Pertanian	%		77,93	78,64	
21	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	%		79,26	78,64	
22	Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	0%	56	56	
3	KEHUTANAN					



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Luas Kawasan Hutan	Ha	5787	5787	5.787	
2	Luas Hutan lindung	Ha	2731	2731	2.731	
3	Luas Hutan Produksi terbatas	Ha	996	996	996	
4	Luas Hutan Produksi biasa	Ha	2060	2060	2.06	
5	Luas Hutan rakyat	Ha				
6	Luas Hutan kota	Ha	7,6	7,6	7,6	
4	ENERGI DAN SDM					
1	Jumlah pelanggan pengguna listrik					
2	Rumah Tangga I	Pelanggan	46.631		52.185	
3	Bisnis (B)	Pelanggan	1.776		2.606	
4	Sosial (S)	Pelanggan	1.095		1.212	
5	Pemerintah (P)	Pelanggan	445		516	
6	Industri (I)	Pelanggan	13		18	
5	PERDAGANGAN					
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp				
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15	14,65	14,25	13,52
3	Pasar Tradisional	Unit			0	
4	Pasar Swalayan/ Supermarket/ Toserba	Unit			6	
5	Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	%		100	147 Rekomendasi(65%)	
6	Persentase Sarana Perdagangan dalam Kondisi Baik	%		85	86	
7	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%		85	12 Barang (85%)	
8	Pengembangan Ekspor	%		85	0%	
9	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	%		85	50 UTTP (6%)	
10	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	%		85	0%	
11	Laju pertumbuhan ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan speeda motor	%	10,7	-2,40	7,33	9,54
6	PERINDUSTRIAN					
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7,7	6,91	9,76	18,47
2	Persentase perencanaan dan Pembangunan Industri	%	77	85*	42.60%	
3	Persentase Izin Usaha Industri tercatat	%	77	85*	0,44%	
4	Persentase Informasi Industri Nasional	%	77	85*	0.20%	
5	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Industri Pengolahan	%	68,8	-9,50	43,76	122,89
7	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Produksi perikanan	Ton	83.195		86.719	
2	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	5.568,30		6.256,4	6.382,4
3	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	77.626,80		80.388	89.37
4	Konsumsi ikan	%			43,67	
5	Cakupan bina kelompok nelayan	%			44,04%	
6	Cakupan bina kelompok Pembudidaya	%			5,40%	
7	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton			2755,3	



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
8	Jumlah Kelompok nelayan yang terlatih dan bersertifikat, jumlah kelompok pelaku usaha perikanan berbadan hukum/ koperasi/ SKT	Poktan				
9	Jumlah pelaku usaha perikanan taat hukum	Orang			2026	
10	Jumlah kelompok pelaku usaha yang mampu bankable	Kelompok				
11	Tersedianya data base perikanan	Database			1	
12	jumlah produksi olahan konsumsi	%			75,11	
13	rata-rata pendapatan pembudidaya rumput laut	Rp				
14	LPE subsektor perikanan	%	7,18	5		
15	Jumlah kelompok pengawasan yang dibina (kelompok)	Kelompok	3,6	4		
	LAYANAN URUSAN PENUNJANG					
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada*	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada*	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada*	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada*	Ada	Ada
5	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat	1	1	1	1
6	Persentase Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	%	100%	100%	100%	100%
7	Rata -rata Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	%	98,52	94,04%	94,04%	94,04%
8	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B (61,72)	B	B*	B
9	Indeks Reformasi Birokrasi (penilaian mandiri)	Predikat	C	C	C*	C
10	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah tepat waktu	%	90	100	100	100
11	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program	%	90	100	100	100
12	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	90	100	100	100
2	KEUANGAN					
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP*	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	%			1,18	
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%			1,18	
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%			100	
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%			25,95	
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%			25,91	
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%				



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	-			0,05	
9	Penetapan APBD	-			Tepat Waktu	Tepat Waktu
10	Jumlah Kasus Korupsi	Kasus			0	
11	Meningkatnya rata-rata PAD setiap tahun	%		97	10,45	
12	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	%		90	88,66	
13	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		90	100	
14	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	%		90	89,18	
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tahun	1	1	1 Tahun	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%			7,80%	
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tructural	%			7,24%	
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	33	34	33 Orang	
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	146	680	474 Jabatan	
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1988	2020	2560 Orang	
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (penilaian mandiri)	Indeks	Terstandarisasi	Terstandarisasi	Terintegrasi dan Terukur	
8	Persentase aparatur yang di bina dan dikembangkan	%			90	
9	Persentase pegawai yang memiliki Sertifikat diklat peningkatan kompetensi	%			65,69%	
10	Persentase PNS yang mendapat melanjutkan pendidikan	%		90	6,59%	
11	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian daerah	%	81	85	90%	
12	Persentase sumber daya manusia yang telah mengikuti peningkatan komepetensi	%	81	85	78,06%	
4	PENGAWASAN					
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	96,27	96,25	97.67	
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0	0	
3	Persentase pengawasan	%		90*		
4	Persentase Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	%		90*		
5	Jumlah Temuan BPK	Kasus	15	9	17	
5	SEKRETARIAT DEWAN					
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	5	5	5	



No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	5	5	5	
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	5	5	5	
4	Jumlah rancangan perda yang ditetapkan bersama (Legislatif dan Eksekutif)	Perda	9	12	13	
5	Persentase Layanan Anggota DPRD	%				
6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Presentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	%	62,5	75	83,33	
2	Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	%			50%	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	908.573	1.043.060	954.57	993.386
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	na		427.088	
3	Jumlah kriminalitas	kasus	270	118	132	127

Tabel II.40
Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2022

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
a) Pendidikan					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	96,98%	80,59	92,39
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	116,24%	100,22	118,67
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	93,99%	99,39	84,18
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	22,26%	98,39	99,88
b) Kesehatan					
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	15%		0,16
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	1%		50
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	107,21%	100%	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	102,22%	100%	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	104,58%	100%	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	78,13%	100%	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	78,39%	100%	100



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	44,87%	65,30%	81,19
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	58,71%	100%	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100%	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	100%	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100%	100
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	51,83%	91,82%	91,82
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	41,21%	82,72%	82,71
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	9,11%	86%	86,85
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	90,53%	83,50%	84,64
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	69,17%	83%	67,632
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100%	100%	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	65%	76,25%	69,01
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	45%	90%	90,74
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100%	100%	100
d) Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	3,15%	77,17	0,00%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0%	0	0%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	24,98%	16,90	2,50%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%		37,50	37,07%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	36,38%	100	13,86%
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	91,67%	100,00%	100%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	36,36%	100,00%	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	0	132,084	202.482
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	49,334	189496
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	0	102	377
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100,00%	100,00%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	5.52 menit	9,96 menit
f) Sosial					
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator	%	100%	100,00%	100%



No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
	SPM)				
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100%	100,00%	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
a) Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0%	100%	100%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%	18,14%	28,14%	29,59%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	1597,72%	21,95%	62154,13 %
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	3,30%	60%	55%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	48,67%	82,02%	24,06%
g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	84%	59,95%	36,34%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,09%	0,053%	0,30%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	19,60%	0,026%	0,01%
h) Pangan					
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	508%	0	413,20%
i) Pertanahan					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100%	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100%	62,19	60
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100%	100	100
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0%	4,38	100
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0%	0	100
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	60%	100	100
j) Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	-	82,56	67,91	66,91
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	91,60%	95,86%	97,64%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0%	30%	99,95%
k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	perekaman KTP elektronik	%	99,37%	99,58%	97,77%
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	15,56%	38,98%	41,87%
3	kepemilikan akta kelahiran	%	94,63%	99,31%	99,00
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	16,22%	7	20,00%
l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	0%	0%	0%
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	66,66%	40%	50%
m) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		59,92	1,71	1,67
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	86%	72,61	70,57
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet	%		13,97	16,82



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
	need)				
	n) Perhubungan				
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	-	178	178,75	178,75
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	-	33,69%	0,65%	0,65
	o) Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	84%	82%	79
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100%	100%	100
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	0%	100%	100
	p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	30,81%	30%	31%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,42%	1,54%	1,00%
	q) Penanaman Modal				
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	4,90%	22,6%	89,10%
	r) Kepemudaan dan Olahraga				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,26%		14,38
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,37%		0,88
3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	17 medali		3
	s) Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	100
	t) Persandian				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	4,10%	81,80%	87
	u) Kebudayaan				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	42,68%	100	52,44
	v) Perpustakaan				
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	-	tdk ada survey	90.000	92.000
2	Indeks Pcmbangunan Literasi Masyarakat	-	0%	85	85
	w) Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	442	405	450
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-		Tidak Dilaksan akan	Tidak Dilaksana kan
	Urusan Pilihan				
	a) Kelautan dan Perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	92,536 ton	92.835,43	101,17
	b) Pariwisata				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-1%	600%	-78,57
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-22,70%	182,96%	35,15
3	Tingkat hunian akomodasi	%	9123,71%	11,03%	32549
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	%	0,80%	0,85%	83,24
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%		70,40%	1,66
	c) Pertanian				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5784,78%	5,817%	586,5324



No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
					501
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0,33%	0,44%	4,7945205
d) Kehutanan					
e) Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0%	0	100
f) Perdagangan					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	95,02%	78%	7,0%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	30,84%	71%	23,00%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	1,30%	8%	9%
g) Perindustrian					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	0,17%	30,11%	6,84%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0%	0%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	100,00%	25%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0%	0%	0%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	0%	0%	0%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-		Tersedia	Tersedia
h) Transmigrasi					
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
a) Perencanaan dan Keuangan					
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	34,39%	12%	30,4671088
2	Rasio PAD	%	1.822.990.24%	12%	17,3508879
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	level 3	level 3	level 3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	level 2	level 3	level 3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	83,78%	65%	71,6962011
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0%	0%	0%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	6,53%	0,14%	9,45%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100,01%	26%	10,906%
c) Kepegawaian					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	329%	274,06%	329,48%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	ASN	5,33%	8,31%	21,74%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	98,13%	30,86%	34,67%
d) Manajemen Keuangan					
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	121,77%	86%	64,6358676
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%		66%	52,96540



No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
					12
3	Manajemen Aset	-	ya	ya	100
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0,12%	1,20%	1,169383
e) Transparansi dan Partisipasi Publik					
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	102,15%	100%	72,731685
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	83,33%	100%	100

2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya yang menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (outcome). Indikator kinerja yang dimaksud adalah variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023. Selanjutnya, indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Evaluasi RKPD 2022) Berikut tabel rinci yang merupakan hasil evaluasi pembangunan pada tahun sebelumnya.



Tabel II.41
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR BATIN BERORIENTASI PADA KEMAJUAN, Keadilan, Kelestarian dan Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya Lokal							
Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Status Capaian
MISI 1. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS							
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pembangunan manusia		IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	-	69,56	69,69	100,00	Sangat Tinggi
Sasaran 1	Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	57	56,87	99,77	Sangat Tinggi
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas perempuan dalam pembangunan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	81,06	81,51	100,00	Sangat Tinggi
MISI 2. MENINGKATKAN AKSELERASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA							
Tujuan 2 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	8,16	9,07	88,85	Tinggi
Sasaran 3	Menguatnya struktur ekonomi melalui peningkatan Wirausaha Baru	Tingkat Pengangguran	%	4,16	2,72	100,00	Sangat Tinggi
Sasaran 4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita	Juta Rp per Kapita	49,66	61	100,00	Sangat Tinggi
MISI 3. MENINGKATKAN AKSES, PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA							
Tujuan 3 Meningkatkan Pembangunan Kesehatan Wilayah		Indeks Kesehatan	Angka	78,08	78,28	100,00	Sangat Tinggi
Sasaran 5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Angka	70,75	70,88	100,00	Sangat Tinggi
MISI 4. MENGOPTIMALKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERBASIS KELESTARIAN LINGKUNGAN							
Tujuan 4 Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur wilayah		Gini Rasio	Angka	0,33	0,32	96,97	Sangat Tinggi
Sasaran 6	Meningkatnya layanan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	67,09	72,99	100,00	Sangat Tinggi
Sasaran 7	Meningkatnya pembangunan yang berbasis kelestarian lingkungan	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka	74,56	66,91	89,73	Tinggi
Sasaran 8	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	Angka	100,85	105,96	100,00	Sangat Tinggi
MISI 5. MENGOPTIMALKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN							
Tujuan 5 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,74-6,32	15,45	100,00	Sangat Tinggi



VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR BATIN BERORIENTASI PADA KEMAJUAN, Keadilan, Kelestarian dan Keunggulan berbasis Agama dan Budaya Lokal								
Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Status Capaian
	Sasaran 9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	LPE pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	%	3,5	0,35	10,00	Sangat Rendah
	Sasaran 10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	PAD Sektor Pariwisata (Juta Rp)	Juta Rp.	804,1	2.919	100,00	Sangat Tinggi
	Sasaran 11	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan	LPE PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	%	6	3,08	51,28	Rendah
MISI 6. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK								
	Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf	B (>60 – 70)	43,63 (C)	72,72	Sedang
	Sasaran 12	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf	BB (>70 – 80)	60,34 (B)	86,20	Tinggi
	Sasaran 13	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	(A/sangat Baik) 88,31 - 100,00	86,36	97,79	Sangat Tinggi

Tabel II.42
Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu dan Realisasi Anggaran 2022		
		Fisik	Keuangan	Predikat Kinerja Anggaran
1	RSUD Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu	100,0	99,2	Sangat Tinggi
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100,0	94,9	Sangat Tinggi
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,0	93,8	Sangat Tinggi
4	Dinas Sosial	100,0	91,2	Sangat Tinggi
5	RSUD Banyorang	100,0	91,2	Sangat Tinggi
6	Dinas Pertanian	99,9	83,0	Tinggi
7	Dinas Kesehatan	99,3	89,4	Tinggi



No	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu dan Realisasi Anggaran 2022		
		Fisik	Keuangan	Predikat Kinerja Anggaran
8	Dinas Pariwisata	98,5	98,5	Sangat Tinggi
9	Kecamatan Uluere	98,4	98,4	Sangat Tinggi
10	Dinas Ketahanan Pangan	98,1	95,2	Sangat Tinggi
11	Sekretariat DPRD	97,6	97,6	Sangat Tinggi
12	Inspektorat Daerah	97,0	97,0	Sangat Tinggi
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	97,0	95,2	Sangat Tinggi
14	Sekretariat Daerah	96,5	88,3	Tinggi
15	Dinas Lingkungan Hidup	96,4	91,0	Sangat Tinggi
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	95,9	88,6	Tinggi
17	Kecamatan Gantarangkeke	95,7	95,7	Sangat Tinggi
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	94,8	94,8	Sangat Tinggi
19	Badan Pengelola Keuangan Daerah	94,5	94,5	Sangat Tinggi
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	93,6	93,6	Sangat Tinggi
21	Kecamatan Eremerasa	92,7	92,7	Sangat Tinggi
22	Kecamatan Bissappu	92,7	91,5	Sangat Tinggi
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92,1	92,1	Sangat Tinggi
24	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,9	91,9	Sangat Tinggi
25	Kecamatan Sinoa	91,3	91,3	Sangat Tinggi
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	90,6	90,6	Sangat Tinggi
27	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	90,6	90,6	Sangat Tinggi
28	Kecamatan Bantaeng	90,0	90,0	Sangat Tinggi
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90,4	90,4	Sangat Tinggi
30	Kecamatan Tompobulu	90,3	90,3	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Pajukukang	88,8	88,8	Tinggi

No	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu dan Realisasi Anggaran 2022		
		Fisik	Keuangan	Predikat Kinerja Anggaran
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	88,8	88,8	Tinggi
33	Dinas Perikanan dan Kelautan	87,3	87,3	Tinggi
34	Dinas Perhubungan	87,2	87,2	Tinggi
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83,8	83,8	Tinggi
36	Dinas Pemuda dan Olahraga	82,1	82,1	Tinggi
37	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	79,3	79,3	Sedang
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76,4	64,1	Rendah
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67,5	67,5	Rendah

Tabel II.43
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Renstra)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah		Pagu dan Realisasi			
		Program	Kegiatan	Target Renstra OPD	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	8	19	Rp219.974.278.487,00	Rp202.585.398.299,00	92,095	Sangat Tinggi
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	10	31	Rp130.763.597.247,00	Rp116.893.837.690,00	89,393	Tinggi
3	RSUD Prof. Anwar Makkatutu	5	5	Rp107.495.778.214,00	Rp106.602.656.194,00	99,169	Sangat Tinggi
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	20	Rp147.751.339.506,00	Rp94.651.532.423,00	64,061	Rendah
4	Urusan Pemerintahan Bidang	8	19	Rp13.004.965.265,00	Rp11.519.102.965,00	88,575	Tinggi



No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah		Pagu dan Realisasi			
		Program	Kegiatan	Target Renstra OPD	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	25	Rp10.191.085.216,00	Rp9.670.601.792,00	94,893	Sangat Tinggi
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	13	Rp5.088.113.664,00	Rp4.642.138.579,00	91,235	Sangat Tinggi
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	6	14	Rp4.564.315.493,00	Rp3.620.384.341,00	79,319	Sedang
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	8	Rp7.067.242.766,00	Rp6.726.383.573,00	95,177	Sangat Tinggi
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	13	Rp5.655.440.430,00	Rp5.383.367.527,00	95,189	Sangat Tinggi
10	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	21	Rp16.480.369.180,00	Rp14.998.117.134,00	91,006	Sangat Tinggi
11	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	20	Rp4.532.073.203,00	Rp4.166.821.953,00	91,941	Sangat Tinggi
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	11	Rp7.959.005.527,00	Rp5.372.142.412,00	67,498	Rendah
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	13	Rp7.361.540.750,00	Rp6.653.690.531,00	90,384	Sangat Tinggi
14	Urusan Pemerintahan Bidang	2	13	Rp6.489.764.160,00	Rp5.661.535.364,00	87,238	Tinggi



No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah		Pagu dan Realisasi			
		Program	Kegiatan	Target Renstra OPD	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
	Perhubungan						
15	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	5	11	Rp7.382.519.747,00	Rp6.687.711.435,00	90,588	Sangat Tinggi
16	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	10	17	Rp8.660.954.340,00	Rp8.214.852.506,00	94,849	Sangat Tinggi
17	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	12	Rp10.143.914.013,00	Rp8.500.105.498,00	83,795	Tinggi
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4	12	Rp6.043.742.621,00	Rp4.962.656.822,00	82,112	Tinggi
19	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5	14	Rp2.509.481.528,00	Rp2.348.293.738,00	93,577	Sangat Tinggi
20	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	5	16	Rp6.431.056.633,00	Rp5.611.719.195,00	87,26	Tinggi
21	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4	11	Rp6.473.197.853,00	Rp6.375.096.902,00	98,485	Sangat Tinggi
22	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7	19	Rp35.894.392.857,80	Rp29.805.736.356,00	83,037	Tinggi
23	Sekretariat Daerah	3	19	Rp57.426.787.920,00	Rp50.679.203.768,00	88,25	Tinggi
24	Sekretariat DPRD	2	13	Rp28.789.378.896,00	Rp28.086.762.431,00	97,559	Sangat Tinggi
25	Perencanaan	4	17	Rp7.616.456.700,00	Rp7.143.882.929,00	93,795	Sangat Tinggi
26	Keuangan	4	13	Rp123.118.617.968,00	Rp116.381.676.554,00	94,528	Sangat Tinggi
27	Kepegawaian	2	10	Rp5.046.796.910,00	Rp4.482.020.281,00	88,809	Tinggi



No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah		Pagu dan Realisasi			
		Program	Kegiatan	Target Renstra OPD	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
28	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	Rp5.046.796.910,00	Rp4.482.020.281,00	88,809	Tinggi
29	Inspektorat Daerah	3	11	Rp6.057.469.250,00	Rp5.877.267.054,00	97,025	Sangat Tinggi
30	Kecamatan Bantaeng	4	10	Rp9.904.736.718,00	Rp8.918.203.820,00	90,04	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Bissappu	5	11	Rp9.016.117.236,00	Rp8.245.446.839,00	91,452	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Tompobulu	5	11	Rp5.448.571.050,00	Rp4.921.759.552,00	90,331	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Pajukukang	5	11	Rp2.025.419.170,00	Rp1.799.254.853,00	88,834	Tinggi
34	Kecamatan Eremerasa	4	8	Rp2.532.974.400,00	Rp2.349.278.913,00	92,748	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Uluere	5	10	Rp1.559.680.459,00	Rp1.535.309.017,00	98,437	Sangat Tinggi
36	Kecamatan Sinoa	5	9	Rp1.361.218.690,00	Rp1.243.324.810,00	91,339	Sangat Tinggi
37	Kecamatan Gantarangkeke	4	9	Rp3.736.877.425,00	Rp3.578.042.959,00	95,75	Sangat Tinggi
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	Rp3.293.134.258,00	Rp2.983.650.581,00	90,602	Sangat Tinggi



Tabel II.44
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Evaluasi RKPD 2022)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 (masuk lampiran)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja RPJMD pada 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d. RKPD 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6 X 100%		9=5+7		10=9/4 X 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

2.4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pada dasarnya, target dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal adalah 100 persen di setiap jenis pelayanan yang dilaksanakan. Pada sebagian besar jenis pelayanan sudah dilaksanakan hingga memiliki capaian Sangat Tinggi, namun masih terdapat pula sedikit indikator dengan capaian Sangat Rendah. Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, khususnya pelayanan minimal yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bantaeng disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.45
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2022 (Permendagri No. 59/2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendidikan Dasar						
1.1	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	n.a.	95,35	96,92	99,99	99,38
1.2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	-					
2	Pendidikan kesetaraan						
2.1	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	n.a.	100	22,26	31,34	99,88
2.2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	-					
3	Pendidikan Anak Usia Dini						



No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
3.1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	n.a.	44,60	74,78	78,99	87,08

Tabel II.46
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 - 2022 (Permendagri No. 59/2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	na	92,72	98,13	118	100
2	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	na	98,47	102	116	100
3	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	na	101,34	105	100	100
4	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	na	55,45	78	100	100
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	na	39,45	78	40,14	100
6	Jumlah warga negara usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	na	29,00	45	58,62	81,19
7	Jumlah warga negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	na	39,18	59	94,18	100
8	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	na	100	100	100	100
9	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan	Persen	na	100	100	100	100
10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	na	100	100	100	100
11	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	na	116,61	100	100	100
12	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	na	100	100	100	100

Tabel II.47
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Bantaeng, 2018 – 2022 (Permendagri No. 59/2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	75,90	78,00	80,90	83,50	84,65
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	53,50	55,20	56,00	57,17	67,57

Tabel II.48
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pemukiman dan Perumahan
Kabupaten Bantaeng, 2018 – 2022 (Permendagri No. 59/2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	na	100	na	100	na
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	na	100	na	0	na

Tabel II.49
SPM Urusan Ketentramandan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantaeng, 2018 – 2022 (Permendagri No. 59/2021)

No.	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	Persen					100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	13,2	11,3	6,05	0,6	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	20,78	3,59	3,59	61,23	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	0,0	6,3	6,3	72,13	



No.	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen					100

Tabel II.50
Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2022 (Permendagri No. 59/2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	na	100,00	100,00	100,00	75,00
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	na	100,00	100,00	100,00	75,00
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	na	100,00	100,00	100,00	75,00
4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	na	110,00	100,00	100,00	30,00
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	na	103,33	100,00	100,00	90,82

2.5. CAPAIAN PEMBANGUNAN TPB/SDG's

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. Dalam pelaksanaan *pembangunan* daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2024, maka berikut dijabarkan capaian pembangunan indikator TPB yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel II.51
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
TUJUAN 01 : TANPA KEMISKINAN							
	Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						
	Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	%	8,95	9,41	9,03	Dinas Sosial.
	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	Dinas Sosial	KPM	6,763	7,274	7,72	Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata.
	Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	101,8	111,4	117	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi pengguna metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 14-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	%	72,77	72,61	72,68	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1.4.1.(d)	Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas PUPR	%	80,90	83,50	83,67	Dinas PUPR, Dinas



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
	dan berkelanjutan						Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan.
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas PUPR	%	87	87,9	88,01	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan
1.4.1.(h)	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	93,99	97,06	97,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Dinas PUPR.
Target 1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tahun	BPBD	%	41,19	61,23	61,62	BPBD, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian
Target 1.a : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumberdaya, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi							



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
1.a.1*	Proporsi sumberdaya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Dinas Sosial	%	25	24	20	Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Dinas Sosial	Rp	23.425.906.000	18.958.100.000	21.193.225.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan.
TUJUAN 02 : TANPA KELAPARAN							
	Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN						
	Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun						
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Dinas Ketahanan Pangan	kkal	1822,3	1812,2	1617,2	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PUPR.



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
	Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula						
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi eksklusif	Dinas Kesehatan	%	63,49	66,76	64,50	Dinas Kesehatan
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Ketahanan Pangan	%	90,6	90,8	75,2	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan.
TUJUAN 03 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
	Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA						
	Target 3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	%	86	58,9	240,6	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesmelahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	%	34,89	33,86	100	Dinas Kesehatan
3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	34,59	33,74	100	Dinas Kesehatan
	Target 3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan angka kematian balita 25 per 1000						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	0	0	2,4	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	4	5	2,1	Dinas Kesehatan
3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran	Dinas Kesehatan	%	2	2	2,4	Dinas



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
	hidup						Kesehatan
	Target 3.3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya						
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	%	0	0	0,11	Dinas Kesehatan
	Target 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan						
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	21	21	35,2	Dinas Kesehatan
	Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional						
3.7.1 (b)	Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	8,6	11,22	12,38	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	BPS	%	50,31	36,14	36,01	Dinas Kesehatan
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	BPS	%	2,03	1,7	2,12	Dinas Kesehatan
	Target 3.8 : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang						
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	89,9	89,9	87,8	Dinas Kesehatan,



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
							BPJS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
TUJUAN 04 : PENDIDIKAN BERKUALITAS							
	Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA						
	Target 4.1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif						
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	102,14	112,48	114,12	Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, PUPR
	Target 4.2 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar						
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	85,68	83,99	84,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD PPPA, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Target 4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi di kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi						
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur	Dinas Pendidikan dan	%	94,91	97,17	97,84	Dinas



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
	≥ 15 tahun	Kebudayaan					Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMD PPPA
4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 - 24 tahun, dan umur 15 - 59 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	94,91	97,17	97,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMD PPPA
Target 4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil							
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	91,29	92,82	93,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
TUJUAN 05 : KESETARAAN GENDER							
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
Target 5.6 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development at the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut							
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	%	13,93	13,97	13,92	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan,



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
							Dinas Sosial
TUJUAN 06 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA							
TUJUAN 07 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA							
TUJUAN 08 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
	Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA						
	Target 8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahun di negara kurang berkembang						
8.1.1 (a)	PDRB	BPS	%	47,59	50,94	52,16	Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan,



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
							Dinas Pariwisata
	Target 8.3 : Manggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreatifitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan						
8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	11,88	28,29	28,31	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
	Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata	%	0,9	0,849	0,85	Dinas Pariwisata. Dinas PUPR
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	OR	67731	96601	97412	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR
	Target 8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua						
8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	11,34	23,86	24,72	Dinas Koperasi, Dinas Pertanian
TUJUAN 09 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
	Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI						
	Target 9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	6,98	9,22	9,65	Dinas Koperasi, UKM dan



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
							Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal PTSP
9.2.1 (a)	Laju Pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	9,50	43,76	44,31	Dinas Koperasi, BPKD, Dinas Sosial
Target 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	0	0	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Sosial
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	0	0	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Sosial



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN							
	Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTAR NEGARA						
	Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional						
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Sosial	%	9,78	9,41	9,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas PMD PPPA
10.1.1 (b)	Jumlah desa mandiri	Dinas PMD, PP dan PA	%	3	11	11	Dinas PMD, PPPA, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Sosial
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
	Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN						
	Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh						
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	%	6,16	8,58	8,79	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Penanaman



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
							Modal PTSP
TUJUAN 12 : POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
	Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN						
TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
	Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA						
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUT							
	Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN SAMUDRA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARAT							
	Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI						
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh							
	Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN						
	Target 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak						
TUJUAN 17 : KEMITRAAN							



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi			Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	
UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							

2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan analisa evaluasi hasil capaian pembangunan dalam kerangka sasaran implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantaeng, secara umum dapat diasumsikan bahwa pembangunan mengalami gejolak akibat adanya Pandemi COVID-19. Meskipun beberapa capaian pembangunan memiliki progress positif dimana berbagai capaian pembangunan dapat terealisasi dengan baik, namun beberapa sektor terdampak COVID-19 yang menyebabkan target tidak tercapai. Selain itu, adanya gejolak ekonomi global karena kondisi geopolitik dampak peperangan Rusia Ukraina mengindikasikan adanya resesi ekonomi yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Isu ini juga harus segera diantisipasi agar tidak memberi dampak signifikan pada pembangunan Bantaeng.

Beberapa keberhasilan pembangunan terlihat dari cukup mendekatinya realisasi capaian pembangunan dengan target pembangunan yang telah dirumuskan pada awal periode pembangunan jangka menengah. Data-data yang terlihat menunjukkan beberapa indikator mengalami trend peningkatan baik pada indikator sasaran maupun indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah. Begitu juga sebaliknya, masih terdapat beberapa target pembangunan yang belum terwujud dan memiliki capaian jauh dari harapan. Oleh karena itu, kondisi ini akan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya sebagai estafet untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Bantaeng.

Meskipun beberapa capaian memiliki rapor positif, namun setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negatif dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja. Oleh karena itu, setiap rumusan perencanaan pembangunan mempunyai upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai target pembangunan sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut faktor penghambat (permasalahan pembangunan) beserta



upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasinya berdasarkan sasaran pembangunan Bantaeng.



Tabel II.52
Permasalahan Pembangunan Daerah dan Upaya Penyelesaiannya
Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024	Permasalahan	Akar Masalah	Upaya-Upaya untuk Mencapai Target
Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya perencanaan dan implementasi terhadap kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya implementasi dalam menjalankan perencanaan pembangunan secara komprehensif	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah• Peningkatan kapasitas sumber daya perangkat/ aparaturnya desa/kelurahan• Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan
			Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antarlembaga/instansi Pemerintah	
Sasaran 1.2 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Minimnya ASN yang memiliki kompetensi dalam pengawasan dan pengendalian internal	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi• Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi dalam pengawasan dan pengendalian internal
Sasaran 1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam melayani masyarakat	Masih kurangnya kesadaran aparaturnya pemerintahan sebagai pelayan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Perlu meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi• Peningkatan kapasitas aparaturnya pelayanan publik
Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan kepribadian	Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan berkeadilan berbasis IT	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan akses serta infrastruktur pendidikan di beberapa wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemerataan layanan pendidikan• Memprioritaskan penyelesaian



Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024	Permasalahan	Akar Masalah	Upaya-Upaya untuk Mencapai Target
masyarakat			Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam bidang pendidikan	program wajib belajar 12 tahun • Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
Sasaran 2.3 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat	Belum optimalnya jaminan perlindungan kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas implementasi UMK dalam sistem pengupahan tenaga kerja • Pemerataan kualitas pekerjaan di berbagai sektor lapangan usaha • Meningkatkan kualitas RTS penerima bansos
	Pengendalian harga dan ketersediaan barang		Masih tingginya fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat	
	Pengembangan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri		Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan desa	
Sasaran 3.1 Meningkatnya kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	Peningkatan produktivitas pertanian daerah	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah	Belum meratanya pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengembangan tanaman pangan	• Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian
			Masih rendahnya diversifikasi produk hasil pertanian	
	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan	Belum optimalnya kemampuan dan penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM Belum optimalnya pengembangan kawasan Industri Bantaeng	• Pengembangan usaha dan infrastruktur UKM serta industri • Peningkatan kualitas koperasi daerah • Meningkatkan kondusivitas iklim investasi daerah



Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024	Permasalahan	Akar Masalah	Upaya-Upaya untuk Mencapai Target
			Minimnya daya dukung daerah dalam menciptakan peluang investasi (iklim investasi)	
Sasaran 3.2 Meningkatnya layanan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur jalan	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan infrastruktur aksesibilitas (jalan, sarpras perhubungan, dan sebagainya) dan penunjang kehidupan masyarakat (perumahan layak, air bersih, sanitasi, dan sebagainya)• Meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial serta daya dukung RTH
			Masih cukup tingginya panjang jalan dalam kondisi rusak	
			Belum optimalnya pelayanan sanitasi dan kebutuhan air baku (air minum, air industri)	
			Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan yang sesuai dengan RTRW	
Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Bantaeng	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan		Minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup	



b. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berikut dijabarkan Permasalahan Pembangunan Penyelenggaraan sesuai dengan Bidang Urusan Daerah:

Tabel II.53
Permasalahan Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR		
1	Pendidikan	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana
		Belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
2	Kesehatan	Belum optimalnya peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya kualitas prasarana jalan dan jembatan jalan
		Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir
		Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan pengelolaan air limbah
		Belum terlaksananya rencana pembangunan infrastruktur sesuai RTRW
4	Perumahan dan Pemukiman	Penanganan pemukiman kumuh belum optimal
		Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni
		Belum seluruh rumah tinggal memiliki sanitasi yang layak
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum	Belum optimalnya kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Belum optimalnya wawasan masyarakat terkait kebangsaan dan politik
		Munculnya potensi konflik pada tahun politik
6	Sosial	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
		Minimnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON- DASAR		
7	Tenaga Kerja	Masih kurangnya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan (kesempatan kerja)
		Belum tingginya kompetensi dan kualitas tenaga kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah
		Minimnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan
9	Pangan	Belum optimalnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman
		Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
10	Pertanahan	Masih minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam proses penerbitan sertifikat tanah warga
		Masih ditemukannya kasus konflik pertanahan/ sengketa tanah
11	Lingkungan Hidup	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha



No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan
		dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
		Minimnya pengelolaan persampahan
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya peran lembaga pemberdayaan desa
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih belum optimal
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
15	Perhubungan	Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas
		Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan perhubungan kurang memadai
16	Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam pendistribusian informasi daerah
17	Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Kurangnya daya saing KUMKM, khususnya sektor unggulan
		Menurunnya jumlah koperasi aktif
18	Penanaman Modal	Belum efektifnya promosi investasi
		Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menarik investor
19	Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi dan kegiatan kepemudaan
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
20	Statistik	Belum terimplementasinya Satu Data Bantaeng
21	Persandian	Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal
22	Kebudayaan	Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur
23	Perpustakaan	Kurangnya tenaga ahli dan terampil perpustakaan (pustakawan, tenaga teknis dan penilai)
		Keterbatasan koleksi buku perpustakaan
24	Kearsipan	Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah
		Kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku
		Minimnya ketersediaan arsiparis
C. URUSAN PILIHAN		
25	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya belum optimal
26	Pariwisata	Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata
		Belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
27	Pertanian	Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan



No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan
28	Perdagangan	Belum optimalnya pemasaran berbagai produk unggulan daerah Belum optimalnya daya saing produk unggulan Bantaeng
29	Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri Belum optimalnya fasilitas pemerintah daerah dalam peningkatan pembinaan IKM
D. URUSAN PENUNJANG		
30	Penelitian dan pengembangan	Belum diimplementasikannya secara konsisten dan menyeluruh inovasi yang dikembangkan di Bantaeng
31	Perencanaan	Belum optimalnya kualitas rumusan perencanaan pembangunan, sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah
32	Keuangan Daerah	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bantaeng
33	Kepegawaian	Masih rendahnya SDM ASN yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi
34	Pengawasan	Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
35	Sekretariat Dewan	Belum optimalnya pelayanan terhadap aktivitas dewan

2.7. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada pembangunan Kabupaten Bantaeng di tahun 2024, perlu adanya menelaah isu strategis terkini yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, khususnya program dan kegiatan. Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan



integrasi dengan penjabaran isu strategis pada pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 sebagai berikut:

A. ISU STRATEGIS GLOBAL

Saat ini, isu strategis global (internasional) yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantaeng adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona masih satu *family* dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari Tahun 2020, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus Corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah di berbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia. Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi.

Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran. Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif terhadap perencanaan pembangunan pasca Pandemi Covid-19.

Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng seperti:

a. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut ***Sustainable Development Goals (SDGs)***. Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs

adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;

- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai wilayah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana salah satu upaya adalah mengarusutamakan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan diharapkan mampu mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan masyarakat untuk jangka Panjang yang memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian pembangunan Kabupaten Bantaeng mampu mengimplementasikan tujuan-tujuan SDG's dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Ancaman resesi ekonomi global

Resesi ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Kondisi saat ini, berbagai ancaman krisis ekonomi global melanda di hampir seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Salah satu penyebab yang mengemuka adalah adanya perang Ukraina dengan Rusia yang menyebabkan gejolak stabilitas politik global terjadi.

Peperangan antara dua kubu tersebut tidak hanya sebagai konflik bilateral antardua negara karena masalah perbatasan, melainkan konflik regional yang membuat ekonomi Eropa mengalami krisis energi. Krisis tersebut terjadi karena pihak Rusia telah memangkas aliran gas alam ke daerah Eropa yang biasa digunakan

untuk menggerakkan roda ekonomi di benua biru tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyak negara di Eropa mengalami krisis energi yang berujung pada naiknya nilai inflansi pada setiap negara yang ada di benua tersebut. Akibat dari krisis energi tersebut, harga gas alam dan minyak bumi dunia yang terus meningkat yang membuat harga BBM di Indonesia juga merangkak naik. Selain itu, peperangan tersebut juga mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar di seluruh dunia. Kondisi ini akan menyebabkan ketatnya likuiditas negara-negara di Eropa. Sehingga, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju lebih lambat dari yang diperkirakan. Kondusivitas yang tidak menentu ini menjadikan investor berupaya bermain aman. Dampak bergejolaknya iklim investasi menyebabkan pertumbuhan penanaman modal melambat yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.

c. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika penjagaan atas jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim; dan
- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “*Katowice Climate Package*” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Bantaeng.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan sebagai sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, di mana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

B. ISU STRATEGIS NASIONAL

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan dan persiapan menghadapi tahun politik pada pemilihan umum 2024.

a. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan tahapan pembangunan tahunan terakhir dari masa kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo pada periode pembangunan 2019-2024. Arah kebijakan yang diusung RKP Tahun



2024 dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing usaha
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Adapun strategi kebijakan di tahun 2024 difokuskan pada peningkatan peran KTI dengan menjaga momentum pertumbuhan KBI; pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan pengurangan pengangguran.

b. Menghadapi Tahun Politik

Pelaksanaan pemilihan umum secara serentak di seluruh Indonesia menjadikan tahun politik kali ini berbeda dengan pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya. Dalam memasuki tahun politik ini, Presiden Joko Widodo mendorong seluruh pihak untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam memasuki tahun politik 2024. Terlebih juga dampak tahun politik tidak hanya akan dirasakan pada tahun sebelum dan tahun pelaksanaan pemilihan umum, namun juga beberapa tahun setelahnya. Diharapkan memanasnya kondisi saat tahun politik dan dampaknya nanti tidak memberi guncangan pada pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah menghadapi potensi resesi global.

Seperti yang terjadi pada tahun politik sebelumnya, tahun politik kali ini juga memiliki potensi untuk memicu konflik dan polemik. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan dan mengumumkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh lolos verifikasi administrasi dan faktual. Sebanyak 24 partai ini berhak ikut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 nanti. Selain itu, pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden juga akan dibuka sehingga potensi suhu politik akan naik.

Berbagai potensi yang dapat terjadi dan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan seperti adanya kompetisi antarpartai politik peserta pemilu guna menaikkan massa, adanya black campaign yang menimbulkan gesekan antar peserta pemilu, politik kebencian termasuk di dalamnya mengeksploitasi isu



suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), hingga banyaknya hoax yang tersebar di dunia maya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pendidikan politik yang baik kepada peserta pemilu dan masyarakat. Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu juga harus bekerja secara adil, jujur dan transparan sehingga akan mendapatkan kepercayaan masyarakat, tidak mencederai demokrasi, dan membuahkan legitimasi.

C. ISU STRATEGIS DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kondisi kekinian daerah yang memotret berbagai isu-isu strategis yang berkembang di dalam masyarakat dan pembangunan daerah.

a. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang menyusun RPD untuk tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Bantaeng, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantaeng sampai tahun 2026 adalah

“Komunitas yang Mandiri Bernafaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal”

RPD Bantaeng tahun 2024-2026 merujuk pada pembangunan jangka panjang tahap keempat. Pada RPJM keempat, Program prioritas adalah program-program yang memanfaatkan momentum pembangunan yang berhasil dipicu pada 3 (tiga) tahapan pembangunan sebelumnya dan program-program untuk menyempurnakan kebutuhan pembangunan yang tidak sempat dirampungkan pada tahapan-tahapan pembangunan yang lalu sehingga visi Bantaeng didapat diwujudkan. Bantaeng sebagai komunitas yang mandiri di wilayah Selatan Sulawesi yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dapat diwujudkan. Pelaksanaan RPJD ke-4 (empat), yang merupakan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan periode terakhir pada RPJPD Tahun Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Bantaeng harus berupaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024-2026 ini, perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng memiliki tujuan dan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam satuan Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dipisahkan. Implikasi dari perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik akan memberikan pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel sehingga memberikan suasana kemasyarakatan yang sejahtera, adil dan merata, berkualitas berkesinambungan, serta harmonis, aman dan tentram. Impian dari seluruh Pemerintah Daerah, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Bantaeng ini perlu diupayakan melalui berbagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga memberikan peluang dan kesempatan kepada aparatur birokrasi dan masyarakat untuk mengembangkan ide, gagasan, dan kreativitas dalam rangka menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk daerah, masyarakat, nusa, dan bangsa. Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah
- b. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT.

2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Fokus pembangunan SDM yang berkualitas adalah menciptakan manusia yang pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

Secara umum, peningkatan kasus positif terus bertambah dimana akhirnya beberapa sektor cukup terdampak akibat mewabahnya pandemi COVID-19 ini, khususnya perekonomian rakyat yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bantaeng di masa pandemi ini terkena imbasnya yaitu dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bantaeng turut berperan dan bertanggungjawab untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya taraf hidup keluarga
- b. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat



- c. Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah
- d. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3. Meningkatkan Kualitas Perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan

Pada masa pandemi covid-19 ini masih berlangsung, langkah yang diambil Kabupaten Bantaeng adalah mengembangkan perekonomian yang prorakyat selain dengan pemulihan usaha menengah dan besar. Hal ini dimaksudkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah serta perekonomian sektor informal yang mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Bantaeng untuk segera pulih kembali. Kabupaten Bantaeng termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, laju perumbuhan di kabupaten Bantaeng hanya mencapai kisaran 0,50 persen. Namun di tahun 2021 LPE kabupaten Bantaeng mencapai 8,86 persen. Kontribusi perekonomian Bantaeng terbesar adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor lain yang mendominasi perekonomian Bantaeng adalah sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Selain mengelola sektor-sektor unggulan secara optimal, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Namun perlu digarisbawahi dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya implementasi perekonomian hijau pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik. Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah
- b. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng 2012-2032

Dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032. RTRW Kabupaten Bantaeng ini adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan



pemanfaatan ruang wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Propinsi Sulawesi Selatan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bantaeng. RTRW disusun untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis mitigasi bencana.

Beberapa kebijakan terkait penataan ruang Kabupaten Bantaeng meliputi:

- a. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan;
- b. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian yang ramah lingkungan;
- d. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan;
- e. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
- f. Perwujudan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pada RTRW Kabupaten Bantaeng memiliki **Rencana Struktur Ruang Wilayah** seperti pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pada strukturwilayah pusat-pusat kegiatan terdiri dari 3 (tiga) pusat wilayah yakni:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kawasan Perkotaan Bantaeng di Kecamatan Bantaeng.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdiri atas:
 - Kawasan Perkotaan Bonto Manai di Kecamatan Bisappu;
 - Kawasan Perkotaan Banyorang di Kecamatan Tompobulu; dan
 - Kawasan Perkotaan Tanetea di Kecamatan Pa'jukukang.



c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi pusat-pusat pemukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa yang terdiri atas:

- Desa Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa;
- Desa Bonto Marannu di Kecamatan Ulu Ere;
- Kelurahan Gantarangkeke di Kecamatan Gantarangkeke; dan
- Desa Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.

Pada sistem jaringan prasarana utama memiliki dua sistem yakni sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi laut. Pada sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:

- a. Sistem jaringan jalan dengan rincian jaringan jalan serta lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. Sistem jaringan perkeretaapian dengan rincian jaringan jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.

Sedangkan pada sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayanan, dengan rincian:

- a. Tatanan kepelabuhanan, terdiri atas:
 - pelabuhan pengumpan primer yaitu pelabuhan Kaili di Kecamatan Bantaeng;
 - pelabuhan pengumpan sekunder yaitu Pelabuhan Bantaeng di Mattoanging Kecamatan Bissappu dan Pelabuhan Ikan Birea di kecamatan Pa'jukukang; dan pelabuhan khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Alur pelayaran merupakan alur pelayaran laut yang terdiri atas:
 - alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan Bantaeng dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Bantaeng dengan pelabuhan nasional.

Pada sistem jaringan prasarana lainnya memiliki 4 (empat) sistem yang terdiri atas:

- a. Sistem jaringan energi yang terdiri dari :
 - 1) Pembangkit tenaga listrik, dengan rincian:
 - Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Bakara Kecamatan Pa'jukukang untuk mendukung kawasan industri, Dengan daya 1,16 MW; dan

- Rencana pengembangan prasarana energi Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH), dan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan daya 25 (dua puluh lima) Kilowatt di Kecamatan Pa'jukukang, Gantarangkeke, Tompobulu, Eremerasa, Bantaeng, Uluere, Sinoa, Bissapu yang merupakan pengembangan energi listrik yang memanfaatkan energi terbarukan.
- 2) Jaringan transmisi tenaga listrik, dengan rincian:
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) Kilovolt yang menghubungkan Gardu Induk di Kabupaten Jeneponto dengan Gardu Induk di Kabupaten Bulukumba; dan
 - Rencana Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dengan tegangan 1450 (seribu empat ratus lima puluh) Kilovolt yang menghubungkan Sengkang – Sinjai - Bulukumba – Bantaeng – Takalar – Makassar.
- b. Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan teresterial dan jaringan satelit. Selain kedua sistem jaringan tersebut, sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base TransceiverStation* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sistem jaringan sumber daya air ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari beberapa sistem yakni:
 - 1) Sistem pengelolaan persampahan;
 - 2) Sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - 3) Sistem jaringan drainase;
 - 4) Sistem jaringan air limbah; dan
 - 5) Jalur evakuasi bencana.

Pada RTRW Kabupaten Bantaeng memiliki Rencana Pola Ruang Wilayah yang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung pada rencana pola ruang wilayah terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
- b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

- c. Kawasan rawan bencana alam; dan
- d. Kawasan lindung geologi.

Sedangkan pada kawasan budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

D. ISU STRATEGIS KABUPATEN BANTAENG

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Bantaeng yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2024. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Bantaeng dijabarkan sebagai berikut :

a. Transformasi Pelayanan Publik Berbasis IT

Cukup tingginya Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) sebesar 81,29 merupakan hasil positif dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bantaeng. Namun capaian tersebut, masih perlu diperbaiki dengan mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektif, efisien dan berkualitas, khususnya dalam pelayanan dasar masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, transformasi pelayanan publik sudah menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan melalui berbagai inovasi dan juga improvisasi dalam memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik berkualitas.

Teknologi informasi hadir dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkompeten dan mudah. Hal ini menjadi suatu adaptasi bagi unit pelaksana pelayanan publik guna menjawab kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Transformasi digital ini nantinya diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan dengan cepat dan efisien. Selain itu, layanan ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan transparansi pelayanan sehingga terhindar dari kondisi yang tidak diharapkan seperti pungutan liar dan sebagainya.



b. Pemantapan SDM Maju, Berbudaya Dan Berdikari

Sebagai modal dasar pembangunan, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi suatu potensi besar dalam akselerasi pencapaian tujuan pembangunan yang didasarkan pada kualitas dan pemerataan kesejahteraan sosial. Masih minimnya capaian **Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,69** pada tahun 2022, menjadikan Kabupaten Bantaeng wajib meningkatkan capaian-capaian pembangunan, khususnya pelayanan dasar masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Capaian pendidikan dan kesehatan yang masih memerlukan peningkatan, menjadikan perencanaan pembangunan wajib memerhatikan kedua urusan tersebut, tanpa mengindahkan urusan pembangunan yang lain. Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam pemeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Bantaeng.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat Bantaeng, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Dari sisi kesehatan, pembangunan kesehatan di Bantaeng sudah menunjukkan hasil positif, namun untuk lebih mengoptimalkan kualitas SDM dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, maka peningkatan layanan kesehatan harus terus ditingkatkan. Berbagai kasus penanganan kesehatan khusus harus menjadi salah satu fokus kebijakan kesehatan dalam perencanaan pembangunan ke depan seperti stunting/gizi buruk, kematian ibu dan bayi, hingga peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan.

c. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Saat ini, pemerintah pusat memiliki fokus dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang mencapai USD 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Kondisi ini menyebabkan pemerintah memberikan intervensi kepada rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrem supaya maju dan bertumbuh melalui berbagai program seperti subsidi, pengurangan beban



pengeluaran masyarakat miskin ekstrem, hingga program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kapasitas ekonomi keluarga.

Kabupaten Bantaeng memiliki tugas untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun mendatang. Berdasarkan data Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem Tahun 2020, **Kabupaten Bantaeng memiliki persentase kemiskinan ekstrem sebesar 2,44% dengan total secara umum terdapat 8,95% penduduk miskin.** Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan termasuk didalamnya pengentasan kemiskinan ekstrem dengan beberapa strategi yang dilakukan yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan subsidi, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan cara membangun infrastruktur pelayanan dasar. Untuk membantu riset di Kabupaten Bantaeng sendiri menerapkan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan melibatkan kaum perempuan, disabilitas, warga miskin dalam diskusi untuk menjangkau informasi tentang hambatan dan harapan tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.

d. Antisipasi Resesi Ekonomi Dalam Pembangunan Berbasis Ekonomi Unggulan Daerah

Pembangunan perekonomian di Bantaeng sudah memiliki modal berupa pertumbuhan ekonomi yang cukup baik bahkan menempati urutan pertama se Sulawesi Selatan dengan capaian 15,45 persen. Kondisi ini tentu saja harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai upaya antisipasi adanya resesi ekonomi akibat gejolak global. Kondisi ini diperkirakan akan menunjukkan kelesuan ekonomi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara global akan berkontraksi.

Resesi ekonomi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Selain karena meningkatnya harga-harga secara tajam sehingga menyebabkan ekonomi menjadi stagnan atau dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi, resesi ekonomi juga bisa terjadi karena turunnya harga-harga atau deflasi. Situasi ini disebut bisa membuat ekonomi ke depan masih sulit untuk diperkirakan perkembangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bantaeng harus memiliki upaya preventif dalam mengantisipasi dampak negatif dari resesi ekonomi sehingga perlu adanya program pembangunan yang meningkatkan ketahanan ekonomi kerakyatan, khususnya komoditas ekonomi unggulan daerah. Kondisi ini juga harus

memerhatikan dengan situasi politik dan keamanan di tanah air yang cenderung memanas menjelang Pemilihan Umum (pemilu) juga harus dijaga agar tidak kontra produktif terhadap perekonomian. Sehingga kondusivitas dan iklim investasi yang pro-investasi harus dijaga kestabilannya agar mampu menopang perekonomian Bantaeng ke depan.

e. Perekonomian Hijau Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, selain sebagai modal pembangunan juga merupakan penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

Penerapan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Beberapa alternatif dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.

Sebagai wilayah yang memiliki struktur ekonomi dominan pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, tentu saja dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam tersebut perlu adanya pengawasan yang melekat agar tidak berpotensi merusak lingkungan hidup. Selain itu juga semakin berkembangnya industri pengolahan di Bantaeng akan meningkatkan potensi kerusakan lingkungan hidup jika pengelolaan limbahnya tidak dilakukan secara baik.

2.8. INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH BANTAENG

Inovasi (atau juga disebut reka baru) dapat diartikan sebagai suatu proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Sehingga inovasi dalam pembangunan mengindikasikan sesuatu hal baru baik dari sistem, tata kelola hingga implementasi dalam mewujudkan pembangunan di suatu wilayah, dalam hal ini di Kabupaten Bantaeng. Adapun inovasi pembangunan ini seyogyanya memiliki dampak dalam akselerasi pencapaian visi dan misi kepala

daerah, khususnya dalam menyejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.

1. CETAR” (Cek Tekanan Darah Rutin)

Inovasi “ CETAR” (Cek Tekanan Darah Rutin) dikembangkan karena rendahnya kesadaran masyarakat penderita hipertensi untuk berobat secara rutin. Penyebab utama karena kurangnya informasi dan malasnya pasien hipertensi yang tidak memiliki keluhan untuk berobat. Inovasi ini memudahkan tenaga kesehatan, aparat pemerintah desa dan lintas sektor untuk memberikan pelayanan hipertensi. Inovasi ini sesuai dengan target SDGs yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan ke 6 yaitu hipertensi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantaeng yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia, Akses Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar.

Inovasi CETAR melalui 3 tahapan yaitu:

1. Memberikan kartu kontrol pengobatan yang memberikan informasi yang mengenai identitas pasien dan catatan pemeriksaan pasien untuk digunakan memonitor pasien pada kunjungan selanjutnya
2. Mengadakan pelayanan kesehatan khusus pasien hipertensi di Posbindu untuk memantau keadaan penderita hipertensi
3. Mengadakan Senam Prolanis dan edukasi hipertensi

Inovasi CETAR berdampak pada penderita hipertensi. Jumlah penderita yang teridentifikasi sebelum inovasi sebanyak 120 orang, namun setelah implementasi inovasi ditemukan 183 orang di tahun 2021, tahun 2022 ditemukan 204 orang. Sehingga angka kontak tenaga kesehatan menjadi tinggi. Selain itu inovasi ini juga meningkatkan kepatuhan minum obat karena penderita teratur minum obat anti hipertensi sehingga kecacatan akibat komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung dapat diminimalisir.

Tujuan inovasi CETAR adalah :

1. Meningkatkan kesadaran penderita hipertensi untuk berobat teratur yang berimplikasi pada meningkatnya angka kontak tenaga kesehatan dengan penderita.
2. Status kesehatan penderita hipertensi terpantau oleh tenaga kesehatan.
3. Penderita hipertensi dapat berobat secara rutin di fasilitas kesehatan

2. DEKAP BAYI

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu



saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Kemenkes 2017).

Permasalahan yang ditemui di PKM Campagaloe terkait pelayanan imunisasi dasar lengkap pada bayi adalah rendahnya cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Capaian IDL sebelum pandemi bulan Januari sampai Maret 2020 mencapai target.

Setelah pandemi, cakupan capaian pelayanan IDL pada bayi menurun. Pada bulan April sampai Juli 2020 cakupan IDL Puskesmas Campagaloe sebanyak 70 orang (43%), di mana target yang harus dicapai adalah 95%, terjadi kesenjangan capaian 52%.

Dengan adanya inovasi DEKAP BAYI ini semua sasaran terjangkau sehingga pada bulan Agustus sampai Desember 2020 IDL sudah mencapai target yaitu 154 orang (95%). Bulan Januari sampai Desember 2021 capaian IDL sebanyak 163 orang (100%), dan tahun 2022 capaian Imunisasi dasar Lengkap (IDL) sebanyak 121 orang (100%).

Capaian tersebut dapat diraih berkat strategi yang diterapkan oleh PKM Campagaloe berupa Pelayanan imunisasi dengan cara kunjungan ke rumah sasaran sesuai jadwal posyandu yang telah ditetapkan. Adanya kerjasama dari lintas program dan dukungan lintas sektor serta komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf PKM Campagaloe.

Tujuan Inovasi DEKAP BAYI :

1. Meningkatkan layanan sasaran Imunisasi Dasar Lengkap posyandu dengan sistem kunjungan rumah
2. Menyediakan akses layanan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi melalui kunjungan rumah.
3. Meningkatkan cakupan layanan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi dalam masa pandemi Covid-19
4. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan layanan imunisasi dengan program Kehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi, Surveilans dan Promkes.

3. INOVASI PA'BALLETA (PELAYANAN OBAT EKSKLUSIF DAN TERINTEGRASI)

Pelayanan farmasi merupakan bagian penting dari sistem pelayanan rumah sakit. Instalasi farmasi melayani pasien termasuk penyakit kronis. Tantangan dalam memberikan pelayanan pasien kronis, yaitu ketidakpatuhan pasien kronis dalam mengonsumsi obat harian, serta adanya pasien yang datang

sebelum jadwal kontrol yang seharusnya. Hal ini berdampak terhadap kesembuhan pasien dan kerugian yang ditanggung rumah sakit. Selain itu, pasien juga sulit mendapatkan informasi tentang obat yang dikonsumsi.

Inovasi Pelayanan Obat Eksklusif dan Terintegrasi (PA'BALLETA) hadir untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut. Ada enam layanan unggulan yang memberikan kemudahan dalam pelayanan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya layanan pengobatan kepada pasien kronis.

Layanan tersebut terdiri dari tempat pelayanan obat khusus bagi pasien kronis, layanan pasien iterasi obat tanpa kontak, tim pengantaran obat pasien kronis, penyediaan notifikasi pengingat minum obat, *call center* farmasi, dan media informasi waktu tunggu pelayanan obat.

Inovasi PA'BALLETA telah berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan farmasi, khususnya pada apotek rawat jalan yaitu telah berhasil menurunkan ketidakpatuhan pasien dalam melakukan kontrol obat dari 5,12% tahun 2019, 4,18% tahun 2020, 3,90% tahun 2021, dan 2,45% tahun 2022.

Jumlah kerugian yang ditanggung oleh rumah sakit juga berhasil diturunkan dari Rp 37.945.121 tahun 2019 dan Rp 31.692.343 tahun 2020 menjadi Rp 5.023.196 tahun 2021 dan Rp 2.911.919 tahun 2022.

Inovasi PA'BALLETA bertujuan:

1. Meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat sesuai aturan.
2. Menurunkan kerugian rumah sakit karena harus menanggung biaya obat yang tidak terklaim.

4. JEDAR SASKIA (Jemput Dan AntaR SASaran Kesehatan Ibu dan Anak)

Inovasi JEDAR SASKIA atau Jemput dan Antar Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak, hadir karena tingginya jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan tidak adanya persalinan yang dilakukan pada fasilitas kesehatan. Pada umumnya setiap ibu hamil dan ibu bersalin yang tidak memeriksakan kehamilan maupun kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan bukan disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemeriksaan kesehatan, namun banyak diantaranya terkendala status ekonomi yang kurang serta akses ke fasilitas kesehatan yang jauh.

Inovasi ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi setiap sasaran baik ibu hamil KEK maupun ibu bersalin. Setiap ibu hamil KEK dijadwalkan melakukan konsultasi dengan dokter ahli gizi di Unit Pelayanan Gizi Terpadu dengan sistem jemput antar sasaran. Selain itu, semua ibu hamil

yang akan memasuki proses persalinan dijemput untuk kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan, memperoleh pelayanan persalinan hingga akhirnya diantarkan kembali ke rumahnya tanpa dibebankan biaya apapun.

Inovasi ini memberi dampak yang sangat positif khususnya bagi ibu hamil yang tinggal pada daerah pegunungan dan ibu dengan status ekonomi kurang. Dengan adanya sistem jemput antar sasaran, akses jalan yang sulit dan terjal serta besaran biaya yang harus dikeluarkan tidak lagi menjadi faktor penghambat untuk menempuh fasilitas pelayanan kesehatan.

Inovasi JEDAR SASKIA hadir dengan tujuan:

1. Membantu dan memfasilitasi ibu hamil KEK dan ibu bersalin, agar memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
2. Menurunkan jumlah ibu hamil KEK
3. Mewujudkan 100% persalinan faskes sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) guna meminimalisir berbagai resiko yang mungkin terjadi jika kekurangan energy kronik pada ibu hamil tidak segera tertangani dan persalinan tidak dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada Bayi Baru Lahir.

5. Molen Banting (Mendampingi Online Balita Stunting)

UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu diresmikan pada tanggal 2 maret 2021 berperan sebagai wadah dinas melaksanakan fungsi proses interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat secara optimal dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bantaeng. Sesuai SK Kepala UPT Gizi nomor 5 tanggal 25 maret 2021 Tentang Penetapan Inovasi Molen Banting Kabupaten Bantaeng.

Kesulitan mengevaluasi kembali status gizi balita yang datang ke UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu memunculkan solusi mendekatkan pelayanan kepada sasaran balita stunting, gizi kurang, dan gizi buruk yang berkunjung ke poli gizi secara online.

Pelayanan konseling *offline* dan *online* dilakukan kolaborasi antara dokter umum, nutrisisionis, bidan, dan perawat. Petugas kesehatan mengevaluasi status gizi dan kesehatan balita. Sarana yang digunakan dalam inovasi adalah grup *WhatsApp group*, dengan mendampingi ibu balita melakukan Pemberian Makanan Bagi Anak (PMBA), perawatan kesehatan balita sehingga

meningkatkan kunjungan ulang balita yang rawat jalan dievaluasi, meningkatkan status gizi balita yang telah menjalani rawat jalan. Sarana *WhatsApp group* digunakan dengan alasan sudah banyak Ibu Balita memiliki HP dengan aplikasi WhatsApp, cepat menyebarkan informasi, biaya murah terjangkau bagi ibu balita untuk melakukan konsultasi dengan petugas, tidak dibatasi oleh waktu dan jarak, memudahkan penggunaanya serta sesuai dengan masalah sumber daya yang ada pada keluarga.

Tujuan Inovasi Molen Banting:

1. Meningkatkan jumlah balita yang berkunjung ulang ke UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu.
2. Meningkatkan status gizi dan kesehatan anak stunting, gizi kurang, dan gizi buruk yang rawat jalan untuk dievaluasi.
3. Berkontribusi pada penurunan angka stunting di Kabupaten Bantaeng sesuai target yang diharapkan menjadi 14% pada tahun 2024.

6. Peduli KASI (Kampung ASI)

Kondisi yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Loka, Persentase ASI Eksklusif Tahun 2019 sebanyak 66.05%. Walaupun mencapai target indikator kinerja gizi tahun 2019, namun ada kurang lebih 30% bayi yang tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh ASI Eksklusif. Dari Hasil Analisis situasi balita stunting di wilayah kerja Puskesmas loka pada tahun 2020, ASI eksklusif mempengaruhi kejadian stunting sebanyak 84.74%. Persentase balita stunting pada tahun 2020 sebanyak 44% yang artinya hampir setengah balita di wilayah kerja Puskesmas Loka mengalami kejadian stunting.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Puskesmas Loka melahirkan gagasan berupa ide solusi yang diberi nama Peduli KASI (Peduli Kampung ASI). Dengan adanya Inovasi Peduli KASI yang dikembangkan dengan 1 pohon katuk untuk 1 ibu hamil, dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pemberian ASI Eksklusif dan mampu mencegah terjadinya kejadian stunting. Tanaman katuk yang diberikan dapat menjadi *booster* ASI. Inovasi ini dapat meningkatkan persentase ASI Eksklusif menjadi 76.90 % dan menurunkan menjadi 33.46%.

Inovasi Peduli KASI dalam implementasinya, melibatkan lintas program yaitu bidan desa, bidan dusun, promkes. dan lintas Sektor yaitu Pemerintah desa, Penyuluh pertanian. Keberlanjutan inovasi Peduli Kampung ASI hingga saat ini masih terus berlangsung dan telah dikembangkan ke semua desa di

wilayah kerja Puskesmas Loka

Tujuan dan Kelompok Sasaran Masyarakat :

Inovasi Peduli KASI merupakan Inovasi yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pemberian ASI Eksklusif dan meningkatkan capaian ASI Eksklusif menjadi 100% sehingga dapat mencegah sejak dini terjadinya stunting pada anak.

Kelompok Peduli ASI yang memantau ibu hamil dan tanaman katuk yang diberikan kepada sasaran, merupakan kelompok masyarakat yang peduli dengan pemberian ASI Eksklusif.

Sedangkan tanaman katuk diberikan kepada semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas Loka, sehingga ibu menyusui nantinya dapat mandiri meningkatkan produksi ASI dengan pangan lokal, salah satunya dengan cara mengonsumsi daun katuk.

7. PELAYANAN PARIPURNA LANSIA SEJAHTERA (PELIPUR LARA)

Puskesmas Dampang memiliki lansia berjumlah 630 orang, di mana sebagian besar lansia bermasalah dengan kesehatannya. Di Puskesmas Dampang jumlah kunjungan lansia yang berobat masih kurang, hanya sekitar 189 orang (30%) dari jumlah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Dampang, dimana terdapat sebanyak 208 orang lansia yang beresiko dan 422 orang yang tidak beresiko. Selain itu, tingkat pengetahuan keluarga lansia tentang kesehatan masih kurang.

Adapun strategi yang akan dilakukan tim PELIPUR LARA dalam rangka pelayanan paripurna bagi lansia adalah. Pemeriksaan kesehatan di faskes berupa pengecekan tanda tanda vital pemberian obat atau terapi sesuai dengan keluhan atau penyakit para lansia. Posyandu lansia dilakukan selain pemeriksaan kesehatan, juga diberikan penyuluhan dan edukasi tentang pola hidup sehat para lansia. Kunjungan ke rumah lansia, dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar apabila tidak dapat ditangani di rumah, maka dianjurkan untuk ditindak lanjuti oleh dokter di Faskes.

Edukasi keluarga atau pendamping lansia berupa pertemuan yang dilakukan satu kali sebulan, memberikan pengetahuan tentang pola hidup sehat lansia, kepatuhan minum obat, pola diet.

Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan terjadi perubahan, dengan meningkatnya jumlah kunjungan lansia yang memeriksakan kesehatan, kemudian dengan kegiatan edukasi juga memberikan dampak yang baik, karena telah

meningkatkan pengetahuan keluarga atau pendamping lansia tentang pola hidup sehat lansia.

Berikut ini adalah tujuan dari Inovasi PELIPUR LARA

1. Meningkatkan jumlah kunjungan lansia yang memeriksakan kesehatan di Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pasien, keluarga atau pendamping lansia tentang masalah kesehatan.
3. Pengadaan kartu kontrol pemeriksaan (Kartu Pesan Baik)

8. PELITA ASUH

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan dukungan dari berbagai bidang. Puskesmas berperan penting dalam memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Permenkes Nomor 23 tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan maupun masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi, yang dimaksud kelompok rawan gizi yaitu bayi, balita, ibu hamil dan lansia.

Puskesmas Bissappu adalah salah satu Puskesmas yang terletak di Kecamatan Bissappu, Kelurahan Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng. Keadaan alam di Wilayah Puskesmas Bissappu merupakan daerah yang cocok untuk lahan pertanian seperti persawahan dan perkebunan, sehingga penduduk yang bertempat tinggal dominan bergerak di sektor pertanian. Permasalahan gizi yang sering dijumpai yaitu terdapat balita dengan status gizi kurang.

Inovasi PELITA ASUH atau adalah kumpulan dari gagasan ide oleh petugas kesehatan di Puskesmas Bissappu. Setelah inovasi diimplementasikan berdampak pada perubahan status gizi balita. Jumlah balita yang memiliki gizi kurang yang teridentifikasi sebelum inovasi sebanyak 72 orang. Namun, setelah implementasi inovasi tahun 2021 dilakukan terjadi penurunan balita *underweight* sampai tahun 2022 sebanyak 25 orang. Monitoring dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan inovasi.

Tujuan inovasi ini adalah:

1. Meningkatkan status gizi balita
2. Menurunkan prevalensi balita gizi kurang

3. Menurunkan prevalensi berat badan kurang
4. Menurunkan prevalensi stunting

9. PETISI PEDULI REMATRI (Pemantauan Sistem Online dan Offline Peduli Remaja Putri)

Pemantauan Sistem *Online* dan *Offline* Peduli Remaja Putri (Petisi Peduli Rematri/PPR) dikembangkan oleh Puskesmas Labbo karena rendahnya jumlah remaja putri yang mendapatkan layanan kesehatan, serta kurang disiplin dalam minum obat Tablet Tambah Darah (TTD). Tidak ada data remaja putri baik yang di sekolah maupun yang putus/tidak sekolah sehingga kurang menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan. Inovasi ini memudahkan tenaga kesehatan, aparat pemerintah desa, lintas sektor memantau kesehatan remaja putri karena bukan hanya dilakukan dengan kunjungan rumah tetapi juga dipantau melalui *chat* WA atau telepon.

Inovasi PPR berdampak pada kelompok remaja putri, karena kelompok ini merupakan kelompok yang kurang mendapatkan akses pelayanan kesehatan, sementara mereka adalah calon ibu yang nanti melahirkan generasi penerus bangsa.

Jumlah remaja putri yang terpantau kesehatannya sebelum inovasi sebanyak 15 orang (2020), setelah implementasi inovasi dipantau 49 orang (2021), dan 65 orang (2022). Dan tentunya akan semakin meningkat di tahun berikutnya.

Inovasi PPR sangat sesuai dengan kategori 1 yaitu Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan. Inovasi ini menjadikan akses pelayanan kesehatan merata bagi semua kalangan masyarakat khususnya remaja putri yang merupakan kelompok usia yang harus mendapat perhatian lebih. Diharapkan remaja putri rutin mengonsumsi TTD dan vitamin agar asupan nutrisi tercukupi serta memeriksakan kesehatan secara berkala.

Tujuan inovasi PPR adalah:

1. Meningkatkan angka kontak tenaga kesehatan dengan remaja putri
2. Status kesehatan remaja putri terpantau oleh tenaga kesehatan baik melalui sistem online maupun sistem offline melalui kunjungan rumah dan kunjungan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja puskesmas.
3. Meningkatnya derajat kesehatan pada remaja putri dalam hal persiapan menjadi calon ibu di masa depan
4. Lintas sektor mengetahui serta ikut memantau kesehatan remaja putri di wilayahnya.



10. POSYANDU SORE

Posyandu adalah suatu Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat, di mana salah satu tujuan pelaksanaan posyandu adalah sasaran yang datang di posyandu lebih 80 persen dari jumlah sasarannya. Kenyataannya di posyandu Butta toa BTN Arakeke, sasaran yang datang pada hari posyandu sangat sedikit karena di pagi hari, orangtua bayi/balita sedang berada ditempat kerja masing- masing karena sebahagian besar adalah ASN dan karyawan swasta, sehingga tidak memiliki kesempatan membawa anaknya ke posyandu.

Atas kesepakatan petugas puskesmas, kader posyandu dan opini warga, maka pelaksanaan posyandu dipindahkan ke sore hari dengan harapan orang tua bayi/balita sudah kembali dari tempat kerjanya dan dapat membawa anaknya ke posyandu.

Sebelum inovasi “POSYANDU SORE” diimplementasikan, telah dilakukan sosialisasi secara internal staf Puskesmas Lasepang agar inovasi ini di dukung oleh semua lintas program yang ada, sosialisasi kepada lintas sektor, kader posyandu melalui lokmin lintas sektor, untuk warga penerima manfaat, sosialisasi dilakukan dengan mengunjungi rumah sasaran dan diumumkan melalui mimbar Mesjid.

Setelah inovasi berjalan, jumlah sasaran yang datang ke posyandu meningkat signifikan sehingga target yang diharapkan tercapai.

Untuk keberlanjutan inovasi dilakukan beberapa strategi; strategi institusional berupa regulasi, SK dan MOU. Strategi sosial berupa kolaborasi, partisipasi pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan inovasi dan strategi managerial dengan meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat di posyandu.

Tujuan inovasi ini yaitu :

Berangkat dari latar belakang tersebut maka Inovasi POSYANDU SORE digagas, diinisiasi dan diterapkan dengan tujuan agar jumlah sasaran yang hadir di posyandu bisa mencapai target, sehingga dengan sendirinya strata posyandu dapat meningkat dari yang awalnya strata Pratama bisa meningkat menjadi Purnama ataupun Mandiri dan semua sasaran dapat terlayani serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dapat terlaksana dengan baik.



11. SAMAWAKI (Sistim Aplikasi Menikah Bawa Pulang KK, KTP dan Buku Nikah)

Inovasi SAMAWAKI adalah solusi yang dikembangkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bantaeng untuk mengatasi permasalahan perkawinan yang belum tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK) dan perilaku masyarakat yang kadangkala setelah menikah nanti sudah terdesak (terkadang sudah di meja operasi) baru mengurus dokumen kependudukannya. Tujuannya memberikan pelayanan yang memudahkan dan membahagiakan masyarakat yang akan menikah. Inovasi ini berkolaborasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.

Inovasi SAMAWAKI dilakukan melalui layanan One Stop Service artinya pasangan menikah hanya mendaftarkan pernikahannya di KUA dan pada waktu pernikahan pasangan menikah akan mendapatkan 5 dokumen Kependudukan (3 Kartu Keluarga, 2 KTP) dan 2 Buku Nikah dari KUA.

Status **kawin belum tercatat** berimplikasi terhadap istri, suami, dan anak, salah satunya yaitu suami dan istri dianggap sudah kawin tetapi belum tercatat karena tidak ada buku nikah sehingga diperlukan bukti pendukung lain seperti SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) sebagai dokumen untuk menjadi pegangan bagi Dinas Dukcapil dalam penerbitan Akta kelahiran anak dari pasangan tersebut.

Dampak dari inovasi SAMAWAKI terlihat pada penurunan jumlah kawin belum tercatat di Kabupaten Bantaeng yaitu tahun 2020 sebanyak **53.770**, kemudian di tahun 2021 menjadi **50.776** dan di tahun 2022 sebanyak **46.240 orang** Sehingga terlihat trend penurunan jumlah kawin belum tercatat setelah adanya inovasi SAMAWAKI.

Inovasi SAMAWAKI sangat sesuai dengan kategori Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan. Ini memberikan akses layanan penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan merata bagi semua kalangan masyarakat, khususnya bagi pasangan yang akan menikah. Inovasi ini memungkinkan pasangan pengantin untuk menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan dokumen kependudukan sekaligus ketika mereka menikah, sehingga mengurangi masalah administrasi di kemudian hari dan biaya.

12. SENYUMAN ABIKU (Sehat Nyaman dan Aman Anakku Bebas Stunting dan Gizi Kurang)

Stunting adalah gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis yang



mengakibatkan anak tidak mencapai pertumbuhan yang sesuai usianya. Gizi kurang adalah suatu keadaan dimana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu.

Inovasi SENYUMAN ABIKU (sehat, nyaman dan aman anakku bebas stunting dan gizi kurang) ini selaras dengan kategori pemberdayaan masyarakat karena kehidupan sehat sejahtera dan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pelayanan kesehatan, edukasi dan penyuluhan khususnya masyarakat Kecamatan Sinoa.

Data program gizi Puskesmas Sinoa jumlah gizi kurang tahun 2020 (30 orang) tahun 2021 (28 orang), tahun 2022 (25 orang) dan stunting tahun 2020 (20 orang), tahun 2021 (18 orang), tahun 2022 (15 orang) dan khususnya Desa Bonto Tiro kasus balita gizi kurang tahun 2020 (9 orang), tahun 2021 (7 orang), tahun 2022 (6 orang) dan stunting tahun 2020 (8 orang), tahun 2021 (6 orang), tahun 2022 (6 orang).

Memantau pertumbuhan dan perkembangan balita yang ditimbang di posyandu untuk mengetahui status gizi balita. Adanya perhatian pemerintah setempat dengan balita yang mengalami gizi kurang dan stunting dengan mengalokasikan dana desa dengan pemberian PMT, pemberian multivitamin, pemberian bibit kepada sasaran dan adanya konvergensi desa terhadap penanganan gizi kurang dan stunting.

Tujuan inovasi adalah :

1. Menurunkan jumlah balita kasus stunting dan gizi kurang.
2. Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pola asuh dan pola makan balita.
3. Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan gizi.

13. PANDORA GESIT (Penggalangan Donor Darah Terintegrasi)

Dasar hukum Lahirnya inovasi Pandora Gesit berdasarkan amanat : (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

Masalah Inovasi ini lahir dari kondisi yang ada di RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang memiliki masalah penyediaan stok darah, dimana jumlah stok



darah di rumah sakit tidak memenuhi jumlah permintaan darah yang meningkat. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) seringkali mengalami kondisi kritis, yaitu minimnya persediaan darah aman yang dibutuhkan masyarakat. Akibatnya rumah sakit mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan transfusi darah.

Karena masih kurangnya stok darah yang bisa disediakan oleh UTDRS untuk melayani permintaan pasien, sehingga keluarga pasien harus mencari pendonor sendiri untuk mendonorkan darahnya, hal ini menyulitkan bagi keluarga pasien dalam mencari pendonor pengganti.

Ide solusi PANDORA GESIT adalah inovasi dari RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng. PANDORA GESIT adalah singkatan dari Penggalangan Donor Darah Terintegrasi. PANDORA GESIT merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan darah transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng.

Inovasi PANDORA GESIT merupakan solusi atas masalah kekurangan persediaan darah di Unit Transfusi Darah RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng. Inovasi ini diimplementasikan sejak tahun 2021 dengan melibatkan instansi-instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Puskesmas, Sekolah, Organisasi Masyarakat dan Tempat Ibadah. Dalam pelaksanaannya, inovasi ini didukung oleh tenaga-tenaga terlatih dan dilengkapi dengan fasilitas/sarana prasarana pendukung.

Hasil Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa output dari inovasi terlihat dari semakin meningkatnya jumlah kemitraan dan jumlah relawan pendonor dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan darah di RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu dapat terpenuhi untuk masyarakat di Kabupaten Bantaeng maupun kabupaten sekitar yaitu, Kabupaten Bulukumba, Jeneponto dan Selayar.

Hasil capaian inovasi PANDORA GESIT setelah diimplementasikan yaitu pada tahun 2021 kebutuhan darah sebesar 2.382 kantong darah dengan ketersediaan stok darah sebesar 2.595 yang berarti kebutuhan darah telah terpenuhi bahkan melebihi permintaan. Mitra PANDORA GESIT juga telah mencapai 54 mitra dengan jumlah pendonor mitra sebanyak 2.172 pendonor. PANDORA GESIT telah berhasil meningkatkan jumlah pendonor sukarela sebanyak 287 pendonor dan menurunkan jumlah pendonor pengganti menjadi 177 pendonor. Selain itu, jumlah relawan on call yang menjadi layanan unggulan PANDORA GESIT jumlahnya turut meningkat yaitu sebanyak 32 orang relawan.



Sejak Tahun 2021, UTDRS terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon pendonor sehingga keterlibatan berbagai pihak terhadap inovasi ini semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kemitraan dan jumlah relawan pendonor dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan darah di RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu dapat terpenuhi untuk masyarakat di Kabupaten Bantaeng maupun kabupaten sekitar yaitu, Kabupaten Bulukumba, Jeneponto dan Selayar.

Keunikan Inovasi PANDORA GESIT memiliki keunikan yaitu: (1). Adanya Kerjasama dengan pihak lain, tidak terbatas pada instansi-instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, tetapi juga melibatkan Organisasi Masyarakat seperti Karang Taruna dan Remaja Mesjid. (2). Dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, setiap tahun dibuat jadwal rutin untuk setiap lokasi penggalangan donor darah. (3). Ada relawan On Call yang siap melakukan donor darah sewaktu-waktu diperlukan, relawan On Call ini lahir dari hasil edukasi dan adanya inisiatif relawan yang ingin memberikan pengabdian. Setiap relawan diberikan reward berupa sertifikat, dan akan ada notifikasi pengingat kepada relawan yang akan mengingatkan waktu untuk melakukan donor darah rutin.

Tahapan Inovasi ini dimulai dari tahapan persiapan yang meliputi persiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, sosialisasi dan edukasi, dan kerjasama dengan mitra.

Tahapan implementasi yaitu pelaksanaan kegiatan penggalangan donor darah secara rutin dan berkelanjutan dengan melibatkan mitra dan relawan On Call.

Tahapan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengadakan evaluasi internal dan eksternal setiap

6 (enam) bulan, dengan melibatkan tim kerja, mitra, dan seluruh pihak yang terkait dengan inovasi ini.

Gagasan inovasi PANDORA GESIT lahir untuk menjamin ketersediaan darah transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng.

Adapun tujuan inovasi daerah ini adalah :

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan darah transfusi.
2. Memfasilitasi para masyarakat yang ingin berdonor darah.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan Kabupaten Bantaeng berada pada awal pelaksanaan periode pembangunan daerah tahun 2024-2026. Kondisi pada awal pelaksanaan pembangunan periode 2024-2026 ini akan membawa Bantaeng memasuki babak baru dalam masa transisi pembangunan jangka menengah daerah setelah dilaksanakannya pemilihan umum di tahun 2024 nanti. Oleh karena itu, dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pemahaman bahwa anggaran memiliki fokus dalam pencapaian prioritas-prioritas pembangunan khususnya dalam menyelesaikan pelaksanaan tahap akhir pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantaeng.

Pada dasarnya, perencanaan pembangunan perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah disekitarnya. Strategi pembangunan perlu memerhatikan kekhasan daerah yang menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah, perlu mengkaji pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek. Menentukan kebijakan perekonomian Kabupaten Bantaeng akan menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan “besaran anggaran” yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya.

Penataan ‘besaran keuangan’ berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh.

Pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pembelajaran tersebut akan menjadi titik tolak perumusan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya sudah tentu menunjukkan hasil-hasil yang dirumuskan dalam



monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Positif maupun negatifnya hasil pembangunan tersebut akan menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan tahunan periode ini maupun ke depan baik melalui penyempurnaan program dan kegiatan maupun penggantian program dan kegiatan yang lebih baik.

Rumusan perencanaan pembangunan 2024 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga melihat bagaimana perencanaan tahun 2024 baik pada level Provinsi Sulawesi Selatan maupun perencanaan Nasional. Selain itu, rancangan kerangka ekonomi makro daerah diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2024 untuk mewujudkan target pembangunan pada tahun berkenaan.

Guna melihat arah kebijakan perekonomian yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, analisis ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, apakah sudah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah atau belum sepenuhnya terlaksana. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berbagai kebijakan dalam rangka penanganan dan pemulihan pasca Pandemi Covid-19 yang telah terjadi, telah merubah tatanan pembangunan di segala aspek, terutama aspek perekonomian Kabupaten Bantaeng. Hal ini terlihat dari kinerja perekonomian Kabupaten Bantaeng mengalami penurunan pada tahun 2020. Upaya untuk mengembalikan ke kondisi normal terus dilakukan, disamping juga perlu untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya tertangani hingga saat ini.

3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian Kabupaten Bantaeng di tahun 2024, pemulihan perekonomian disertai dengan penguatan kapabilitas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM menjadi prioritas pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tema pembangunan



Kabupaten Bantaeng di Tahun 2024 adalah **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berdaya Saing Dan Berbudaya.**

Pada masa pemulihan pasca pandemi covid-19 ini, langkah yang diambil Kabupaten Bantaeng adalah mengembangkan perekonomian yang prorakyat selain dengan pemulihan usaha menengah dan besar. Hal ini dimaksudkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah serta perekonomian sektor informal yang mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Bantaeng untuk segera pulih kembali.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pertumbuhan suatu daerah dalam satu periode. Di masa pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020 sebesar 0,52 persen. Persentase pertumbuhan ekonomi tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,75 persen. Adapun berbagai kebijakan telah diupayakan dan memberi dampak positif hingga memberikan hasil pertumbuhan ekonomi yang cukup melesat hingga mencapai 15,45 persen di tahun 2022.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah

A. Tantangan Perekonomian Global

Pada tahun 2020, kita melihat dampak karena mengabaikan persiapan dan mengabaikan risiko jangka panjang. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengorbankan jutaan jiwa, tetapi juga telah memperlebar kesenjangan kesehatan, ekonomi, dan digital selama ini. Pada tahun 2020, dunia melihat dampak buruk karena mengabaikan risiko jangka panjang seperti pandemi, yang sekarang menjadi risiko genting berdasarkan Laporan Risiko Global 2021. Kaum minoritas yang terbelakang sebelum pandemi, kini berisiko kehilangan arah menuju masyarakat yang baru dan lebih adil yang bisa jadi terbuka dengan pemulihan pasca pandemi.

Terkait dengan akses teknologi dan keterampilan digital, kesenjangan antara mereka yang “punya” dan “tidak punya” berisiko kian melebar dan mempersulit ikatan sosial. Hal ini terutama akan memengaruhi generasi muda di seluruh dunia, karena kelompok ini menghadapi krisis global kedua dalam satu generasi dan bisa jadi kehilangan seluruh kesempatan dalam satu dekade ke depan. Tekanan keuangan, digital, dan reputasi yang disebabkan oleh COVID-19 juga mengancam banyak perusahaan dan tenaga kerja menjadi tertinggal untuk pasar masa depan. Meskipun potensi perbedaan ini dapat mengakibatkan perpecahan masyarakat di berbagai negara, namun pandangan geopolitik yang semakin tegang dan rapuh juga akan menghalangi pemulihan



global jika kekuatan tingkat menengah tidak memiliki suara di meja global.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global. Kondisi inipun berdampak hingga nasional maupun Kabupaten Bantaeng khususnya terhadap gejolak ekonomi baik makro maupun mikro daerah.

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Pandemi COVID-19 yang lebih lama dan berdampak besar dari perkiraan menyebabkan proses pemulihan ekonomi Indonesia masih akan berlanjut pada tahun 2024. Pada saat yang sama, pemerintah akan melanjutkan agenda reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19. Upaya akselerasi pemulihan dan reformasi struktural perekonomian diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali ke tingkat sebelum krisis pandemi dan terus mengalami pertumbuhan dengan lebih baik.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya beberapa kondisi dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekali pun terdapat *base effect*). Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit perbankan pada Januari 2023 tembus Rp6.310,88 triliun. Capaian ini, terpantau tumbuh 10,53 persen secara tahunan (*year-on-year/yoy*). Meski demikian jika dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, nilai ini terlihat melambat karena sebelumnya tumbuh 11,36 persen yoy.

Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ditambah lagi dengan kondisi fluktuasi inflasi yang menjadi sorotan sebagai upaya pemerataan kesejahteraan rakyat mengalami kenaikan. Perlu adanya intervensi pemerintah secara hierarki dari pemerintah pusat hingga



daerah dalam menyelesaikan berbagai fenomena yang berdampak negatif di kemudian hari.

Terkait dengan kebijakan dan kondisi perekonomian nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami “come back” dimana angka pertumbuhan ekonomi kembali berada pada capaian kondisi sebelum Pandemi Covid-19 muncul.

Perekonomian domestik sepanjang tahun 2022 mampu menunjukkan tren positif di tengah dinamika perekonomian global. Pemulihan ekonomi berlanjut seiring keberhasilan Pemerintah dalam menekan kasus harian Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 serta bagaimana pemerintah maupun para pengusaha menekan dampak dari gejolak geo-politik akibat perang Rusia-Ukraina memberikan ketahanan ekonomi yang cukup tinggi pada perekonomian Nasional.

Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh kinerja APBN selama tahun 2022. Di tengah eskalasi gejolak global di tahun 2022, peran APBN sebagai *shock absorber* menjadi demikian krusial. Disrupsi di sisi suplai akibat meningkatnya optimisme perbaikan ekonomi di sejumlah negara maju yang belum diikuti dengan perbaikan sisi produksi telah menyebabkan naiknya tekanan inflasi. Perang di Ukraina kemudian mengakibatkan gangguan pasokan sehingga harga komoditas, khususnya pangan dan energi, melonjak tajam. Akibatnya, banyak negara menghadapi tekanan inflasi yang sangat tinggi. Inflasi di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa, mencatatkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Transmisi global dampak inflasi tinggi ke domestik dapat ditekan dengan mengoptimalkan fungsi APBN sebagai *shock absorber*. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi, penambahan BLT terkait penyesuaian harga BBM, bantuan subsidi upah, serta penguatan dana transfer ke daerah untuk pengendalian inflasi digulirkan oleh Pemerintah. Inflasi domestik terkendali pada level yang moderat, hanya 5,5 persen di tahun 2022, sehingga daya beli



masyarakat dan keberlanjutan pemulihan ekonomi terjaga.

Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja positif sepanjang tahun 2022 sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional. Penerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai 115,6 persen dari target. Hal tersebut mendorong kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang defisitnya menjadi di bawah 3 persen.

Sebagai landasan menuju pembangunan tahun 2024, upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dengan defisit APBN diperkirakan mencapai 2,16 persen hingga 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, sesuai arahan Presiden RI bahwa APBN 2024 akan difokuskan pada program-program prioritas seperti penurunan kemiskinan dan stunting.

C. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 605,14 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan hampir mencapai 60 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 545,17 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 343,40 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 360,87 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 persen, tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,10 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,64 persen; Konstruksi sebesar 14,00 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 12,90 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,64 persen.

Realisasi pendapatan 24 Kabupaten/Kota hingga triwulan IV 2022 di



Sulawesi Selatan lebih baik dibandingkan triwulan IV 2021. Sejalan dengan realisasi pendapatan, realisasi belanja untuk keseluruhan 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan juga meningkat, terutama dikontribusikan oleh peningkatan belanja modal di tengah penurunan realisasi belanja lainnya.

Kemandirian fiskal Sulawesi Selatan hingga triwulan IV 2022 meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2021. Hal ini tercermin pada rasio jumlah PAD seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 24 Kabupaten/Kota) terhadap total pendapatannya yang meningkat, dari 20,36% menjadi 22%. Selain melalui pengembangan potensi daerah, peningkatan kemandirian fiskal daerah juga dapat didorong oleh pengelolaan pendapatan belanja keuangan daerah yang lebih baik. Salah satu faktor yang mendorong perbaikan tersebut adalah optimalisasi pendapatan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang bersinergi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sehingga kebocoran PAD dapat diminimalkan.

Inflasi yang sempat meningkat, mulai menunjukkan penurunan di triwulan IV 2022. Inflasi gabungan 5 Kota IHK di Sulawesi Selatan yang sempat tercatat sebesar 2,40 persen (yoy) di 2021, terus meningkat dan mencapai level tertingginya di 6,35 persen (yoy) pada triwulan III 2022. Tren kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas akibat peningkatan tensi geopolitik dunia dan ketidakpastian iklim yang terjadi secara global. Menyikapi hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui implementasi berbagai program yang mengacu pada kerangka strategi 4K (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Upaya tersebut berhasil menurunkan laju inflasi pada triwulan IV 2022, hingga mencapai 5,77 persen (yoy) di akhir 2022.

Kinerja stabilitas sistem keuangan Sulawesi Selatan tetap terjaga di tengah risiko domestik dan global. Hal ini didukung oleh meningkatnya kinerja sektor Rumah Tangga (RT), korporasi, dan perbankan. Penyaluran pinjaman ke sektor RT tercatat meningkat, namun konsumsi RT pada masyarakat berpendapatan Rp1-4 juta masih tertahan pascapengalihan subsidi BBM. Kinerja intermediasi perbankan ke sektor korporasi juga meningkat di tengah berbagai tantangan global dengan Non Performing Loan (NPL) yang masih terjaga di bawah *threshold* 5 persen.



Secara keseluruhan, kinerja perbankan meningkat pada triwulan laporan, antara lain terlihat dari ROA (return on asset) yang lebih tinggi, peningkatan penyaluran kredit, dan peningkatan pembiayaan syariah. Lebih lanjut, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) triwulan IV 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Di sisi lain, penyaluran kredit kepada UMKM melambat pada triwulan laporan, namun dengan kualitas kredit yang semakin baik. Sektor UMKM ini potensial untuk didorong melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sementara itu, pembiayaan fintech meningkat di tengah risiko (TWP 90) yang lebih rendah pada triwulan laporan.

D. Tantangan Perekonomian Daerah

Dinamika perekonomian di Bantaeng mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang masih berlanjut di tahun 2021 termasuk didalamnya adanya gejolak geopolitik sebagai dampak peperangan antara Rusia dan Ukraina. Rencana untuk memulihkan dan mempertahankan kualitas perekonomian yang sinergis dengan rencana provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Pusat dilakukan salah satunya dengan pengembangan investasidi Kabupaten Bantaeng terutama berkaitan dengan pengembangan industri logam dasar sebagai upaya pemerintah untuk mendorong sentra pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan sekaligus mendorong hilirisasi pertambangan di Sulawesi Selatan. Adapun pemulihan ekonomi di Kabupaten Bantaeng, provinsi maupun nasional yang dilakukan sejak tahun 2020 mulai tampak hasilnya pada tahun 2022 yang terlihat dari peningkatan capaian indikator makro pembangunan sebagai berikut:

Tabel III.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022

No.	Indikator	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	Nasional
1	IPM	69,69	72,82	72,91
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,07	8,63	9,54
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,72	4,51	5,86
4	Indeks Gini	0,320	0,377	0,384
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	15,45	5,09	5,31
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)	61,00	65,59	71,00

Dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Bantaeng dibutuhkan indikator kinerja utama baik IPM, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi,



hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, income per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Relevansi data-data tersebut akan membantu pengambilan kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan terarah. Angka PDRB dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.

Sebagai wilayah agraris, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Bantaeng tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya, hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembentukan PDRB Bantaeng.

Kontribusi sektor lapangan usaha terbesar pada perekonomian Bantaeng pada tahun 2022 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Meskipun mengalami penurunan, namun masih mendominasi hingga mencapai 23,72 persen. Sektor lain yang mendominasi perekonomian Bantaeng adalah sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi masing-masing 16,83 persen dan 18,47 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang minim kontribusi terhadap perekonomian daerah adalah sektor pengadaan listrik dan gas (0,34%) dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,06%).

Tabel III.2
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,1	4,5	-0,06	4,36	0,35
B	Pertambangan dan Penggalian	9,9	5,0	6,41	6,22	4,6
C	Industri Pengolahan	18,0	68,8	-9,50	43,76	122,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,1	49,6	-2,36	69,30	127,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,9	5,9	3,70	0,11	4,17
F	Konstruksi	9,1	8,0	0,23	11,04	4,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,9	10,7	-2,40	7,33	9,54
H	Transportasi dan Pergudangan	10,0	8,4	-4,19	6,79	12,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,2	8,2	5,06	4,72	14,95
J	Informasi dan Komunikasi	9,9	9,9	17,69	6,51	7,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,3	4,7	8,08	6,15	1,52
L	Real Estate	4,9	7,2	6,77	4,92	4,61
M,N	Jasa Perusahaan	10,2	6,6	-3,20	3,76	11,85
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,4	12,3	-0,84	0,83	-0,48
P	Jasa Pendidikan	6,5	9,1	3,81	4,69	4,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,5	8,1	16,98	7,86	7,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	13,3	9,2	-8,82	9,06	9,16
Laju Pertumbuhan Ekonomi		8,13	10,75	0,52	8,86	15,45

Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2023

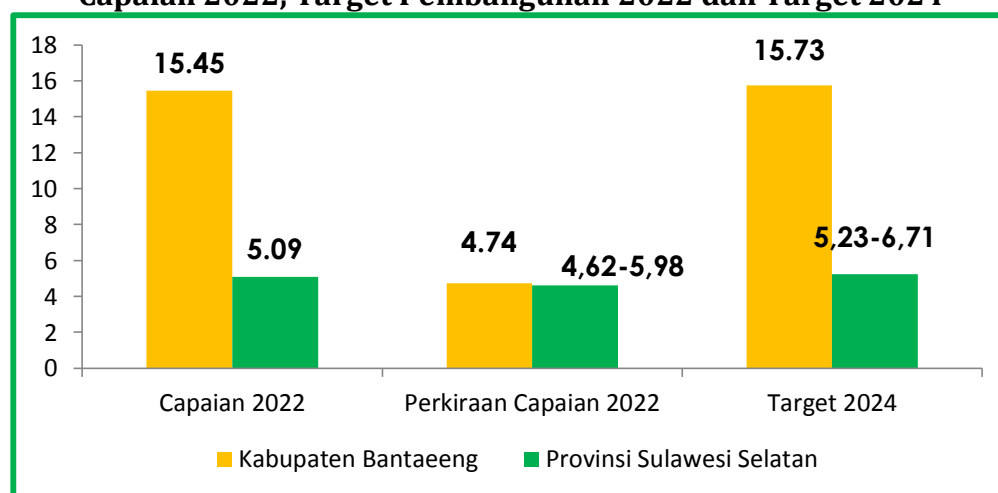
Salah satu tolak ukur pembangunan suatu daerah yaitu dengan mengamati pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itu, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor lapangan usaha yang potensial.



Laju pertumbuhan ekonomi di Bantaeng mengalami peningkatan secara bertahap dalam kurun waktu empat tahun terakhir dengan pola perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Bantaeng mencapai 8,13 persen, angka tersebut meningkat hingga pada tahun tahun 2019 mencapai 10,75 persen. Peningkatan ini tidak bertahan pada tahun 2020 dimana terjadi perlambatan yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 0,52 persen pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang menyerang di setiap sendi-sendi perekonomian dan berdampak negatif pada hampir seluruh sektor pembangunan daerah. Kemudian, sebagai hasil dari upaya penanganan dan pemulihan perekonomian daerah selama masa Pandemi COVID-19, maka pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dengan capaian 8,86 persen dan 15,45 persen yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Grafik III.1.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024**



Sumber Data : BPS, 2023 (diolah)

Pada tahun 2022, penanganan dan pemulihan dampak Pandemi terhadap perekonomian Bantaeng terus dilakukan. Progres positif dialami hampir seluruh kategori lapangan usaha dalam pergerakan bidang di sektor pembangunan masing-masing. Sebagai sektor yang terdampak cukup berat pada tahun 2020, kategori industri pengolahan mampu bangkit dari keterpurukan dengan capaian pertumbuhan ekonomi sektoral tahun 2022 mencapai 122,89 persen. Adapun pada sektor dominan lainnya yakni pertanian, konstruksi dan perdagangan besar dan



eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor memiliki pertumbuhan ekonomi sektoral sebesar 0,35 persen; 4,60 persen dan 9,54 persen.

Pada tahun 2022, Kabupaten Bantaeng memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang mencapai 15,45 persen. Angka ini tentu saja jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mencapai 5,09 persen.

Di tahun 2022, perkiraan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran angka 4,29-5,72 persen di atas perkiraan capaian target pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,10-5,55 persen. Di tahun 2022 ini, capaian tersebut lebih dari 100 persen dimana perekonomian daerah mulai berkembang kembali dikarenakan gejolak masyarakat yang berusaha bangkit dari pandemi walaupun dengan protokol kesehatan yang harus ditegakkan. Sedangkan di tahun 2024, diharapkan pandemi covid-19 angka penyebarannya sudah berkurang dikarenakan program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah pusat sudah hampir merata di seluruh Indonesia, sehingga optimisme untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

b. PDRB per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

PDRB per kapita di Bantaeng mengalami peningkatan signifikan yang mengindikasikan tingginya peningkatan PDRB yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2017, PDRB per kapita Bantaeng sebesar Rp.41,63 juta dan meningkat dalam waktu lima tahun mencapai Rp.61,00 juta pada tahun 2022.

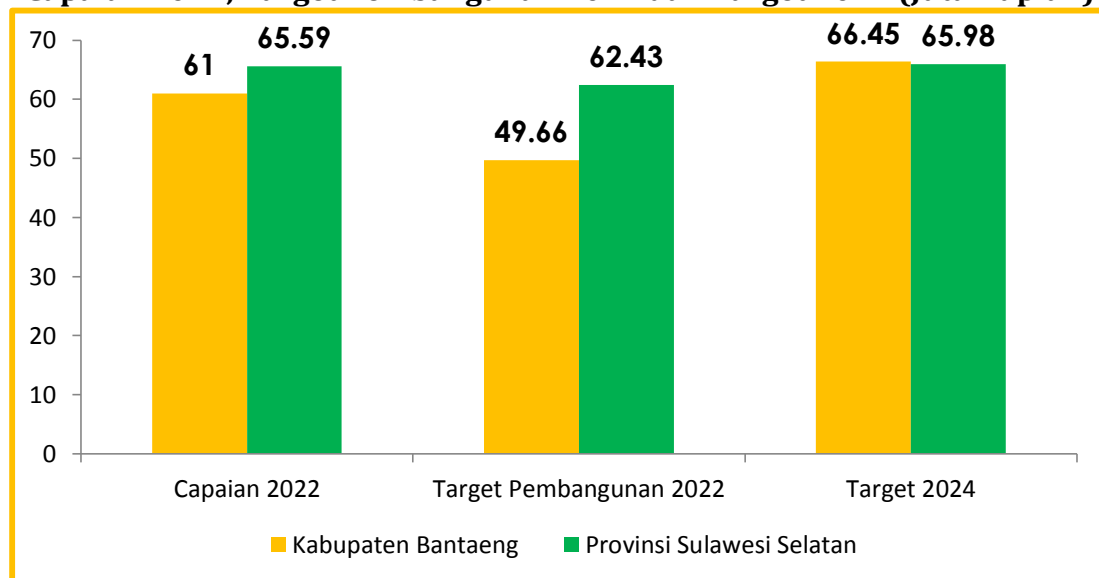
Jika dibandingkan dengan target PDRB per Kapita pada dokumen RPJMD, maka capaian PDRB per Kapita tahun 2022 sudah jauh di atas



target RPJMD sehingga tingkat capaian mencapai lebih dari 100 persen dengan status capaian “Sangat Tinggi”.

Grafik III.2.

**Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024 (Juta Rupiah)**



Sumber Data : BPS, 2023 (diolah)

c. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain kesempatan, kualitas pendidikan, dan lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini”, rasio ini menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1, maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

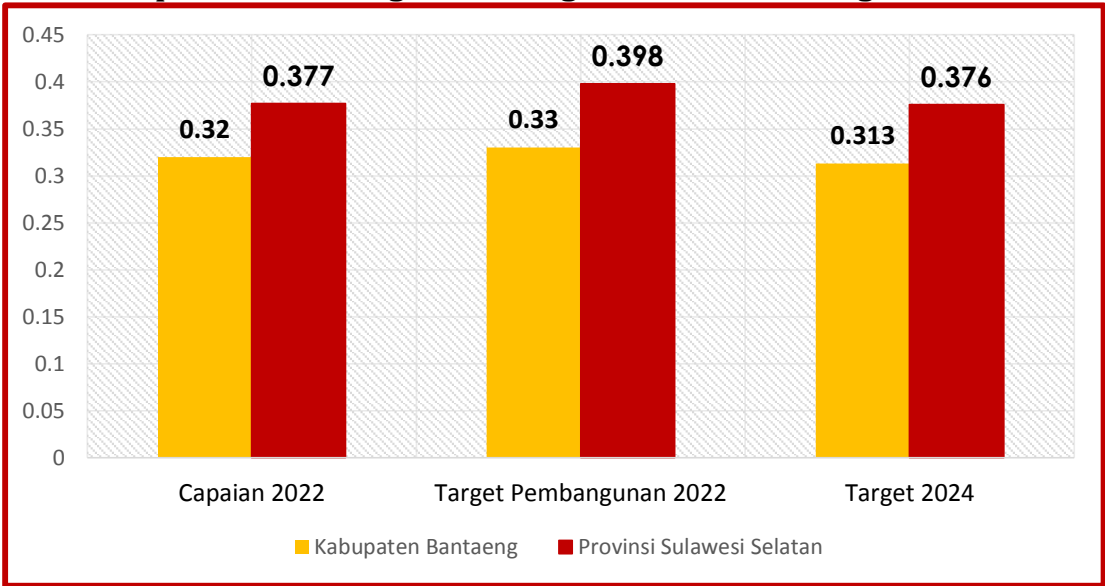
Pemerataan kesejahteraan di Bantaeng masih fluktuatif dan tergolong belum merata secara baik yang terlihat pada tingginya angka indeks gini sebesar 0,320 pada tahun 2022. Pemerataan kesejahteraan di Bantaeng secara umum lebih baik dibandingkan seluruh Provinsi Sulawesi Selatan (0,377). Untuk perkiraan target 2024, Kabupaten Bantaeng merumuskan angka dengan menurunkan selama beberapa tahun hingga tahun 2024 mencapai 0,313. Hal ini diasumsikan bahwa pemerataan



kesejahteraan terjadi karena permasalahan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh lapisan masyarakat.

Grafik III.3.

Indeks Gini Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024



Sumber Data : BPS, 2023 (diolah)

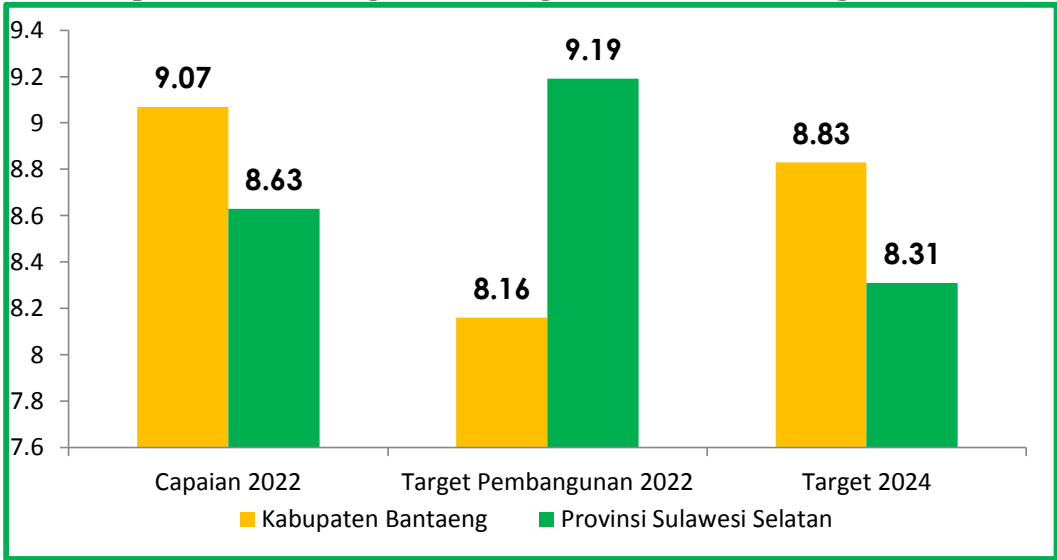
d. Angka Kemiskinan

Salah satu indikator berhasilnya Pemerintah yaitu ketika Pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 9,07 persen dimana angka ini mengalami penurunan dibandingkan kemiskinan tahun 2021 dimana pada tahun tersebut capaian tertinggi angka kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan dampak pandemi yang cukup signifikan terjadi pada pertengahan 2020 hingga awal 2021. Untuk di tahun 2024, angka kemiskinan di kabupaten Bantaeng diperkirakan turun secara signifikan. Hal ini sejalan dengan provinsi, dimana tahun 2024 diharapkan mengalami penurunan dengan asumsi perekonomian kembali berjalan normal.



Grafik III.4.
Angka Kemiskinan Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024



Sumber Data : BPS, 2023 (diolah)

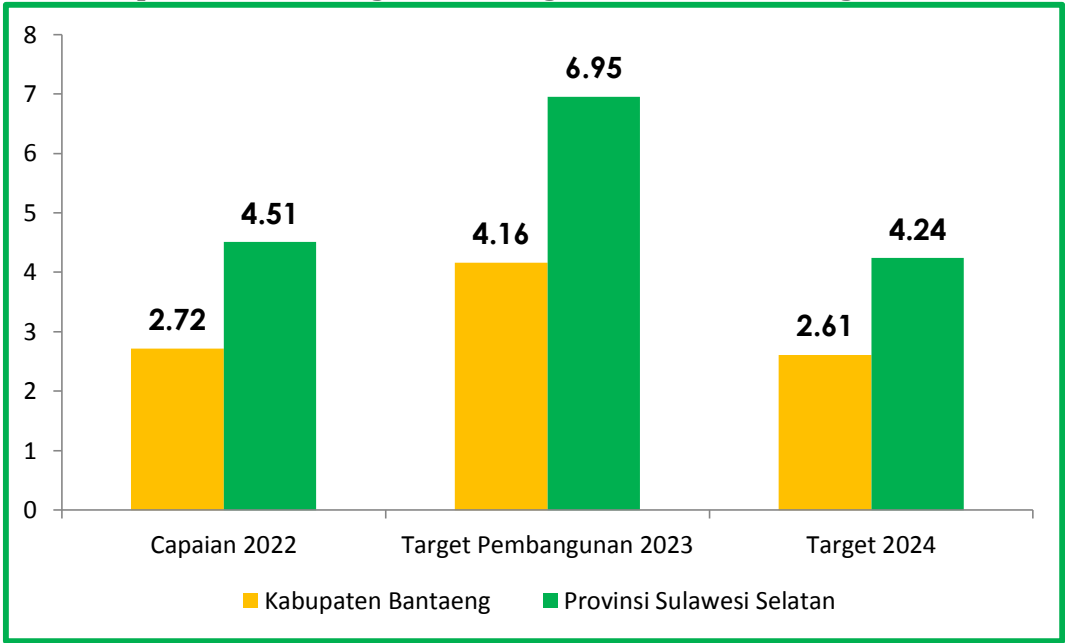
e. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantaeng memiliki tren fluktuatif naik turun dalam setiap periodenya.

TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran. Angka pengangguran Kabupaten Bantaeng sebesar 3,98 persen pada tahun 2019, namun dikarenakan Pandemi COVID-19, maka pengangguran meningkat kembali hingga mencapai 4,27 persen pada tahun 2020. Setelah adanya penanganan dan pemulihan pasca pandemi, pengangguran berangsur turun kembali hingga mencapai angka 2,72 persen pada tahun 2022. Secara nilai angka pengangguran Bantaeng lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Sulawesi Selatan maupun Nasional pada tahun 2022. Diperkirakan di tahun-tahun mendatang pengangguran di Bantaeng terus menurun dikarenakan lapangan usaha baru yang berkaitan dengan pertambangan yang akan dibangun di Bantaeng.



Grafik III.5.
Tingkat Pengangguran Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024



Sumber Data : BPS, 2021 (diolah)

Indikator utama dalam dokumen perencanaan daerah terangkum dalam Indikator kinerja makro. Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan PP 13/ tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja makro Kabupaten Bantaeng tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel III.3
Indikator Kinerja Makro
Capaian 2022, Target Pembangunan 2022 dan Target 2024

No.	Indikator	CAPAIAN 2022		TARGET 2022 (DOK RPJMD)		TARGET 2024 (DOK RPD)	
		Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan
1	IPM	69,69	72,82	69,56	72,68	70,29	74,41
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,07	8,63	8,16	9,19	8,83	8,31
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,72	4,51	4,16	6,95	2,61	4,24
4	Indeks Gini	0,32	0,377	0,33	0,398	0,313	0,376
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	15,45	5,09	4,74-6,32	4,62-5,98	15,73	5,23-6,71
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)	61	65,59	49,66	62,43	66,45	65,98

Sumber data: Bappeda Kabupaten Bantaeng Tahun 2023

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2019–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, kebijakan pembangunan tahun 2023, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2024 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 dimana gelombang kedua krisis tersebut telah terlewati.

RKP Tahun 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 ditekankan pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Berdasarkan skenario yang disusun Bappenas, sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2024 adalah sebesar 5,3 hingga 5,7 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5 hingga 5,7 persen, rasio gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) di kisaran 73-74, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27, nilai tukar petani (NTP) 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga 110.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi daerah khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, dan Kabupaten Bantaeng menerima pendapatan transfer pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan, dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Bantaeng diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD dan Dana

Perimbangan agar proporsi dana dari pemerintah pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi system perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, dan Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta upaya penambahan obyek retribusi berdasarkan potensi perkembangan Kabupaten Bantaeng.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara professional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan

prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan pendapatan tahun anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating data base potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan dis-insentif.
3. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola PAD
4. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan.
5. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.
6. Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
7. Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan.
8. Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

Sementara itu, pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diharapkan terus meningkat. Namun dengan adanya koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat termasuk kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kabupaten Bantaeng dan Provinsi, diharapkan mengalami peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan selanjutnya dialihkan kepada DAK dan diperkirakan akan meningkatkan target pendapatan Dana Perimbangan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber Lain-Lain pendapatan Daerah Yang Sah.



Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2021-2022, APBD 2023 serta proyeksi 2024 dan prognosis 2025 dari masing-masing jenis pendapatan daerah Kabupaten Bantaeng secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel III.4
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2025
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 (Juta Rupiah)

URAIAN	REALISASI		RKPD 2023	PROYEKSI 2024	PROGNOSIS 2025
	2021	2022			
PENDAPATAN	974.581	1.001.963	1.049.965	996.811,69	1.118.263
PENDAPATAN ASLI DAERAH	121.642	175.816	194.232	220.781,44	179.350
Pendapatan Pajak Daerah	21.970	52.949	43.063	75.372,64	54.013
Pendapatan Retribusi Daerah	6.621	7.003	31.145	30.364,80	7.144
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.424	7.193	12.000	17.000,00	7.338
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	88.626	108.670	108.024	98.044,00	110.854
PENDAPATAN TRANSFER	817.797	789.928	798.734	760.519,89	901.966
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	712.503	689.973	754.248	711.819,89	800.003
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	62.099	44.938	44.486	-	45.841
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	43.194	55.016	-	48.700,00	56.122
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	35.142	36.219	57.000	10.204,35	36.947
Pendapatan Hibah	1.514	21.689	57.000	10.204,35	22.125
Pendapatan Lainnya	33.628	14.530	-	-	14.822

sumber: BPKD Kab.Bantaeng Tahun 2023



Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng, antara lain sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
- b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat;
- c. Pemberian *Reward* dan *Punishment*;
- d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- e. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
- g. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi.
- h. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- i. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
- j. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;
- k. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
- l. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya; dan
- m. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Dengan berpedoman pada prinsip – prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2024 tetap disusun dengan pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2024 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.



- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

a. Belanja Operasi yang terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

- Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN, mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji ASN
- Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas ASN dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
- Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dapat diberikan berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah, termasuk pegawai yang dipekerjakan pada pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka program Pemerintah Daerah yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga



3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

5) Belanja Hibah

- Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepadabadan/ lembaga/ organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan.

6) Belanja Bantuan Sosial

- Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.



- Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja Tidak Terduga

Tujuan pembiayaan untuk Belanja Tidak Terduga yang disediakan adalah untuk kegiatan yang sifatnya tanggap darurat, serta dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah.

d. Belanja Transfer

- 1) Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dan Parpol

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2024 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini



Tabel III.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2024
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 (Juta Rupiah)

URAIAN	REALISASI		RKPD 2023	PROYEKSI 2024	PROGNOSIS 2025
	2021	2022			
BELANJA	962.752	991.148	1.002.997	995.311,69	1.118.262,92
BELANJA OPERASI	731.802	722.068	772.326	753.926,10	845.645,00
Belanja Pegawai	412.847	396.802	440.468	448.322,43	452.857
Belanja Barang	301.779	311.257	328.508	239.970,02	378.497
Belanja Bunga	-	-		-	
Belanja Hibah	14.931	10.597	1.471	65.602,46	10.810
Belanja Bantuan Sosial	2.245	3.412	1.879	31,2	3.481
					-
BELANJA MODAL	143.734	175.254	134.362	145.061,64	178.776
Belanja Tanah	1.500	2.900	6.300	3.000,00	2.958
Belanja Peralatan dan Mesin	58.786	50.843	15.770	9.276,64	51.865
Belanja Gedung dan Bangunan	21.295	30.930	22.852	8.445,86	31.552
Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	59.518	90.533	89.408	124.339,13	92.353
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.635	47	32	-	48
					-
BELANJA TAK TERDUGA	300	750	3.046	6.488,88	765
Belanja Tak Terduga	300	750	3.046	6.488,88	765
TRANSFER	86.916	93.077	93.264	89.835,07	93.077
Transfer Bagi Hasil Ke Desa	-	-	800	527,54	-
Transfer Bantuan Keuangan	86.916	93.077	92.464	89.307,52	93.077

Sumber : BPKD Kab. Bantaeng Tahun 2023



Berdasarkan hasil analisis, secara total proyeksi Belanja Operasi mengalami kenaikan yang khususnya disebabkan oleh kenaikan belanja barang dan jasa. Adapun pegawai mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2021. Secara umum, belanja barang modal juga mengalam kenaikan dengan berfokus pada belanja gedung dan bangunan serta belanja jalan, irigasi dan jaringan.

Penggunaan belanja operasi dibagi menjadi tiga kategori prioritas. Prioritas I digunakan untuk memenuhi belanja wajib mengikat, di antaranya belanja pegawai, belanja rutin Perangkat Daerah seperti tagihan listrik, telepon, air dan internet. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi komponen Belanja Operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik $\pm 1,00\%$ pertahun. Penekanan kenaikan belanja pegawai sebesar 1,00% bertujuan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai. Prioritas II meliputi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program-program unggulan Bupati. Prioritas III digunakan untuk membiayai program-program urusan di luar prioritas I dan II. Selain itu, pada tahun 2024 perlu diprioritaskan belanja operasi untuk dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM) di tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 160.636,46 juta,- atau 16,14 persen dari total Belanja Daerah dengan rincian alokasi sebagai berikut :

Tabel III.6
Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bantaeng di tahun 2024

No	Urusan	Nama Program	Pagu Anggaran (Jt Rp.)	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	41.560,51	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	30,60	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5.105,48	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	79.937,78	Dinas Kesehatan



No	Urusan	Nama Program	Pagu Anggaran (Jt Rp.)	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.204,36	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	26	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2	RSUD PROF. DR. ANWAR MAKKATUTU
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.353,65	RSUD BANYORANG
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SSA)	1.050,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	450	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	419,37	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.201,29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.489,79	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Program Penanggulangan Bencana	535,6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	71,18	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	598,09	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	189	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	411,76	Dinas Sosial
Jumlah			160.636,46	

Sumber: BPKAD, 2023



Adapun dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, maka dirumuskan program prioritas pembangunan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bantaeng. Adalam pelaksanaan di tahun 2024, terdapat 59 program prioritas dengan anggaran sebesar Rp. 383.735.985.152,- atau 38,55 persen dari total belanja. Adapun rincian dari 59 program prioritas tertuang pada tabel dibawah ini:



Tabel III.7

Kapasitas Rill Keuangan Daerah Program Prioritas Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
1	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Sumber Daya Manusia	70	309.999.800	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah tepat waktu	100	1.392.260.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	98	5.049.347.276	Sekretariat Daerah
2	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindak Lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	88	3.952.813.200	Inspektorat Daerah
3	Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	3.201.288.500	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Program Peningkatan Peran Partai Politik D A N L E M B A G A Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik (Dengan Satuan:Persen)	100	31.776.315.350	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4	Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan berkeadilan berbasis IT	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Sd/Mi/Paket A (Dengan Satuan:Persen)	98,23	41.560.506.300	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Smp/Mts/Paket B (Dengan Satuan:Persen)	96,87		
			Angka Partisipasi Penduduk Usia 5-6	83,91		



Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
5	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat		Tahun Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Dengan Satuan:Persen)			
			Angka Partisipasi Penduduk Pada Pendidikan Non Formal Usia 7-18 Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:Persen)	100		
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar kualifikasi SI/DIV dan Bersertifikat Pendidik	90	5.105.481.400	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
5	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Pp/Pkb, Lks Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan).	70	57.848.500,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	80	71.176.000	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	33,33	598.093.800	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	33,33	188.998.900	Dinas Sosial
6	Pengendalian harga dan ketersediaan barang	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Perekonomian, Pembangunan dan Pengelolaan Barang dan Jasa	95	1.026.700.400	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (Dengan	5	80.000.000	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
		Dan Barang Penting	Satuan:%)			
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (Dengan Satuan:%)	60	221.490.000	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Penunjang Pangan Utama (Dengan Satuan:Persen)	100	185.269.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
7	Pengembangan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berprestasi (Dengan Satuan:Persen)	80	1.306.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik (Dengan Satuan:Persen)	80	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:Persen)	16,05	2.683.386.798	Dinas Pengendalian Penduduk Dan K E L U A R G A Berencana
8	Peningkatan produktivitas pertanian daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	5	390.626.100	Dinas Pertanian K A B U P A T E N Bantaeng
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	4,3	257.530.000	Dinas Pertanian K A B U P A T E N Bantaeng
		Program Pengelolaan Perikanan	Produksi perikanan Budidaya	98085	150.067.800	Dinas Perikanan Dan Kelautan



Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
		Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	6662,7	81.914.300	Dinas Perikanan Dan Kelautan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	27,39	37.532.400	Dinas Perikanan Dan Kelautan
9	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kontribusi sektor Sarana Prasarana pertanian/perkebunan terhadap PDRB	5	301.817.300	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten (Dengan Satuan:Persen)	0,5	149.748.100	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	50	1.517.200	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
10	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	80%	1.746.173.100	Dinas Perhubungan
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Terpasang dan Dalam Kondisi Baik	80%		
			Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Angka)	250		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Kondisi Jalan, Jembatan Dan Gorong- Gorong Baik (Dengan Satuan:%)	69	81.600.000.000	Dinas Pekerjaan U M U M D A N Penataan Ruang
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	65	419.370.868	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan



Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
		Program Kawasan Permukiman	Persentase pemukiman yang tertata	99,75	33.899.500	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Terselenggaranya PSU Perumahan Permukiman	52	177.265.000	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	90	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan U M U M D A N Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Dengan Satuan:%)	82	450.000.000	Dinas Pekerjaan U M U M D A N Penataan Ruang
11	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	58	4.911.982.900	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditangani	100	752.399.600	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Prosedur	40	19.999.800	Dinas Lingkungan Hidup



Disamping program pembangunan prioritas tersebut, telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing Perangkat daerah di Kabupaten Bantaeng.

Tabel III.8
Pagu Belanja Perangkat daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu RKPD tahun 2024
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	274.186.896.009
2	Dinas Kesehatan	108.844.847.337
3	RSUD Prof. Dr. Anwar Makkatutu	101.952.763.794
4	RSUD Banyorang	9.906.696.541
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	130.599.920.757
6	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan	6.253.847.480
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.754.541.968
8	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	10.456.361.546
9	Dinas Sosial	4.409.051.212
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	3.821.205.541
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.616.109.507
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.578.724.165
13	Dinas Lingkungan Hidup	11.267.426.000
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.946.734.070
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6.574.234.464
16	Dinas Perhubungan	5.309.086.912
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	5.608.608.205
18	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	4.951.302.587
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.828.587.430
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	3.264.541.472
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.452.792.216
22	Dinas Perikanan Dan Kelautan	3.107.979.384
23	Dinas Pariwisata	4.853.765.195
24	Dinas Pertanian	11.947.917.754
25	Sekretariat Daerah	36.135.512.555
26	Sekretariat DPRD	21.951.144.520
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.557.789.916
28	Badan Pengelola Keuangan Daerah	119.236.631.748
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.516.357.572
30	Inspektorat Daerah	9.979.995.200
31	Kecamatan Bantaeng	8.630.594.102
32	Kecamatan Bissappu	8.032.644.700
33	Kecamatan Eremerasa	2.450.356.108
34	Kecamatan Gantarangkeke	3.512.930.158



No	Nama Perangkat Daerah	Pagu RKPD tahun 2024
35	Kecamatan Pajukukang	1.923.746.500
36	Kecamatan Sinoa	1.368.822.428
37	Kecamatan Tompobulu	5.116.671.976
38	Kecamatan Uluere	1.611.365.355
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	35.793.182.874
TOTAL		995.311.687.258

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 sebagaimana yang tergambar pada diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2024;
- 2) Menggunakan SiLPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
- 3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- 4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.



Tabel III.9
Analisis Pembiayaan Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2025

URAIAN	REALISASI		RKPD 2023	PROYEKSI 2024	PROGNOSIS 2025
	2021	2022			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	930	-	-	-	-
Penggunaan SILPA	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	930	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500	1.500	-	1.500,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500	1.500	-	1.500,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-

Sumber : BPKD Kab. Bantaeng 2023



3.2.4. Kapasitas Riil Pendanaan Tahun 2024

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.10
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2021-2025 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2021	Realisasi 2022	RKPD 2023	Proyeksi th 2024	Prognosis th 2025
1.	Pendapatan	974.580,7 7	1.001.962,67	1.049.965,3 3	996.811,69	1.118.262,9 2
2.	Penerimaan Pembiayaan	929,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PENERIMAAN					
	(Dikurangi):					
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	501.563,8 1	492.128,0 3	536.777,12	611.748,84	557.509
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	473.946,79	509.834,64	513.188,21	385.062,85	560.753,92

Sumber: BPKAD Kabupaten Bantaeng, 2023 (diolah)

Kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5886 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, sebagian besar



belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel III.11
Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Pagu
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2021-2025 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi 2021	RKPD Perubahan 2022	2023 (RKPD)	Proyeksi 2024	Prognosis 2025
1	Pendapatan	974.580,77	1.001.962,67	1.049.965,33	996.811,69	1.118.262,92
2	Penerimaan Pembiayaan	929,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapasitas Riil Pagu OPD		975.510,59	1.001.962,67	1.049.965,33	996.811,69	1.118.262,92

Sumber: BPKAD Kabupaten Bantaeng, 2023 (diolah)



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026 khususnya pada agenda pembangunan tahun pertama. RKPD 2024 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPD.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantaeng mempertimbangkan dari hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Prioritas pembangunan daerah ini harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun optional sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Dalam penyusunan prioritas RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026 dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Memedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis Program Provinsi (RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024) dan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP tahun 2024;
3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2024; serta;
4. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.



4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng

RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 merupakan pelaksanaan pembangunan RPD 2024-2026. Pembangunan tahun 2024 memedomani tujuan, sasaran pembangunan tahun 2024 dari dokumen RPD Kabupaten Bantaeng 2024-2026. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD). Sesuai dengan penjabaran rumusan Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bantaeng tahun 2024-2026. Berikut penjabaran tujuan dan sasaran sesuai dokumen RPD sebagai berikut:

Tabel IV.1
Tujuan, Sasaran dan Target RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN TARGET
			2022	2024
Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	44,65 (C)	51,36 (CC)
Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	poin	62,55 (B)	65,26 (B)
Sasaran 1.2 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Indeks Persepsi Anti Korupsi	poin	86,21	87,42
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	75,847	78,139
Sasaran 1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	poin	81,29	98,50
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	poin	69,69	70,97
	Tingkat Kemiskinan	%	9,07	8,40
Sasaran 2.1	Indeks Pendidikan	-	0,569	0,576



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN TARGET
			2022	2024
Meningkatnya kualitas pendidikan dan kepribadian masyarakat				
Sasaran 2.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	0,783	0,788
Sasaran 2.3 Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	PDRB per Kapita	Juta/ Kapita	61,00	66,45
	Inflasi	-	4,12 ¹	3,31
	Indeks Gini	-	0,320	0,310
Sasaran 2.4 Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,72	3,34
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	15,45	8,84
Sasaran 3.1 Meningkatkan kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian	%	0,35	1,68
	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	122,89	50,00
	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	9,54	10,77
Sasaran 3.2 Meningkatkan layanan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur	-	NA	70
Sasaran 3.3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Bantaeng	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	NA	1

Dengan melihat sasaran, indicator dan target pembangunan tahun 2024, terlihat beberapa indicator terjadi penyesuaian target. Hal ini dikarenakan



capaian tahun 2022 merupakan "pantulan" dampak pasca pandemi yang menyebabkan berbagai aktivitas kegiatan ekonomi kembali ke normal. Kemudian, penyesuaian target juga disesuaikan dengan arahan target yang ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Bantaeng.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan RPD Kabupaten Bantaeng 2024-2026. RKPD ini disusun berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2024 yang dirumuskan dalam RPD Kabupaten Bantaeng 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bantaeng harus memedomani prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD Provinsi Sulawesi Selatan) dan prioritas pembangunan nasional (RKP 2024).

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan Kabupaten Bantaeng harus mampu mendukung dan sejalan dengan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pusat (Nasional). Pada tahun ini Pemerintah Pusat menyikapi adanya isu global terkait resesi ekonomi, isu international yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan. Dengan memahami gejolak dinamika pemerintahan, sesuai keputusan Pemerintah Pusat maka tema pembangunan Nasional tahun 2024 ini adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Dengan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024 sebagai berikut:

- Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



- Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dengan tema dan prioritas pembangunan diatas maka sasaran dan arah kebijakan untuk tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Gambar IV.1
Sasaran dan target pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2024



Menindaklanjuti prioritas, tema dan sasaran pembangunan yang dijabarkan diatas maka berikut arah kebijakan sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas dan mencapai sasaran pembangunan nasional:

- Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan
- Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan
- Penguatan Daya saing usaha
- Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
- Percepatan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara)
- Pelaksanaan pemilu 2024

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Dalam mewujudkan keselarasan pembangunan dan memaksimalkan pencapaian pembangunan wilayah Kabupaten Bantaeng yang berada didalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maka keberhasilan pembangunan Provinsi juga dipengaruhi oleh dukungan dan



keberhasilan pembangunan dari daerah Kab/Kota. Dengan berdasarkan permasalahan dan isu yang berkembang saat ini kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan pada tahun 2024 ini adalah



“Peningkatan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Yang Inklusif”

Dengan tema tersebut maka prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
- 2) Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
- 3) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah;
- 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;
- 5) Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 6) Pembentukan karakter dan akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta professional;

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng

Pada tahun 2024 pembangunan Kabupaten Bantaeng menitikberatkan penyempurnaan reformasi birokrasi dan peningkatan pembangunan SDM yang lebih berkualitas sehingga mampu bersaing dengan daerah yang lain. Hal ini untuk mempercepat pembangunan daerah, sehingga pemerintah bersama masyarakat dapat bergerak cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Tema Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Bantaeng dalam RPD Tahun 2024-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun pertama maka tema pembangunan Kabupaten Bantaeng pada tahun 2024 adalah



“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berdaya Saing dan Berbudaya”



Pembangunan tahun pertama (2024), berorientasi pada pembangunan pemerintahan dan SDM maka tema pembangunan tahun ini adalah “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berdaya Saing dan Berbudaya”. Berdasarkan tema tersebut, maka tahun 2024 pembangunan Kabupaten Bantaeng fokus utama pembangunannya adalah pada SDM dan pemerintahan. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka tahun pertama ini kualitas SDM dan pemerintahan yang unggulan diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam pembangunan daerah. Sehingga dengan SDM yang unggul dan berdaya saing dan pelayanan birokrasi pemerintahan yang prima mampu menjadi langkah awal yang akan mempermudah pada tahap pembangunan berikutnya.

B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Dengan memahami dinamika pembangunan, isu dan permasalahan daerah yang tercantum dalam bab II , serta menelaah RPD khususnya pada strategi dan arah kebijakan yang nantinya akan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan Kabupaten Bantaeng 2024-2026 khususnya tahun 2024 beserta tema pembangunan Kabupaten Bantaeng maka prioritas pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel IV.2
Isu Strategi, Permasalahan, strategi dan Prioritas Pembangunan
Kab.Bantaeng Tahun 2024

Isu Strategis	Permasalahan	Strategi pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Arah Kebijakan (Prioritas) pembangunan Kab.Bantaeng 2024	
a. Transformasi Pelayanan Publik Berbasis IT	Belum optimalnya perencanaan dan implementasi terhadap kinerja pemerintah daerah	1	Pemantapan implementasi reformasi birokrasi	1	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif			2	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
	Belum			3	Menjaga



Isu Strategis	Permasalahan	Strategi pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Arah Kebijakan (Prioritas) pembangunan Kab.Bantaeng 2024	
	optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam melayani masyarakat				kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada
b. Pemantapan SDM Maju, Berbudaya Dan Berdikari	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan	2	Akselerasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	4	Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan berkeadilan berbasis IT
c. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat	3	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem	5	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
				6	Pengendalian harga dan ketersediaan barang
				7	Pengembangan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri
d. Antisipasi Resesi Ekonomi Dalam Pembangunan Berbasis Ekonomi Unggulan Daerah	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah	4	Perwujudan transformasi ekonomi	8	Peningkatan produktivitas pertanian daerah
	Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan			9	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian
	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan	5	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan	10	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pembangunan
e. Perekonomian Hijau Sebagai		6	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	11	Implementasi pengelolaan sumber daya



Isu Strategis	Permasalahan	Strategi pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Arah Kebijakan (Prioritas) pembangunan Kab.Bantaeng 2024
Alternatif Pembangunan Berkelanjutan				alam menggunakan teknologi ramah lingkungan

Dengan penjabaran strategi dan prioritas pembangunan diatas, maka untuk memperjelas langkah/upaya dijabarkan strategi, sebagai berikut:

1. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi

Birokrasi sebagai roda penggerak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Birokrasi dimaknai sebagai proses system secara rasional menjamin mekanisme dan system kerja yang terstruktur dan teratur dalam pemerintahan daerah. Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang lebih baik, maka sebagai upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan reformasi birokrasi. Dengan reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara. Hal ini dilakukan sebagai pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*), dan sumber daya manusia aparatur. Menindaklanjuti hal tersebut maka berbagai upaya perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yaitu penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan, digitalisasi tata kelola keuangan daerah, dan optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT. Dengan percepatan implementasi reformasi birokrasi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi dalam melayani masyarakat menjadi lebih professional, efektif dan efisien.

2. Akselerasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan

Sumber Daya Manusia menjadi subyek utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya



manusia merupakan prioritas yang harus diperhatikan dan dirancang dengan matang untuk mengimbangi kebutuhan kualitas daya saing manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan. Dengan memperhatikan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan berbasis IT. Hal ini perlu diperkuat dengan upaya peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta penanganan anak tidak sekolah, pendidikan anak usia dini, penanganan stunting dan pencegahan perkawinan anak untuk meningkatkan RLS dan HLS serta UHH kabupaten Bantaeng yang di bawah rata-rata provinsi

Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau layanan Pendidikan dengan lebih mudah, nyaman dan mampu mengembangkan minat, bakat, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan usaha. Selain Pendidikan, kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Kesehatan menjadi factor utama dalam produktivitas masyarakat. Dengan pelayanan kesehatan yang lebih merata, lebih hadir dan memberikan kemudahan akses, maka masyarakat Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat menikmati fasilitas tersebut dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan salah satu hal dasar yang mempengaruhi kesehatan masyarakat kebersihan lingkungan dan pemenuhan gizi yang seimbang. Terkait hal tersebut, untuk menjaga kesehatan tubuh dan kualitas generasi penerus perlu diperhatikan kualitas dan kuantitas kebutuhan dan pemenuhan gizi masyarakat, terutama untuk ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan menyusui, balita, pasangan pasca pernikahan. Hal ini dilakukan untuk kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik, sehingga tercipta masyarakat yang berkualitas. Dengan demikian akselerasi pembangunan bidang Pendidikan dan kesehatan akan mampu menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kualitas masyarakat Kabupaten Bantaeng yang berdaya saing tinggi.

3. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem

Dengan kondisi ekonomi saat ini, dampak dari Covid-19 yang masih terasa, kenaikan inflasi yang terjadi saat ini, membuat perekonomian masyarakat tidak stabil. Walaupun Kabupaten Bantaeng tidak begitu ekstrim



terdampak Covid-19. Namun beberapa bidang sector ekonomi seperti pariwisata, jasa, dan diperparah dengan adanya PHK dari usaha-usaha yang terdampak. Memahami kondisi tersebut, masyarakat rentan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga dapat berpotensi pada bertambahnya kantong-kantong kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan standar hidup rata-rata disuatu daerah, hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Salah satu penanganan kemiskinan yang dapat dilakukan yaitu pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang dilakukan dengan adanya bantuan tepat sasaran bagi masyarakat miskin, Pemberdayaan masyarakat terutama di perdesaan harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bantaeng, ini penting untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat terutama didesa-desa. Pemberdayaan masyarakat juga akan berdampak pada meningkatnya produktivitas masyarakat, terutama akan lebih terbukanya peluang penerimaan tenaga kerja. Produktivitas masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas daya saing SDM, dengan tenaga kerja yang unggul dan terampil akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Dalam menindaklanjuti hal tersebut produktivitas tenaga kerja perlu meningkatkan kualitas skill yang dimiliki, yang akan membuka besarnya peluang penempatan pekerja. Hal ini akan membuka peluang besar bagi investor untuk menanamkan usaha di Kabupaten Bantaeng yang akan berdampak banyaknya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng.

4. Perwujudan transformasi ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah harus dilakukan dengan mengolah potensi sumber daya yang tersedia dengan maksimal. Perwujudan transformasi ekonomi daerah harus berfokus pada pengembangan Kawasan dan produk andalannya. Kabupaten Bantaeng mempunyai sector unggulan yaitu sector pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata. Beberapa sector ini memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah yang cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bantaeng. Pertanian



merupakan sector yang penting dalam pembangunan ekonomi, selain mencukupi kebutuhan pangan, sector pertanian diharapkan mampu dapat berkembang menjadi sector industry unggulan daerah. Titik krusial pembangunan ekonomi adalah bergesernya produk (hasil pertanian) yang berupa bahan mentah ke sektor industri. Industri yang mengolah hasil-hasil pertanian primer menjadi produk olahan adalah proses dari agroindustri. Dengan upaya transformasi ekonomi, maka diharapkan mampu memberikan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga mampu membuka lapangan kerja, memperluas pasar bagi produk unggulan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut dan melihat potensi yang ada Kabupaten Bantaeng sudah berkomitmen untuk mengembangkan potensi SDA. Dengan ini diharapkan pengembangan potensi unggulan di Kabupaten Bantaeng ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah

Infrastruktur menjadi salah satu bukti pembangunan fisik yang mampu memberikan pengaruh kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bersinergi dan berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng. Dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, akan mempermudah dan meningkatkan aktivitas dan produktivitas masyarakat. Selain itu perlu adanya upaya untuk identifikasi infrastruktur yang membutuhkan upaya percepatan dan atau optimalisasi agar mudah diintegrasikan dalam program pembangunan, antara lain peningkatan kemantapan dan konektivitas jalan antara pusat pengolahan dan pusat pemasaran, pemenuhan kebutuhan air dan energy untuk optimalisasi peningkatan fungsi kawasan industry. Sehingga dengan ini diharapkan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah ini mampu mempercepat pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng.

6. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Dalam pembangunan ekonomi terkadang aktivitasnya terdapat potensi merusak ekosistem lingkungan hidup. Pengembangan beberapa



sector ini memungkinkan terjadinya degradasi lingkungan. Hal ini dapat memicu pencemaran bahkan meracuni lingkungan yang akhirnya secara bertahap mampu mendegradasi ekosistem lingkungan. Kerusakan yang terjadi pada berbagai ekosistem, menyebabkan terganggunya komponen-komponen yang menyusun suatu ekosistem lingkungan hidup. Dalam rangka menjaga kondisi lingkungan hidup perlu adanya daya dukung dan daya tampung LH kabupaten Bantaeng yang perlu untuk dijaga keberlanjutannya agar mudah diintegrasikan dalam program pembangunan, antara lain peningkatan RTH untuk peningkatan IKTL, pengelolaan sampah dan limbah baik limbah RT dan B3 untuk peningkatan IKU dan IKA. Dengan ini perlu adanya upaya pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Menindaklanjuti hal tersebut diharapkan pembangunan ekonomi, infrastruktur dapat berlangsung dengan baik dan mampu meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup, sehingga kesejahteraan masyarakat dan kemajuan menuju pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 difokuskan pada sasaran beserta indikator dan target pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV.3
Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target
						2022	2024
		Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	-	44,65 (C)	51,36 (CC)
1	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	62,55 (B)	65,26 (B)
2	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan		Sasaran 1.2 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Indeks Persepsi Anti Korupsi	-	85,70	87,42
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	74,726*	78,139
3	Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada		Sasaran 1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	-	98,00	98,50



Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Tujuan/Sasaran Daerah		Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target
						2022	2024
			berbasis IT				
		Tujuan 2 Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	-	69,69	70,97
				Tingkat Kemiskinan	%	9,07	8,40
4	Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan berkeadilan berbasis IT		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan kepribadian masyarakat	Indeks Pendidikan	-	0,569	0,576
5	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			PDRB per Kapita	Juta/ Kapita	61,00	66,45
6	Pengendalian harga dan ketersediaan barang			Inflasi ¹	-	4,12	3,31
7	Pengembangan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri			Indeks Gini	-	0,320	0,310
		Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	15,45	8,84
8	Peningkatan produktivitas pertanian daerah		Sasaran 3.1 Meningkatnya kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian	%	0,35	1,68
9	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian			LPE Kategori Industri Pengolahan	%	122,89	50,00
				LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	9,54	10,77
10	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pembangunan		Sasaran 3.2 Meningkatnya layanan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur	-	NA	70
11	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan			Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Bantaeng	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	NA

*: Data 2021

¹: Data pendekatan Bulukumba



4.2.4. Keselarasan Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng

Pencapaian pembangunan daerah memberikan kontribusi dalam pencapaian pembangunan Provinsi dan nasional. Kontribusi yang diberikan akan berdampak pada seberapa besar capaian yang akan tercapai dalam pembangunan.

➤ Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng

Memahami pernyataan diatas maka target sasaran pembangunan terutama pada indikator makro akan menunjukkan perkiraan kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian target sasaran Provinsi dan nasional, untuk memastikan hal tersebut maka perlu sandingan target indikator makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bantaeng yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.4
Tabel Sandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

No	Indikator	Target Nasional	Target Provinsi Selatan	Target Kabupaten Bantaeng
1	IPM	73,99 – 74,02	73,99	70,97
2	Tingkat Kemiskinan	6,5% - 7,5%;	8,31	8,40
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0 – 5,7%;	4,24	3,34
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3% - 5,7%;	5,23-6,71	8,84
5	Indeks Gini	0,374-0,377	0,361	0,310

➤ Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Dengan beberapa kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024 yang sudah dituangkan sebelumnya, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan maka perlu dipastikan pembangunan daerah mampu memberikan dukungan dalam kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Memahami hal tersebut, maka perlu dilihat keterkaitan antara tema pembangunan dan prioritas pembangunan daerah.

Gambar IV.2
Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Dan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2024



➤ **Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024**

Kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pusat (nasional) dan Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD 2024). Dalam rangka melihat dan memastikan dukungan Kabupaten Bantaeng terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi maka disajikan tabel keterkaitan kebijakan/prioritas pembangunan antara Nasional (RKP 2024), prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD 2024) dan RKPD Kabupaten Bantaeng yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

Tabel IV.5
Keselarasan Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Prioritas Nasional		Kegiatan Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas pembangunan Kab.Bantaeng 2024	
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi pelayanan publik	1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggara n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan



Prioritas Nasional		Kegiatan Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas pembangunan Kab.Bantaeng 2024	
		Reformasi sistem akuntabilitas kinerja				daerah
					2	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggara n pemerintahan
		Penguatan kapasitas lembaga demokrasi			3	Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	2	Pembentukan karakter dan akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta professional	4	Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan berkeadilan berbasis IT
		Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun				
		peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan				
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	revolusi mental sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti				
4	Mengembangkann Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	5	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
		Memperkuat SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah				
		Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga			6	Pengendalian harga dan ketersediaan barang
		Distribusi pusat-pusat pertumbuhan			7	Pengembangan desa sebagai komunitas yang



Prioritas Nasional		Kegiatan Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas pembangunan Kab.Bantaeng 2024	
		(PKW) ke wilayah yang belum berkembang				maju dan mandiri
5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan, dan kepastian pasar	4	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	8	Peningkatan produktivitas pertanian daerah
		Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian			9	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian
		Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa				
6	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	5	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	10	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pembangunan
		penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman				
		Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan				
		Keselamatan dan keamanan transportasi				
7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pencegahan pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup	6	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	11	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Penanggulangan pencemaran dan kerusakan SDA				



Prioritas Nasional		Kegiatan Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas pembangunan Kab.Bantaeng 2024	
		dan lingkungan hidup				
		Pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup				

4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam rangka penyusunan R-APBD 2024 terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berbasis pada RPD Kabupaten Bantaeng. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 harus selaras dan berkesinambungan dengan RKPD sebelumnya sehingga pembangunan jangka panjang daerah dapat direalisasikan secara bertahap. Mekanisme tersebut ditentukan dengan jelas dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Terkait dengan penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, DPRD perlu memberikan input. Masukan ini penting artinya agar materi yang direncanakan oleh Pemda tidak menyimpang dari RPJPD. Oleh karena itu, penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bantaeng yang tertuang pada Keputusan DPRD Kabupaten Bantaeng tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bantaeng dilakukan dalam rangka memenuhi ranah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bantaeng dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Adapun hasil pokok-pokok pikiran DPRD antara lain:

- 1. Bidang Pendidikan:
 - a. Peningkatan kualitas Pendidikan berkarakter.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
- 2. Bidang Kesehatan:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.



- b. Peningkatan pelayanan Kesehatan.
- c. Menekan jumlah bayi terkena gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan
- d. Meningkatkan kewaspadaan penyakit menular

3. Bidang Sosial Ekonomi:

- a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
- b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif.
- d. Pengembangan ekonomi kreatif UMKM
- e. Pengadaan alat dan mesin pertanian untuk kelompok tani
- f. Bantuan bibit tanaman dan ternak bagi masyarakat
- g. Pengadaan alat tangkap dan bibit rumput laut untuk kelompok nelayan

4. Bidang Infrastruktur dan Pemukiman:

- a. Peningkatan pembangunan drainase, jalan tani dan normalisasi sungai
- b. Peningkatan keamanan akses jalan untuk meminimalisir kecelakaan
- c. Peningkatan jalan/pengaspalan jalan
- d. Peningkatan pemukiman perumahan dan lingkungan
- e. Pembangunan Talud
- f. Pengadaan sarana air bersih

5. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:

- a. Pembahasan APBD yang tepat waktu
- b. Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan latihan serta perbaikan kinerja OPD dalam rangka pelayanan publik.

4.2.6. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Dengan rumusan tujuan, sasaran, tema dan prioritas pembangunan, sebagai pelaksanaan prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan daerah yang tersusun pada tabel berikut.



Tabel IV.6

Prioritas Pembangunan, Program Prioritas, indikator, target dan Pagu Indikatif Tahun 2024 Kabupaten Bantaeng

Prioritas Nasional			Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan			Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024			Tujuan/Sasaran Daerah		Program Prioritas		Indikator		Target		Pagu		Penanggung Jawab		
									Tujuan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik												
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Sumber Daya Manusia	70	309.999.800	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
								Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah tepat waktu	100	1.392.260.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
								Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	98	5.049.347.276	Sekretariat Daerah									
				2	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan		Sasaran 1.2 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindak Lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	88	3.952.813.200	Inspektorat Daerah									
3	Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan		Sasaran 1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban	Persentase Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Dengan	100	3.201.288.500	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam													



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Tujuan/Sasaran Daerah	Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
					Pilpres dan Pilkada	berbasis IT	Umum	Satuan:Persen)			Kebakaran
							Program Peningkatan Peran Partai Politik D A N L E M B A G A Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik (Dengan Satuan:Persen)	100	31.776.315.350	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
						Tujuan 2 Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat					
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2	Pembentukan karakter dan akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta professional	4	Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan berkeadilan berbasis IT	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan kepribadian masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Sd/Mi/Paket A (Dengan Satuan:Persen)	98,23	41.560.506.300	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
								Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Smp/Mts/Paket B (Dengan Satuan:Persen)	96,87		
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							Angka Partisipasi Penduduk Usia 5-6 Tahun Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Dengan Satuan:Persen)	83,91		
								Angka Partisipasi Penduduk Pada Pendidikan Non	100		



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Tujuan/Sasaran Daerah	Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
4	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	5	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Sasaran 2.2Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat		Formal Usia 7-18 Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:Persen)			
							Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar kualifikasi SI/DIV dan Bersertifikat Pendidik	90	5.105.481.400	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
							Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Pp/Pkb, Lks Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan).	70	57.848.500,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
							Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	80	71.176.000	Dinas Sosial
							Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	33,33	598.093.800	Dinas Sosial
							Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah	33,33	188.998.900	Dinas Sosial



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Tujuan/Sasaran Daerah	Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
				6	Pengendalian harga dan ketersediaan barang			menerima jaminan sosial			
							Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Perekonomian, Pembangunan dan Pengelolaan Barang dan Jasa	95	1.026.700.400	Sekretariat Daerah
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (Dengan Satuan:%)	5	80.000.000	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (Dengan Satuan:%)	60	221.490.000	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
							Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Penunjang Pangan Utama (Dengan Satuan:Persen)	100	185.269.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
				7	Pengembangan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berprestasi (Dengan	80	1.306.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Tujuan/Sasaran Daerah		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
								Hukum Adat	Satuan:Persen)			Dan Perlindungan Anak
								Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik (Dengan Satuan:Persen)	80	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
								Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:Persen)	16,05	2.683.386.798	Dinas Pengendalian Penduduk Dan K E L U A R G A Berencana
				Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan								
5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	4	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	8	Peningkatan produktivitas pertanian daerah		Sasaran 3.1 Meningkatnya kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	5	390.626.100	Dinas Pertanian K A B U P A T E N Bantaeng
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	4,3	257.530.000	Dinas Pertanian K A B U P A T E N Bantaeng
								Program Pengelolaan	Produksi perikanan Budidaya	98085	150.067.800	Dinas Perikanan Dan



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Tujuan/Sasaran Daerah	Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
							Perikanan Budidaya				Kelautan
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap	6662,7	81.914.300	Dinas Perikanan Dan Kelautan	
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Produksi Olahan Hasil Perikanan	27,39	37.532.400	Dinas Perikanan Dan Kelautan	
				9	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kontribusi sektor Sarana Prasarana pertanian/perkebunan terhadap PDRB	5	301.817.300	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng
							Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten (Dengan Satuan:Persen)	0,5	149.748.100	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
							Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	50	1.517.200	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
6	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	5	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	10	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Sasaran 3.2 Meningkatnya layanan aksesibilitas dan infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	80%	1.746.173.100	Dinas Perhubungan
								Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu	80%		



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Tujuan/Sasaran Daerah	Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
Ekonomi dan Pelayanan Dasar				pembangunan		wilayah		Lintas yang Terpasang dan Dalam Kondisi Baik			
								Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Angka)	250		
							Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Kondisi Jalan, Jembatan Dan Gorong- Gorong Baik (Dengan Satuan:%)	69	81.600.000.000	Dinas Pekerjaan U M U M D A N Penataan Ruang
							Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	65	419.370.868	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
							Program Kawasan Permukiman	Persentase pemukiman yang tertata	99,75	33.899.500	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Terselenggaranya PSU Perumahan Permukiman	52	177.265.000	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan	90	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan U M U M D A N Penataan Ruang



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Tujuan/Sasaran Daerah	Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	11	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan			Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)			
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Dengan Satuan:%)	82	450.000.000	Dinas Pekerjaan U M U M D A N Penataan Ruang
						Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Bantaeng	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	58	4.911.982.900	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditangani	100	752.399.600	Dinas Lingkungan Hidup
							Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Prosedur	40	19.999.800	Dinas Lingkungan Hidup



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD 2024 berisikan program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024. Melalui program dan kegiatan ini diharapkan mampu mengimplementasikan secara sinergis terhadap penjabaran dan pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Bantaeng 2024-2026.

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Sesuai dengan hasil perumusan kerangka pendanaan yang tersaji pada bab III, maka dilihat kerangka pendanaan dari sisi proyeksi belanja daerah di tahun 2024, khususnya belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel V.1
Rincian Kerangka Pendanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng 2024 dan Prognosis 2025
(Juta Rupiah)

URAIAN	PROYEKSI 2024	PROGNOSIS 2025
PENDAPATAN	996.811,69	1.118.262,92
BELANJA	995.311,69	1.118.262,92
BELANJA OPERASI	753.926,10	845.645,00
Belanja Pegawai	448.322,43	452.857
Belanja Barang	239.970,02	378.497
Belanja Bunga	-	
Belanja Hibah	65.602,46	10.810
Belanja Bantuan Sosial	31,2	3.481
BELANJA MODAL	145.061,64	178.776
BELANJA TAK TERDUGA	6.488,88	765
TRANSFER	89.835,07	93.077
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500,00	-
TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	611.748,84	557.509
KAPASITAS RIIL	385.062,85	560.753,92



5.1.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Perumusan program prioritas pembangunan daerah menjadi bagian penting karena salah satu upaya pelaksanaan dari prioritas pembangunan yang telah dirumuskan yang dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan daerah.. Dengan 11 prioritas pembangunan ini maka program prioritas pembangunan dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel V.2
Program Prioritas Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
1	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Sumber Daya Manusia	70	309.999.800	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah tepat waktu	100	1.392.260.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	98	5.049.347.276	Sekretariat Daerah
2	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindak Lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	88	3.952.813.200	Inspektorat Daerah
3	Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	3.201.288.500	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Program Peningkatan Peran Partai	Persentase Peningkatan Peran Partai	100	31.776.315.350	Badan Kesatuan Bangsa Dan



Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
		Politik D A N L E M B A G A Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Politik (Dengan Satuan:Persen)			Politik
4	Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan berkeadilan berbasis IT	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Sd/Mi/Paket A (Dengan Satuan:Persen)	98,23	41.560.506.300	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Smp/Mts/Paket B (Dengan Satuan:Persen)	96,87		
			Angka Partisipasi Penduduk Usia 5-6 Tahun Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Dengan Satuan:Persen)	83,91		
			Angka Partisipasi Penduduk Pada Pendidikan Non Formal Usia 7-18 Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:Persen)	100		
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar kualifikasi SI/DIV dan Bersertifikat Pendidik	90	5.105.481.400	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
5	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Pp/Pkb, Lks Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta	70	57.848.500,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian



Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
			Bpjs Ketenagakerjaan).			
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	80	71.176.000	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	33,33	598.093.800	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	33,33	188.998.900	Dinas Sosial
6	Pengendalian harga dan ketersediaan barang	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Perekonomian, Pembangunan dan Pengelolaan Barang dan Jasa	95	1.026.700.400	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (Dengan Satuan:%)	5	80.000.000	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (Dengan Satuan:%)	60	221.490.000	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Penunjang Pangan Utama (Dengan Satuan:Persen)	100	185.269.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
7	Pengembangan desa sebagai komunitas yang maju dan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat	80	1.306.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan



Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
	mandiri	Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Hukum Adat Yang Berprestasi (Dengan Satuan:Persen)			Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik (Dengan Satuan:Persen)	80	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:Persen)	16,05	2.683.386.798	Dinas Pengendalian Penduduk Dan K E L U A R G A Berencana
8	Peningkatan produktivitas pertanian daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	5	390.626.100	Dinas Pertanian K A B U P A T E N Bantaeng
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	4,3	257.530.000	Dinas Pertanian K A B U P A T E N Bantaeng
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan Budidaya	98085	150.067.800	Dinas Perikanan Dan Kelautan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	6662,7	81.914.300	Dinas Perikanan Dan Kelautan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	27,39	37.532.400	Dinas Perikanan Dan Kelautan
9	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kontribusi sektor Sarana Prasarana pertanian/perkebunan terhadap PDRB	5	301.817.300	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng
		Program Perencanaan Dan	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan	0,5	149.748.100	Dinas Tenaga Kerja Dan



Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
		Pembangunan Industri	Menengah Di Kabupaten (Dengan Satuan:Persen)			Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	50	1.517.200	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
10	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	80%	1.746.173.100	Dinas Perhubungan
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Terpasang dan Dalam Kondisi Baik	80%		
			Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Angka)	250		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Kondisi Jalan, Jembatan Dan Gorong-Gorong Baik (Dengan Satuan:%)	69	81.600.000.000	Dinas Pekerjaan U M U M D A N Penataan Ruang
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	65	419.370.868	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
		Program Kawasan Permukiman	Persentase pemukiman yang tertata	99,75	33.899.500	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Persentase Terselenggaranya PSU Perumahan Permukiman	52	177.265.000	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan



Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2024		Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Penanggung Jawab
		(Psu)				
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	90	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan U M U M D A N Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Dengan Satuan:%)	82	450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	58	4.911.982.900	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditangani	100	752.399.600	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Prosedur	40	19.999.800	Dinas Lingkungan Hidup

5.1.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 akan menyajikan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi nama program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, indikator kinerja program (*outcome*), kegiatan dan sub



kegiatan (output), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/Perangkat Daerah penanggungjawab program, kegiatan dan sub kegiatan. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2024, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Bantaeng. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Selanjutnya, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Bantaeng beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 terlampir pada lampiran V.3.



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar peran pemerintah daerah dapat menyentuh kehidupan masyarakat. Peran pemerintah tersebut menjadi pusat layanan bagi berbagai keperluan masyarakat. Pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagian besar mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan hasil yang dicapai atas penyelenggaraan pelayanan tersebut menunjukkan tingkat peradaban masyarakatnya. Dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantaeng yang terus berkembang maka hal ini juga akan menuntut pemerintah daerah harus mampu mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Sehingga ini berimplikasi pada kompleksitas layanan jasa yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan kompleksitas layanan yang semakin tinggi maka hal ini harus diiringi oleh peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk dapat melihat keberhasilan dan kegagalan kinerja maka perlu adanya alat ukur capaian pembangunan daerah yang dinyatakan dalam Indikator kinerja daerah.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output*



pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

6.1 Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VI.1
Target Indikator Makro Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
1	IPM	-	69,69	70,33	70,97
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,07	8,74	8,40
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,72	3,83	3,34
4	Indeks Gini	-	0,326	0,318	0,310
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	15,45	8,00	8,84
6	PDRB per Kapita	Juta Rp	61,00	63,72	66,45

Sumber: data diolah

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel VI.2
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	ASUMSI	TAHUN TARGET
			2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	44,65 (C)	48,00 (C)	51,36 (CC)
2	Nilai SAKIP	poin	62,55 (B)	63,90 (B)	65,26 (B)
3	Indeks Pembangunan Manusia	poin	69,69	70,33	70,97
4	Tingkat Kemiskinan	%	9,07	8,74	8,4
5	PDRB per Kapita	Juta/ Kapita	61	63,72	66,45
6	Inflasi	-	4,12	3,71	3,31
7	Indeks Gini	-	0,32	0,318	0,310
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,72	3,83	3,34
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	15,45	8,00	8,84
10	Indeks Infrastruktur	-	NA	67,5	70
11	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	NA	1	1

Sumber: data diolah

6.3 Indikator Kinerja Kunci

Dengan penetapan kinerja pemerintah untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Daerah. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara umum, Indikator Kinerja merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Indikator ini merupakan adalah indikator *outcome* yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja merupakan capaian pembangunan



Tahun 2024 yang berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen RKPD diuraikan tabel sebagai berikut:



Tabel VI.3
Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	15,45		8,84	
2	PDRB per Kapita	Juta/ Kapita	61		66,45	
3	Inflasi**	%	4,121		3,31	
4	Indeks Gini	-	0,32		0,31	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,72		3,34	
6	Indeks Pembangunan Manusia	poin	69,69		70,97	
7	Tingkat Kemiskinan	%	9,07		8,4	
8	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	44,65 (C)		51,36 (CC)	
9	Nilai SAKIP	poin	62,55 (B)		65,26 (B)	
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	poin	86,21*		87,42	
11	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	75,847		78,139	
12	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	poin	81,29*		98,5	
13	Indeks Pendidikan	-	0,569		0,576	
14	Indeks Kesehatan	-	0,783		0,788	
15	LPE Kategori Pertanian	%	0,35		1,68	
16	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	122,89		50	
17	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	9,54		10,77	
18	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	NA		1	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	954.570		1.105.034	
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	427.088		494.408	
3	Indeks Infrastruktur		NA		70	
4	Rasio ketergantungan	-	43,83		42,53	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM					
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
Pendidikan						
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.30	12,65	13.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6.81	6,91	7.00	
3	Angka Partisipasi Sekolah penduduk Usia 5-18 Tahun	Persen	94.57	97,29	100	
4	Guru PAUD,SD/MI dan SMP/MTS yang Bersertifikat Pendidik	Persen	44.32	47,16	50	



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
5	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
6	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	90	96,67	100	
7	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	90	96,67	100	
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	97,34	97,79	98,23	
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	95,3	96,09	96,87	
10	Angka partisipasi Penduduk Usia 5-6 Tahun Pada Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	75,86	79,89	83,91	
11	Angka Partisipasi Penduduk Pada Pendidikan Non Formal Usia 7-18 yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar	Persen	99,88	99,94	100	
12	Persentase muatan lokal Yang ditetapkan sebagai bahan ajar	Persen	100	100,00	100	
13	Guru Paud,SD/MI,SMP/MTS yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV	Persen	93,77	94,39	95	
14	Persentase Izin Operasional Pendidikan Dasar Yang di Terbitkan	Persen	100	100,00	100	
15	Persentase Bahasa lokal dan sastra daerah yang dikembangkan	Persen	75	87,50	100	
Kesehatan						DINAS KESEHATAN
1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan	%	89,59	89,80	90	
3	Angka Harapan Hidup	Angka	70,6	70,80	71	
4	Angka Kesakitan	%	24	23,50	23	
5	Persentase Penerapan PHBS	%	71,01	74,16	77,3	
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	90	91,00	92	
7	Persentase Rata-Rata Pelayanan UKM dan UKP	Persen	90	90,50	91	
8	Persentase Cakupan Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persen	90	90,50	91	
9	Persentase IRTP yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	90	90,50	91	
10	Persentase Capaian Survei Mawas Diri	Persen	80	80,00	80	
RSUD Prof. Dr. dr. Anwar Makkatutu						



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
1	Nilai SAKIP RSUD Prof. Dr Anwar Makkatutu	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	RSUD PROF. DR. dr. ANWAR MAKKATUTU
2	Tingkat capaian indikator sasaran RSUD Prof. Dr Anwar Makkatutu	Persen	100	100,00	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	Nilai	80	80,00	80	
4	Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	Persen	65	65,00	65	
5	Rasio Daya Tampung RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	persen	0.14	0,14	0.14	
6	Rata-rata waktu tunggu pelayanan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	Menit	60	60,00	60	
7	Tercapainya prosentase administrasi perkantoran	persen	100	100,00	100	
8	Peningkatan jumlah kunjungan pasien	persen	100	100,00	100	RSUD BANYORANG
RSUD Banyorang						
1	Nilai SAKIP RSUD Banyorang.	Nilai Predikat	B (62)	B (63,5)	B (65)	
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran RSUD Banyorang	Nilai Predikat	63,73	81,87	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan	Persen	75	75,00	75	
4	Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Banyorang	persen	70	72,50	75	
5	Rasio Daya Tampung RSUD Banyorang	persen	0,25	0,38	0,5	
6	Rata-rata waktu tunggu pelayanan RSUD Banyorang	persen	60	55,00	50	
7	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah RSUD Banyorang	persen	70	70,00	70	
8	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di RSUD Banyorang	persen	65	67,50	70	
9	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Banyorang	persen	70	70,00	70	
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
1	Persentase pembangunan infrastruktur wilayah yang terbangun	%	69	69,50	70	
2	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	69	69,50	70	
3	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (satuan:%)	%	60	65,00	70	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	%	67,98	67,99	68	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
	dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota					
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	68	69,00	70	
6	Persentase implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	%	100		100	
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	91	91,50	92	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100,00	100	
9	Prosentase kesesuaian Pembangunan dengan RTRW dan RDTR yang ditetapkan	%	100	100,00	100	
10	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	%	87	87,50	88	
11	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	91	91,50	92	
12	Persentase jalan perkotaan yang memiliki drainase yang baik	%	80	81,50	83	
13	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai	B (62)	B (63,5)	B (65)	
14	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai	80	84,00	88	
15	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100,00	100	
16	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	20	24,50	29	
17	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	86	88,00	90	
18	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	80	81,00	82	
19	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang dilaksanakan dalam satu tahun	persen	65	65,50	66	
20	Persentase infrastruktur di kawasan strategis	persen	100	100,00	100	
21	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	persen	100	100,00	100	
22	Presentase Kondisi Jalan, jembatan dan gorong- gorong Baik	persen	68	68,50	69	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi 2023	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
23	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	N/a	100,00	100	
24	Perentase Pembangunan Infrastruktur yang Sesuai RTRW	persen	90	91,50	93	
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan						
1	Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persen	95,87	96,19	96,5	
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen (%)	0,03	0,03	0,02	
4	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	0,142	0,14	0,142	
5	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaann	Persen (%)	19,39	22,60	25,8	
6	Persentase Luas Lahan PEMDA yang Berlegalitas	Persen (%)	46,61	47,63	48,64	
7	Persentase jumlah kasus sengketa tanah PEMDA yang ditangani	persen (%)	100	100,00	100	
8	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	Persen	80	82,50	85	
9	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	62	63,50	65	
10	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	99	99,38	99,75	
11	Persentase PSU Perumahan Permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	45	48,50	52	
12	Persentase tertanganinya sengketa tanah PEMDA secara litigasi / non litigasi	Persen	70	72,50	75	
13	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	75	77,50	80	
14	Persentase Luas Lahan PEMDA yang bersertiifkat	Persen	46	47,00	48	
15	Persentase Lahan Pemda yang terdata	Persen	94	95,00	96	
Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Satpol PP & Pemadam Kebakaran						
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	9,96	12,48	15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100,00	100	
3	Persentase Penegakan PERDA	persen	100	100,00	100	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
4	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100,00	100	
5	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Predikat	B	B	B	
6	rata-rata tingkat capaian indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persen	100	100,00	100	
7	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100,00	100	
8	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100,00	100	
9	Persentase Bencana Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Yang Terlaksana Dengan Baik dan sesuai Regulasi yang Berlaku	Persen	100	100,00	100	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
1	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat (Nilai)	B (60)	B (62,5)	B (65)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	100,00	100	
3	Indeks Resiko Bencana	Nilai	102,2	101,10	100	
4	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Bencana Alam	Jam	20	17,50	15	
5	Persentase Capaian Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persen	100	92,50	85	
6	Persentase Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	100	100,00	100	
7	Persentase korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persen	0,01	50,01	100	
Sosial						
1	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	DINAS SOSIAL
2	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran perangkat daerah	%	100	100,00	100	
3	Tingkat penurunan jumlah PPKS	%	3.50	5,35	7.19	
4	Persentase PPKS yang tertangani	%	3,5	5,35	7,19	
5	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100,00	100	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
6	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80	90,00	100	
7	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	80	56,67	33,33	
8	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	80	56,67	33,33	
9	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	80	56,67	33,33	
10	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	80	56,67	33,33	
11	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	80	56,67	33,33	
12	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	80	56,67	33,33	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
Tenaga Kerja dan Perindustrian						
1	Tingkat Produktivitas tenaga kerja (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	persen	21,95	21,98	22	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (rekomendasi indikator sasaran perangkat daerah)	persen	50	51,00	52	
3	Rata-rata pendapatan masyarakat (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Rupiah	3.165.876	3.182.938	3.200.000	
4	persentase pelaku usaha yang menerapkan upah minimum provinsi	persentase	11	11,25	11,5	
5	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	persen	0,2	0,20	0,2	
6	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah).	persen	2	2,00	2	
7	Nilai SAKIP (rekomendasi indikator sasaran daerah).	Predikat (Nilai)	B (60)	B (61,5)	B (63)	
8	rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah (rekomendasi indikator sasaran perangkat daerah)	persen	90	90,50	91	
9	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	persen	80	80,00	80	
10	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	persen	8,6	9,18	9,76	



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
11	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen	50	55,00	60	
12	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen	68	69,00	70	
13	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	persen	0,5	0,50	0,5	
14	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	10	30,00	50	
15	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7875	0,79	0,8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	15	15,50	16	
3	Persentase desa yang difasilitasi penataannya	persen	70	75,00	80	
4	Jumlah desa yang di fasilitasi kerjasamanya	Desa	3	6,50	10	
5	Persentase desa yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik	persen	80	80,00	80	
6	Persentase lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang berprestasi	persen	70	75,00	80	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	95,76	95,78	95,8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	81,2	81,50	81,8	
3	Persentase Anak Korban Kekerasan yan ditangani	Persentase	100	100,00	100	
4	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	598	624,00	650	
5	Nilai SAKIP Dinas PMD,PPPA	Predikat	B (62)	B (63,5)	B (65)	
6	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas PMD,PPPA	persen	75	77,5	80	
7	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	80	82,50	85	
8	Persentase Lembaga yang melakukan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	persen	80	82,50	85	
9	Persentase perlindungan perempuan yang mendapatkan	persen	80	80,00	80	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
	pelayanan perlindungan					
10	Persentase Lembaga dan Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas keluarga	persen	80	80,00	80	
11	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Sistem data gender dan anak	persen	80	82,50	85	
12	Persentase lembaga yang menyediakan layanan pemenuhan hak anak	persen	80	80,00	80	
13	Persentase Perangkat Daerah dalam Perlindungan Khusus untuk Anak	persen	80	80,00	80	
Ketahanan Pangan						
1	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Predikat (Nilai)	B (62,15)	B (62,66)	B (63,17)	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Ketahanan Pangan	Persen	98	99,00	100	
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	76,6	77,25	77,9	
4	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	44,382	44,58	44,774	
5	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100,00	100	
6	Persentase desa yang masuk dalam kategori mandiri pangan	Persen	100	100,00	100	
7	Persentase ketersediaan penunjang pangan utama	Persen	100	100,00	100	
8	Persentase Daerah Rawan Pangan yang tertangani	Persen	100	100,00	100	
9	Persentase produk pangan yang bersertifikat	Persen	100	100,00	100	
Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,912	68,07	68,222	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	94,380	94,60	94,811	
3	Indeks Kualitas Air	Angka	60,00	60,14	60,27	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	32,55	32,63	32,70	
5	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	Angka	54	57,00	60	
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3	Persen	22	23,00	24	
6	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah	Persen	0	0,10	0.20	
7	Persentase Rekomendasi KLHS yang Diakomodir dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100,00	100	
8	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Predikat (Nilai)	BB (74.31)	BB (74,66)	BB (75)	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
9	Tingkat Capaian Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100%	100%	100%	
10	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah	Persen	100	100	100	
11	Tersusnya Dokumen Perencanaan Dokumen Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
12	Persentase Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hldup yang Ditangani	Persen	100	100	100	
13	Persentase Tingkat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	11	11,50	12	
14	Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Prosedur	Persen	30	35,00	40	
15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	99,95	99,98	100	
16	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Lembaga	0	1	1	
17	Persentase lembaga pendidikan atau kelompok masyarakat pemerhati lingkungan yang memperoleh pelatihan lingkungan hidup	Pelatihan	25	25	25	
18	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
19	Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	
20	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Persen	57,65	57,83	58	
Kependudukan dan Pencatatan Sipil						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat (Nilai)	B (62)	B (65,5)	B (69)	
2	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	70	85,00	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Nilai	89,98	90,99	92	
4	Persentase penduduk yang memiliki identitas Kependudukan	Persen	46,8	54,03	61,26	
5	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	Persen	59,5	59,67	59,84	
6	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	OPD	16	19,50	23	



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
7	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang terpenuhi	Persen	95	97,50	100	
8	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP Elektronik	Persen	95	95,00	95	
9	Persentase identitas kependudukan digital dari total perekaman	Persen	0,72	15,36	30	
10	Persentase Penduduk Usia 0-16 Tahun yang memiliki KIA	Persen	41,87	47,93	53,98	
11	Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Persen	99	99,34	99,68	
12	Persentase Kompleks Pemakaman Memiliki Buku Pokok Pemakaman	Persen	20	30,00	40	
13	Persentase ketersediaan data layanan informasi administrasi kependudukan	Persen	90	92,50	95	
14	Persentase Profil Kependudukan yang Disajikan	Persen	95	95,00	95	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Predikat (Nilai)	B(65)	B(65)	B(65)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persen	90	95,00	100	
3	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	100	100,00	100	
4	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	Persen	1,6	1,55	1,5	
5	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100,00	100	
6	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	Persen	1,6	1,55	1,5	
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	16,05	16,05	16,05	
8	Persentase Pasrtisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga	Persen	90	90,00	90	
Perhubungan						
1	Indeks angkutan jalan	Angka	2,5	2,39	2,27	DINAS PERHUBUNGAN
2	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi darat	Persen	50%	51,00%	52%	
3	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	Persen	15%	15,00%	15%	
4	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Predikat	B (62)	B (63,5)	B (65)	
5	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Perhubungan	Persen	84,83%	84,92%	85%	



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
6	Persentase Bidang dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantorannya	Persen	100%	100,00%	100%	
7	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	Persen	75%	77,50%	80%	
8	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Terpasang dan Dalam Kondisi Baik	Persen	70%	75,00%	80%	
9	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Angka	250	250,00	250	
Komunikasi, Informatika, dan Persandian						
1	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,63)	B (65,26)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	Tingkat capaian indikator sasaran Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	
3	Indeks SPBE	Predikat (Nilai)	Cukup (2,29)	Cukup (2,34)	Cukup (2,4)	
4	Persentase Rilis Data statistik akurat dan tepat waktu	%	40	57,5	75	
5	Indeks KAMI	Nilai	435	442,5	450	
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Persen	82	84,5	87	
7	Persentase OPD yang menyediakan data sektoral yang valid dan tepat waktu sesuai format yang di sediakan	Persen	61	63,5	66	
8	Skor Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi	Predikat (Nilai)	Kurang Informatif (46)	Kurang Informatif (51)	Kurang Informatif (56)	
9	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	
10	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	100	100	100	
11	Indeks Kematangan SPBE pada Domain Kebijakan SPBE	Indeks	2,9	2,925	2,95	
12	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	
13	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	87	88,5	90	
Koperasi, UKM, dan Perdagangan						
1	Persentase UMKM Yang Naik Skala Usaha	%	1	1	1	DINAS KOPERASI UKM DAN



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
2	Persentase Koperasi Yang Aktif	%	77	77,4	77,8	PERDAGANGAN
3	Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah Baru	%	1	1	1	
4	Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan	%	284,27	154,64	25	
5	Eksport Bersih Perdagangan	Nilai	6.80	8,5	8,5	
6	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
7	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	%	75	75	75	
8	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	
9	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	43,50	43,75	44	
10	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	31	31,25	31,5	
11	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	31	31,25	31,5	
12	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	48	48	48	
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi	Persen	1	1	1	
14	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	1	1	1	
15	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen	1	1,025	1,05	
16	Persentase perizinan dan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan untuk izin	Persen	100	100	100	
17	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	50	55	60	
18	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persen	0	2,5	5	
19	Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	0	7,5	15	
20	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	unit	9	9,5	10	
21	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persen	0	12,5	25	



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1	Persentase peningkatan investasi daerah	Persen	50	52	54	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Milyar	650	675	700	
3	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat (Nilai)	B(62)	B (63,5)	B(65)	
4	Tingkat capaian indikator sasaran	Persen	93	93,5	94	
5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan	Persen	83	83,5	84	
6	rata-rata waktu penerbitan izin dan non izin usaha	hari	7	6,5	6	
7	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	
8	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	Persen	85	92,5	100	
9	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi	Persen	85	92,5	100	
10	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP	Persen	80	82,5	85	
11	persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	Persen	25	25	25	
12	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid	Persen	100	100	100	
Pemuda dan Olahraga						
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	1,11	1,115	1,12	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Jumlah Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatana	Orang	340	345	350	
3	Pertumbuhan Wirausaha Muda	Persen	3	3	3	
4	Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
5	Tingkat Capaian Indikator sasaran Dinas pemuda dan Olahraga	Persen	66	83	100	
6	Persentase Peningkatan Atlet berprestasi	Persen	25	25	25	
7	Jumlah Atlet berprestasi terhadap ajang yang di ikuti	Orang	15	16	17	
8	Persentese Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persen	80	82,5	85	
9	Persentase pengembangan kapasitas pemuda dalam bidang organisasi dan kewirausahaan yang terpenuhi	Persen	1	1,0005	1,001	



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
10	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	100	100	100	
11	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepramukaan	Jumlah	2	2	2	
Kebudayaan						
1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	52,44	63,72	75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara	Cagar Budaya	43	52	61	
3	Persentase Objek Budaya yang dipelihara	Persen	92	96	100	
4	Persentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	
5	Persentase Sejarah Lokal cagar budaya yang dilestarikan	Persen	NA	10	10	
6	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	20	22,5	25	
7	Persentase Museum Yang di Kelola dengan baik	Persen	100	100	100	
Perpustakaan dan Kearsipan						
1	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Predikat (Nilai)	B (60)	B (63,5)	B (65)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Predikat (Nilai)	B (60)	B (60)	B (60)	
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	75	75	75	
4	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	69	64,5	60	
5	Persentase Dokumen yang telah diarsipkan dengan baik	%	60	62,5	65	
6	Persentase Pengelolaan Kearsipan di OPD yang sesuai standar	%	60	62,5	65	
7	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10	10	
8	Persentase Perpustakaan yang terkelola dengan Baik	Persen	80	82,5	85	
9	Persentase Perpustakaan yang diBina	Perpustakaan	80	82,5	85	
10	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Persen	70	72,5	75	
11	persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	0	45	90	
12	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	80	82,5	85	
13	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang dikeluarkan	Persen	0	40	80	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
Perikanan dan Kelautan						
1	LPE Subkategori Perikanan	Nilai	2,98	3,49	4	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap, Budidaya dan Olah Hasil Perikanan)	Ton	95770,65	96185,605	96600,56	
3	Nilai SAKIP Dinas Perikanan dan Kelautan	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
4	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan	Persen	100	100	100	
5	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	
6	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6382,4	6522,55	6662,7	
7	Produksi perikanan Budidaya	Ton	294,016	49189,633	98085,25	
9	Produksi Olah Hasil Perikanan	Ton	17,4	22,395	27,39	
Pariwisata						
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	1,66	1,66	1,66	DINAS PARIWISATA
2	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	0,35	0,355	0,36	
3	Rata-rata lama kunjungan	hari	1,75	1,775	1,8	
4	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	predikat (nilai)	B (62)	B (63)	B (64)	
5	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pariwisata	persen	91,31	92,155	93	
6	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	unit usaha	279	285,5	292	
7	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif yang telah memperoleh izin	unit usaha	147	148,5	150	
8	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten. Kota	Persen	100	100	100	
9	Persentase Objek Wisata yang memiliki Fasilitas standar pariwisata	Persen	44	45	46	
10	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara	Persen	35	35,5	36	
11	Sumber Daya Pariwisata yang memperoleh pengembangan kapasitas	Persen	77	77,5	78	
Pertanian						
1	LPE subkategori pertanian	Persen	4.8 %	4,65%	4,50%	DINAS PERTANIAN
2	Persentase Peningkatan Mutu Produk Olah Hasil	Persen	10	13	16	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
	Pertanian					
3	Produktivitas Pertanian	Kwintal/Ha	53.25	54,07	54.89	
4	Persentase Kenaikan Populasi Ternak	Persen	20.25	21,75	23.25	
5	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Predikat (Nilai)	BB (72)	BB (72)	BB (72)	
6	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Pertanian	Persen	80	80	80	
7	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	Persen	75	75	75	
8	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	5	5	5	
9	Kontribusi sektor Sarana Prasarana pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	5	5	5	
10	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	4,79	4,545	4,30	
11	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	25	37,5	50	
12	Persentasi Penerbitan izin usaha pertanian terhadap mutu produk hasil pertanian	Persen	75	75	75	
13	Kontribusi subsektor penyuluhan terhadap peningkatan produktivitas pertanian	Persen	60	62,5	65	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
Sekretariat Daerah						
1	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Predikat (Nilai)	B (62,09)	B (66,00)	BB (70)	SEKRETARIAT DAERAH
2	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Persen	95	95	95	
3	Nilai LPPD	Status (Skor)	Tinggi (3.5)	Tinggi (3.75)	Sangat Tinggi (4)	
4	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	Persen	90	91	92	
5	Tingkat Inflasi	persen	3.54	3,47	3.4	
6	Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	Komoditas	10	9,5	9	
7	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota	Persen	92	96	100	
8	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tata Pemerintahan	Persen	98	98	98	
9	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Perekonomian, Pembangunan dan Pengelolaan Barang dan Jasa	Persen	95	95	95	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi 2023	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
Sekretariat Dewan						
1	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Predikat (Nilai)	B (62)	B (68,5)	BB (75)	SEKRETARIAT DPRD
2	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Sasaran Sekretariat DPRD	Persentase	85	87,5	90	
3	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Predikat (Nilai)	Cukup Baik (41-60)	Baik (65)	Baik (70)	
4	Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan	Persen	60	67,5	75	
5	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	
6	Persentase Pemenuhan layanan kesejahteraan Anggota Dewan	Persen	100	100	100	
7	Jumlah Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	3	4	5	
8	Persentase tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM)	Persen	80	82,5	85	
9	Persentase muatan integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Persen	80	90	100	
Perencanaan Pembangunan						
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	90	90	90	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Persen	92.66	100	100	
3	Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	
4	Indeks Inovasi Daerah	Persen	48,31	48,33	48,35	
5	Persentase kemanfaatan inovasi daerah	Persen	100	90	80	
6	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat	B (67.85)	B (67,93)	B (68.01)	
7	Tingkat capaian indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat	97,61	97,61	98.12	
8	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota	Persen	100	100	100	
9	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah tepat waktu	Persen	100	100	100	



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
10	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	
11	Persentase Pemanfaatan hasil Kelitbangan	Persen	71,42	85,71	100	
Keuangan Daerah						
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2	Penetapan APBD Pokok dan Perubahan	Tepat/Tidak Tepat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
3	Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	
4	Persentase Tingkat Pertumbuhan PAD	Persen	76,5	76,5	76,5	
5	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Nilai	51,75	69,38	87	
6	Nilai SAKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah	Predikat (Nilai)	B (62)	B (62,5)	B (63.02)	
7	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Badan Pengelola keuangan Daerah	Persen	100	100	100	
8	Persentase Capaian Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100	100	100	
9	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penganggaran Keuangan Daerah	Persen	100	100	100	
10	Persentase Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tepat waktu	Persen	100	100	100	
11	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menyampaikan Keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	
12	Persentase Barang Milik Daerah yang di Kelola oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	
13	Kredibilitas Penerimaan Pendapatan dan Perencanaan Awal	Persen	98,18	99,09	100	
Kepegawaian dan Pengembangan SDM						
1	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	80	82,5	85	
3	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	55,32	55,32	61.44	
4	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	%	65	67,5	70	
5	Indeks Sistem Merit	Nilai	174	192	210	
6	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan	%	45	50	55	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
	kompetensinya					
7	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Persen	90	90	90	
8	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Persen	90	90	90	
9	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	65	67,5	70	
Pengawasan						
1	Nilai SAKIP (rekomendasi indikator sasaran daerah)	Predikat	B	B	B	INSPEKTORAT DAERAH
2	Tingkat Capaian Indikator sasaran Program Inspektorat Daerah	%	92	92,5	93	
3	Persentase Peningkatan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Persen	87	87,5	88	
4	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	
5	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	
6	Penurunan jumlah temuan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal	Temuan	50	45	40	
7	Penurunan Jumlah Aduan Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Aduan	4	3,5	3	
8	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	95	95	95	
9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Persen	87	87,5	88	
10	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	Persen	100	100	100	
11	Persentase Tingkat Pemenuhan Kapabilitas APIP	Persen	100	100	100	
Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Persentase konflik Ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	persen	80	85	90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	persen	90	92,5	95	
3	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	persen	90	92,5	95	
4	Nilai Sakip Kesbangpol	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
5	Tingkat capaian indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	90	92,5	95	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
6	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	persen	100	100	100	
7	persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	persen	100	100	100	
8	Persentase peningkatan peran partai politik (Dengan Satuan:persen)	persen	100	100	100	
9	persentase ormas yang terdaftar kemasyarakatan	persen	90	92,5	95	
10	Presentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persen	95	96,5	98	
11	Persentase Peningkatan dan penanganan kewaspadaan nasional	Rupiah	90	92,5	95	
Kewilayahan						
	Kec. Bantaeng					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantaeng	Predikat	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bantaeng	Persen	100	100	100	
3	Persentase permasalahan dan Pengaduan Masyarakat yang ditangani di Kecamatan Bantaeng	Persen	100	100	100	
4	Nilai SAKIP Kecamatan Bantaeng	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
5	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Kecamatan Bantaeng	Persen	100	100	100	
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	
7	Persentase Kelompok Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terbedayakan	Persen	90	90	90	
8	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Bantaeng	Persen	20	20	20	
9	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa se kecamatan Bantaeng	Persen	90	91	92	
	Kec. Bissappu					
1	Nilai SAKIP Kecamatan Bissappu	Predikat (Nilai)	B (65)	B (65)	B (65)	
2	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Sasaran di Kecamatan Bissappu	Nilai	B	B	B	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bissappu	Persen	75	75	75	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bissappu	Persen	100	100	100	
	Persentase Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat	Persen	100	100	100	



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
	Yang di Tangani di Kecamatan Bissappu					
5	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bissappu	Persen	100	100	100	
7	Persentase Kelompok Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terberdayakan	Persen	100	100	100	
8	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Keamanan wilayah	Persen	100	100	100	
9	Persentase Peningkatan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	
	Kec. Tompobulu					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tompobulu	persen	75	76	77	
2	persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tompobulu	persen	95	95	95	
3	persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yg ditangani dikecamatan Tompobulu	persen	95	95	95	
4	Nilai Sakip Kecamatan Tompobulu	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
5	rata-rata tingkat capaian indikator sasaran di kecamatan Tompobulu	Angka	B	B	B	
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab/Kota	persen	100	100	100	
7	Jumlah anak sekolah dan masyarakat yang dilayani	persen	100	100	100	
8	Kelompok masyarakat di wilayah kecamatan tompobulu	persen	100	90	80	
9	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kecamatan tompobulu	persen	100	100	100	
10	Terselenggaranya pemerintahan desa yang efektif	persen	100	100	100	
	Kec. Pajukukang					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan pajukukang	Predikat	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	
2	Persentase penyelenggaraan Kinerja pemerintahan Kecamatan Pajukukang	%	100	100	100	
3	Persentase permasalahan dan pengaduan Masyarakat yang di Tangani di Kecamatan pajukukang	%	100	100	100	
4	Nilai Sakip Kecamatan pajukukang	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
5	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Kecamatan pajukukang	%	100	100	100	
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100	
7	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan pajukukang	persen	100	100	100	
8	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang Terberdayakan	persen	100	100	100	
9	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	persen	20	20	20	
10	Persentase Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan	persen	100	100	100	
	Kec. Eremerasa					
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Eremerasa	Persen	85	86	87	
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Eremerasa	Persen	100	100	100	
3	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang di tangani	persen	100	100	100	
4	Nilai Sakip Kecamatan Eremerasa	Predikat(Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
5	Tingkat Capaian Indikator sasaran Kecamatan Eremerasa	Persen	100	100	100	
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100	
7	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan	persen	100	100	100	
8	Presentase lembaga yang aktif dalam proses perencanaan dan pemberdayaan	persen	100	100	100	
9	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum kec. Eremerasa	persen	100	100	100	
10	Persentase Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	85	85,5	86	
	Kec. Uluere					
1	Nilai SAKIP Kecamatan Ulu Ere	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Kecamatan Ulu Ere	Persen	100	100	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Ulu Ere	Predikat	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	



**RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024**



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ulu Ere	Persen	100	100	100	
5	Persentase permasalahan dan Pengaduan Masyarakat yang ditangani di Kecamatan Ulu Ere	Persen	100	100	100	
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	90	91	92	
7	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan	persen	85	85,5	86	
8	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang terberdayakan	persen	90	90	90	
9	Persentase Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	90	91	92	
	Kec. Sinoa					
1	Nilai Sakip Kecamatan Sinoa	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Kecamatan Sinoa	Persen	100	100	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Sinoa	Predikat	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sinoa	Persen	100	100	100	
	Persentase permasalahan dan Pengaduan Masyarakat yang ditangani di Kecamatan Sinoa	Persen	100	100	100	
5	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan sinoa	Persen	100	100	100	
7	Presentase lembaga yang aktif dalam proses perencanaan dan pemberdayaan	Persen	90	90	90	
8	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum kecamatan sinoa	Persen	20	20	20	
9	Persentase Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan kecamatan sinoa	Persen	90	91	92	
	Kec. Gantarangkeke					
1	Nilai Sakip Kecamatan Gantarangkeke	Predikat (Nilai)	B (62)	B (63,5)	B (65)	
2	1.1. Tingkat Capaian Indikator Sasaran Kecamatan Gantarangkeke	Predikat (Nilai)	B (65)	B (65)	B (65)	



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi	Target	OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Gantarangeke	Predikat	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Gantarangeke	Persen	95	95	95	
5	Persentase Permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani Kec. Gantarangeke	Persen	100	100	100	
5	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan sinoa	Persen	100	100	100	
7	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang terberdayakan	Persen	100	100	100	
8	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum kecamatan Gantarangeke	Persen	100	100	100	
9	Persentase Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan kecamatan Gantarangeke	Persen	100	100	100	

Sumber: BPS dan RPD Kabupaten Bantaeng 2024-2026



Tabel VI.4
Target Indikator Kinerja Kunci
(Permendagri 18 Tahun 2020)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Asumsi 2023	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	6.715 (78,99)	100,00%	100,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	20.541 (99,99)	100,00%	100,00%	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	93,99%	100,00%	100,00%	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	31.340	37,5%	40,00%	
b) Kesehatan						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	15%	15%	15%	DINAS KESEHATAN RSUD PROF. DR. dr. ANWAR MAKATUTU RSUD BANYORANG
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	1%	1%	1%	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	118%	100,00%	100,00%	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	116%	100,00%	100,00%	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100%	100,00%	100,00%	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100%	100,00%	100,00%	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	40,14%	100,00%	100,00%	
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	58,62%	59,25%	60,00%	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,18%	100,00%	100,00%	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100,00%	100,00%	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100,00%	100,00%	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100,00%	100,00%	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	100,00%	100,00%	



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Asumsi 2023	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100,00%	100,00%	
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	51,83%	55,92%	60,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	41,21%	45,61%	50,00%	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	9,11%	12,06%	15,00%	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	90,53%	100,00%	100,00%	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	69,17%	72,09%	75,00%	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100%	100,00%	100,00%	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	65%	70,00%	75,00%	
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	45%	47,50%	50,00%	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100%	100,00%	100,00%	
d) Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	3,15%	6,58%	10,00%	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0%	0,00%	0%	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	24,98%	27,49%	30,00%	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%		17,50%	20,00%	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	36,38%	43,19%	50,00%	
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	91,67%	95,84%	100,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	36,36%	43,18%	50,00%	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	0	250	350	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	250	350	



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Asumsi 2023	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	0	0	0	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100,00%	100,00%	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	15 menit	15 menit	
f) Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100%	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100%	100,00%	100,00%	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0%	7,50%	15%	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%	18,14%	24,07%	30,00%	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	1597,72%	100%	100%	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	3,30%	6,65%	10,00%	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	48,67%	54,34%	60,00%	
g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	84%	84,50%	85,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,09%	0,05%	0%	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	19,60%	17,30%	15%	
h) Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	508%	100,00%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN
i) Pertanian						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100%	100,00%	100,00%	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100%	100,00%	100,00%	



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Asumsi 2023	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100%	100,00%	100,00%	
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanab Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0%	0%	0%	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0%	0%	0%	
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	60%	100,00%	100,00%	
j) Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	-	82,56	84,00	85,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	91,60%	95,80%	100,00%	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0%	30,00%	60%	
k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	perekaman KTP elektronik	%	99,37%	99,69%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	15,56%	22,78%	30,00%	
3	kepemilikan akta kelahiran	%	94,63%	97,32%	100,00%	
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	16,22%	23,11%	30,00%	
l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	0%	25,00%	50%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri	%	66,66%	83,33%	100,00%	
m) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		59,92	52,46	45	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	86%	93%	100,00%	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%		0%	0%	
n) Perhubungan						
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	-	178	189	200	DINAS PERHUBUNGAN
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	-	33,69%	41,85%	50,00%	
o) Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	84%	92,00%	100,00%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100%	100,00%	100,00%	



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Asumsi 2023	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	0%	0%	0%	
p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	30,81%	40,41%	50,00%	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,42%	5,71%	10,00%	
q) Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	4,90%	7,45%	10,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
r) Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,26%	1,38%	2,50%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,37%	1,44%	2,50%	
3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	17 medali	21	25	
s) Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100,00%	100,00%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100,00%	100,00%	
t) Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	4,10%	9,55%	15,00%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
u) Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	42,68%	46,34%	50,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
v) Perpustakaan						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	-	tdk ada survey	tdk ada survey	tdk ada survey	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	Indeks Pcmbangunan Literasi Masyarakat	-	0%	0%	0%	
w) Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	442	471	500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-		100	100	



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Asumsi 2023	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
Urusan Pilihan						
a) Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	92,536 ton	93.268	94.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
b) Pariwisata						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-1%	2,00%	5%	DINAS PARIWISATA
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-22,70%	3,65%	30%	
3	Tingkat hunian akomodasi	%	9123,71%	65%	70%	
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	%	0,80%	0,16%	3,00%	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%		3%	3,50%	
c) Pertanian						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5784,78%	5784,78%	5784,78%	DINAS PERTANIAN
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0,33%	0%	0%	
d) Kehutanan						
e) Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0%	0%	0%	-
f) Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	95,02%	100,00%	100,00%	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	30,84%	40,42%	50,00%	
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	1,30%	3,15%	5,00%	
g) Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	0,17%	1,34%	2,50%	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0%	0%	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	100,00%	100,00%	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0%	0%	0%	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	%	0%	0%	0%	



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Asumsi 2023	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/ kota					
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-		tersedia	tersedia	
h) Transmigrasi						
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a) Perencanaan dan Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	34,39%	34,39%	34,39%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH INSPEKTORAT DAERAH
2	Rasio PAD	%	1.822.990.24	1.822.990.24	1.822.990.24	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	level 3	level 3	level 3	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	level 2	level 3	level 3	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	83,78%	83,78%	83,78%	
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	
b) Pengadaan						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0%	0,00%	0%	SEKRETARIAT DAERAH
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	6,53%	8,27%	10,00%	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100,01%	100,01%	100,00%	
c) Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	329%	364,50%	400%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	ASN	5,33%	7,67%	10,00%	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	98,13%	99,07%	100,00%	
d) Manajemen Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	121,77%	100%	100%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH INSPEKTORAT DAERAH
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%		100%	100%	
3	Manajemen Aset	-	ya	ya	ya	
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0,12%	0%	0%	
e) Transparansi dan Partisipasi Publik						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	102,15%	101%	100%	SEKRETARIAT DAERAH
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	83,33%	90,00%	100,00%	

Sumber: Bappeda, data diolah



6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktupencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencanapemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI.5
Target Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Bantaeng 2024

	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	ASUMSI 2023	TARGET 2024
1	PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Dasar:				
	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	%	99,38	100	100
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerisasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	-	na	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya
2	Pendidikan Kesetaraan:				
	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	99,88	100	100
	Rata-rata kemmpuan literasi dan numerisasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	-	na	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya
3	Pendidikan Anak Usia Dini:				
	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	87,08	100	100
2	KESEHATAN				
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100
4	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100
5	Jumlah anak pada usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100
6	Jumah warga negara usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	81,19	100	100
7	Jumlah usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan	%	100	100	100



RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024

	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	ASUMSI 2023	TARGET 2024
	Kesehatan				
8	Jumlah warga negara Penderita Hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100
9	Jumlah warga negara Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100
10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100
11	Jumlah warga negara yang terduga TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100
12	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100
3	URUSAN SOSIAL				
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	75,00	100	100
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	75,00	100	100
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	75,00	100	100
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	30,00	100	100
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	%	90,82	100	100
4	URUSAN PEKERJAAN UMUM				
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	%	84,65	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota	%	67,57	100	100
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				
	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	na	100	100
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	na	100	100
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
05.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	%	100	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
05.0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
2					
1	Jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	na	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	na	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	na	100	100

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan *komitmen* global dan nasional dalam upaya untuk menyejahteraan masyarakat masyarakat mencakup 17 (tujuh belas) tujuan.



RKPD KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan masa mendatang.

Dalam pelaksanaan *pembangunan* daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2024, maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.



BAB VII

PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu: Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

VII.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan kebijakan/prioritas pembangunan tahunan pusat (RKP) Tahun 2024.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2024. Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 sekaligus juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, akan didapatkan serangkaian program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, juga akan terdapat acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/APBD (KUA) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, dan tersedianya acuan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024. Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2024.
- b. OPD dan masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2024 dengan sebaik baiknya.
- c. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
- d. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

VII.2 KESIMPULAN

Kesimpulan dalam RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 ini dijabarkan sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2024.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2024 yaitu: **“PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA”** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD

mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

4. RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI BANTAENG,

H. ILHAM SYAH AZIKIN

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Evaluasi RKPD 2022)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

Indikator dan Target Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																								
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	90	50,026,104,339	90.00	21,078,020,198	90.00	60,489,368,198	0.57	381,825,300	29.69	17,957,364,272	9.88	5,979,180,345	49.32	29,834,164,995	89.46	54,152,534,912	179.46	75,230,555,110	199.40	150.38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Dasar	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	90	22,491,363,157	90.00	8,972,268,228	90.00	36,422,778,166	0.30	122,806,810	20.80	7,574,627,150	9.48	3,452,091,019	55.27	20,130,462,833	85.85	31,279,987,812	175.85	40,252,256,040	195.39	178.97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	90	198,205,117			90.00	558,044,834	-				35.43	197,717,400	61.26	341,838,200	96.69	539,555,600	96.69	539,555,600	107.43	272.22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	90	103,539,117			90.00	235,691,136	-				46.82	110,356,600	52.67	124,140,800	99.49	234,497,400	99.49	234,497,400	110.55	226.48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Perpustakaan Sekolah	90	150,191,250	90.00	177,898,000	90.00	25,885,650	-				100.00	25,885,650	-	100.00	25,885,650	190.00	203,783,650	211.11	135.68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	90	10,771,877,564			90.00	3,362,597,984	-		3.02	101,567,600	24.03	808,019,700	50.80	1,708,294,500	77.85	2,617,881,800	77.85	2,617,881,800	86.50	24.30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terehabilitasinya Sedang/Berat Ruang Kelas	90	2,404,459,236	90.00	2,867,681,000	90.00	4,460,719,974	-		12.59	561,805,500	24.04	1,072,266,219	55.52	2,476,575,243	92.15	4,110,646,962	182.15	6,978,327,962	202.39	290.22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Raung Guru/Kepala Sekolah/TU	Terehabilitasinya Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	90	164,296,484	90.00	217,408,000	90.00	163,907,490	-		16.79	27,522,650	40.08	65,692,100	43.06	70,571,200	99.93	163,785,950	189.93	381,193,950	211.03	232.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terehabilitasinya Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	90	486,430,318	90.00	730,208,000	90.00	454,914,040	-		15.80	71,880,600	40.05	182,195,500	43.94	199,881,200	99.79	453,957,300	189.79	1,184,165,300	210.88	243.44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terehabilitasinya Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	90	331,000,000			90.00	258,993,378	-				25.04	64,851,700	26.38	68,333,500	51.42	133,185,200	51.42	133,185,200	57.14	40.24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Mebel Sekolah						90.00	983,952,600	-				1.59	15,637,400	49.23	484,389,450	50.82	500,026,850		500,026,850			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya Perlengkapan Sekolah Untuk Peserta Didik	90	1,655,000,000	90.00	1,600,626,500	90.00	2,814,579,200	0.77	24,038,400	43.51	1,360,652,600	23.25	654,259,540	15.92	447,988,860	83.44	2,486,939,400	173.44	4,087,565,900	192.71	246.98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Terpeliharanya Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	90	107,505,987			90.00	17,068,900	-		100.00	17,068,900	-		-		100.00	17,068,900	100.00	17,068,900	111.11	15.88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	90	219,398,286	90.00	2,787,252,000	90.00	4,124,800,200	-				0.39	16,174,100	99.61	4,108,626,100	100.00	4,124,800,200	190.00	6,912,052,200	211.11	3,150.46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar dan Ujian Sekolah	90	1,683,762,245	90.00	286,859,300	90.00	50,307,500	-		52.49	26,407,500	14.11	7,100,000	33.39	16,800,000	100.00	50,307,500	190.00	337,166,800	211.11	20.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyusunan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan	Monitoring,Evaluasi Tingkat SD	90	222,348,952			90.00	39,021,530	-				100.00	39,021,530	-	100.00	39,021,530	100.00	39,021,530	111.11	17.55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembinaat Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Lomba MIPAS Kreatifitas SD/MI	90	1,427,817,422	90.00	304,335,428	90.00	121,308,960	22.48	30,303,000	30.64	41,305,000	19.63	23,810,000	21.34	25,885,000	94.09	121,303,000	184.09	425,638,428	204.55	29.81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah SD/MI	90	2,381,055,545			90.00	341,064,790	13.41	50,835,810	32.85	124,500,000	39.90	136,073,980	8.62	29,405,000	94.79	340,814,790	94.79	340,814,790	105.32	14.31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terbayarnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90	184,475,634			90.00	18,409,920,000	0.09	17,629,600	25.63	5,241,916,800	0.18	33,029,600	54.47	10,027,733,780	80.36	15,320,309,780	80.36	15,320,309,780	89.29	8,304.79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90	16,304,469,942	90.00	9,234,679,010	90.00	14,585,910,748	0.52	84,418,810	41.61	6,742,930,172	11.16	1,627,408,026	36.55	5,331,017,130	89.83	13,785,774,138	179.83	23,020,453,148	199.82	141.19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Laboratorium SMP						90.00	1,486,919,168	-				8.32	123,721,500	79.60	1,183,651,600	87.92	1,307,373,100		1,307,373,100			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah						90.00	266,078,992	-				31.76	84,509,800	66.34	176,524,200	98.10	261,034,000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terehabilitasinya Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	90	890,190,275	90.00	4,101,617,810	90.00	833,459,195	0.57	5,320,000			31.17	259,804,350	66.40	553,379,100	98.14	818,503,450	188.14	4,920,121,260	209.05	552.70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Terehabilitasinya Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	90	66,497,221	90.00	895,770,780	90.00	13,817,400	-				100.00	13,817,400	-		100.00	13,817,400	190.00	909,588,180	211.11	1,367.86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terehabilitasinya Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	90	147,682,601	90.00	289,073,410	90.00	33,109,150	-				67.38	22,309,150	-		67.38	22,309,150	157.38	311,382,560	174.87	210.85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terehabilitasinya Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	90	125,241,115			90.00	24,368,150	-				100.00	24,368,150	-		100.00	24,368,150	100.00	24,368,150	111.11	19.46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terehabilitasinya Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	90	251,560,000			90.00	159,693,373	-		19.33	30,862,678	50.44	80,544,050	27.14	43,344,500	96.91	154,751,228	96.91	154,751,228	107.67	61.52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Mebel Sekolah						90.00	310,500,000	-				49.99	155,227,950	-		49.99	155,227,950		155,227,950			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya Perlengkapan Sekolah Untuk Peserta Didik Baru	90	9,301,923,396	90.00	3,520,323,670	90.00	3,113,197,860	0.55	19,015,200	43.61	1,508,373,364	20.27	631,047,176	20.00	622,749,500	84.43	2,781,185,240	174.43	6,301,508,910	193.81	67.74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Alat Partikik dan Peraga Siswa						90.00	545,000,000	-				-		100.00	545,000,000		545,000,000					
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar dan Ujian Sekolah	90	1,177,292,227	90.00	420,747,630	90.00	231,694,810	-		25.30	58,608,860	55.22	127,950,000	17.99	41,680,750	98.51	228,239,610	188.51	648,987,240	209.45	55.13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Monitoring,Evaluasi Tingkat SMP	90	147,406,249			90.00	36,563,750	43.65	17,732,300			-		51.50	18,831,450	95.15	36,563,750	95.15	36,563,750	105.72	24.80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaat Minat,Bakat dan Kreatifitas Siswa	Terlaksananya Lomba MIPAS Kreatifitas SMP/MTs	90	628,747,723	90.00	7,145,710	90.00	81,879,060	17.59	15,999,060	34.69	31,560,000	32.63	26,715,000	7.14	5,850,000	92.05	80,124,060	182.05	87,269,770	202.28	13.88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah SMP/MTs	90	1,725,585,684			90.00	133,537,050	11.43	16,960,950	39.76	59,000,000	36.55	48,802,200	6.50	8,673,900	94.24	133,437,050	94.24	133,437,050	104.71	7.73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Terbayarnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	95	1,842,343,451			90.00	7,316,092,790	0.12	9,391,300	62.18	5,054,525,270	0.39	28,591,300	29.13	2,131,332,130	91.82	7,223,840,000	91.82	7,223,840,000	96.65	392.10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Nonformal	95	9,027,978,710	90.00	2,871,072,960	90.00	6,911,498,634	2.27	174,599,680	32.05	2,461,256,950	11.33	783,166,650	45.11	3,117,555,032	90.76	6,536,578,312	180.76	9,407,651,272	190.28	104.21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terbangunnya Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	90	827,500,000	90.00	400,000,000	90.00	388,119,244	-				23.59	91,562,500	51.92	201,528,000	75.52	293,090,500	165.52	693,090,500	183.91	83.76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terbangunnya Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD	90	489,856,681			90.00	552,595,780	-				39.49	218,215,850	51.48	284,488,650	90.97	502,704,500	90.97	502,704,500	101.08	102.62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terehabilitasinya Sedang/Berat Gefung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	90	268,110,000			90.00	347,666,420	-				4.88	16,978,500	33.78	117,438,000	38.66	134,416,500	38.66	134,416,500	42.96	50.13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Mebel PAUD						90.00	30,000,000	-				-		99.99	29,997,972	99.99	29,997,972		29,997,972			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya Perlengkapan Sekolah	90	5,286,287,798	90.00	1,629,318,760	90.00	1,528,478,400	-		54.48	832,785,250	29.86	456,409,800	14.97	228,831,800	99.32	1,518,026,850	189.32	3,147,345,610	210.35	59.54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	90	219,398,286	90.00	841,754,200	90.00	574,359,000	-		-				99.90	573,813,000	99.90	573,813,000	189.90	1,415,567,200	211.01	645.20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	90	181,460,522			90.00	35,621,700	-		76.70	27,321,700			14.04	5,000,000	90.74	32,321,700	90.74	32,321,700	100.82	17.81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Monitoring, Evaluasi Tingkat PAUD	90	176,073,116			90.00	24,253,180	75.15	20,252,380					16.49	4,000,000	91.65	24,252,380	91.65	24,252,380	101.83	13.77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah PAUD	Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah PAUD	90	147,277,904			90.00	296,199,410	46.90	154,347,300	20.80	68,450,000			23.95	70,952,110	91.65	293,749,410	91.65	293,749,410	101.83	199.45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terbayarnya Pengelolaan Dana BOP PAUD	90	1,432,014,403			90.00	3,134,205,500	-		48.90	1,532,700,000			51.10	1,601,505,500	100.00	3,134,205,500	100.00	3,134,205,500	111.11	218.87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	90	2,202,292,530	-	90.00	2,569,180,650	-	-	45.87	1,178,550,000	4.54	116,514,650		1,255,130,000	50.41	2,550,194,650	50.41	2,550,194,650	56.01	115.80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan					90.00	18,511,000	-							-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manjemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah NonFormal	90	770,278,127			90.00	128,569,650	-				90.62	116,514,650	9.01	11,580,000	99.63	128,094,650	99.63	128,094,650	110.70	16.63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terbayarnya Pengelolaan Dan BOP NonFormal/Kesetaraan	90	1,432,014,403			90.00	2,422,100,000	-		48.66	1,178,550,000			51.34	1,243,550,000	100.00	2,422,100,000	100.00	2,422,100,000	111.11	169.14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya Kualitas/Mutu Layanan Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum yang dikembangkan	95	211,099,354			90.00	29,793,000	60.42	20,000,000	24.47	8,100,000			5.68	1,693,000	90.57	29,793,000	90.57	29,793,000	95.34	14.11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatkan Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar					90.00	9,793,000	-		82.71	8,100,000			17.29	1,693,000	100.00	9,793,000	100.00	9,793,000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						90.00	9,793,000	-		82.71	8,100,000			17.29	1,693,000	100.00	9,793,000	100.00	9,793,000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatkan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini/NonFormal	90	211,099,354			90.00	20,000,000	90.00	20,000,000	-	-			-		90.00	20,000,000	90.00	20,000,000	100.00	9.47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal	Guru PAUD/NonFormal yang Mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal NonFormal	90	114,575,716			90.00	10,000,000	90.00	10,000,000					-		90.00	10,000,000	90.00	10,000,000	100.00	8.73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Guru PAUD/NonFormal yang Mengikuti Penyusunan Silabus Dasar Muatan Lokal	90	96,523,638			90.00	10,000,000	90.00	10,000,000					-		90.00	10,000,000	90.00	10,000,000	100.00	10.36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Meningkatnya Kualitas/Mutu Layanan Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Memenuhi Standar Kualifikasi S1/DIV dan Bersertifikasi Pendidik	90	24,267,948,161			90.00	3,114,762,000	-	-	21.25	661,818,200			-		21.25	3,023,633,650	21.25	3,023,633,650	23.61	12.46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD,dan Pendidikan	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik Pada Satuan Pendidikan	90	24,267,948,161			90.00	3,114,762,000	-	-	21.25	661,818,200			-		21.25	3,023,633,650	21.25	3,023,633,650	23.61	12.46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan	Guru Pada Satuan Pendidikan	90	19,733,090,744			90.00	2,044,762,000	-		17.58	359,568,200	27.66	565,635,600	50.43	1,031,179,850	95.68	1,956,383,650	95.68	1,956,383,650	106.31	9.91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan	Guru Pada Satuan Pendidikan	90	4,534,857,417			90.00	1,070,000,000	-		28.25	302,250,000	27.03	289,250,000	44.46	475,750,000	99.74	1,067,250,000	99.74	1,067,250,000	110.83	23.53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan	90	152,289,376			90.00	85,485,000	-				100.00	85,485,000	-		100.00	85,485,000	100.00	85,485,000	111.11	56.13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Pelaku Budaya	90	152,289,376			90.00	85,485,000	-				100.00	85,485,000	-		100.00	85,485,000	100.00	85,485,000	111.11	56.13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terpeliharanya Objek Tradisi Budaya	90	152,289,376			90.00	85,485,000	-				100.00	85,485,000	-		100.00	85,485,000	100.00	85,485,000	111.11	56.13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	90	884,222,676			90.00	69,971,100	-		37.01	25,894,600	19.83	13,875,000	-		56.84	68,084,600	56.84	68,084,600	63.15	7.70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pembinaan Kesenian Masyarakat	90	884,222,676			90.00	69,971,100	-		37.01	25,894,600	19.83	13,875,000	-		56.84	68,084,600	56.84	68,084,600	63.15	7.70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pelaku Organisasi dan Komunitas Seni yang Berkarya	90	884,222,676			90.00	69,971,100	-		37.01	25,894,600	19.83	13,875,000	40.47	28,315,000	97.30	68,084,600	97.30	68,084,600	108.12	7.70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	90	267,881,114			90.00	-	#DIV/0!	-			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Peringkat Penetapan Cagar Budaya Kab/Kota	90	267,881,114			90.00	-	#DIV/0!	-			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penetapan Cagar Budaya	Cagar Budaya Yang dilestarikan	90	267,881,114			90.00	-	#DIV/0!				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13x100%		15
7	Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	90					49,824,500	-	-	60.54	30,164,500	-	-	-	-	60.54	49,824,500	60.54	49,824,500	67.27	#DIV/0!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan Museum Kabi/Kota	90					49,824,500	-	-	60.54	30,164,500			-	-	60.54	49,824,500	60.54	49,824,500	67.27	#DIV/0!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		90				90.00	49,824,500	-		60.54	30,164,500	26.09	13,000,000	13.37	6,660,000	100.00	49,824,500	100.00	49,824,500	111.11	#DIV/0!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terciptanya Pelayanan Urusan Pemerintahan Dengan Baik	95	512,941,264,761	90.00	445,539,220	90.00	204,702,343,670	12.29	27,954,603,001	26.51	54,264,005,525	-	-	-	-	38.80	188,509,335,071	128.80	188,954,874,291	135.58	36.84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	95	880,622,455	90.00	117,966,610	90.00	232,385,690	27.81	71,803,560	9.44	21,947,250	-	-	-	-	37.25	226,099,940	127.25	344,066,550	133.95	39.07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90	383,047,036			90.00	144,213,560	44.81	71,803,560			42.07	60,664,000	3.94	5,679,000	90.81	138,146,560	90.81	138,146,560	100.90	36.07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen RKA/DPA dan IKK	90	497,575,419	90.00	117,966,610	90.00	79,999,880	-		0.17	13,775,000	52.16	41,730,130	30.35	24,276,000	82.68	79,781,130	172.68	197,747,740	191.87	39.74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						90.00	8,172,250	-		100.00	8,172,250	-		-	-	100.00	8,172,250	100.00	8,172,250	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan Negara	90.00	508,555,973,562	90.00	32,493,300	90.00	203,909,408,870	12.27	27,802,669,450	23.86	54,067,163,674	26.45	53,931,736,884	25.47	51,944,348,535	88.06	187,745,918,543	178.06	187,778,411,843	197.84	36.92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	95	507,910,757,959			95.00	203,797,008,000	12.96	27,799,735,050	25.17	54,000,206,129	26.46	53,922,518,984	25.47	51,911,060,145	90.06	187,633,520,308	90.06	187,633,520,308	94.80	36.94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD	90	515,196,403			90.00	81,623,870	2.46	2,230,400	47.29	42,884,545	8.84	7,217,900	35.88	29,288,390	94.47	81,621,235	94.47	81,621,235	104.97	15.84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	90	130,019,200	90.00	32,493,300	90.00	30,777,000	2.06	704,000	70.40	24,073,000	6.50	2,000,000	13.00	4,000,000	91.95	30,777,000	181.95	63,270,300	202.17	48.66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	90.00	151,914,899			90.00	45,869,000	8.88	4,523,340	23.04	10,567,100	10.70	4,909,050	55.93	25,653,610	98.54	45,653,100	98.54	45,653,100	109.49	30.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen dan Data Aset	90	151,914,899			90.00	45,869,000	8.88	4,523,340	23.04	10,567,100	10.70	4,909,050	55.93	25,653,610	98.54	45,653,100	98.54	45,653,100	109.49	30.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	90.00	1,334,245,797	90.00	134,619,950	90.00	190,857,800	12.17	25,806,550	38.92	82,540,000	28.84	55,037,450	13.37	25,517,250	93.30	188,901,250	183.30	323,521,200	203.66	24.25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	90	29,923,085	90.00	2,869,950	90.00	8,217,800	26.58	2,426,550			34.19	2,809,450	19.68	1,617,250	80.44	6,853,250	170.44	9,723,200	189.38	32.49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	90	56,799,600	90.00	7,200,000	90.00	7,800,000	-		33.33	2,600,000	25.00	1,950,000	41.67	3,250,000	100.00	7,800,000	190.00	15,000,000	211.11	26.41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Perjalanan Dinas	90	1,247,523,112	90.00	124,550,000	90.00	174,840,000	12.04	23,380,000	41.15	79,940,000	28.76	50,278,000	11.81	20,650,000	93.75	174,248,000	183.75	298,798,000	204.17	23.95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	90	1,395,336,334	11.50	160,459,360	90.00	246,517,860	10.39	28,453,101	28.60	78,337,501	19.39	47,800,025	32.62	80,424,611	91.00	235,015,238	102.50	395,474,598	113.89	28.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	90	1,048,123,019	90.00	160,459,360	90.00	135,848,640	17.86	26,953,341	19.80	29,888,011	21.91	29,764,375	27.92	37,924,091	87.48	124,529,818	177.48	284,989,178	197.20	27.19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum	90	347,213,315			90.00	110,669,220	1.22	1,499,760	39.40	48,449,490	16.30	18,035,650	38.40	42,500,520	95.32	110,485,420	95.32	110,485,420	105.91	31.82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I		II		III		IV				12			13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	90	623,171,714			90.00	77,304,450	24.85	21,347,000	4.02	3,450,000	12.16	9,400,000	43.40	33,550,000	84.43	67,747,000	84.43	67,747,000	93.81	10.87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas, Jabatan	Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	90	623,171,714			90.00	77,304,450	24.85	21,347,000	4.02	3,450,000	12.16	9,400,000	43.40	33,550,000	84.43	67,747,000	84.43	67,747,000	93.81	10.87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JUMLAH KESELURUHAN				90	588,750,809,781	90.00	21,523,559,418	90.00	268,541,547,468	10.56	28,356,428,301	27.16	72,947,347,097	2.26	6,078,540,345	11.11	29,835,857,995	91.58	245,918,690,733	89.39	267,392,425,651			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																								
DINAS KESEHATAN																								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																								
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26,702,594,971				26,702,594,971					-										Dinas Kesehatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		79,256,000				79,256,000					-										Dinas Kesehatan
		Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)	95	79,256,000			95	88,332,900	14.165458	12,512,760	33.954959	29,993,400	19.1	16,851,800	13.1	11,550,000	80.3	70,907,960					Dinas Kesehatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24,995,450,771				24,995,450,771					-	0.0	0.0	0.0	-						Dinas Kesehatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN (Bulan)	90	24,833,850,771			90	26,898,187,661		4,164,386,098		7,273,629,521	19.7	5,292,044,310	20.7	5,559,048,334	82.9	22,289,108,263					Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (Bulan)	Persentase Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (Bulan)	90	161,600,000			90	195,972,550	8.4195465	16,500,000	32.300442	63,300,000	21.4	41,892,000	20.4	39,900,000	82.5	161,592,000					Dinas Kesehatan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		133,800,000				133,800,000					-	0.0	0.0	0.0	-						Dinas Kesehatan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	90	133,800,000			90	71,138,000	41.814501	29,746,000	45.200034	32,154,400	50.4	35,822,900	49.2	34,968,900	186.5	132,692,200					Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		496,668,200				496,668,200					-	0.0	0.0	0.0	-						Dinas Kesehatan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Administrasi Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	90	23,053,800			90	9,213,000	101.05286	9,310,000		3,299,000	70.4	6,482,300	42.9	3,950,000	250.1	23,041,300					Dinas Kesehatan
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Administrasi Dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	90	161,064,400			90	356,619,000	0	-		54,630,000	16.8	60,000,000	9.5	33,710,500	41.6	148,340,500					Dinas Kesehatan
		Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan	Jumlah Administrasi Bacaan Dan Peralihan Perundang Undangan (Bulan)	100	18,000,000			100	6,000,000	0	-	76.166667	4,570,000	32.5	1,950,000	180.8	10,850,000	289.5	17,370,000					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Administrasi Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bulan)	100	294,550,000			100	253,700,000	14.334924	36,367,702	13.019053	33,029,338	32.9	83,565,994	37.7	95,591,913	98.0	248,554,947					Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		522,444,000				522,444,000					-	0.0	0.0	0.0	-						Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Administrasi Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik (Bulan)	100	222,444,000			100	584,925,408	8.8030849	Rp 51,491,480	6.8018683	39,785,856	7.9	46,035,102	9.6	56,048,497	33.1	193,360,935					Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capalan Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Kebersihan Kantor (Bulan)	100	300,000,000			100	293,376,700	20.49866	60,138,291	30.421639	89,250,000	26.4	77,487,118	24.7	72,374,000	102.0	299,249,409					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		474,976,000				474,976,000				-	0.0		0.0		0.0	-					Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (Bulan)	100	474,976,000			100	561,180,000		98,407,884	18.765985	105,310,956	15.8	88,459,303	31.8	178,210,837	83.8	470,388,980					Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			103,217,035,676				103,217,035,676				-	0.0		0.0		0.0	-					Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan		20,977,050,313				20,977,050,313				-	0.0		0.0		0.0	-					Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi & Pemeliharaan Puskesmas		100	924,984,147			100	11,086,742,875		-		725,283,467	0.0	-	0.0		-	6.5	725,283,467				
		Rehabilitasi & Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		100	1,039,593,590			100	5,669,223,106		-	8.9434867	507,026,212	0.0	-	5.3	301,109,850	14.3	808,136,062					Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi & Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		100	22,336,686			100	426,177,100		-		-	0.0	-	4.0	16,956,950	4.0	16,956,950					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Prasarana & Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100	6,102,315,000			100	4,623,040,650		-	0.0788442	3,645,000	0.0	-	131.7	6,088,990,000	131.8	6,092,635,000					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100	771,463,622			100	1,783,056,929		-		500,480,000	15.2	270,983,622	0.0	-	43.3	771,463,622					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Obat Vaksin		100	11,647,373,636			100	6,697,827,645	0	-	0	-	10.3	692,712,000	154.5	10,346,256,671	164.8	11,038,968,671					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai		100	468,983,632			100	1,335,578,384		-		29,213,500	19.6	262,202,700	13.2	176,252,000	35.0	467,668,200					Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			82,239,985,363				82,239,985,363				-	0.0		0.0		0.0	-					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100	85,864,400			100	141,188,900		-	3.489297	4,926,500	45.6	64,343,750	10.6	14,950,000	59.7	84,220,250					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			179,633,250						-		13,162,500		83,983,750		73,740,000							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			29,140,000						-		1,880,000		13,560,000		13,050,000							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			244,292,250						-		4,352,300		29,990,000		101,044,950							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		100	102,180,450			100	20,496,350		-	0	-	49.1	10,056,450	393.8	80,711,050	442.8	90,767,500					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			250,000,000						-		-		147,000,000		78,400,000							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			227,989,350						-		5,905,000		60,807,750		91,482,350							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi		100	200,000,000			100	154,100,000		12,500,000		-	4.9	7,500,000	108.5	167,266,000	121.5	187,266,000					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		100	10,000,000			100	84,442,894		10,000,000	0	-	0.0	-	0.0	-	11.8	10,000,000					Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		100	140,035,000			100	165,505,000		-	0	-	60.6	100,360,000	22.9	37,875,000	83.5	138,235,000				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
										8		9		10		11									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		100	18,530,000			100	219,649,500		-	8.4361676	18,530,000	0.0	-	0.0	-	8.4	18,530,000					Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV		100	259,885,000			100	136,066,220		-	53.562155	72,880,000	72.9	99,250,000	62.2	84,590,000	188.7	256,720,000					Dinas Kesehatan	
8		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		100	3,302,182,700			100	501,856,200		-	0.7239125	3,633,000	32.5	163,331,800	578.6	2,903,830,590	611.9	3,070,795,390						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		100	32,351,000			100	44,148,500		-	73.277688	32,351,000	0.0	-	0.0	-	73.3	32,351,000					Dinas Kesehatan	
9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		90	240,270,000			90	687,499,686		-	0	-	21.7	149,267,800	13.2	90,620,000	34.9	239,887,800					Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100	1,400,000,000			100	1,215,571,350		-	14.150116	172,004,758	1.8	22,402,000	97.4	1,183,972,000	113.4	1,378,378,758					Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular & Tidak Menular		100	1,806,119,680			100	3,050,117,200		-	1.3769963	42,000,000	17.5	534,973,542	22.6	690,588,040	41.6	1,267,561,582					Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		100	50,045,821,700			100	58,864,670,000		24,794,085,035	12.308915	7,245,602,174	15.3	8,992,086,669	4.9	2,896,083,300	74.6	43,927,857,178					Dinas Kesehatan	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		100	125,370,000			100	231,046,000		89,108,500	11.855215	27,391,000	1.9	4,500,000	0.0	-	52.4	120,999,500					Dinas Kesehatan	
		Operasional Pelayanan Puskesmas		90	13,260,426,500			90	26,231,293,320		-	18.688776	4,902,307,700	1.1	298,823,040	25.4	6,666,832,813	45.2	11,867,963,553					Dinas Kesehatan	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		90	9,851,406,083			90	6,629,501,122		414,260,000	34.686918	2,299,569,638	8.6	572,805,000	80.3	5,323,817,975	129.9	8,610,452,613					Dinas Kesehatan	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		100	328,488,000			100	1,277,840,200		-	0	-	0.0	-	1.3	16,942,500	1.3	16,942,500					Dinas Kesehatan	
10		Pelaksanaan Kewaspadaan Diri & Respon Wabah		100	100,000,000			100	193,313,000		-	6.6958766	12,944,000	40.0	77,376,000	4.9	9,530,000	51.7	99,850,000					Dinas Kesehatan	
12		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDMK			200,000,000				200,000,000		0	-	0.0		0.0		0.0	-						Dinas Kesehatan	
		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM di wilayah kab/kota			200,000,000				200,000,000		0	-	0.0		0.0		0.0	-							
		Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		100	150,000,000			100	159,708,000		-	28.455369	45,445,500	0.0	-	31.5	50,269,400	59.9	95,714,900						
		Pembinaan dan Pengawasan SDMK		100	50,000,000			100	28,236,450		-	88.591165	25,015,000	68.4	19,302,800	14.2	4,000,000	171.1	48,317,800						
		PROGRAM PERSEDIAAN FARMASI, ALKES & MAMIN			74,999,900				74,999,900		0	-	0.0		0.0		0.0	-							
		Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil pemeriksaan Pos Market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri RT			74,999,900				74,999,900		0	-	0.0		0.0		0.0	-							
		Pemeriksaan Post market pada produk makanan - minuman industri RT yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan		100	74,999,900			100	30,142,960		-	57.245539	17,255,500	153.0		38.6	11,640,000	248.8	74,999,900						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			568,966,700				568,966,700		0	-	0.0		0.0		0.0	-							
		Pelaksanaan sehat dalam rangka promotik preventif Tingkat Daerah Kab/kota			68,966,700				68,966,700		0	-	0.0		0.0		0.0	-							
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			500,000,000						-	275,025,500				174,155,000									
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan & Gerakan Hidup Bersih & Sehat		100	68,966,700			100	1,274,765,000		-	0	-	4.9		0.2	2,596,100	5.1	65,438,900						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program				130,763,597,247				130,763,597,247		22.79	29,798,813,750		18.90	24,716,781,720		14.2	18,584,486,700		33.5	43,793,755,520		89.4	116,893,837,690		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)										22.78830988				275,025,500		14			33			89			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I		II		III		IV				12			13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
RSUD Prof.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU																								
	MembaiKnya Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TercapaiKnya prosentase administrasi perkantoran																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tertaksananya pembayaran Gaji Pegawai	100	17,347,319,000	94.26	14,472,012,932	100%	16,718,228,214	19.22	3,212,961,962	47.88	8,004,761,274	73.68	12,318,729,939	97.55	16,309,040,979	97.55	16,309,040,979	191.81	30,781,053,911	192	177.44	RSUD
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tertaksananya pembayaran rekening atas pemakaian telepon,air dan listrik	100	2,002,000,000	94.10	1,868,893,187	0%	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	94.10	1,868,893,187	94	93.35	RSUD
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya atas perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi	100	88,000,000	62.06	57,929,499	0%	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	62.06	57,929,499	62	65.83	RSUD
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan yang berkus	100	66,000,000,000	115.08	74,804,265,501	100%	59,591,584,557	28.57	17,024,853,311	52.02	31,000,316,185	83.80	71,231,001,285	99.92	84,932,101,814	99.92	84,932,101,814	215.00	159,736,367,315	215	242.02	RSUD
										-							-	0	-	-				
	Tersedianya Sarana Peralatan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya prosentase sarana rumah sakit yang memadai							-							-	0	-	-				
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan jumlah kunjungan pa	100	19,760,191,025	99.81	17,934,945,661	100%	5,777,550,000			14.96	864,258,262	56.77	3,279,675,712	92.80	5,361,513,401	92.80	5,361,513,401	192.61	23,296,459,062	193	117.90	RSUD
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja : Adanya dukungan kebijakan dan anggaran pada beberapa program strategis																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Rendahnya keberhasilan kinerja karena tidak adanya batasan anggaran dan kegiatan dalam penyusunan Renstra SKPD sehingga ketersediaan anggaran tiap tahun tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran yang direncanakan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Agar memprioritaskan program yang capaiKnya masih rendah dalam RKPD berikutnya																								
RSUD BANYORANG																								
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-			-			Rp 468,225,919		Rp 1,137,256,788	36,06%	Rp 1,920,875,145	10,27%	Rp 308,154,468		1,605,482,707		1,605,482,707	321,096,541	RSUD Banyorang		
2		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase capaian perencanaan yang tersusun dalam renstra, renja, RAK, dan DPA perangkatKaat daerah	-			-			Rp 5,328,550		Rp 9,506,750	86,36	Rp 12,458,150	6,93%	Rp 1,000,000		14,835,300		14,835,300	2,967,060	RSUD Banyorang		
3		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah														-			-	RSUD Banyorang			
4		Kordinasi dan penyusunan dokumen RAK SKPD	jumlah dokumen RAK	75%	34,000,000	-	-	30,13%	Rp 2,807,700	58,54%	Rp 5,456,000	82,60%	Rp 7,698,400	10,73%	Rp 1,000,000		8,263,700		8,263,700	1,652,740	RSUD Banyorang			
5		Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan realisasi	75%	25,000,000	-	-	49,37%	Rp 2,520,850	79,32%	Rp 4,050,750	93,21%	Rp 4,759,750				6,571,600		6,571,600	1,314,320	RSUD Banyorang			
6		Administrasi keuangan perangkat daerah	tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah							Rp 271,541,031		Rp 709,913,781	30,09%	Rp 1,282,934,339	11,80%	Rp 232,083,788		981,454,812		981,454,812	196,290,962	RSUD Banyorang		
7		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	75%	3,905,000,000	-	-	6,16%	Rp 260,052,301	16,26%	Rp 686,216,051	29,58%	Rp 1,248,304,009	11,86%	Rp 228,083,788		946,268,352		946,268,352	189,253,670	RSUD Banyorang			
8		pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	jumlah jasa pengelola keuangan	75%	25,000,000	-	-	26,69%	Rp 3,645,700	58,42%	Rp 7,981,300	81,42%	Rp 11,123,800	7,31%	Rp 1,000,000		11,627,000		11,627,000	2,325,400	RSUD Banyorang			
9		kordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	jumlah kordinasi dan penyusunan laporan keuanhgan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	75%	40,000,000	-	-	25,97%	Rp 7,843,030	52,04%	Rp 15,716,430	77,83%	Rp 23,506,530	9,93%	Rp 3,000,000		23,559,460		23,559,460	4,711,892	RSUD Banyorang			
10		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	tersedianya laporan barang milik daerah							Rp 4,727,350		Rp 10,137,550	80,82%	Rp 14,285,750	11,31%	Rp 2,000,000		14,864,900		14,864,900	2,972,980	RSUD Banyorang		
11		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	jumlah barang milik daerah	75%	40,000,000	-	-	26,74%	Rp 4,727,350	57,35%	Rp 10,137,550	80,82%	Rp 14,285,750	11,31%	Rp 2,000,000		14,864,900		14,864,900	2,972,980	RSUD Banyorang			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
12		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah						Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		-		-		-	RSUD Banyorang		
13		Pengadaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	jumlah aparatur yang dipasiltasi administrasi kepegawaian												-		-		-		-	RSUD Banyorang		
14		kordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	jumlah laporan administrasi kepegawaian	75%	15,000,000										-		-		-		-	RSUD Banyorang		
15		Administrasi umum perangkat daerah	terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah						Rp 33,445,500		Rp 59,708,150	41,58%	Rp 94,772,850	1,99%	Rp 4,399,700	93,153,650	93,153,650		18,630,730			RSUD Banyorang		
16		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75%	140,000,000	-	20,77%	Rp 11,335,500	44,69%	Rp 24,393,150	64,73%	Rp 35,327,850	8,92%	Rp 4,399,700	35,728,650		35,728,650		7,145,730			RSUD Banyorang		
17		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	75%	33,000,000						21,07%	Rp 19,200,000			-		-		-		-	RSUD Banyorang		
18		penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	75%	25,000,000										-		-		-		-	RSUD Banyorang		
19		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	75%	25,000,000	-	-								-		-		-		-	RSUD Banyorang		
20		penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah perajadin	75%	180,000,000	-	-	27,83%	Rp 22,110,000	44,44%	Rp 35,315,000	50,64%	Rp 40,245,000			57,425,000	57,425,000		11,485,000			RSUD Banyorang		
21		pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	tersedianya barang milik daerah						Rp -		Rp -	51,39%	Rp 13,000,000		Rp -	-	-		-		-	RSUD Banyorang		
22		pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan												-		-		-		-	RSUD Banyorang		
23		pengadaan mebel	jumlah mebel yang tersedia	75%	50,000,000										-		-		-		-	RSUD Banyorang		
24		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah pengadaan dan peralatan mesin lainnya	75%	40,000,000						51,39%	Rp 13,000,000			-		-		-		-	RSUD Banyorang		
25		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	cakupan pelayanan penunjang pemerintah						Rp 132,321,988		Rp 281,885,657	66,77%	Rp 403,917,156	9,82	Rp 59,168,980	414,207,645	414,207,645		82,841,529			RSUD Banyorang		
26		penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik	jumlah biaya tagihan telepon,air dan listrik	12 Bln	600,000,000	-	22,04%	Rp 45,055,439	42,36%	Rp 86,594,818	61,32	Rp 125,345,058	9,2%	Rp 18,168,980	131,650,257	131,650,257		26,330,051			RSUD Banyorang			
27		penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah biaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	30,000,000	-	7,00%	Rp 4,300,000	39,37%	Rp 24,192,600	59,40%	Rp 36,503,439			28,492,600	28,492,600		5,698,520			RSUD Banyorang			
28		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bln	400,000,000	-	24,47%	Rp 82,966,549	50,46%	Rp 171,098,239	71,40%	Rp 242,068,659	12,7%	Rp 41,000,000	254,064,788	254,064,788		50,812,958			RSUD Banyorang			
29		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	terpeliharanya barang milik daerah						Rp 18,285,000		Rp 62,205,000	56,30%	Rp 94,607,000	5,97%	Rp 9,502,000	80,490,000	80,490,000		16,098,000			RSUD Banyorang		
30		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan yg tersedia	75%	80,000,000	-	10,47%	Rp 4,700,000	22,61%	Rp 10,150,000	37,45%	Rp 16,810,000			14,850,000	14,850,000		2,970,000			RSUD Banyorang			
31		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan yg tersedia	75%	450,000,000		10,85%	Rp 11,200,000	37,20%	Rp 38,414,000	56,32%	Rp 58,164,000	9,20%	Rp 9,502,000	49,614,000	49,614,000		9,922,800			RSUD Banyorang			
32		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi gedung yg tersedia	75%	95,000,000	-	11,98%	Rp 2,385,000	68,51%	Rp 13,641,000	98,60%	Rp 19,633,000			16,026,000	16,026,000		3,205,200			RSUD Banyorang			
33		Penataan Organisasi	Persentase Cakupan Penataan Organisasi						Rp 2,576,500		Rp 3,899,900	95,79%	Rp 4,899,900		Rp -	6,476,400	6,476,400		1,295,280			RSUD Banyorang		
34		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang tersedia	75%	25,000,000	-	50,37%	Rp 2,576,500	19,59%	Rp 3,899,900	95,79%	Rp 4,899,900			6,476,400	6,476,400		1,295,280			RSUD Banyorang			
35		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			-	-		Rp 130,537,500		Rp 863,309,430	32,70%	Rp 1,743,265,352	53,72%	Rp 4,511,891,628	993,846,930	993,846,930		198,769,386			RSUD Banyorang		
36		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM Dan UKP			-	-		Rp -		Rp 345,887,492	29,13%	Rp 640,359,106	62,81%	Rp 3,409,136,072	345,887,492	345,887,492		69,177,498			RSUD Banyorang		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
37		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan yang dilakukan															K	Rp	K	Rp			RSUD Banyorang
38		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas yang dilakukan																Rp					RSUD Banyorang
39		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	80%	12,434,448,444	-		-				5,45%	Rp 64,978,000	71,66%	Rp 3,199,718,703				Rp					RSUD Banyorang
40		Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah obat dan vaksin yang tersedia	80%	800,000,000	-		-		46,48%	Rp 233,438,305	49,09%	Rp 246,576,595	29,23%	Rp 155,528,858		233,438,305				233,438,305		46,687,661	RSUD Banyorang
41		Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah pengadaan bahan habis pakai	80%	660,000,000	-		-		28,41%	Rp 112,449,187	76,29%	Rp 328,804,511	12,51	Rp 53,888,511		112,449,187				112,449,187		22,489,837	RSUD Banyorang
42		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan	80%	200,000,000																			RSUD Banyorang
43		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan yang dilakukan	80%	300,000,000																			RSUD Banyorang
44		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	-		-		-	Rp 130,537,500		Rp 517,421,938	35,20%	Rp 1,102,906,246	37,11%	Rp 1,102,755,556		647,959,438				647,959,438		129,591,888	RSUD Banyorang
45		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	jumlah biaya yang dikeluarkan untuk operasional rumah sakit	80%	6,000,000,000	-		- 6,69%	Rp 130,537,500	16,56%	Rp 517,421,938	35,20%	Rp 1,102,906,246	37,11%	Rp 1,102,755,556		647,959,438				647,959,438		129,591,888	RSUD Banyorang
46		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah anggaran yang dikeluarkan dalam persiapan dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit	80%	450,000,000																			RSUD Banyorang
47		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah pengadaan dan pengelolaan SPGDT	80%	300,000,000																			RSUD Banyorang
48		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi						Rp -		Rp -		Rp -		Rp -									RSUD Banyorang
49		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	jumlah biaya dalam pengelolaan sistem informasi	85%	120,000,000																			RSUD Banyorang
50		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	85%	250,000,000																			RSUD Banyorang
51		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-		-	Rp 4,540,000		Rp 13,780,500	85,49%	Rp 19,450,500	4,77%	Rp 1,000,000		18,320,500				18,320,500		3,664,100	RSUD Banyorang
52		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-		-		-	Rp 3,040,000		Rp 7,600,000	100%	Rp 9,120,000		Rp -		10,640,000				10,640,000		2,128,000	RSUD Banyorang
53		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan sumber daya manusia kesehatan	75%	30,000,000	-		- 33,33%	Rp 3,040,000	83,33%	Rp 7,600,000	100%	Rp 9,120,000				10,640,000				10,640,000		2,128,000	RSUD Banyorang
54		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-		-	Rp 1,500,000		Rp 6,180,500	75,79%	Rp 10,330,500	8,45%	Rp 1,000,000		7,680,500				7,680,500		1,536,100	RSUD Banyorang
55		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengembangan mutu dan oeringkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah	85%	50,000,000	-		- 33,33%	Rp 1,500,000	45,34%	Rp 6,180,500	75,79%	Rp 10,330,500	8,45%	Rp 1,000,000		7,680,500				7,680,500		1,536,100	RSUD Banyorang
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capalan Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik dan aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																						
4		KABUPATEN/KOTA																						
5		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
6		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100	600,000,000			80,670,750.00	4	2,900,300.00	8,467,900.00		20,566,600.00		43,932,550.00	4	75,867,350.00	4	75,867,350.00	4		13		
7		Dokumen Renja, PRK, RKA, DPA, DPPA		100												-	0.00	-	0.00	-				
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja PD	100	145,000,000	45,115,250	5	2,304,000.00		1,200,000.00	7,766,700.00		26,915,650.00	5	38,186,350.00	5	38,186,350.00	5		26				
9		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD	100	750,000,000	45,115,250.00	8	3,795,000.00		7,908,900.00	5,484,000.00		13,180,000.00	8	30,367,900.00	8	30,367,900.00	8		4				
10		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				74,177,150.00	-									-	0.00	-	0.00					
11		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase tersedianya pembayaran gaji ASN	100	7,000,000,000	4,639,490,675.00	16	763,576,744.00		1,223,052,898.00	1,013,715,689.00		1,036,029,188.00	16	4,036,374,519.00	16	4,036,374,519.00	16		58				
12		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100		55,082,000.00	11	6,117,500.00		15,972,700.00	9,759,750.00		23,182,550.00	11	55,032,500.00	11	55,032,500.00	11						
13		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen		167,781,335											-	0.00	-	0.00					
14		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			341,500,000	14,983,760.00	-									-	0.00	-	0.00					
15		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Data Aset yang akurat/tabel dan akurat setiap tahunnya	100	148,500,000	14,983,760.00	16	2,373,300		2635600	10,068,400.00		11,709,400.00		26,786,700.00	-	26,786,700.00	-		18				
16		Administrasi Umum Perangkat Daerah			296,500,000	281,477,290.00	-									-	0.00	-	0.00					
17		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya mebeleur	100	55,000,000	75,051,290.00	90	67,837,400		25837400	67,837,400.00		67,837,400.00	90	229,349,600.00	90	229,349,600.00	90		417				
18			Tersedianya peralatan gedung kantor	100												-	0.00	-	0.00					
19			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100												-	0.00	-	0.00					
20		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	100	75,000,000	9,992,000.00	42	4,200,000.00		4200000	8,900,000.00		9,900,000.00	42	27,200,000.00	42	27,200,000.00	42		36				
21		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	100	1,345,328,000	146,434,000.00		82,699,200		19250000	132,999,006.00		146,004,506.00	-	380,952,712.00	-	380,952,712.00	-		28				
22		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2,104,052,000	140,062,500.00	-									-	0.00	-	0.00	-				
23		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Air, Telepon, dan Listrik	100	525,000,000	85,074,000.00	33	28,267,239		5082193	45,520,345.00		55,766,630.00		134,636,407.00	-	134,636,407.00	-		26				
24		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan/alat jasa kebersihan kantor	100	1,414,052,000	54,988,500.00		21,968,500		3750000	42,098,000.00		45,848,000.00	-	113,664,500.00	-	113,664,500.00	-		8				
25		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1,590,000,000	148,969,000.00	-									-	0.00	-	0.00	-				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
25	Meningkatnya kualitas jalan dan jaringan Pendukung	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasionall	100	215,000,000				123,984,000.00	13	16,091,500		18439672		102,349,904.00		110,064,076.00		246,945,152.00	-	246,945,152.00	-	115	
26		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kerja	100	90,000,000													-	0.00	-	0.00	-	-	
27		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab rumah Dinas	100	700,000,000				24,985,000.00	-								-	0.00	-	0.00	-	-	
28			Rehab rumah gedung kantor	100														-	0.00	-	0.00			
29		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		100					14,693,282,269.00	-								-	0.00	-	0.00			
30		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	92,120,000,000				824,043,557.00	-								-	0.00	-	0.00			
31		Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Tersedianya embung dan penampungan air	100											180,985,500.00		2,610,532,668.00	-	2,791,518,168.00	-	2,791,518,168.00			
32		Pembangunan Tanggul Sungai	Tersedianya tanggul sungai	100	9,500,000,000				24,081,100.00	-			177968250		319,493,000.00		860,808,200.00	-	1,358,269,450.00	-	1,358,269,450.00			
33		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Tertaksananya rehab embung	100														-	0.00	-	0.00			
34		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			68,429,000,000				13,869,238,712.00	-								-	0.00	-	0.00			
35		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya jaringan irigasi	100	24,163,000,000				3,040,218,102.00	-			178970500		1,270,611,300.00		1,954,501,350.00	-	3,404,083,150.00	-	3,404,083,150.00			
36		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tertaksananya rehab jaringan irigasi	100	12,702,000,000				7,928,528,210.00	-			179027500		2,835,839,850.00		7,849,594,650.00	-	10,864,462,000.00	-	10,864,462,000.00			
37		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tertaksananya pemeliharaan jaringan irigasi	100	6,000,000,000				2,900,492,400.00	-			1199782000		1,856,583,200.00		2,134,754,950.00	-	5,191,120,150.00	-	5,191,120,150.00			
38		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		100					16,435,711,968.00	-								-	0.00	-	0.00			
39		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		100	44,650,000,000				16,435,711,968.00	-								-	0.00	-	0.00			
40	Meningkatnya kualitas jalan dan jaringan Pendukung	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersedianya spam	100	6000000000				5,760,504,428.00	-								-	0.00	-	0.00			
41		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya spam	100	1800000000				654,688,600.00	-					450,558,591.00		2,205,779,996.00	-	2,656,338,587.00	-	2,656,338,587.00			
42		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan spam	100	6000000000				10,020,518,940.00	-			567533200		567,533,200.00		611,188,600.00	-	1,746,255,000.00	-	1,746,255,000.00			
43		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan spam	100	6000000000								284167700		3,965,965,575.00		6,510,517,202.00	-	10,760,650,477.00	-	10,760,650,477.00			
44		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							9,239,698,689.00	-								-	0.00	-	0.00			
45		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			38,687,681,850				9,239,698,689.00	-								-	0.00	-	0.00			
46		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	tersedianya sarana pengelolaan air limbah		9,000,000,000				8,918,747,589.00	-					2,157,911,388.00		6,934,835,122.00	-	9,092,746,510.00	-	9,092,746,510.00			
47		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah		657,000,000				11,637,100.00	-					2,272,550.00		2,272,550.00	-	4,545,100.00	-	4,545,100.00			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
48		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Tersedianya pengelolaan air limbah	100	800,000,000											-	0.00	-	0.00					
49		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						14,799,036,546.00	-							-	0.00	-	0.00					
50		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			40,000,000,000			14,799,036,546.00	-							-	0.00	-	0.00					
51		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya sistem drainase	100	30,000,000,000			14,799,036,546.00	-			1071586350		5,356,839,948.00		11,204,826,963.00		-	17,633,253,261.00	-	17,633,253,261.00			
52		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						6,364,628,469.00	-							-	0.00	-	0.00					
53	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			45,000,000,000			6,364,628,469.00	-							-	0.00	-	0.00					
54		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastuktur kawasan permukiman	100	45,000,000,000			6,364,628,469.00	-			127520450		2,710,811,207.00		4,762,608,434.00		-	7,600,940,091.00	-	7,600,940,091.00			
55		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						6,337,948,830.00	-							-	0.00	-	0.00					
56		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						6,337,948,830.00	-							-	0.00	-	0.00					
57		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan bangunan gedung daerah	100				6,261,098,830.00	-					1,110,979,380.00		1,430,217,480.00		-	2,541,196,860.00	-	2,541,196,860.00			
58		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		100	66,200,000,000			65,660,201,912.00	-							-	0.00	-	0.00					
59		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		100	66,200,000,000			65,660,201,912.00	-							-	0.00	-	0.00					
60		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kondisi jalan	100	350,000,000			640,051,250.00	-					14,402,000.00		21,657,000.00		-	36,059,000.00	-	36,059,000.00			
61		Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi jalan	100	20,000,000,000			14,059,079,849.00	-			879289700		2,436,152,500.00		4,575,400,900.00		-	7,890,843,100.00	-	7,890,843,100.00			
62		Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya pemeliharaan jalan	100	24,000,000,000			49,439,637,913.00	-			7120556750		8,809,757,700.00		25,122,780,450.00			41,053,094,900.00	-	41,053,094,900.00			
63	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya pemeliharaan jalan	100	4,000,000,000			1,521,432,900.00	39	600,000,000.00				1,061,603,300.00		1,516,996,600.00			3,178,599,900.00	-	3,178,599,900.00	-	79	
64		Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pelebaran jalan	100	6,000,000,000											-	0.00	-	0.00	-	-			
65		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						855,552,560.00	-							-	0.00	-	0.00					
66		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			2,200,241,675			334,194,260.00	-							-	0.00	-	0.00					
67		Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	jasa konstruksi	100	524,074,525											-	0.00	-	0.00					
68		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi	100	718,013,650			197,266,260.00	-					25,421,260.00		200,253,260.00		-	225,674,520.00	-	225,674,520.00			
69		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi		673,153,500			56,928,000.00	-					15,070,000.00		58,288,200.00		-	73,358,200.00	-	73,358,200.00			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
70		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2,401,613,800				257,000,000.00	-								-	0.00	-	0.00			
71		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya perangkat pendukung jasa konstruksi		801,613,800														0.00	-	0.00			
72		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100	660,000,000				398,931,650.00	-									0.00	-	0.00			
73		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi		558,647,000				12,000,000.00	-		101,425,000.00		146,463,300.00		261,358,300.00		509,246,600.00	-	509,246,600.00				
74		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			6,215,500,000														0.00	-	0.00			
75		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			4,305,000,000				268,931,650.00	-									0.00	-	0.00			
76		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan RT RW		300,000,000				118,931,650.00	-				12,917,200.00		12,917,200.00		25,834,400.00	-	25,834,400.00				
77	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan penataan ruang	100	450,000,000				100,000,000.00	-				20,501,250.00		20,501,250.00		41,002,500.00						
78		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Regulasi penataan ruang	100	55,000,000				50,000,000.00	-				12,500,000.00		12,500,000.00		25,000,000.00						
79		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1,012,000,000													0.00						
80		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi	100	40,000,000													0.00						
81		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peningkatan peran masyarakat	100	972,000,000													0.00						
82		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100	338,500,000				100,000,000.00	-								0.00						
83		Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya sistem informasi penataan ruang	100	325,000,000				100,000,000.00	-				77,382,000.00		114,635,845.00		192,017,845.00						
84		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			560,000,000				30,000,000.00	-								0.00						
85		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi penataan ruang		30,000,000				30,000,000.00	-				20,559,200.00		28,881,300.00		49,440,500.00						
86		Survey dan Pemetaan	Jumlah Peta analogi dan tematik untuk Kabupaten Bantaeng															0.00						
87		Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang		100														0.00						
88		Survey dan pemetaan		100														0.00						
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																								
I	DPKPP	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan			20,362,950,000		7,688,456,461		13,004,965,265		805,719,882		1,392,410,597		3,284,026,367			11,519,102,965		19,916,126,232				
		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			9,762,950,000		5,561,091,161		8,554,048,725		582,469,542		1,067,297,977		1,346,378,627			8,018,367,678		14,288,025,645				
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	85%	2,967,950,000	85%	1,974,450,653	85%	2,284,493,524		407,095,668		629,386,660		476,441,654		512,114,457	2,025,038,439		3,994,109,092		1.346	DPKPP	
Meningkatnya tata kelola OPD		Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Yang Baik	2dokumen	180,000,000	2dokumen	64,414,900	2dokumen	80,595,390		16,264,600		13,033,200		18,334,400		21,655,060	69,287,260		133,702,160		0.743		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang Disusun dan Ditetapkan	1dokumen	90,000,000	1dokumen	21,925,000	1dokumen	34,273,730		7,694,700		5,061,200		8,309,500		6,389,400	27,454,800		49,379,800				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1dokumen	90,000,000	1dokumen	42,489,900	1dokumen	46,321,660		8,569,900		7,972,000		10,024,900		15,265,660	41,832,460		84,322,360				
		Administrasi Keuangan Pera	Laporan Keuangan SKPD yang	1dokumen	2,262,000,000	1dokumen	1,694,160,848	1dokumen	1,908,591,590		327,308,066		546,409,528		407,343,362		392,345,112	1,673,406,068		3,367,566,916		1.489		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Terbakar	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Terbakar	1 Tahun	2,200,000,000	1 Tahun	1,651,630,898	1 Tahun	1,855,799,700		317,262,366		528,351,478		398,385,632		376,644,702	1,620,644,178		3,272,275,076				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan VerifikasiKeuangan SKPD	47 Dokumen	30,000,000	47 Dokumen	34,943,950	47 Dokumen	47,246,190		4,500,000		18,058,050		8,957,730		15,700,410	47,216,190		82,160,140				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1dokumen	32,000,000	1dokumen	7,586,000	1dokumen	5,545,700		5,545,700		-		-		-	5,545,700		13,131,700				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	85%	285,950,000	85%	115,073,160	85%	186,869,000		37,003,000		43,539,600		24,748,000		71,488,360	176,778,960		291,852,120		1.021		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	6 komponen	8,500,000	6 komponen	2,893,500	6 komponen	4,501,000		573,000		-		573,000		3,355,000	4,501,000		7,394,500				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	12 unit	14,000,000	12 unit	-	12 unit	-		-		-		-		-	-		-				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kegiatan	7 eksemplar	13,450,000	7 eksemplar	9,025,000	7 eksemplar	9,360,000		1,650,000		2,830,000		1,885,000		2,875,000	9,240,000		18,265,000				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	250,000,000	12 bulan	103,154,660	12 bulan	173,008,000		34,780,000		40,709,600		22,290,000		65,258,360	163,037,960		266,192,620				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	100,000,000	85%	5,380,000	85%	-		-		-		-		-	-		-		-		
		Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor	2 unit	100,000,000	2 unit	-	2 unit	-		-		-		-		-	-		-		-		
		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor		250,000,000	4 jenis	-	17 Unit	-		-		-		-		-	-		-		-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor		400,000,000	2 jenis	-	-	-		-		-		-		-	-		-		-		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Gedung Kantor			1 unit	5,380,000		-		-		-		-		-	-		-		-		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	85%	70,000,000	85%	46,669,135	85%	58,807,544		12,970,002		12,201,722		15,865,892		15,775,925	56,813,541		103,482,676		1.478		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Biaya Tagihan Listrik dan Air	2 rek	34,000,000	2 rek	19,632,845	2 rek	24,281,944		6,464,262		4,881,722		5,565,042		5,871,915	22,782,941		42,415,786				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	16,000,000	12 bulan	6,765,000	12 bulan	12,610,000		1,000,000		2,820,000		4,795,000		3,500,000	12,115,000		18,880,000				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Gedung Kantor	1gedung	20,000,000	1gedung	20,271,290	1gedung	21,915,600		5,505,740		4,500,000		5,505,850		6,404,010	21,915,600		42,186,890				
		Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	70,000,000	85%	48,752,610	85%	49,630,000		13,550,000		14,202,610		10,150,000		10,850,000	48,752,610		97,505,220		1.393		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara	1 unit	70,000,000	1 unit	48,752,610	1 unit	49,630,000		13,550,000		14,202,610		10,150,000		10,850,000		48,752,610		97,505,220				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-	1 gedung	-		-		-		-		-		-						
2		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Perumahan Yang Layak Huni dan Sarana Dasar Bagi Masyarakat Miskin	80%	3,855,000,000	80%	952,550,427	80%	396,142,530		83,334,414		93,790,677		108,671,513		100,432,625		386,229,229		1,352,376,856		0.351	DPKPP	
Meningkatnya akses warga terhadap ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau		Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten	80%	525,000,000	80%	110,788,300	80%	49,722,090		3,574,630		10,679,730		23,485,430		11,982,300		49,722,090		160,510,390		0.306		
		Identifikasi perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1dokumen	90,000,000	1dokumen	48,837,500	1dokumen	32,640,490		3,574,630		8,510,530		13,587,530		6967800		32,640,490		81,477,990				
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan-Lahan Potensial Lokasi Relokasi Perumahan	1dokumen	95,000,000	1dokumen	2,650,500	1dokumen	-	0		0		0		0		-		2,650,500					
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	1dokumen	100,000,000	1dokumen	25,195,000	1dokumen	-	-		0		0		0		0		-		25,195,000			
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Penyediaan Data Tingkat Kerusakan Korban Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan	1dokumen	75,000,000	1dokumen	31,447,300	1dokumen	17,081,600		0		2,169,200		9,897,900		5,014,500		17,081,600		48,528,900				
		Pendataan dan Verifikasi Penerimaan Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dokumen Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana Alam atau Relokasi Program Kabupaten	1dokumen	80,000,000	1dokumen	2,658,000	1dokumen	-	-		0		0		0		0		-		2,658,000		0.033	
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1dokumen	85,000,000	1dokumen	-	1dokumen	-	-		-		0		0		0		-		-			
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Sosialisasi Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	70%	155,000,000	70%	-	-	-	-		-		0		0		0		-		-		-	
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1sosialisasi	75,000,000	1sosialisasi	-	-	-	-		-		0		0		0		-		-			
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terselenggaranya Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1pelatihan	80,000,000	1pelatihan	-	-	-	-		-		0		0		0		-		-			
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Tersedianya rumah bagi korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 Unit	2,650,000,000	50 Unit	560,092,200	-	-	0		-		0		0		0		-		560,092,200		0.211	
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	5 unit	700,000,000	5 unit	7,655,850	-	-	0		-		0		0		0		-		7,655,850			
		Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah Korban Bencana	10 unit	950,000,000	10 unit	4,913,400	-	-	0		-		0		0		0		-		4,913,400			
		Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan Rumah Khusus Beserta PSU Korban Bencana	325 unit	850,000,000	325 unit	547,522,950	-	-	0		-		0		0		0		-		547,522,950			
		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan	45%	150,000,000	45%	-	-	-	-		-		0		0		0		-		-			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13x100%		15
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Persentase terlaksananya pembinaan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Tumah Khusus	70%	345,000,000	70%	268,072,727	70%	346,420,440		79,759,784		83,110,947		85,186,083		88,450,325		336,507,139		631,774,266		1.831	
		Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Unit Bangunan Rusunawa yang Terkelola Dengan Baik	3rusun	345,000,000	3rusun	268,072,727	3rusun	346,420,440		79,759,784		83,110,947		85,186,083		88,450,325		336,507,139		604,579,866			
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	80%	180,000,000	80%	13,597,200		-		-		0		0		0		-		13,597,200			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi Perizinan dalam Rusunawa yang Terkelola Dengan Baik	1dokumen	180,000,000	1dokumen	13,597,200		-		-		0		0		0		-		13,597,200			
3		Program Kawasan Permukiman	Persentase Permukiman Yang Tertata	50%	1,940,000,000	50%	1,860,133,231	50%	4,396,795,790		31,831,710		344,120,640		666,970,210		3,153,723,300		4,196,645,860		1,129,028,110		0.582	DPKPP
	Pengurangan luasan permukiman kumuh	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen Perencanaan Kelurahan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	10dokumen	550,000,000	10dokumen	36,595,150		-		0		0		-		0	0%	-		36,595,150		0.067	
		Penyusunan dan/ atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1dokumen	550,000,000	1dokumen			-		0		0		0		0		-		36,595,150			
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Permukiman Yang Tertata	50%	440,000,000	50%	42,084,750	50%	56,297,750		9,432,000		9,877,000		14,903,000		14,097,500		48,309,500		90,394,250		0.205	
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Pelatihan BKM Dan Penguatan KKP	9kip	300,000,000	9kip	41,071,350		56,297,750		9,432,000		9,877,000		14,903,000		14,097,500		48,309,500		89,380,850			
		Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman Yang Tertata	50%	140,000,000	50%	1,013,400		-		-		0		0		0		-		1,013,400			
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase berkurangnya permukiman kumuh pada kawasan permukiman kumuh	50%	950,000,000	50%	1,781,453,331	50%	4,340,498,040		22,399,710		334,243,640		652,067,210		3,139,625,800		4,148,336,360		1,002,038,710		1.055	
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design(DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DED Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten	3dokumen	400,000,000	3dokumen	60,354,000	1dokumen	172,527,000		8,010,250		8,424,750		15,081,500		30,482,000		61,998,500		122,352,500			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Unit Rumah Tidak Layak Huni		350,000,000		1,682,895,431	60 Unit	3,245,908,750				317,557,790		595,353,010		2,331,944,750		3,244,855,550					
		Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase Terjalinnnya kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan PSU	50%	200,000,000	50%	38,203,900	50%	922,062,290		14,389,460		8,261,100		41,632,700		777,199,050		841,482,310		879,686,210			
4		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan dan Permukiman Kumuh	70%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		#DIV/0!	DPKPP
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		70%	-		-		-		0				0		0		-		-		#DIV/0!	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar	Jumlah Perbaikan Unit Rumah Tidak Layak Huni	68 unit	-		-		-		0				0		0		-		-			
5		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Terselenggaranya PSU Perumahan Permukiman	70%	1,000,000,000	70%	773,956,850	70%	1,476,616,881		60,207,750				94,295,250		1,172,862,050		1,410,454,150		7,812,511,587		7.813	DPKPP
	Terwujudnya pembangunan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya PSU Perumahan	13 lokasi	1,000,000,000	13 lokasi	773,956,850	13 lokasi	1,476,616,881		60,207,750		83,089,100		94,295,250		1,172,862,050		1,410,454,150		7,812,511,587		7.813	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yag berbasis kelestarian lingkungan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	1dokumen	500,000,000	1dokumen	39,297,150	1dokumen	54,025,500		10,849,500		12,080,500		9,687,500		17,772,000		50,389,500		89,686,650			
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan dan Permukiman yang Menunjang Fungsi Hunian	13 lokasi	500,000,000	13 lokasi	734,659,700	13 lokasi	1,422,591,381		49,358,250		71,008,600		84,607,750		1,155,090,050		1,360,064,650		2,094,724,350			
		Urusan Pertanahan			10,600,000,000		2,127,365,300		4,450,916,540		223,250,340		325,112,620		1,937,647,740		1,014,724,587		3,500,735,287		5,628,100,587			
6		Program Penyelesaian Sengketa Tanah	Jumlah Sengketa Tanah yang Difasilitasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah PEMDA	5 kasus	600,000,000	5 kasus	77,849,650	5 kasus	152,108,180		20,321,880		24,536,820		39,305,640		36,898,240		121,062,580		198,912,230	0.332	DPKPP	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Tertanganinya sengketa tanah PEMDA secara litigasi/non litigasi	80%	600,000,000	80%	77,849,650	80%	152,108,180		20,321,880		24,536,820		39,305,640		36,898,240		121,062,580		198,912,230	0.332		
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terinventarisasinya Tanah-tana Pemerintah Daerah yang Dalam Sengketa Konflik dan Yang Berperkara	80%	200,000,000	80%	38,434,350	80%	100,247,230		13,393,160		19,170,720		28,786,210		27,427,840		88,777,930		127,212,280			
		Mediasi Penyelesaian Sengketa,Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terselenggaranya Mediasi Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah PEMDA	80%	400,000,000	80%	39,415,300	80%	51,860,950		6,928,720		5,366,100		10,519,430		9,470,400		32,284,650		71,699,950			
7		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Terselaiskannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	70%	8,450,000,000	70%	1,847,391,600	70%	3,998,842,000		38,058,630		261,148,600		1,870,250,470		939,943,000		3,109,400,700		4,956,792,300	0.587		
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya lahan untuk pembangunan	70%	8,450,000,000	70%	1,847,391,600	70%	3,998,842,000		38,058,630		261,148,600		1,870,250,470		939,943,000		3,109,400,700		4,956,792,300	0.587		
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pemberian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5lokasi	8,000,000,000	5lokasi	1,822,020,600	5lokasi	3,956,179,500		33,635,730		252,403,900		1,857,832,870		931,102,000		3,074,974,500		4,896,995,100			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	70%	450,000,000	70%	25,371,000	70%	42,662,500		4,422,900		8,744,700		12,417,600		8,841,000		34,426,200		59,797,200			
8		Program Pengelolaan Tanah	Persentase Terdatanya dan Terkelolanya Tanah PEMDA	50%	750,000,000	50%	30,883,500	50%	51,955,000		10,178,900		13,061,300		15,087,100		7,013,700		45,341,000		76,224,500	0.102	DPKPP	
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase terinventarisasinya data inventaris tanah PEMDA beserta pemanfaatannya	70%	750,000,000	70%	30,883,500	70%	51,955,000		10,178,900		13,061,300		15,087,100		7,013,700		45,341,000		76,224,500	0.102		
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Tersedianya Data Inventarisasi Tanah PEMDA	1dokumen	750,000,000	1dokumen	30,883,500	1dokumen	51,955,000		10,178,900		13,061,300		15,087,100		7,013,700		45,341,000		76,224,500			
9		Program Penatagunaan Tanah	Terciptanya Penatagunaan Administrasi Pertanahan yang Handal	45%	800,000,000	45%	171,240,550	45%	248,011,360		154,690,930		26,365,900		13,004,530		30,869,647		224,931,007		396,171,557	0.495	DPKPP	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten /Kota	Sertifikat dan Pengamanan Aset Tanah PEMDA	45%	800,000,000	45%	171,240,550	45%	248,011,360		154,690,930		26,365,900		13,004,530		30,869,647		224,931,007		396,171,557	0.495		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengamanan Aset Tanah PEMDA	Persentase Tersertifikasinya Kepemilikan dan Pengamanan Aset Tanah PEMDA	50%	600,000,000	50%	147,507,300	50%	196,536,760		150,530,530		13,400,000		10,396,230		9,526,947		183,853,707		331,361,007			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Persentase Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	50%	200,000,000	50%	23,733,250	50%	51,474,600		4,160,400		12,965,900		2,608,300		21,342,700		41,077,300		64,810,550			
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																								
	Terpeliharanya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat																							
1		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		100%	34,081,803,035	60%	9,592,808,138	20%	10,233,228,800	5%	2,072,390,498	5%	2,687,104,814	5%	2,432,858,797	5%	2,451,850,197	20%	161,785,405	80%	9,754,593,543	80%	28.62%	Satpol.PP dan Damkar
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran	100%	11,858,832,189	60%	3,564,442,853	20%	4,578,239,600	5%	798,910,048	5%	1,264,977,205	5%	1,109,598,395	5%	1,046,243,797	20%	132,847,164	80%	3,697,290,017	80%	31.18%	Satpol.PP dan Damkar
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	100%	104,685,500	60%	23,145,950	20%	29,867,500	5%	6,826,000	5%	8,270,000	5%	2,349,005	5%	8,289,500	20%	6	80%	23,145,956	80%	22.11%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10 dokumen	43,294,600	6 dokumen	13,922,100	2 dokumen	8,277,500	1 dokumen	3,178,000	0 dokumen	2,645,000	0 dokumen	2,044,000	1 dokumen	270,000	dokumen	-	6 dokumen	13,922,100	60%	32.16%	Subbag. Program dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	10 dokumen	17,750,000	6 dokumen		2 dokumen	8,250,000	0 dokumen		0 dokumen	-	0 dokumen	4,979,000	2 dokumen	5,253,500	0 dokumen	-	6 dokumen	-	60%	0.00%	Subbag. Program dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	5 dokumen	26,720,900	3 dokumen	9,223,850	1 dokumen	7,500,000	0 dokumen	2,055,000	0 dokumen	1,644,000	0 dokumen	900,000	0 dokumen	2,766,000	1 dokumen	1	4 dokumen	9,223,851	80%	34.52%	Subbag. Program dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	25 dokumen	16,920,000	15 dokumen		5 dokumen	5,840,000	4 dokumen	1,593,000	1 dokumen	3,981,000	0 dokumen	(5,573,995)	0 dokumen	-	5 dokumen	5	20 dokumen	5	80%	0.00%	Subbag. Program dan Pelaporan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	100%	9,772,082,638	60%	3,269,309,458	20%	3,851,142,000	5%	684,772,722	5%	1,056,258,118	5%	879,666,538	5%	851,542,131	20%	65	80%	3,269,309,523	80%	33.46%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan tunjangan	152 orang	9,726,460,838	152 orang	3,255,038,858	50 orang	3,843,236,000	50 orang	681,529,722	orang	1,054,477,118	orang	878,446,038	orang	850,001,631	50 orang	50	202 item	3,255,038,908	133%	33.47%	Subbag. Keuangan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang di-SPJ-kan	99 kegiatan	40,667,600	69 kegiatan	12,723,100	13 kegiatan	6,256,000	8 kegiatan	1,672,000	5 kegiatan	1,781,000	1 kegiatan	1,220,500	0 kegiatan	1,540,500	14 kegiatan	14	83 kegiatan	12,723,114	84%	31.29%	Subbag. Keuangan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen keuangan akhir	5	4,954,200	3	1,547,500	1	1,650,000	1	1,571,000	0		0	-	0	-	1	1	4	1,547,501	80%	31.24%	Subbag. Keuangan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Laporan Realisasi Akhir Tahun SKPD	tahun	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		item				
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	100%	7,482,500	60%	-	20%	2,750,000	5%		5%	1,050,000	5%	1,307,000	5%	381,000	20%	1	80%	1	80%	0.00%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	5 dokumen	7,482,500	3 dokumen	-	1 dokumen	2,750,000	0 dokumen		0 dokumen	1,050,000	0 dokumen	1,307,000	1 dokumen	381,000	1 dokumen	1	4 dokumen	1	80%	0.00%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Prangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi ke-pegawaiannya	100%	694,221,000	0%	-	20%	107,300,000	5%	821,000	5%	713,000	5%	105,181,000	5%	421,000	20%	104,151,000	20%	104,151,000	20%	15.00%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP dan Damkar beserta kelengkapannya	900 stel	679,996,000	0 stel		298 stel	104,300,000	0 stel		0 stel		298 stel	104,151,000	0 stel		298 stel	104,151,000	298 stel	104,151,000	33%	15.32%	Subbag. Umum & Kepegawaian
			Jumlah pakaian seragam olahraga anggota Satpol PP dan Damkar	600 stel		0 stel		0 stel		0 stel		0 stel		0 stel		0 stel		0 stel		0 stel		0%	#DIV/0!	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang teradministrasi	153 orang	14,225,000	49 orang		50 orang	3,000,000	50 orang	821,000	orang	713,000	orang	1,030,000	orang	421,000	0 orang	-	0 orang	-	0%	0.00%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang terlayani pengadministrasian umumnya	100%	460,675,255	60%	87,926,700	20%	76,964,800	5%	20,104,000	5%	31,066,500	5%	13,994,800	5%	58,394,500	20%	51	80%	87,926,751	80%	19.09%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	44 item	9,936,590	28 item	3,139,000	3 item	3,139,800	3 item	760,000	item	1,120,000	item	753,000	item	502,000	3 item	3	31 item	3,139,003	70%	31.59%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/ perlengkapan Kantor	49 item	36,573,765	16 item	11,662,000	8 item	6,250,000	3 item	804,000	3 item	605,000	2 item	1,441,800	0 item	3,187,700	8 item	8	24 item	11,662,008	49%	31.89%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran	27 exp	19,939,600	17 exp	6,160,000	5 exp	6,312,000	5 exp		0 exp	3,120,000	0 exp	1,590,000	0 exp	1,530,000	5 exp	5	22 exp	6,160,005	81%	30.89%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	175 kali	394,225,300	105 kali	66,965,700	35 kali	61,263,000	6 kali	18,540,000	9 kali	26,221,500	8 kali	10,210,000	12 kali	53,174,800	35 kali	35	140 kali	66,965,735	80%	16.99%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	159,906,000	60%	20,554,000	20%	17,297,700	0%	-	20%	17,295,000	0%	-	0%	-	20%	17,295,000	80%	37,849,000	80%	23.67%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan	126 unit	159,906,000	54 unit	20,554,000	21 unit	17,297,700	0 unit		21 unit	17,295,000	0 unit		0 unit		21 unit	17,295,000	75 unit	37,849,000	60%	23.67%	Subbag. Umum & Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	133,199,396	60%	38,966,805	20%	42,157,600	5%	9,395,246	5%	10,544,237	5%	10,795,865	5%	12,856,666	20%	1,000	80%	38,967,805	80%	29.26%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	5000 lembar	8,063,150	3000 lembar	2,520,500	1000 lembar	2,670,000	254 lembar	491,000	364 lembar	886,500	288 lembar	588,000	94 lembar	694,000	1000 lembar	1,000	4000 lembar	2,521,500	80%	31.27%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa yang terbayarkan	15 rekening	111,681,351	9 rekening	32,227,305	3 rekening	35,252,600	3 rekening	8,026,246	rekening	8,052,737	rekening	9,498,665	rekening	11,169,866	3 rekening	3	12 rekening	32,227,308	80%	28.86%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat/bahan kebersihan	75 item	13,454,895	45 item	4,219,000	15 item	4,235,000	6 item	878,000	6 item	1,605,000	2 item	709,200	1 item	992,800	15 kali	15	60 kali	4,219,015	80%	31.36%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	526,579,900	60%	124,539,940	20%	450,760,000	5%	76,991,080	5%	139,780,350	5%	96,304,187	5%	114,359,000	20%	16	80%	124,539,956	80%	23.65%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	35 unit	421,501,400	17 unit	108,820,940	17 unit	435,340,000	16 unit	76,316,080	0 unit	127,185,350	unit	98,174,180	unit	114,359,000	16 unit	16	33 unit	108,820,956	94%	25.82%	Subbag. Umum & Kepegawaian
			Jumlah kendaraan Dinas yang dibayarkan perizinannya	65 unit		44 unit		13 unit		3 unit		5 unit		3 unit		2 unit		13 unit	57 unit	88%	Subbag. Umum & Kepegawaian			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin	58 unit	15,078,500	26 unit	4,385,000	7 unit	4,020,000	2 unit	675,000	3 unit	1,195,000	1 unit	(1,869,993)	1 unit	-	7 unit	7	33 unit	4,385,007	57%	29.08%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	4 unit	90,000,000	2 unit	11,334,000	1 unit	11,400,000	0 unit	unit	1 unit	11,400,000	unit	unit	0 unit	-	1 unit	11,400,000	3 unit	22,734,000	75%	25.26%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	12,417,646,997	60%	3,315,948,636	20%	3,225,071,800	5%	696,570,000	5%	826,768,329	5%	734,200,400	5%	829,091,500	20%	24	80%	3,315,948,660	80%	26.70%	Satpol.PP dan Damkar
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	11,645,736,047	60%	3,238,310,636	20%	3,218,082,600	5%	694,689,500	5%	823,661,829	5%	732,200,900	5%	829,091,500	20%	24	80%	3,238,310,660	80%	27.81%	Bidang Tibum & Tranmas dan Bidang Linmas
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah pemantauan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	156 kali	2,813,375,200	104 kali	556,921,500	24 kali	705,062,100	6 kali	97,141,500	6 kali	143,346,500	6 kali	138,479,500	6 kali	181,260,000	24 kali	128 kali	556,921,524	82%	19.80%	Seksi Pencegahan Gannouan	
			Jumlah pengamanan/pengawasan dan patroli siaga	20 kegiatan		12 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		4 dokumen		16 dokumen	80%					
				9		5		1		0						0			5					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah kegiatan apel siaga HUT Satpol PP	kegiatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan		dokumen		dokumen		56%					
		Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah operasi penertiban pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	325 kali	7,830,679,537	195 kali	2,641,511,736	52 kali	2,439,076,400	15 kali	595,839,000	11 kali	646,458,829	11 kali	592,051,000	15 kali	593,849,500	52 kali	2,641,511,788	247 kali	2,641,511,788	76%	33.73%	Seksi Keteriban Umum	
			Jumlah dokumen pelaporan trantribum	5 dokumen		3 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		dokumen		dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		80%			
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi	12 kali	49,200,000	4 kali	-	kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 unit	-	4 unit	-	33%	0.00%	Seksi Data dan Informasi	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah wilayah pemantauan peran serta Linmas	8 kecamatan	183,485,910	8 kecamatan	12,291,000	8 kecamatan	6,282,100	8 kecamatan	1,709,000	0 kecamatan	1,456,500	0 kecamatan	1,670,400	0 kecamatan	1,400,000	8 kecamatan	8	8 kecamatan	12,291,008	100%	6.70%	Seksi Bina Potensi Linmas	
			Jumlah anggota Linmas yang berpartisipasi dalam penanganan Pemilu	2440 orang		1220 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		1220 orang		50%							
			Jumlah dokumen pelaporan Linmas	5 dokumen		3 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		80%					
			Jumlah dokumen laporan pengamanan hasil pemilu	2 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50%							
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat	60 orang	340,365,400	0 orang	27,586,400	0 orang	17,555,600	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	19,091,000	0 orang	19,091,000	0 orang	46,677,400	0%	13.71%	Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	
			Jumlah anggota Linmas yang mengikuti diklat pengembangan kapasitas anggota Satlinmas	1335 orang		355 orang		134 orang		0 orang		0 orang		0 orang		355 orang		27%							
			Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat	716 orang		366 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		366 orang		51%							
			Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi kelinmasan	400 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0%							

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi tranitumb terpadu	23 kali	222,630,000	13 kali	-	25 kali	48,106,400	0 kali		13 kali	32,400,000	- kali		12 kali	33,491,000	25 kali	25	38 kali	25	165%	0.00%	Seksi Kerjasama
		Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	162 unit	143,500,000	100 unit	-	- unit		0 unit		0 unit	-	0 unit	-	0 unit		0 unit	-	100 unit	-	62%	0.00%	Seksi Pencegahan Gannguan Tranitumb
		Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang disusun	10 dokumen	30,750,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen		0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen		0 dokumen	-	0 dokumen	-	0%	0.00%	Seksi Pencegahan Gannnauan
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	30 kasus	31,750,000	0 kasus	-	5 kasus	2,000,000	0 kasus		0 kasus	-	0 kasus	-	0 kasus		0 kasus	-	0 kasus	-	0%	0.00%	Seksi Ketertiban Umum
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase perda yang ditegakkan	100%	577,685,450	60%	77,638,000	20%	6,989,200	5%	1,880,500	5%	3,106,500	5%	2,000,000	5%	-	20%	24	80%	77,638,024	80%	13.44%	Bidang Penegakan Perda dan Perbup
		Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi/penyuluhan penegakan perda dan Perbup	70 kali	122,734,400	20 kali	20,311,000	- kali		0 kali		0 kali	-	- kali		0 kali		0 kali	-	20 kali	20,311,000	29%	16.55%	Seksi Penyuluhan
		Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Perbup	156 kali	235,990,950	52 kali	50,216,750	24 kali	6,989,200	6 kali	1,880,500	6 kali	3,106,500	6 kali	2,000,000	6 kali	-	24 kali	24	76 kali	50,216,774	49%	21.28%	Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
		Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegakan Perda/Perbup	260 kali	218,960,100	156 kali	7,110,250	- kali		39 kali		39 kali		39 kali		39 kali		156 kali	-	312 kali	7,110,250	120%	3.25%	Seksi Pananakan rlan
Persentase kasus pelanggaran Perda yang dilimpahkan ke Pengadilan	10 %		0 %	%				0 %	%		0 %	%		0 %		0 %	0 dokumen	0%						
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah PPNSD	12%	194,225,500	4%	-	-	0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	4%	-	33%	0.00%	Bidang Penegakan Perda dan Perbup	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPNSD	6 orang	194,225,500	2 orang	-	orang		0 orang		0 orang	-	0 orang	-	0 orang		0 orang	-	2 orang	-	33%	0.00%	Seksi Peneqakan dan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatnya pengelolaan pelayanan penanganan bencana kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase bencana kebakaran, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	9,805,323,849	60%	2,712,416,649	20%	2,429,917,400	5%	576,909,950	5%	595,359,280	5%	589,060,002	5%	576,514,900	20%	9,847,108	80%	2,722,263,757	80%	27.76%	Satpol.PP dan Damkar
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	9,338,770,999	60%	2,702,439,149	20%	2,416,317,400	5%	568,854,250	5%	593,771,180	5%	588,160,002	5%	573,529,000	20%	3,747,058	80%	2,706,186,207	80%	28.98%	Bidang Pemadam Kebakaran
		Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pecegahan kesiapsiagaan	150 orang	152,500,000	50 orang	-	50 orang	3,800,000	0 orang	-	50 orang	3,747,000	orang	-	0 orang	-	50 orang	3,747,000	100 orang	3,747,000	67%	2.46%	Seksi Pencegahan Kabakaran
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian bahaya kebakaran	100 %	8,448,387,999	60 %	2,685,806,149	20 %	2,327,167,400	5 %	566,334,250	5 %	583,104,180	5 %	555,100,000	5 %	553,815,000	20 %	20	80 %	2,685,806,169	80%	31.79%	Seksi Operasional Damkar dan Pansulamatan
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran dan non kebakaran	100 %	102,500,000	60 %	-	20 %	9,850,000	5 %	-	5 %	-	%	-	10 %	19,262,500	20 %	20	80 %	20	80%	0.00%	Seksi Operasional Damkar dan
		Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	100 %	102,500,000	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0%	0.00%	Seksi Operasional Damkar dan Pansulamatan
				Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana yang terstandarisasi	20 unit	92,250,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0%
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pemadam serta alat pelindung diri			74 unit	179,133,000	47 unit	16,633,000	16 unit	65,500,000	0 unit	-	unit	-	12 unit	42,500,000	4 unit	451,500	16 unit	16	63 unit	16,633,016	85%	9.29%	Seksi Sarana & Prasarana
Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah anggota Satgas Damkar yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			10 orang	155,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0%	0.00%	Seksi Pencegahan Kebakaran
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Alat/ Sistim Komunikasi dan informasi			46 unit	86,000,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0%	0.00%	Seksi Sarana & Prasarana

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Perbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah MoU kerjasama antar daerah	4 dokumen	20,500,000	0 dokumen	-	2 dokumen	10,000,000	0 dokumen	2,520,000	0 dokumen	6,920,000	0 dokumen	(9,439,999)	2 dokumen	-	2 dokumen	2	2 dokumen	2	50%	0.00%	Seksi Pencegahan Kebakaran
		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase inspeksi peralatan proteksi kebakaran	100%	15,250,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0.00%	Bidang Pemadam Kebakaran	
		Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran yang didata	50 unit	10,250,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0%	0.00%	Seksi Sarana & Prasarana
		Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran yang layak	25 unit	5,000,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0%	0.00%	Seksi Sarana & Prasarana
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	51,250,000	0%	-	0%	7,500,000	13%	1,955,700	13%	1,588,100	12%	900,000	12%	2,985,900	50%	50	50%	50	50%	0.00%	Bidang Pemadam Kebakaran
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase kasus/kejadian kebakaran yang diinvestigasi	100 %	51,250,000	0 %	-	50 %	7,500,000	13 %	1,955,700	12 %	1,588,100	12 %	900,000	13 %	2,985,900	50 %	50	50 %	50	50%	0.00%	Seksi Operasional Damkar dan Penyelamatan
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana	30000	351,877,850	0	9,977,500	10000	6,100,000	50%	6,100,000	-	0	-	-	-	50%	6,100,000	0.5	16,077,500	0%	4.57%	Bidang Pemadam Kebakaran	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	600 orang	107,227,850	200 orang	9,977,500	30 orang	6,100,000	30 orang	6,100,000	orang	0 orang	-	0 orang	-	30 orang	6,100,000	230 orang	16,077,500	38%	14.99%	Seksi Pencegahan Kebakaran	
		Sub Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Rukmin	Jumlah Rukmin yang dibentuk	268	107,300,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0.00%	Seksi Pencegahan Kebakaran

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I	II		III		IV				K			K				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan yang di bina	orang	107,300,000	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	0%	0.00%	
		Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan parasarana pemadam kebakaran untuk relawan yang di berdayakan	134 unit	137,350,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0%	0.00%	Seksi Pencegahan Kebakaran
		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	48,175,000	40%	-	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	40%	-	40%	0.00%	Bidang Pemadam Kebakaran	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan	24 kali	12,300,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0%	0.00%	Seksi Operasional Damkar dan Penyelamatan
		Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan ter- Standarisasi	20 unit	10,250,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0%	0.00%	Seksi Sarana & Prasarana
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	20 kali	10,250,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0%	0.00%	Seksi Sarana & Prasarana
		Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Aparatur/ relawan Pencarian dan Pertolongan	30 orang	15,375,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0%	0.00%	Seksi Pencegahan Kebakaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
DINAS SOSIAL																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV									
									8		9		10		11									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN WAJIB																						
		URUSAN WAJIB																						
		PELAYANAN DASAR																						
		SOSIAL																						
		DINAS SOSIAL																						
	Meningkatnya Kualitas Hidup Fakir Miskin dan PMKS Lainnya			100	1,961,710,834	60	426,096,500.00	20	208,372,880	6	31,555,130	6	57,908,250	6	46,572,000	6	72,327,500	25.00	208,362,880	85.00	634,459,380	85.00	32.34	
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tercapainya prosentase perlindungan dan jaminan sosial	100	1,482,105,001	60	412,329,000.00	20	208,372,880	6	31,555,130	6	57,908,250	6	46,572,000	6	72,327,500	25.00	208,362,880	85.00	620,691,880	85.00	41.88	
1.06.05.2.02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	1,482,105,001	60	412,329,000.00	20	208,372,880	6	31,555,130	6	57,908,250	6	46,572,000	6	72,327,500	25.00	208,362,880	85.00	620,691,880	85.00	41.88	
1.06.05.2.02.01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	16	930,785,713	12	243,904,100.00	4	23,489,880.00	1	3,073,130	1	2,907,250	1	5,112,000	1	12,387,500	4.00	23,479,880	16.00	267,383,980	100.00	28.73	
1.06.05.2.02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	60	226,133,200	36	168,424,900.00	12	184,883,000.00	3	28,482,000	3	55,001,000	3	41,460,000	3	59,940,000	12.00	184,883,000	48.00	353,307,900	80.00	156.24	
1.06.05.2.02.03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan	8	376,436,088	0	-	0	-									0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
1.06.05.2.02.04		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan	8	205,000,000	0	-	0	-									0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Tercapainya prosentase pemberdayaan sosial	100	479,605,833	40	13,767,500.00	0	-									0.00	-	40.00	13,767,500	40.00	2.87	
1.06.03.2.01		Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Tercapainya persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100	102,500,000	0	-	0	-									0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
1.06.03.2.01.01		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Laporan	1	51,250,000	0	-	0	-									0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
1.06.03.2.01.02		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Laporan	1	51,250,000	0	-	0	-									0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
1.06.02.2.02		Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	9,458,131	60	2,299,700.00	0	-									0.00	-	60.00	2,299,700	60.00	24.31	
1.06.02.2.02.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Laporan	60	9,458,131	36	2,299,700.00											0.00	-	36.00	2,299,700	60.00	24.31	
1.06.02.2.03		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100	367,647,703	40.16	11,467,800.00	0	-									0.00	-	40.16	11,467,800	40.16	3.12	
1.06.02.2.03.01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	10	73,529,541	5.8	11,467,800.00											0.00	-	5.80	11,467,800	58.00	15.60	
1.06.02.2.03.02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	10	73,529,541	5	-											0.00	-	5.00	-	50.00	0.00	
1.06.02.2.03.03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	10	73,529,541	5	-											0.00	-	5.00	-	50.00	0.00	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.02.2.03.04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	10	73,529,541	5	-									0.00	-	5.00	-	50.00	0.00			
1.06.02.2.03.05		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Laporan	10	73,529,541	5	-									0.00	-	5.00	-	50.00	0.00			
				100	6,302,034,682	34.67	1,268,565,200.00	40	1,801,454,000	10	437,173,500	10	235,396,000	10	339,967,500	10	385,622,000	40.00	1,398,159,000	74.67	2,666,724,200	74.67	42.32	
1.06.02.2.03.06		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tercapainya prosentase pelayanan rehabilitasi sosial	100	4,864,487,193	60	724,138,750.00	80	1,410,569,000	20	360,773,500	20	235,396,000	20	339,967,500	20	385,622,000	80.00	1,321,759,000	140.00	2,045,897,750	140.00	42.06	
1.06.02.2.03.07		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tercapainya prosentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	4,864,487,193	60	724,138,750.00	80	1,410,569,000	20	360,773,500	20	235,396,000	20	339,967,500	20	385,622,000	80.00	1,321,759,000	140.00	2,045,897,750	140.00	42.06	
1.06.04.2.01.01		Penyediaan Permakanan	Jumlah Laporan	60	2,360,496,164	36	124,556,600.00	12	711,208,000.00	3	121,663,000	3	114,370,000	3	115,530,000	3	162,102,000	12.00	513,665,000	48.00	638,221,600	80.00	27.04	
1.06.04.2.01.04		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Laporan	60	300,709,409	36	27,025,050.00									0.00	-	36.00		27,025,050	60.00	8.99		
1.06.04.2.01.06		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Laporan	60	148,286,034	36	18,793,900.00									0.00	-	36.00		18,793,900	60.00	12.67		
1.06.04.2.01.07		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Laporan	60	26,126,659	36	1,149,600.00									0.00	-	36.00		1,149,600	60.00	4.40		
1.06.04.2.01.08		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Laporan	60	26,126,659	36	5,512,350.00									0.00	-	36.00		5,512,350	60.00	21.10		
1.06.04.2.01.09		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Laporan	60	1,740,716,556	36	513,020,200.00	12	669,699,500.00	3	234,755,500	3	115,200,000	3	219,762,500	3	213,755,000	12.00	783,473,000	48.00	1,296,493,200	80.00	74.48	
1.06.04.2.01.10		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Laporan	60	91,553,644	36	9,587,100.00	12	22,411,500.00	3	2,530,000	3	4,026,000	3	2,850,000	3	7,965,000	12.00	17,371,000	48.00	26,958,100	80.00	29.45	
1.06.04.2.01.11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Laporan	60	149,389,409	36	22,317,600.00	12	7,250,000.00	3	1,825,000	3	1,800,000	3	1,825,000	3	1,800,000	12.00	7,250,000	48.00	29,567,600	80.00	19.79	
1.06.04.2.01.12		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Laporan	60	21,082,659	36	2,176,350.00									0.00	-	36.00		2,176,350	60.00	10.32		
1.06.03.		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		100	20,500,000	0	-	0	-							0.00	-	0.00		-	0.00	0.00		
1.06.03.2.01		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	100	20,500,000	0	-	0	-							0.00	-	0.00		-	0.00	0.00		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.03.2.01.0		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	Tercapainya prosentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	2	20,500,000	0	-									0.00	-	0.00	-	0.00	0.00			
1.06.06		PROGRAM PENANGNANAN BENCANA	Tercapainya Prosentase penanganan korban bencana	100	1,417,047,489	60	544,426,450.00	40	390,885,000	10	76,400,000	10	134,913,000	10	85,652,000	10	93,900,000	40.00	390,865,000	100.00	935,291,450	100.00	66.00	
1.06.06.2.01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	100	235,728,818	60	87,417,200.00					-				0.00	-	60.00	87,417,200	60.00	37.08			
1.06.06.2.01.0		Penyediaan Permakanan	Jumlah Laporan	60	132,405,000	36	-									0.00	-	36.00	-	60.00	0.00			
1.06.06.2.01.0		Penyediaan Sandang	Jumlah Laporan	60	101,156,159	36	86,729,600.00									0.00	-	36.00	86,729,600	60.00	85.74			
1.06.06.2.01.0		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Laporan	60	2,167,659	36	687,600.00									0.00	-	36.00	687,600	60.00	31.72			
1.06.06.2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase Masyarakat siapsiaga terhadap Bencana di Kabupaten	100	1,181,318,671	60	457,009,250.00	80	390,885,000	20	76,400,000	20	134,913,000	20	85,652,000	20	93,900,000	80.00	390,865,000	140.00	847,874,250	140.00	71.77	
1.06.06.2.02.0		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Laporan	60	72,010,036	36	20,812,600.00									0.00	-	36.00	20,812,600	60.00	28.90			
1.06.06.2.02.0		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Laporan	60	1,109,308,636	36	436,196,650.00	12	390,885,000.00	3	76,400,000	3	134,913,000	3	85,652,000	3	93,900,000	12.00	390,865,000	48.00	827,061,650	80.00	74.56	
1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Kondisi TMP Baik	100	326,177,668	60	70,719,478.00	80	215,336,300	19	6,000,000	19	12,000,000	19	70,693,000	19	120,297,300	76.80	208,990,300	136.80	279,709,778	136.80	85.75	
1.06.07.2.01		KegiatanPemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase TMP Kabupaten dalam keadaan Baik	100	326,177,668	60	70,719,478.00	80	215,336,300	19	6,000,000	19	12,000,000	19	70,693,000	19	120,297,300	76.80	208,990,300	136.80	279,709,778	136.80	85.75	
1.06.07.2.01.0		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	5	154,277,360	3	12,191,600.00	1	123,562,700.00	0					61,693,000	55,523,700	0.00	117,216,700	3.00	129,408,300	60.00	83.88		
1.06.07.2.01.0		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	60	131,117,046	36	45,922,498.00	12	79,773,600.00	3	4,000,000	3	8,000,000	3	6,000,000	3	61,773,600	12.00	79,773,600	48.00	125,696,098	80.00	95.87	
1.06.07.2.01.0		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	60	40,783,262	36	12,605,380.00	12	12,000,000.00	3	2,000,000	3	4,000,000	3	3,000,000	3	3,000,000	12.00	12,000,000	48.00	24,605,380	80.00	60.33	
1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan PD	100	10,734,289,454	60	2,827,832,440.00	80	2,862,949,884	36	490,902,376	12	746,576,610	20	663,374,883	12	725,030,030	80.00	2,625,883,899	140.00	5,453,716,339	140.00	50.81	
1.06.01.2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	235,802,114	60	43,576,500.00	80	36,096,750	36	10,100,000	12	10,872,500	20	9,124,250	12	6,000,000	80.00	36,096,750	140.00	79,673,250	140.00	33.79	
1.06.01.2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokuemn	15	63,429,719	9	11,400,800.00	3	8,720,250.00	2	2,500,000		2,403,500	1	2,316,750	0	1,500,000	3.00	8,720,250	12.00	20,121,050	80.00	31.72	
1.06.01.2.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	10	63,473,066	6	12,901,800.00	2	9,633,000.00	1	2,800,000		2,736,500	1	2,596,500	0	1,500,000	2.00	9,633,000	8.00	22,534,800	80.00	35.50	
1.06.01.2.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	60	72,903,454	36	13,855,700.00	12	14,325,500.00	3	3,600,000	3	4,000,000	3	3,725,500	3	3,000,000	12.00	14,325,500	48.00	28,181,200	80.00	38.66	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
1.06.01.2.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	15	35,995,876	9	5,418,200,00	3	3,418,000,00	3	1,200,000		1,732,500		485,500		-	3.00	3,418,000	12.00	8,836,200	80.00	24.55	
1.06.01.2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	100	7,736,170,059	60	2,256,751,354,00	80	2,401,257,500	30	404,388,731	17	624,650,934	17	593,529,250	17	563,802,599	80.00	2,186,371,514	140.00	4,443,122,868	140.00	57.43	
1.06.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan	60	7,526,647,343	36	2,214,494,654,00	12	2,370,930,000,00	3	394,151,481	3	617,816,684	3	586,173,250	3	557,902,599	12.00	2,156,044,014	48.00	4,370,538,668	80.00	58.07	
1.06.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan	60	183,454,063	36	33,987,500,00	12	27,454,500,00	3	7,364,250	3	6,834,250	3	7,356,000	3	5,900,000	12.00	27,454,500	48.00	61,442,000	80.00	33.49	
1.06.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	25	26,068,653	15	8,269,200,00	5	2,873,000,00	5	2,873,000						-	5.00	2,873,000	20.00	11,142,200	80.00	42.74	
1.06.01.2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	48,586,330	60	16,606,850,00	80	9,900,000	20	1,500,000	20	3,300,000	20	2,550,000	20	2,550,000	80.00	9,900,000	140.00	26,506,850	140.00	54.56	
1.06.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	60	48,586,330	36	16,606,850,00	12	9,900,000,00	3	1,500,000	3	3,300,000	3	2,550,000	3	2,550,000	12.00	9,900,000	48.00	26,506,850	80.00	54.56	
1.06.01.2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,083,478,627	60	149,543,700,00	80	90,285,000	20	30,030,000	20	34,955,000	20	5,000,000	20	17,800,000	80.00	87,785,000	140.00	237,328,700	140.00	21.90	
1.06.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan	60	11,155,752	36	2,263,700,00	12	3,505,000,00	3	1,910,000	3		3	1,595,000	3	-	12.00	3,505,000	48.00	5,768,700	80.00	51.71	
1.06.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan	60	42,369,600	36	6,240,000,00	12	6,000,000,00	3		3	2,000,000	3		3	2,000,000	12.00	4,000,000	48.00	10,240,000	80.00	24.17	
1.06.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	60	1,029,953,275	36	141,040,000,00	12	80,780,000,00	3	28,120,000	3	32,955,000	3	3,405,000	3	15,800,000	12.00	80,280,000	48.00	221,320,000	80.00	21.49	
1.06.01.2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	217,837,750	60	31,971,000,00	0	-									0.00	-	60.00	31,971,000	60.00	14.68	
1.06.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan	10	217,837,750	3	31,971,000,00											0.00	-	3.00	31,971,000	30.00	14.68	
1.06.01.2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	388,881,682	60	95,668,836,00	80	163,696,634	20	17,021,692	20	25,958,165	20	17,422,558	20	95,396,322	80.00	155,798,737	140.00	251,467,573	140.00	64.66	
1.06.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	60	32,385,948	36	9,258,850,00	12	10,272,960,00	3	2,507,030	3	3,786,730	3	2,179,200	3	1,800,000	12.00	10,272,960	48.00	19,531,810	80.00	60.31	
1.06.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan	60	183,520,896	36	57,925,436,00	12	52,213,344,00	3	7,770,682	3	15,365,085	3	9,993,358	3	11,351,322	12.00	44,480,447	48.00	102,405,883	80.00	55.80	
1.06.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan	60	172,974,838	36	28,484,550,00	12	101,210,330,00	3	6,743,980	3	6,806,350	3	5,250,000	3	82,245,000	12.00	101,045,330	48.00	129,529,880	80.00	74.88	
1.06.01.2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	968,338,293	60	219,206,000,00	80	147,874,000	20	24,691,953	20	42,722,011	20	32,196,825	20	36,481,109	80.00	136,091,898	140.00	355,297,898	140.00	36.69	
1.06.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan	60	874,709,043	36	189,506,000,00	12	147,874,000,00	3	24,691,953	3	42,722,011	3	32,196,825	3	36,481,109	12.00	136,091,898	48.00	325,597,898	80.00	37.22	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%			15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan	60	93,629,250	36	29,700,000.00									0.00	-	36.00	29,700,000	60.00	31.72				
1.06.01.2.13		Kegiatan Penataan Organisasi	Tertatanya Organisasi PD	100	55,194,601	60	14,508,200.00	80	13,840,000	20	3,170,000	20	4,118,000	20	3,552,000	20	3,000,000	80.00	13,840,000	140.00	28,348,200	140.00	51.36		
1.06.01.2.13.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	60	55,194,601	36	14,508,200.00	12	13,840,000.00	3	3,170,000	3	4,118,000	3	3,552,000	3	3,000,000	12.00	13,840,000	48.00	28,348,200	80.00	51.36		
Rata-rata capaian kinerja						46.14	4,593,213,618.00	49.33	5,088,113,064	14.17	959,631,006	11.65	1,292,441,860	12.19	75,704,425.53	11.65	85,125,302.00	49.67	4,755,861,079	104.34	9,349,074,697	104.34	37.02		
Predikat																		ST		ST		ST			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				1 Jumlah Anggaran yang cukup 2 Regulasi yang jelas (SPM) PP no 2 dan Permensos No. 9 3 SDM sesuai dengan tupoksi +/- 50 %																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja				1 Regulasi berubah-ubah sementara dokumen perlu waktu untuk penyesuaian 2 SDM tidak sesuai dengan tupoksi +/- 50% 3																					
Tindak lanjut yang di perlukan dalam triwulan berikutnya				1 Penyesuaian Anggaran Atas perubahan regulasi keuangan 2 Pelaksanaan Kegiatan Prioritas pengungkit Kinerja OPD 3																					
Tindak lanjut yang di perlukan dalam RKPD berikutnya				1 Perlu Analisis Bobot Kinerja Fisik untuk setiap kegiatan pada OPD Sebagai Instrumen/ indikator dalam mengukur capaian 2 Perlu Indikatorif anggaran yang realistis dan memiliki kepastian 3 Pemberian Indikatorif KUA seharusnya mengacu pada skala prioritas berdasarkan beban Program Prioritas masing-masing OPD (ASB seharusnya menjadi alat ukur utama dalam menentukan besaran Biaya Output dalam penentuan besaran KUA Urusan, bukan belanja. sedangkan tolak ukur belanja adalah SSH, HPSK, dan SBU)																					
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN																									
1.	Terlaksananya operasional perkantoran OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																						
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD			-																		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	50	150,000,000	20	-	10	30,000,000	3	1,200,000	1	2,662,900	2	1,955,600	4	3,600,000	10	9,418,500	30	9,418,500	60.00	6.28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	35	150,000,000	21	158,749,250	7	98,796,100	2	9,466,700	2	17,002,000	1	14,386,100	2	25,816,000	7	66,670,800	28	225,420,050	80.00	150.28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang Diselesaikan tepat waktu																						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN Yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan	60	2,500,000,000	36	3,393,984,125	12	1,651,879,350	3	355,635,217	3	547,092,106	3	518,136,332	3	527,864,595	12	1,948,728,250	48	5,342,712,375	80	213.71	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen keuangan Yang DiVerifikasi	15	25,000,000	12	32,882,900	3	14,400,000	1	2,400,000	0	4,800,000	1	3,814,600	1	3,936,400	3	14,951,000	15	47,833,900	100.00	191.34	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun	5	5,000,000	3	3,559,500	1	2,620,910	1	1,800,000		-		955,800	-	225,300	1	2,981,100	4	6,540,600	80.00	130.81	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah																						
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan yang rekonsiliasi barang Milik Daerah Pada SKPD	48	195,000,000	-	-	4	7,459,900	1	2,801,700	1	5,449,600	1	5,479,000	1	12,286,750	4	26,017,050	4	26,017,050	8.33	13.34	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor																						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	100	7,000,000	60	6,094,450	20	4,095,150	-	-	16	720,000	18	1,154,000	16	426,000	50	2,300,000	110	8,394,450	110.00	119.92	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	30,000	50,000,000	-	-	20,000	9,200,000	800	277,800	2,300	495,000	11900	2,784,500	5,000	1,642,700	20,000	5,200,000	20,000	5,200,000	66.67	10.40	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	60	10,000,000	36	8,850,000	12	8,000,000	3	800,000	3	900,000	3	2,600,000	3	1,700,000	12	6,000,000	48	14,850,000	80.00	148.50	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi yang diikuti oleh ASN	60	500,000,000	36	419,792,100	12	250,000,000	3	33,740,000	3	65,290,000	3	9,195,000	3	34,570,000	12	142,795,000	48	562,587,100	80.00	112.52	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-																				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	25	90,000,000	41	39,180,500	-	-	-	-							-	-	41	39,180,500	164.00	43.53	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Beroda Dua	1	40,000,000	1	82,075,480	1	33,892,000	-	-	-	1	33,770,000			1	33,770,000	2	115,845,480	200.00	289.61	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah perlatan dan mesin lainnya	18	210,000,000	8	82,075,480	6	52,454,000	-	-	1	1,898,000	-	3	17,756,000	4	19,654,000	12	101,729,480	66.67	48.44	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
		Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	17	90,000,000	4	65,228,500	4	15,016,000	-	-						-	-	4	65,228,500	23.53	72.48	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah				-	-	-	-	-															
		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik,air dan komunikasi yang dibayarkan	60	47,000,000	36	40,554,487	12	24,006,480	3	4,685,600	3	3,883,500	3	4,440,000	3	13,010,162	12	26,019,262	48	66,573,749	80.00	141.65	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	10,000,000	12	17,707,950	75	6,046,500	2	2,000,000	-	850,000	1	1,220,000	1	1,904,000	4	5,974,000	16	23,681,950	160.00	236.82	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	25,000,000	36	54,989,825	12	22,053,945	3	1,720,900	3	3,000,000		2,813,500	3	2,457,760	9	9,992,160	45	64,981,985	75.00	259.93	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik																							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara dan pajaknya terbayarkan	6	140,000,000	2	187,809,825	2	87,401,800	2	23,851,500	-	23,691,000	-	20,669,000	-	15,629,000	2	83,840,500	4	271,650,325	66.67	194.04	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1	300,000,000	2	153,037,250	1	215,052,472	1	7,004,525	-	3,000,000	-	2,250,000	-	2,250,000	1	14,504,525	3	167,541,775	300	55.85	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
		Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja																							
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mengikuti Pelatihan																							
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah peserta Pelatihan yang Lulus	150	1,500,000,000	90	326,715,300	100	7,436,300	-	-	-	3,660,000	36	35,675,700	480	88,075,040	516	127,410,740	606	454,126,040	404.00	30.28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan																							
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar kerja																							
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Keberadaan Bursa Kerja Terhadap Pencari kerja	750	190,000,000	361	171,777,700	150	61,070,100	3,275	1,800,000	242	21,004,500	309	15,858,000	4,076	48,256,000	7,902	86,918,500	8,263	258,696,200	1101.73	136.16	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pasar kerja																							
		Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI yang difasilitasi keepulangannya	750	600,000,000	-	-	150	61,070,100	2	11,426,200	13	2,400,000	15	18,900,000	34	4,200,000	64	36,926,200	64	36,926,200	8.53	6.15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Antara Pengusaha dan pekerja			-	-	-	-	-	-													
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perjanjian yang disepakati bersama antara pengusaha dan pekerja			-	-	-	-	-	-													
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Penunahan	jumlah tenaga kerja yang terdata dan menjadi peserta bpjs	3,000	300,000,000	1,031	149,260,450	1,000	55,694,700	1,979	-	270	35,962,400	-	8,628,000	2,249	3,978,000	2,249	48,568,400	3,280	197,828,850	109.33	65.94	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase perselisihan antara pekerja dan pengusaha																					
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditangani	80	185,000,000	57	120,575,150	10	104,686,850	24	12,425,200	0	9,240,000	-	10,720,000	100	5,700,000	124	38,085,200	181	158,660,350	226.25	85.76	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri			-	-	-	-	-	-													
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan industri			-	-	-	-	-	-													
		Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan , Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM Unggul yang berperan serta pada kegiatan pameran	60	800,000,000	48	4,632,535,106	48	IKM	48	23,230,900	48	33,595,800	48	91,396,100	48 IKM	26,752,000	144.00	174,974,800	192	4,807,509,906	320.00	600.94	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Tersedianya biaya operasional sentra IKM	60	10,000,000	-	-	12	3,715,573,740	3.00	16,035,000	3	61,118,024	3	60,850,518	3	44,190,212	12.00	182,193,754	12	182,193,754	20.00	1,821.94	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Industri yang melibatkan peran serta masyarakat	80	5,500,000,000	72	3,383,850,300	10	3,715,573,740	-	-	10	264,550,100	-	1,200,000	80	201,784,000	90.00	467,534,100	162	3,851,384,400	202.50	70.03	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Industri yang terdpat di akun SIINAS														0%		-	-				
		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI , IUKI dan PK Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha yang terbit					-	-	-	-							0%		-	-			
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah IKM yang terdata dan terfasilitasi	2,250	200,000,000	800	145,245,000	1,730	104,711,250	-	-							-	-	800	145,245,000	35.56	72.62	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota																0%		-	-			
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						-	-	-	-							0%		-	-			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capalan Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Facilitasi pemenuhan komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	48	275,000,000	-	-	1,730	104,711,250	15	-	-	19,266,500	-	7,200,000	50	8,600,000	65	35,066,500	65	35,066,500	135.42	12.75	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
				Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja								Ketersediaan Anggaran														
				Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja								Keterbatasan anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan														
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																										
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					24,808,978,533		6,152,867,494		7,694,042,766		1,763,634,507		1,570,787,181		1,495,274,171		2,343,297,024		7,172,992,883		13,439,730,277					
I. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					5,930,238,000		1,190,167,460		1,972,492,600		324,231,300		157,605,000		374,550,700		940,334,500		1,796,721,500		2,986,888,960					
1.	Meningkatnya kualitas hidup anak & perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Capaian APE (Pratama, Madya, Nindya, Utama)	34,531	2,730,000,000	925	631,770,460	11,497	1,160,090,000	234	293,336,000	234	63,604,300	234	297,611,200		504,824,800	234	1,159,376,300	1159	1,791,146,760	3	66	DPMDPPPA		
		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang melakukan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	103	480,000,000	25	65,157,500	36	225,700,000	34	210,700,000	0	-	0	-	2	14,526,000	36	225,226,000	61	290,383,500	59	60	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang menerapkan PPRG	36	280,000,000	10	53,215,000	10 PD	205,700,000	8	190,700,000	8	-	0	-	2	14,526,000	8	205,226,000	18	258,441,000	50	92	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Advokas Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan Fasilitas penguatan PPRG dan PUG	67	200,000,000	15	11,942,500	26 Desa/Kel	20,000,000	26	20,000,000	0	-	0	-	-	-	26	20,000,000	41	31,942,500	61	16	DPMDPPPA		
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan yang berpartisipasi dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	34,428	2,250,000,000	900	566,612,960	11461 Orang	934,390,000	2000	82,636,000	2000	63,604,300	6000	297,611,200	1461	490,298,800	11461	934,150,300	12361	1,500,763,260	36	67	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Advokas Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	34,428	2,250,000,000	900	566,612,960	11461 Orang	934,390,000	2000	82,636,000	2000	63,604,300	6000	297,611,200	1461	490,298,800	11461	934,150,300	12361	1,500,763,260	36	67	DPMDPPPA		
		Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	184	2,220,000,000	0	558,397,000	21	490,504,000	0	-	2	6,000,000	6	32,333,000	13	312,844,700	21	351,177,700	21	909,574,700	11	41	DPMDPPPA		
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah pengaduan yang dilayani	234	2,220,000,000	58	558,397,000	61	490,504,000	0	-	8	6,000,000	21	32,333,000	32	312,844,700	61	351,177,700	119	909,574,700	51	41	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Advokas Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit layanan terpadu	184	1,085,000,000	48	273,639,000	45 Kasus	275,504,000	0	-	0	-	20	26,833,000	25	109,345,000	45	136,178,000	93	409,817,000	51	38	DPMDPPPA		
Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan layanan perlindungan perempuan	50	1,135,000,000	10	284,758,000	16 Lembaga	215,000,000	0	-	3	6,000,000	3	5,500,000	10	203,499,700	16	214,999,700	26	499,757,700	52	44	DPMDPPPA				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Proram Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan PD yang mengelola Sistem data gender dan anak	103	450,000,000	0		103 PD, Desa/ke	40,602,600	0	-	0	-	80	38,236,500		1,800,000	80	40,036,500	80	40,036,500	78	9	DPMDPPPA
		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah PD yang melakukan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender & anak	103	450,000,000	0	-	103 PD, Desa/ke	40,602,600	0	-	0	-	80	38,236,500		1,800,000	80	40,036,500	80	40,036,500	78	9	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang melakukan penyajian dan pemanfaatan sistem data gender & anak	103	450,000,000	0	-	103 PD, Desa/ke	40,602,600	0	-	0	-	80	38,236,500		1,800,000	80	40,036,500	80	40,036,500	78	9	DPMDPPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan lembaga yang menyediakan layanan pemenuhan hak anak	67	530,238,000	0	-	21 Lembaga Pemerintah, non Pemerintah ah, dan dunia usaha	281,296,000	6	30,895,300	11	88,000,700	1	6,370,000		120,865,000	6	246,131,000	6	246,131,000	9	46	DPMDPPPA
		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang melakukan PHA	46	140,119,000	0	-	8 Lembaga Pemerintah, non Pemerintah ah, dan dunia usaha	50,000,000	6	30,895,300	6	4,350,700	1	6,370,000		1,919,000	8	43,535,000	8	43,535,000	17	31	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang melakukan pelembagaan pemenuhan hak anak	46	140,119,000	0	-	8 Lembaga	50,000,000	6	30,895,300	1	4,350,700	1	6,370,000		1,919,000	8	43,535,000	8	43,535,000	17	31	DPMDPPPA
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/PD yang mendapatkan fasilitasi penguatan dan pengembangan	48	390,119,000	0	-	6 Lembaga/ PD	231,296,000	0	-	5	83,650,000	0	-		118,946,000	5	202,596,000	5	202,596,000	10	52	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	2	120,119,000	0	-	1 PKA	118,946,000	0	-	0	-	0	-	1	118,946,000	0	118,946,000	0	118,946,000	0	99	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Konvensi hak anak (Jumlah PD yang mengarusutamakan kebutuhan anak dalam perencanaannya)	36	270,000,000	0	-	5 PD	112,350,000	0	-	5	83,650,000	0	-		-	5	83,650,000	5	83,650,000	14	31	DPMDPPPA
II.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				18,878,740,533		4,962,700,034		5,721,550,166		1,439,403,207		1,413,182,181		1,120,723,471		1,402,962,524		5,376,271,383		10,452,841,317			
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMDPPPA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			10,644,456,000		2,696,872,460		3,008,251,540		538,367,031		794,302,335		646,729,467		710,024,046		2,689,422,879		5,386,295,339			DPMDPPPA
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	10	255,000,000	4	61,696,500	4 Dokumen	49,406,300	3	13,161,000	3	10,867,000	3	16,310,000	3	9,015,000	3	49,353,000	7	111,049,500	70	44	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu	4	80,000,000	2	20,772,000	2 Dokumen	24,010,100	1	5,663,000	1	5,339,000	1	6,572,000	1	6,403,000	1	23,977,000	3	44,749,000	75	56	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang diselesaikan tepat waktu	3	75,000,000	1	10,502,000	1 Dokumen	11,767,500	1	3,717,000	1	2,028,000	1	5,388,000	1	625,000	1	11,758,000	2	22,260,000	67	30	DPMDPPPA

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (LKj) yang diselesaikan tepat waktu	3	100,000,000	1	30,422,500	1	Dokumen	13,628,700	1	3,781,000	1	3,500,000	1	4,350,000	1	1,987,000	1	13,618,000	2	44,040,500	67	44	DPMDPPPA		
		Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan dokumen administrasi keuangan	36	8,734,956,000	0	2,401,200,167	12	Dokumen	2,687,401,700	6	453,246,403	6	724,155,078	6	590,487,096	6	615,072,978	6	2,382,961,555	6	4,784,161,722	17	55	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang diselesaikan tepat waktu	36	8,473,956,000	12	2,354,343,917	12	Dokumen	2,638,401,700	3	442,564,403	3	711,235,078	3	576,216,096	3	604,028,978	3	2,334,044,555	15	4,688,388,472	42	55	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	36	210,000,000	12	41,147,250	12	Dokumen	40,000,000	3	7,132,000	3	9,518,000	3	12,265,500	3	11,044,000	3	39,959,500	15	81,106,750	42	39	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan tepat waktu	3	51,000,000	1	5,709,000	1	Dokumen	9,000,000	0	3,550,000	1	3,402,000	1	2,005,500	-	2	8,957,500	3	14,666,500	100	29	DPMDPPPA			
		Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan Aparatur DPMDPPPA yang difasilitasi administrasinya	56	45,000,000	56	10,481,500	56	Aparatur	9,999,950	14	2,801,000	14	2,464,000	14	2,517,000	14	2,177,750	56	9,959,750	112	20,441,250	200	45	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kewenangan	Jumlah aparatur DPMDPPPA yang difasilitasi administrasi kewenangiannya	56	45,000,000	56	10,481,500	56	Orang	9,999,950	14	2,801,000	14	2,464,000	14	2,517,000	14	2,177,750	56	9,959,750	112	20,441,250	200	45	DPMDPPPA		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Aparatur DPMDPPPA yang difasilitasi administrasinya	108	949,500,000	0	99,239,405	100		133,911,000	25	46,178,900	25	21,615,000	25	12,272,000	25	53,817,000	100	133,882,900	100	233,122,305	93	25	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang difasilitasi peralatan penerangan dan kelistrikan kantor	6	22,500,000	6	3,336,000	6	Ruangan	5,000,000	1	885,000	2	1,415,000	2	1,602,000	1	1,098,000	6	5,000,000	12	8,336,000	200	37	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	18	20,000,000	0	-	6	Buah	19,509,000	0	-	0	-	0	-	6	19,509,000	6	19,509,000	6	19,509,000	33	98	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang dihadiri	108	907,000,000	36	95,903,405	36	Kali	109,402,000	10	45,293,900	8	20,200,000	8	10,670,000	10	33,210,000	36	109,373,900	72	205,277,305	67	23	DPMDPPPA		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	3	210,000,000	0	44,786,953	6	Berkas	64,297,090	6	9,697,228	6	14,288,257	6	11,947,371	6	14,114,668	6	50,047,524	6	94,834,477	200	45	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	36	150,000,000	12	28,659,953	12	Bulan	44,988,000	3	7,447,228	3	6,835,257	3	7,447,371	3	9,009,668	3	30,739,524	15	59,399,477	42	40	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	36	60,000,000	12	16,127,000	12	Bulan	19,309,090	3	2,250,000	3	7,453,000	3	4,500,000	3	5,105,000	3	19,308,000	15	35,435,000	42	59	DPMDPPPA		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya	72	450,000,000	12	79,467,935	12	Bulan	63,235,500	3	13,282,500	3	20,913,000	3	13,196,000	3	15,826,650	3	63,218,150	15	142,686,085	21	32	DPMDPPPA		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi	72	450,000,000	12	79,467,935	12	Bulan	63,235,500	3	13,282,500	3	20,913,000	3	13,196,000	3	15,826,650	3	63,218,150	15	142,686,085	21	32	DPMDPPPA		
			Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Program Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penataannya	46	2,384,284,533	46		760,955,724	46	817,999,876	3	198,311,076	3	202,745,136	3	204,390,504	3	205,530,228	3	810,976,944	49	1,571,932,668	107	66	DPMDPPPA
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan penataan desa	46	2,384,284,533	46		760,955,724	46	817,999,876	3	198,311,076	3	202,745,136	3	204,390,504	3	205,530,228	3	810,976,944	49	1,571,932,668	107	66	DPMDPPPA
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang menjalankan kewenangan desa			46	2,384,284,533	46		760,955,724	46	817,999,876	3	198,311,076	3	202,745,136	20	204,390,504	20	205,530,228	46	810,976,944	92	1,571,932,668	200	66	DPMDPPPA		
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan jumlah desa yang difasilitasi administrasi pemerintahan desanya			46	1,000,000,000	0	113,869,900	46	Desa	309,611,750	13	207,643,200	11	47,430,000	11	34,206,500	11	18,172,250	46	307,451,950	46	421,321,850	100	42	DPMDPPPA		
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan jumlah desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desanya			46	1,000,000,000	0	113,869,900	46		309,611,750	13	207,643,200	11	47,430,000	11	34,206,500	11	18,172,250	46	307,451,950	46	421,321,850	100	42	DPMDPPPA		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi penyusunan RKPDesnya	46	150,000,000	46	17,241,200	46 Desa	20,000,000	11	4,796,500	13	5,938,000	8	3,034,500	13	5,611,000	45	19,380,000	91	36,621,200	198	24	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang melakukan proses penetapan perdes APBDas tepat waktu	46	480,000,000	26	96,628,700	36 Desa	59,999,850	4	9,219,000	4	11,653,500	4	29,352,000		9,024,750	12	59,249,250	38	155,877,950	83	32	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan asetnya	46	190,000,000	0	-	46 Desa	35,772,000	1	2,317,200	1	27,344,500	1	1,820,000		3,536,500	3	35,018,200	3	35,018,200	7	18	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	634	180,000,000	0	-	138 orang	193,839,900	90	191,310,500	48	2,494,000	0	-		-	138	193,804,500	138	193,804,500	22	108	DPMDPPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang difasilitasi	67	5,850,000,000	0	1,504,871,850	67 Lembaga Kemasya rakatan	1,585,687,000	18	495,081,900	16	368,704,710	15	235,397,000	18	469,236,000	67	1,568,419,610	67	3,073,291,460	100	53	DPMDPPPA
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	67	5,850,000,000	67	1,504,871,850	67 Lembaga Kemasya rakatan	1,585,687,000	18	495,081,900	16	368,704,710	15	235,397,000	18	469,236,000	67	1,568,419,610	134	3,073,291,460	200	53	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah masyarakat hukum adat yang di Identifikasi dan diinventarisasi masyarakat hukum adatnya	9	150,000,000	3	28,369,550	3 Desa	24,401,800	0	-	2	22,001,800	0	-	1	1,500,000	3	23,501,800	6	51,871,350	67	35	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan masyarakat di desa/kelurahan yang difasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatannya	67	1,050,000,000	67	10,376,000	67 Desa/Kel.	165,000,000	46	161,398,100	21	3,078,400		-		-	67	164,476,500	134	174,852,500	200	17	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	67	150,000,000	67	37,973,300	67 Desa/Kel.	40,000,000	25	24,605,300	15	10	50	1,730,000		-	50	26,335,310	117	64,308,610	175	43	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pelaku/kelompok usaha ekonomi masyarakat berbasis dusun & RW yang telah memperoleh fasilitasi & pembinaan	450	4,500,000,000	16	1,428,153,000	150 orang	1,356,285,200	37	309,078,500	38	343,624,500	25	233,667,000	50	467,736,000	150	1,354,106,000	166	2,782,259,000	37	62	DPMDPPPA
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
1. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak																								
2. Adanya kerjasama yang baik antara perangkat daerah terkait lembaga P2TP2A																								
3. Terbentuknya organisasi kemasyarakatan di Desa/Kel																								
4. Pemberian ruang kepada lembaga ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya																								
5. Adanya Regulasi tentang penguatan lembaga ekonomi pedesaan																								
6. Pemberian ruang kepada lembaga kemasyarakatan di desa/kel																								
7. Kebijakan pemerintah untuk penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas aparatur																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja :																								
1. Pelaksanaan perencanaan dan penganggran responsif gender belum optimal																								
2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan perencanaan dan penganggaran responsif gender																								
3. Adanya adat budaya yang kurang mendukung upaya pencegahan pernikahan usia anak																								
4. Belum optimalnya prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam menggali potensi ekonomi desa																								
5. Belum optimalnya SDM pengelola kelembagaan masyarakat																								
6. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*1):																								
1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak																								
2. Meningkatkan implementasi kabupaten layak anak																								
3. Penguatan kelembagaan PUG yang aktif																								
4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					5			6		7		8		9				10			11		12		13= 6 + 12
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
5. Penciptaan komunitas usaha																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*) :																									
1. Meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan																									
2. Meningkatkan kualitas hidup anak																									
3. Meningkatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan																									
4. Meningkatkan kualitas pembangunan desa																									
DINAS KETAHANAN PANGAN																									
2091	1. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		769	10,406,408,634	149	2,222,403,839	147	2,241,936,491	37	384,182,334	30	630,654,251	31	524,908,638	30	536,463,020	138	2,076,208,243	277	4,298,612,082	36	41		
2090	12.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63	724,155,663	13	70,145,000	13	57,026,160	3	17,579,150	3	18,827,680	3	9,112,530	3	11,478,800	13	56,998,160	25	127,143,160	40	18		
2090			12.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)	3	358,391,963	1	42,642,000	1	33,759,900		13,724,350		8,789,150		4,383,400		6,835,000	1	33,731,900	1	76,373,900	33	21	
2090				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	365,763,700	12	27,503,000	12	23,266,260	3	3,854,800	3	10,038,530	3	4,729,130	3	4,643,800	12	23,266,260	24	50,769,260	40	14	
2090	12.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	116	6,565,663,428	27	1,868,083,329	25	1,937,650,900	7	325,283,687	3	527,753,631	3	443,896,308	3	478,200,026	16	1,775,133,652	43	3,643,216,981	37	55	
2090	12.0	201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	Jumlah gaji dan tunjangan ASN (Bulan)	36	5,981,487,000	12	1,832,868,329	12	1,904,078,500	3	315,442,487		517,265,531		439,896,308		468,956,926	3	1,741,561,252	15	3,574,429,581	42	60	
2090			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (Bulan)	Persentase Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (Bulan)	60	271,403,260	12	18,752,800	12	29,572,400	3	5,841,200	3	10,488,100	3	4,000,000	3	9,243,100	12	29,572,400	24	48,325,200	40	18	
2090	12.0	205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, LKJ, LPPD, Sirup (Laporan)	10	101,443,999	1	6,835,000	1	4,000,000	1	4,000,000		-		-		-	1	4,000,000	2	10,835,000	20	11	
2090	12.0	207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran (Laporan)	10	211,329,169	2	9,627,200	0	-						-		-	0	-	2	9,627,200	20	5	
2090	12.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65	296,060,065	12	15,380,800	12	8,030,600	3	2,001,400	3	2,429,200	3	1,200,000	3	2,400,000	12	8,030,600	24	23,411,400	37	8	
2090	12.0	301	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	3	60,000,000	0	-	0	-					-		-	0	-	0	-	0	-		
2090	12.0	304	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Administrasi Jaminan Barang Milik Daerah (Bulan)	60	176,060,065	12	15,380,800	12	8,030,600	3	2,001,400	3	2,429,200	3	1,200,000	3	2,400,000	12	8,030,600	24	23,411,400	40	13	
2090	12.0	305	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	60,000,000	-	-	-	-						-	0	-	0	-	0	-	-		
2090	12.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40	153,963,451	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-		
2090	12.0	511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelatihan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Kec)	40	153,963,451	0	-	0	-					-		-	0	-	0	-	0	-		
2090	12.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	240	1,507,204,964	48	160,510,600	48	127,593,251	12	23,327,201	9	52,284,250	9	29,201,800	9	20,795,000	48	125,608,251	87	286,118,851	36	19	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2090 12.0 601		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Administrasi Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	60	60,377,766	12	2,158,600	12	2,156,000	3	1,000,000	3	1,156,000	3	-	3	-	12	2,156,000	24	4,314,600	40		7
2090 12.0 602		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Administrasi Dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	60	220,868,236	12	8,400,000	12	11,993,800	3		3	943,800	3	11,050,000	3	-	12	11,993,800	24	20,393,800	40		9
2090 12.0 606		Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan	Jumlah Administrasi Bacaan Dan Peralihan Perundang Undangan (Bulan)	60	73,289,218	12	6,840,000	12	6,840,000	3		3	2,520,000	3	2,035,000	3	300,000	12	4,855,000	24	11,695,000	40		16
2090 12.0 609		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Administrasi Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bulan)	60	1,152,669,744	12	143,112,000	12	106,603,451	3	22,327,201		47,664,450		16,116,800		20,495,000	12	106,603,451	15	249,715,451	25		22
2090 12.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120	457,099,822	24	44,115,918	24	39,222,100	6	7,985,763	6	10,952,343	6	8,561,140	6	10,909,154	24	38,408,400	48	82,524,318	40		18
2090 12.0 802		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Administrasi Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik (Bulan)	60	224,385,696	12	21,408,000	12	16,514,400	3	3,970,013	3	3,634,593	3	2,861,140	3	5,509,154	12	15,974,900	24	37,382,900	40		17
2090 12.0 804		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Kebersihan Kantor (Bulan)	60	232,714,126	12	22,707,918	12	22,707,700	3	4,015,750	3	7,317,750	3	5,700,000	3	5,400,000	12	22,433,500	24	45,141,418	40		19
2090 12.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125	702,261,241	25	64,168,192	25	72,413,480	6	8,005,133	6	18,407,147	7	32,936,860	6	12,680,040	25	72,029,180	50	136,197,372	40		19
2090 12.0 901		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat Dan Roda Dua Serta Terpenuhiya BBM Pada Kantor DKP (Bulan)	60	246,157,525	12	50,918,192	12	50,913,600	3	8,005,133	3	17,192,447	3	12,936,980	3	12,680,040	12	50,814,600	24	101,732,792	40		41
2090 12.0 902		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (Bulan)	60	111,769,631	12	1,500,000	12	1,500,000	3		3	1,214,700	3	-	3	-	12	1,214,700	24	2,714,700	40		2
2090 12.0 909		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor DKP Secara Baik Dan Teratur (Unit)	5	344,334,085	1	11,750,000	1	19,999,880					1	19,999,880		-	1	19,999,880	2	31,749,880	40		9
2090 2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Desa yang Masuk dalam Kategori Mandiri Pangan	30	564,136,967	1	525,000,000	1	2,350,000,000	0	-	0	0	0	99,891,000	-	2,152,765,720	1	2,252,656,720	2	2,777,656,720	7		492
2090 22.0 1		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	30	564,136,967	1	525,000,000	1	2,350,000,000					99,891,000		2,152,765,720	1	2,252,656,720	2	2,777,656,720	7		492	
2090 2201 01		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia di Setiap Desa (Unit)	15	291,832,801	1	525,000,000	1	2,350,000,000					99,891,000	1	2,152,765,720	1	2,252,656,720	2	2,777,656,720	13		952	
2090 2201 03		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Unit)	15	272,304,166	0		0						-		-	0	-	0	-	0		-	
2090 3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	495	7,308,096,913	62	1,079,827,300	61	932,515,635	3	41,813,334	3	451,652,835	-	73,035,100	10	357,194,540	41	923,695,809	103	2,003,523,109	21		27

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2090 32.0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	242	3,128,753,200	31	286,833,650	31	111,445,650	3	35,403,234	3	51,012,650		10,165,000		12,885,800	31	109,466,684	62	396,300,334	26		13	
2090 32.0 101		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Bulan)	36	64,355,500	0	-	0	-						-		-	0	-	0	-	0	-		
2090 32.0 102		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah diversifikasi pangan dalam mendukung ketersediaan pangan (Varietas)	40	1,157,035,150	8	117,172,750	8	37,707,650		1,000,000		33,712,650		1,265,000	8	1,560,000	8	37,537,650	16	154,710,400	40		13	
2090 32.0 103		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Pengenalan beberapa produk unggulan daerah (Kali)	30	771,800,500	3	38,288,500	3	1,779,300						200,000	3	1,555,000	3	1,755,000	6	40,043,500	20		5	
2090 32.0 104		Pemantau Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase pemantauan dan Pengendalian harga pangan pokok (Laporan)	60	593,726,000	12	90,659,200	12	38,389,800	3	13,287,800	3	10,500,000	3	7,500,000	3	5,400,000	12	36,687,800	24	127,347,000	40		21	
2090 32.0 105		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pengembangan Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan (Bulan)	36	105,566,050	0	-	0	-						-		-	0	-	0	-	0	-		
2090 32.0 106		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah pengembangan model distribusi yang efisien (Kecamatan)	40	436,270,000	8	40,713,200	8	33,568,900		21,115,434		6,800,000		1,200,000	8	4,370,800	8	33,486,234	16	74,199,434	40		17	
2090 32.0 2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	103	1,392,403,581	20	15,603,800	20	18,949,800	0	873,600	-	12,576,200	-	-	-	-	0	13,449,800	20	29,053,600	19		2	
2090 32.0 202		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal (Laporan)	3	57,614,131	0	-	0	-						-		-	0	-	0	-	0	-		
2090 32.0 203		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan masyarakat (Ton)	100	1,334,789,450	20	15,603,800	20	18,949,800		873,600		12,576,200		-	0	-	0	13,449,800	20	29,053,600	20		2	
2090 32.0 4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun	150	2,786,940,132	11	777,389,850	10	802,120,185	0	5,536,500	-	388,063,985	-	62,870,100	10	344,308,740	10	800,779,325	21	1,578,169,175	14		57	
2090 32.0 401		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Skor Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (Laporan)	25	666,974,000	5	52,700,400	5	34,574,000				3,600,000		20,744,000	5	10,184,330	5	34,528,330	10	87,228,730	40		13	
2090 32.0 402		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Masyarakat yang di Berdayakan dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Kelompok)	120	1,497,009,429	5	696,649,450	5	767,546,185		5,536,500		384,463,985		42,126,100	5	334,124,410	5	766,250,995	10	1,462,900,445	8		98	
2090 32.0 403		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (Laporan)	5	622,956,703	1	28,040,000	0	-						-		-	0	-	1	28,040,000	20		5	
2090 4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	29	1,474,038,458	1	96,384,400	1	87,271,000	0	731,600	-	21,773,400	-	53,666,000	1	11,065,000	1	87,236,000	2	183,620,400	7		12	
2090 42.0 1		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	5	1,093,135,619	1	96,384,400	1	87,271,000	0	731,600	-	21,773,400	-	53,666,000	1	11,065,000	1	87,236,000	2	183,620,400	40		17	
2090 42.0 101		Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan	Jumlah Analisis Peta Kerawanan dan Ketahanan Pangan (Laporan)	5	1,093,135,619	1	96,384,400	1	87,271,000		731,600		21,773,400		53,666,000	1	11,065,000	1	87,236,000	2	183,620,400	40		17	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
										8		9		10		11									12
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2090 42.0 2		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	24	380,902,839	0	-	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-		
2090 42.0 201		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota (Kec)	24	380,902,839	0	-	0	-						-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2090 5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	143	2,054,697,314	18	258,035,885	18	43,580,755	0	12,213,255	-	15,346,250	-	5,763,750	-	10,247,500	18	43,570,755	36	301,606,640	25		15	
2090 52.0 1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	143	2,054,697,314	18	258,035,885	18	43,580,755	0	12,213,255	-	15,346,250		5,763,750		10,247,500	18	43,570,755	36	301,606,640	25		15	
2090 52.0 101		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Jumlah Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten (Varietas)	65	614,613,435	13	58,236,710	13	20,730,805		7,305,805		5,630,000		2,920,000	13	4,865,000	13	20,720,805	26	78,957,515	40		13	
2090 52.0 102		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (Sertifikat)	29	61,531,000	0	-	0	-						-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2090 52.0 104		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (Kec)	24	92,446,379	0	-	0	-						-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2090 52.0 105		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan (Sertifikat/Komoditi)	25	1,286,106,500	5	199,799,175	5	22,849,950		4,907,450		9,716,250		2,843,750	5	5,382,500	5	22,849,950	10	222,649,125	40		17	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				1466						228		199		420				87		29					
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																									
	Meningkatnya perlindungan lingkungan dan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	1,250,000,000	20%	-	40%	249,238,500		-		8,100,000		39,256,200	40%	193,262,800	40%	240,619,000	60%	240,619,000	60%		19%	
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab. Bantaeng yang ditetapkan	1	600,000,000		-		249,238,500		-		8,100,000		39,256,200		193,262,800	100%	240,619,000	100%	240,619,000	100%		40%	
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Tahapan Penetapan RPPLH yang dilaksanakan	2	600,000,000		-	1	249,238,500				8,100,000		39,256,200	1	193,262,800	1	240,619,000	1	240,619,000	50%		40%	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang dibuat dan divalidasi	4	650,000,000		-		-		-		-		-		-		-		-	0%		0%	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	6	300,000,000		-									-	-		-		-	0%		0%	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang dibuat dan dilaksanakan	1	350,000,000		-									-	-		-		-	0%		0%	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditangani	100%	4,035,000,000	50%	985,288,064	100%	4,849,865,450	25%	209,214,850	25%	213,890,395	25%	596,840,114	25%	3,473,480,607	100%	4,493,425,966	100%	5,478,714,030	100%		136%	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumah Sumber Pencemaran dan Kerusakan yang dapat dicegah	35	2,895,000,000	10	2,059,049,866	10	3,410,053,750	2	189,203,150	3	196,304,295	3	540,419,614	2	2,341,136,807	10	3,267,063,866	20	5,326,113,732	57%		184%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Sungai, Pesisir Laut dan Lokasi udara Embien yang ditetapkan status mutunya	11	1,065,000,000	9	418,441,636	10	400,000,000	3	94,268,750	5	103,489,246	3	99,942,150	3	98,140,750	14	395,840,896	14	814,282,532	127%		76%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	2	300,000,000		-	2	76,222,000	1	15,120,400	1	21,805,000	1	18,436,900		17,359,650	3	72,721,950	3	72,721,950	150%		24%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Pencemar yang diuji	36	1,530,000,000	12	489,154,028	12	2,933,831,750	3	79,814,000	5	71,010,049	3	422,040,564	3	2,225,636,407	14	2,798,501,020	26	3,287,655,048	72%	215%	
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencemaran/kerusakan yang ditindaki	70%	100,000,000	0%	-	50%	1,320,490,200		1,345,800		663,100		10,191,700	50%	1,099,847,400	50%	1,112,048,000	50%	1,112,048,000	71%	1112%	
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang Tersedia	1	100,000,000	-	-	1	1,320,490,200	1	1,345,800		663,100		10,191,700		1,099,847,400	1	1,112,048,000	1	1,112,048,000	100%	1112%	
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi Lahan	70%	1,040,000,000		140,874,400	50%	119,321,500		18,665,900		16,923,000		46,228,800		32,496,400		114,314,100		255,188,500	0%	25%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Sumber Pencemar yang ditangani	3	370,000,000	-	-	1	46,427,800	1	3,317,400	1	418,000		28,060,200		14,025,000	2	45,820,600	2	45,820,600	67%	12%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis	3	670,000,000	1	77,692,400	1	72,893,700	1	15,348,500		16,505,000		18,168,600		18,471,400	1	68,493,500	2	146,185,900	67%	22%	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rasio Tingkat Ketaatan Pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100%	627,500,000	49%	107,277,000	25%	81,573,330	#REF!	18,367,100	#REF!	23,763,618	#REF!	24,065,847	#REF!	15,243,100	#REF!	81,439,665	#REF!	188,716,665	#REF!	30%	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	18	627,500,000		244,155,500	6	81,573,330	9	18,367,100		23,763,618		24,065,847		15,243,100	9	81,439,665	9	325,595,165	50%	52%	
		Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai	18	155,500,000	2	-	6	31,744,650	1	7,828,800		8,495,200		10,333,100		4,961,500	1	31,618,600	3	31,618,600	17%	20%	
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	18	472,000,000	28	107,277,000	6	49,828,680	9	10,538,300	6	15,268,418		13,732,747		10,281,600	15	49,821,065	43	157,098,065	239%	33%	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	165,000,000	100%	28,274,350	100%	24,212,200	0%	3,617,600	0%	4,528,450	0%	8,934,600	0%	7,026,000	0%	24,106,650	0%	52,381,000	0%	32%	
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi tindak lanjut kasus/perkara LH yang ditangani	6	165,000,000	10	59,322,850	2	24,212,200		3,617,600	1	4,528,450		8,934,600		7,026,000	1	24,106,650	11	83,429,500	183%	51%	
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditangani	6	165,000,000	10	28,274,350	2	24,212,200		3,617,600	1	4,528,450	2	8,934,600	2	7,026,000	5	24,106,650	15	52,381,000	250%	32%	
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Proporsi Limbah B3 yang diolah sesuai Prosedur	30%	525,500,000		41,067,100	20%	48,599,900		5,726,400		21,018,200		8,509,000	22%	9,596,200	22%	44,849,800	22%	85,916,900	73%	16%	
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi Syarat	60%	285,500,000		41,067,100	50%	28,199,900		3,051,900		17,138,200		2,609,000	22%	3,436,100	22%	26,235,200	22%	67,302,300	37%	24%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diverifikasi	36	285,500,000	10	41,067,100	10	28,199,900	3	3,051,900	3	17,138,200	3	2,609,000	3	3,436,100	12	26,235,200	22	67,302,300	61%	24%	
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpul/Pengangkut Limbah B3 yang memenuhi syarat	50	240,000,000	-	-	-	20,400,000	-	2,674,500	-	3,880,000	-	5,900,000	-	6,160,100	-	18,614,600	-	18,614,600	0%	8%	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas pemenuhan izin pengumpulan limbah B3	10	110,000,000	-	-	-	20,400,000	1	2,674,500	2	3,880,000	-	5,900,000	-	6,160,100	3	18,614,600	3	18,614,600	30%	17%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Limbah B3 yang diangkut keluar daerah	50	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA terkait PPLH yang diakui	20%	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diverifikasi	4	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA terkait PPLH yang diakui	4	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	-	350,000,000	-	-	-	72,600,000	-	-	-	54,456,000	-	14,112,600	-	4,000,000	-	72,568,600	-	72,568,600	-	21%	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan dan penyuluhan	25%	350,000,000	-	-	-	72,600,000	-	-	-	54,456,000	-	14,112,600	-	4,000,000	-	72,568,600	-	72,568,600	0%	21%	
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2	250,000,000	-	-	1	72,600,000	-	-	1	54,456,000	-	14,112,600	-	4,000,000	1	72,568,600	1	72,568,600	50%	29%	
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Penyuluhan Lingkungan Hidup	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	20	1,467,000,000	389,143,004	10	323,278,200	93,168,179	126,732,574	71,989,500	31,251,450	-	323,141,703	712,284,707	0%	49%							
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	36	1,467,000,000	389,143,004	12%	323,278,200	93,168,179	126,732,574	71,989,500	31,251,450	-	323,141,703	712,284,707	0%	49%							

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13x100%		15
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja dalam PPLH	5	1,467,000,000	1	389,143,004	2	323,278,200		93,168,179	1	126,732,574	1	71,989,500		31,251,450	2	323,141,703	3	712,284,707	60%	49%	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Pengelolaan Persampahan Kab. Bantaeng	22.50%	17,263,200,000		4,973,986,415	21.50%	4,959,855,940		1,219,598,000		1,294,743,392		1,217,045,064		1,227,705,860	51.26%	4,959,092,316	51.26%	9,933,078,731	228%	58%	
		Pengelolaan Sampah	Persentase timbul sampah yang terkelola	23%	17,263,200,000		4,973,986,415	22%	4,959,855,940		1,219,598,000		1,294,743,392		1,217,045,064		1,227,705,860	51.26%	4,959,092,316	51.26%	9,933,078,731	228%	58%	
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kab/Kota	Jumlah Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kab/Kota yang tersusun	2	350,000,000	-		1	152,432,700		12,555,600		46,132,000	1	68,718,424		25,006,250	1	152,412,274	1	152,412,274	50%	44%	
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Pengurangan Sampah Melalui 3R	30.0%	300,200,000		80,159,250	20%	70,713,000	25.70%	68,313,000		2,400,000					25.70%	70,713,000	25.70%	150,872,250	86%	50%	
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Sampah Kota yang Tertangani	70%	15,913,000,000	70.72%	4,893,827,165	67%	4,695,812,540		1,133,755,000		1,219,770,492		1,145,444,240	69.35%	1,196,699,610	69.35%	4,695,669,342	69.35%	9,589,496,507	99%	60%	
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengolah Sampah	3	400,000,000	-		2	40,897,700		4,974,400	2	26,440,900		2,882,400		6,000,000	2	40,297,700	2	40,297,700	67%	10%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jenis Sarana Yang di Sediakan	2	100,000,000	-												-	-		-	0%	0%	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan di TPA	2	550,000,000	-												-	-		-	0%	0%	
						-												-	-		-			
	Meningkatnya Pengelolaan RTH	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	14.67%	13,732,500,000	10%	1,948,881,119	12.75%	3,151,340,816	10%	421,272,200		390,066,972		382,767,300		426,570,050	10%	1,620,676,522	10%	3,569,557,641	68%	26%	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	14.67%	13,732,500,000		1,948,881,119	12.75%	3,151,340,816	10%	421,272,200		390,066,972		382,767,300		426,570,050	10%	1,620,676,522	10%	3,569,557,641	68%	26%	
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Terhadap Luas Wilayah Perkotaan yang Dikelola	14.67%	12,982,500,000	10%	1,948,881,119	12.75%	2,418,680,816	10%	240,543,700		200,229,036		201,818,900		245,478,750	10%	888,070,386	10%	2,836,951,505	68%	22%	
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Taman Kehati yang dikelola	5	750,000,000	-			732,660,000		180,728,500		189,837,936		180,948,400		181,091,300		732,606,136		732,606,136	0%	98%	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoranannya	100%	11,562,166,667	100%	2,835,306,752	100%	3,359,680,181	25%	620,822,694	25%	897,283,974	25%	769,971,440	25%	850,118,804	100%	3,138,196,912	100%	5,973,503,664	100%	52%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	100%	127,500,000	100%	36,072,100	100%	33,884,230	2250%	8,069,500	2250%	8,445,900	2250%	8,806,500	2250%	8,539,700	9000%	33,861,600	9000%	69,933,700	9000%	55%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Renja, Renstra) Daerah	7	36,000,000	3	9,971,100	2	7,245,930	1	2,153,800		2,325,500		700,600	1	2,053,800	2	7,233,700	5	17,204,800	71%	48%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan (RKA, DPA)	12	39,000,000	4	11,098,400	4	10,808,800	1	2,309,500		2,685,500	2	2,897,500	1	2,906,600	4	10,799,100	8	21,897,500	67%	56%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja, LKJ, LKPJ yang dihasilkan	78	52,500,000	26	15,002,600	26	15,829,500	8	3,606,200	6	3,434,900	6	5,208,400	6	3,579,300	26	15,828,800	52	30,831,400	67%	59%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%	9,289,000,000	100%	2,389,726,356	100%	2,671,271,427	25%	485,949,511	25%	778,230,915	25%	641,281,654	25%	660,005,081	100%	2,565,467,161	100%	4,955,193,517	100%	53%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	36	9,197,000,000	12	2,368,431,956	12	2,653,192,227	3	477,154,011	3	775,201,065	3	638,203,804	3	656,842,181	12	2,547,401,061	24	4,915,833,017	67%	53%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelayanan Administrasi Keuangan	36	56,000,000	12	16,866,900	12	11,079,200	3	1,800,000	3	3,029,850	3	3,077,850	3	3,162,900	12	11,070,600	24	27,937,500	67%	50%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	15,000,000	1	4,427,500	1	7,000,000	1	6,995,500					1	6,995,500	2	11,423,000	67%	76%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	26	21,000,000	-											-		-	0%	0%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	26,500,000	-		-		-						-		-		-	0%	0%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan RKBU	2	11,000,000	-											-		-	0%	0%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pencatatan dan Pembukuan Barang dan Aset	24	15,500,000	-											-		-	0%	0%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang dilayani	100	246,646,667	-		-		-						-		-		-	0%	0%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	100	40,000,000	-											-		-	0%	0%			
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Perundang-undangan yang disosialisasikan	1	146,646,667	-											-		-	0%	0%			
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dikirim	4	60,000,000	-											-		-	0%	0%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	727,520,000	100%	121,741,230	100%	264,841,250	2250%	40,931,000	2250%	46,729,600	2250%	48,794,300	2250%	56,327,764	100%	192,782,664	100%	314,523,894	100%	43%	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	3	7,900,000	1	2,276,850	1	2,906,250	0.25	471,000	0.25	1,452,000	0.25		0.25	500,000	1.00	2,423,000	2.00	4,699,850	67%	59%	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Diadakan dan Dipelihara	3	36,000,000	1	2,900,000	2	9,990,000				-	2	9,990,000			2	9,990,000	3	12,890,000	100%	36%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotocopy Dokumen/Laporan/Sampul	36	14,520,000	12	2,014,500	12	5,875,000			6	1,010,000	3	1,055,000	3	850,000	12	2,915,000	24	4,929,500	67%	34%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Koran dan Majalah	36	57,000,000	10	11,120,000	12	17,580,000	3	2,930,000	3	5,860,000	3	2,930,000		5,860,000	9	17,580,000	19	28,700,000	53%	50%	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan Minum Rapat dan Tamu	3	51,100,000	1	12,960,700	1	20,000,000	0.25	3,500,000	0.25	6,490,000	0.25	6,000,000	0.25	4,000,000	1.00	19,990,000	2.00	32,950,700	67%	64%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	3	451,000,000	1	90,469,180	1	128,490,000	0.25	31,030,000	0.25	28,917,600	0.25	25,819,300	0.25	42,117,764	1.00	127,884,664	2.00	218,353,844	67%	48%	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tertaksananya Dukungan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	110,000,000	-		1	80,000,000		3,000,000		3,000,000	1	3,000,000		3,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	50%	11%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur memadai	33%	177,500,000	16%	38,107,500	13%	47,869,200	8%	21,000,000		-		-	5%	14,335,000	13%	35,335,000	29%	73,442,500	88%	41%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	2	70,000,000	-												-		-	0%	0%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur kantor yang diadakan	9	37,500,000	3	17,407,500	3	18,235,000				-			2	14,335,000	2	14,335,000	5	31,742,500	56%	85%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	6	70,000,000	4	20,700,000	4	29,634,200	2	21,000,000		-					2	21,000,000	6	41,700,000	100%	60%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Administrasi	100%	459,500,000	100%	116,080,817	100%	186,230,114	2250%	39,404,327	2250%	40,730,976	2250%	40,020,296	2250%	53,353,059	9000%	173,508,658	100%	289,589,475	100%	63%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	278,000,000	6	69,224,597	12	99,990,784	3	18,776,237		17,527,482		18,333,296		32,642,859	3	87,279,874	9	156,504,471	25%	56%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	181,500,000	6	46,856,220	12	86,239,330	3	20,628,090		23,203,494		21,687,000		20,710,200	3	86,228,784	9	133,085,004	25%	73%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	508,000,000	100%	133,578,749	100%	155,583,960	2250%	25,468,356	2250%	23,146,583	2250%	31,068,690	2250%	57,558,200	9000%	137,241,829	100%	270,820,578	100%	53%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelharan dan Diselesaikan Pajaknya	3	300,000,000	1	77,754,799	1	78,207,960	0.25	16,759,041	0.25	14,486,763	0.25	18,253,250	0.25	25,279,300	1.00	74,778,354	2.00	152,533,153	67%	51%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	78,000,000	1	-	1	37,650,000	0.25	8,709,315	0.25	3,059,820	0.25	10,300,440	0.25	6,121,900	1.00	28,191,475	2	28,191,475	67%	36%	
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	2	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor	3	30,000,000	1	3,755,000	1	9,630,000	-	-	0.25	600,000	0.5	2,515,000	0.25	3,200,000	1.00	6,315,000	2	10,070,000	67%	34%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	6	90,000,000	2	52,068,950	2	30,096,000	-	-	1	5,000,000	-	-	1	22,957,000	2	27,957,000	4	80,025,950	67%	89%	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				#REF!				
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja : Adanya dukungan kebijakan dan anggaran pada beberapa program strategis																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Rendahnya keberhasilan kinerja karena tidak adanya batasan anggaran dan kegiatan dalam penyusunan Renstra SKPD sehingga ketersediaan anggaran tiap tahun tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran yang direncanakan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Agar memprioritaskan program yang capaiannya masih rendah dalam RKPD berikutnya																								
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																								
X.X X.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan		8,949,271,736		2,221,603,012		3,189,062,000		433,696,543		677,765,891		715,887,219		552,475,800		2,379,825,453		4,601,428,465		51	
X.X X.01 .2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu		99,528,150		15,528,150		40,000,000		2,590,500		6,395,250		5,863,400		1,150,850		16,000,000		31,528,150		32	
X.X X.01 .2.01 .01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu	2	10,500,000	-	-		5,000,000		-		3,000,000		-		-		3,000,000		3,000,000		28.57142857	
X.X X.01 .2.01 .02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang diselesaikan tepat waktu	1	10,500,000	-	-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
X.X X.01 .2.01 .03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang diselesaikan tepat waktu	1	10,500,000	-	-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
X.X X.01 .2.01 .04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun tepat waktu	1	10,500,000	-	-		5,000,000		-		1,105,650		1,894,350		-		3,000,000		3,000,000		28.57142857	
X.X X.01 .2.01 .05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang diselesaikan tepat waktu	1	10,500,000	-	-		5,000,000		-		-		3,000,000		-		3,000,000		3,000,000		28.57142857	
X.X X.01 .2.01 .06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	1	36,528,150		15,528,150	1	10,000,000		1,032,500		847,600		969,050		1,150,850		4,000,000		19,528,150		53	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.X X.01 .2.01 .07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan yang diselesaikan tepat waktu Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPJ)	1	10,500,000	-		5,000,000		1,558,000		1,442,000	-		-		3,000,000		3,000,000			28.57142857		
X.X X.01 .2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen administrasi keuangan		7,419,951,550	1,838,756,247		2,466,822,000		342,756,253		569,838,199	445,865,193		474,920,137		1,833,379,782		3,672,136,029			49		
X.X X.01 .2.02 .01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	12	7,341,857,200	1,829,961,897	12	2,433,822,000		337,312,253		565,881,849	438,629,093		465,899,587		1,807,722,782		3,637,684,679			50		
X.X X.01 .2.02 .03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	12	10,500,000	-		5,000,000		-		950,000	622,450		1,427,550		3,000,000		3,000,000			29		
X.X X.01 .2.02 .04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan fungsional yang diselesaikan tepat waktu	12	10,500,000	-		5,000,000		-		809,600	1,069,850		1,120,550		3,000,000		3,000,000			29		
X.X X.01 .2.02 .05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan tepat waktu	1	7,835,000	1,535,000	1	3,000,000		1,700,000		-	-		-		1,700,000		3,235,000			41		
X.X X.01 .2.02 .07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang diselesaikan tepat waktu	12	49,259,350	7,259,350	12	20,000,000	12	3,744,000		2,196,750	5,543,800		6,472,450		17,957,000		25,216,350			51		
X.X X.01 .2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan dokumen administrasi barang milik daerah pada SKPD		31,500,000	-		15,000,000		930,850		4,186,750	1,382,400		-		6,500,000		6,500,000			21		
X.X X.01 .2.03 .01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang SKPD	1	10,500,000	-		5,000,000		-		2,000,000	-		-		2,000,000		2,000,000			19		
X.X X.01 .2.03 .05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan barang milik daerah pada SKPD yang diselesaikan tepat waktu	12	10,500,000	-		5,000,000		930,850		1,069,150	-		-		2,000,000		2,000,000			19		
X.X X.01 .2.03 .07		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan pemanfaatan barang milik daerah pada SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1	10,500,000	-		5,000,000		-		1,117,600	1,382,400		-		2,500,000		2,500,000			24		
X.X X.01 .2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Aparatur yang difasilitasi administrasi kepegawaiannya		52,500,000	-		25,000,000		2,005,400		2,573,700	4,579,000		825,900		9,984,000		9,984,000					
X.X X.01 .2.05 .02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah aparatur yang difasilitasi pakaian dinas dan atributnya	39	31,500,000	-		15,000,000		-		-	-		-		-		-			0		
X.X X.01 .2.05 .03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah aparatur yang difasilitasi administrasi kepegawaiannya	39	10,500,000	-		5,000,000		997,200		1,183,200	2,302,800		516,800		5,000,000		5,000,000			48		
X.X X.01 .2.05 .04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	12	10,500,000	-		5,000,000		1,008,200		1,390,500	2,276,200		309,100		4,984,000		4,984,000			47		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.X X.01 .2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelayanan administrasi umum		626,268,650		191,645,600		219,240,000		39,682,200		40,445,000		59,349,080		28,605,000		168,081,280		359,726,880		57	
X.X X.01 .2.06 .01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang difasilitasi peralatan penerangan dan kelistrikan kantor	12	11,972,650		1,472,650	12	5,000,000		-		1,875,000		-		375,000		2,250,000		3,722,650		31	
X.X X.01 .2.06 .02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	104,462,000		62,462,000	15	20,000,000		-		-		-		-		-		62,462,000		60	
X.X X.01 .2.06 .05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40000	10,500,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
X.X X.01 .2.06 .06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3	18,720,000		4,100,000	3	6,240,000		-		2,340,000		600,000		90,000		3,030,000		7,130,000		38	
X.X X.01 .2.06 .08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	120	31,500,000		-		15,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
X.X X.01 .2.06 .09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang dihadiri	100	438,614,000		123,610,950	100	163,000,000		39,682,200		36,230,000		58,749,080		28,140,000		162,801,280		286,412,230		65	
X.X X.01 .2.06 .10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	50	10,500,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
X.X X.01 .2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah yang diadakan		78,500,000		-		200,000,000		-		7,500,000		153,219,222		-		160,719,222		160,719,222		205	
X.X X.01 .2.07 .01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	1	10,500,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
X.X X.01 .2.07 .02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	1	10,500,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
X.X X.01 .2.07 .05		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	2	21,000,000		-		10,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
X.X X.01 .2.07 .06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	2	21,000,000		-		170,000,000		-		7,500,000		153,219,222		-		160,719,222		160,719,222		765	
X.X X.01 .2.07 .09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		5,000,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
X.X X.01 .2.07 .10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dn prasarana gedung kantor yang disediakan	1	10,500,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.X X.01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi		387,327,386		102,210,875		138,000,000		27,231,840		30,005,882		28,370,924		30,733,913		116,342,559		218,553,434			56
X.X X.01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	1	244,803,236		64,693,625	1	80,000,000		15,359,770		15,612,292		16,738,654		17,986,123		65,696,839		130,390,464			53
X.X X.01 2.08 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	25	37,700,000		6,200,000	25	15,000,000		1,520,000		4,040,000		1,020,000		2,020,000		8,600,000		14,800,000			39
X.X X.01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	3	104,824,150		31,317,250	3	43,000,000		10,352,070		10,353,590		10,612,270		10,727,790		42,045,720		73,362,970			70
X.X X.01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharanya		253,696,000		73,462,140		85,000,000		18,499,500		16,821,110		17,258,000		16,240,000		68,818,610		142,280,750			56
X.X X.01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi	10	153,930,000		48,930,000	10	50,000,000		13,047,500		12,039,000		11,943,000		11,804,000		48,833,500		97,763,500			64
X.X X.01 2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi	2	73,750,000		19,516,140	2	25,000,000		5,452,000		4,782,110		5,315,000		4,436,000		19,985,110		39,501,250			54
X.X X.01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang difasilitasi pemeliharannya	1	15,516,000		5,016,000	1	5,000,000		-		-		-		-		-		5,016,000			32
X.X X.01 2.09 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang difasilitasi pemeliharannya	1	10,500,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-			0
###		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5,966,219,600		2,290,545,714		1,755,000,000		379,169,300		327,709,200		518,243,800		607,524,000		1,832,646,300		4,123,192,014			69
###		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pendaftaran penduduk		3,919,888,700		1,432,490,614		1,195,000,000		14,941,050		12,998,100		162,240,850		268,563,850		458,743,850		1,891,234,464			48
2.12. 02.2. 01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan layanan pendaftaran penduduk		2,182,200,850		818,309,664		660,000,000		12,735,900		10,743,800		14,958,950		8,028,350		46,467,000		864,776,664			40
2.12. 02.2. 01.0 1		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12	54,679,700		37,679,700	12	20,000,000		-		-		-		-		-		37,679,700			69
2.12. 02.2. 01.0 1		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman dan penerbitan KTP Elektronik Pendaftaran Penduduk	4727	43,600,000		12,100,000	4159	15,000,000		7,726,650		7,710,300		7,923,400		8,028,350		31,388,700		43,488,700			100
2.12. 02.2. 01.0 4		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah petugas Pelayanan Adminduk	50	201,882,150		158,617,150	50	20,000,000		5,009,250		3,033,500		7,035,550		-		15,078,300		173,695,450			86
2.12. 02.2. 01.0 5		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen yang Tercatat dan Diterbitkan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6050	1,858,759,800		598,160,514	5000	600,000,000		-		-		-		-		-		598,160,514			32
2.12. 02.2. 01.0 8		Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk	8	23,279,200		11,752,300	8	5,000,000		-		-		-		-		-		11,752,300			50

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%			15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.12.02.2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan pendaftaran penduduk		1,664,187,850		614,180,950		500,000,000		2,205,150		2,254,300		147,281,900		260,535,500		412,276,850		1,026,457,800		62		
2.12.02.2.02.0		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blangko dan Alat Cetak Dokumen Kependudukan yang Tersedia	30000	1,664,187,850		614,180,950	35000	500,000,000		2,205,150		2,254,300		147,281,900		260,535,500		412,276,850		1,026,457,800		62		
2.12.02.2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Pelayanan Terkait Pendaftaran Penduduk		63,000,000		-		30,000,000		-		-		-		-		-		-		0		
2.12.02.2.03.0		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah masyarakat yang terlayani atas peristiwa kependudukan	5000	21,000,000		-		10,000,000		-		-		-		-		-		-		0		
2.12.02.2.03.0		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	80	42,000,000		-		20,000,000		-		-		-		-		-		-		0		
2.12.02.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Meningkatnya Tata Kelola Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Pendaftaran Penduduk		10,500,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0		
2.12.02.2.04.0		Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan yang diselesaikan tepat waktu	12	10,500,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0		
####		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi pencatatan sipil		689,293,200		434,047,200		120,000,000		163,225,950		122,430,500		219,600,400		230,968,650		736,225,500		1,170,272,700		170		
2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan layanan pencatatan sipil		236,758,000		173,758,000		30,000,000		13,965,450		24,668,100		21,721,650		81,366,700		141,721,900		315,479,900		133		
2.12.03.2.01.0		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 - 18 tahun	2000	21,000,000		-		10,000,000		3,603,600		7,891,300		6,860,600		66,537,900		84,893,400		84,893,400		404		
2.12.03.2.01.0		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelaksanaan pelayanan keliling dan pelayanan hari libur	144	215,758,000		173,758,000	144	20,000,000		10,361,850		16,776,800		14,861,050		14,828,800		56,828,500		230,586,500		107		
2.12.03.2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Meningkatnya koordinasi mengenai kebijakan kependudukan		431,535,200		260,289,200		80,000,000		149,260,500		97,762,400		197,878,750		149,601,950		594,503,600		854,792,800		198		
2.12.03.2.02.0		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dalam pengelolaan pembinaan kerjasama terkait layanan adminduk	5	231,144,000		189,144,000	5	20,000,000		-		-		-		-		-		189,144,000		82		
2.12.03.2.02.0		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan layanan pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	12	62,893,050		17,647,050	12	20,000,000		149,260,500		97,762,400		197,878,750		149,601,950		594,503,600		612,150,650		973		
2.12.03.2.02.0		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	80	42,000,000		-		20,000,000		-		-		-		-		-		-		0		
2.12.03.2.02.1		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kelurahan/Desa yang dikunjungi dalam rangka Dukcapil Menyapa Masyarakat	67	95,498,150		53,498,150	67	20,000,000		-		-		-		-		-		53,498,150		56		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.03.2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Meningkatnya Tata Kelola Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Pencatatan Sipil		21,000,000		-		10,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
2.12.03.2.03.01		Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan yang diselesaikan tepat waktu	12	21,000,000		-		10,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
####		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tersedianya Informasi Kependudukan yang lengkap, Akurat dan Up to date untuk Kepentingan Publik dan Pembangunan		1,257,580,000		408,550,200		400,000,000		197,740,250		183,687,800		133,979,950		105,238,700		620,646,700		1,029,196,900		82	
2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Tercapainya akurasi data kependudukan yang akurat		262,522,450		183,591,950		35,000,000		45,276,500		9,886,950		2,769,550		3,344,000		61,277,000		244,868,950		93	
2.12.04.2.01.01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang disajikan berdasarkan jenis layanan	5	212,484,950		170,484,950	5	20,000,000		45,276,500		9,886,950		2,769,550		3,344,000		61,277,000		231,761,950		109	
2.12.04.2.01.02		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan Jumlah OPD yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan		- 50,037,500		- 13,107,000		- 15,000,000		- -		- -		- -		- -		- -		- 13,107,000		- 26	
2.12.04.2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan kebutuhan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		10,500,000		-		5,000,000		2,673,400		6,934,900		16,923,900		-		26,532,200		26,532,200		253	
2.12.04.2.02.01		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan pertemuan terkait Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk	12	10,500,000		-		5,000,000		2,673,400		6,934,900		16,923,900		-		26,532,200		26,532,200		253	
2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tercapainya koordinasi (bottom up top down) atas koordinasi kependudukan		344,057,550		224,958,250		55,000,000		44,790,350		166,865,950		69,286,500		101,894,700		382,837,500		607,795,750		177	
2.12.04.2.03.01		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan pertemuan korduk capil secara berkala	12	257,898,000		215,898,000	12	20,000,000		3,160,650		145,425,950		68,026,500		101,264,700		317,877,800		533,775,800		207	
2.12.04.2.03.04		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang mengakses data kependudukan	37	10,500,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
2.12.04.2.03.05		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40	10,500,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
2.12.04.2.03.06		Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah PKS dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2	10,500,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-		-		0	
2.12.04.2.03.07		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Kelurahan/Desa yang dikunjungi dalam rangka Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	67	10,500,000		-		5,000,000		41,629,700		21,440,000		1,260,000		630,000		64,959,700		64,959,700		619	
2.12.04.2.03.08		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah data yang disajikan secara berkala	14	44,159,550		9,060,250	14	15,000,000		-		-		-		-		-		9,060,250		21	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I		II		III		IV				12			13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
2.12.04.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Meningkatnya SDM aparat kependudukan		640,500,000	-		305,000,000		105,000,000	-		45,000,000	-			150,000,000		150,000,000			23		
2.12.04.2.04.02		Supervis Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan pertemuan mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	12	10,500,000	-		5,000,000		-	-		-	-			-		-			0		
2.12.04.2.04.03		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayegunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas adminduk	60	630,000,000	-		300,000,000		105,000,000	-		45,000,000	-			150,000,000		150,000,000			24		
####		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Profil Kependudukan Kabupaten/Kota		99,457,700	15,457,700		40,000,000		3,262,050	8,592,800		2,422,600	2,752,800			17,030,250		32,487,950			33		
2.12.05.2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Terwujudnya informasi yang dapat diakses		99,457,700	15,457,700		40,000,000		3,262,050	8,592,800		2,422,600	2,752,800			17,030,250		32,487,950			33		
2.12.05.2.01.01		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku agregat kependudukan yang diterbitkan	100	51,225,950	9,225,950	100	20,000,000		3,262,050	8,592,800		2,422,600	2,752,800			17,030,250		26,256,200			51		
2.12.05.2.01.01		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Inovasi Layanan	Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	1	48,231,750	6,231,750	1	20,000,000		-	-		-	-			-		6,231,750		13			
				2			2																	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendukung keberhasilan Kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian Kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwuan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota berikutnya																								
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran																					
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Laporan Realisasi dan Evaluasi Kinerja																					
	Laporan Capaian Kinerja Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Capaian Kinerja dan Relaisasi Kinerja	100%	27,765,800	100%	26,448,260	100%	27,969,000	44	12,107,850	3,273,410	6,956,790	5,427,750			26,448,260		5,289,652					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah																			-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,843,334,300	92%	1,245,379,300	97%	1,834,143,300		300,668,675	519,604,824	434,104,147	440,701,959		519,604,824	1,764,984,124		352,996,825					
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	16,763,400	100%	31,829,640	100%	20,379,550	27	4,549,000	3,366,450	4,704,950	4,143,000			31,829,640		6,365,928					
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	11,999,900	100%	6,626,150	100%	6,851,200	58	6,999,900	2,500,000	2,500,000	-			6,626,150		1,325,230					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah														-		-			-		
	Sarana Penerangan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kelengkapan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	935,000	98%	752,200	100%	850,000	45	425,000	510,000	-	-		-	752,200		150,440					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pejabat dan Staff Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	3,960,000	100%	6,000,000	100%	3,600,000	-			900,000		1,800,000		1,260,000				6,000,000		1,200,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	118,175,250	98%	85,464,300	100%	115,660,000	45	53,300,000		19,290,000		38,621,741		6,962,000		19,290,000		104,754,300		20,950,860	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														-		-		-		-	
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	24,998,400	80%	20,505,868	80%	24,876,000	24	6,020,197		6,650,263		7,274,027		4,984,013		6,650,263		27,156,131		5,431,226	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	7,852,950	100%	3,000,000	100%	7,300,000	5.2859117	415,100		730,750		4,212,000		2,495,100		730,750		3,730,750		746,150	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	54,746,600	100%	17,939,900	100%	54,488,400	13	6,946,570		3,960,000		6,000,000		37,839,980		3,960,000		21,899,900		4,379,980	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan														-		-		-		-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	100%	74,295,500	99%	68,915,500	99%	94,666,000	21	15,750,000		28,063,645		22,904,000		6,279,500		28,063,645		96,979,145		19,395,829	
		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	70,645,000	100%	2,000,000	100%	3,300,000	0			70,645,000				-		70,645,000		72,645,000		14,529,000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan Angka Kelahiran															-		-		-		-
		Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian															-		-		-		-
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100%	49,999,850												49,999,850							
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBPK	100%	13,950,000	100%	64,829,000	100%	73,999,000	56	7,805,000				6,145,000		-		-		64,829,000		12,965,800	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota			100%		100%										-		-		-		-
		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK disektor Lain	Terbentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK disektor Lain	100%	21,473,600	100%	20,072,100	100%	20,072,100				7,190,000		14,283,600		-		7,190,000		27,262,100		5,452,420	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100%	49,718,600	100%	78,875,000	100%	80,575,000		1,498,600		300,000		8,320,000		1,200,000		300,000		79,175,000		15,835,000	
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	100%	566,385,000	100%	17,230,000	100%	28,110,000		6,800,000		3,285,000		7,100,000		412,400,000		3,285,000		20,515,000		4,103,000	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Penekanan Angka Kelahiran															-		-		-		-

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																-		-			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100%	164,800,000							59,960,000				95,820,000		59,960,000		59,960,000		11,992,000		
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya Biaya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	100%	324,000,000	100%	805,399,200	100%	732,524,200	0		199,000,000		83,549,700		35,768,125		199,000,000		1,004,399,200		200,879,840		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)															-		-		-		
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pertemuan dan Sosialisasi	100%	378,000,000	100%	632,533,700	100%	632,533,700	0		126,000,000		126,000,000		126,000,000		126,000,000		758,533,700		151,706,740		
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terselenggaranya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%	1,002,415,000	100%	909,802,354	100%	910,778,500	0		464,650,000		190,840,000		341,600,000		464,650,000		1,374,452,354		274,890,471		
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota															-		-		-		
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Kegiatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	192,563,800	100%	97,649,500	100%	569,577,111	0		132,510,000		19,200,000		32,282,000		132,510,000		230,159,500		46,031,900		
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	1,177,676,950	97%	1,520,738,200	100%	1,110,311,000		29,130,100			152,839,000		972,232,200		-		1,520,738,200		304,147,640		
		Pemberdayaan dan Peningkatan peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															-		-		-		
		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	155,260,500	100%	121,420,900	100%	121,420,900		1,000,000	103,445,850		4,000,000		46,813,565		103,445,850		224,866,750		44,973,350		
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terselaksananya Pertemuan di Kampung KB	100%	207,000,000	100%	412,540,000	100%	412,540,000	0		100,080,000				-		100,080,000		512,620,000		102,524,000		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga															-		-		-		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															-		-		-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatn Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPPKS)	Tersedianya Sarana Kelompok Kegiatn Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPPKS)	100%	167,500,000				167,400,000						167,350,000		-		-		-		-	
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPPKS)	100%	27,797,350				26,297,550			27,797,350			-		27,797,350		27,797,350		27,797,350		5,559,470	
		Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														-		-		-		-	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPPKS)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPPKS)	100%	607,528,000				281,182,700			235,648,000			148,000,000		235,648,000		235,648,000		235,648,000		47,129,600	
JUMLAH					7,361,540,750		6,195,951,072		7,361,405,211		453,415,992		2,116,350,542		1,141,864,955		2,942,059,042		2,108,810,682					
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
DINAS PERHUBUNGAN																								
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD		Nilai Sakip																					
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bidang Dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantoran																					Dinas Perhubungan
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan	90%	43,458,547	90%	5,098,500	90%	15,979,200	22%	4,924,500	22%	5,054,500	22%	3,000,000	24%	3,000,000	90%	15,979,000	180%	21,077,500	200%	49%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3,471,932,600	100%	2,749,790,600	100%	2,749,790,600	25%	622,281,434	25%	755,348,646	25%	462,806,409	25%	623,439,714	100%	2,463,876,203	200%	5,213,666,803	200%	150%	
		Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset	100%	95,000,000	100%	60,464,650	100%	35,301,800	25%	9,111,000	25%	8,879,850	25%	6,570,100	25%	10,737,000	100%	35,297,950	200%	95,762,600	200%	101%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Dinas Perhubungan yang Mengikuti Diklat Pendidikan dan Pelatihan formal	60%	150,000,000	60%	14,956,250	0%	15,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	60%	-	14,956,250	100%	10%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										I				II											III				IV			
										8		9		10		11									12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15								
		Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Penggantian Komponen Peralatan Listrik	100%	9,840,000	100%	5,666,000	100%	2,444,500	0%	-	50%	1,399,500	0%	-	50%	1,045,000	100%	2,444,500	200%	8,110,500	200%	82%									
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang - undangan	100%	20,700,000	100%	4,280,000	100%	3,900,000	25%	460,000	25%	1,080,000	25%	660,000	25%	1,550,000	100%	3,750,000	200%	8,030,000	200%	39%									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	100%	195,000,000	100%	173,600,000	100%	128,446,000	25%	34,483,399	25%	46,280,200	25%	24,131,484	25%	23,479,607	100%	128,374,690	200%	301,974,690	200%	155%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	225,042,327	100%	8,621,000	100%	8,621,000	0%	-	100%	8,160,000	0%	-	0%	-	100%	8,160,000	200%	16,781,000	200%	7%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan Telepon	100%	55,200,000	100%	2,373,100	100%	24,423,545	25%	1,082,000	25%	1,727,725	25%	3,579,775	25%	7,621,545	100%	14,011,045	200%	16,384,145	200%	30%									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Upah Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	100%	30,000,000	100%	25,110,800	100%	33,483,560	25%	6,118,970	25%	10,376,280	25%	8,613,940	25%	8,368,850	100%	33,478,040	200%	58,588,840	200%	195%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	69,000,000	100%	68,330,000	100%	62,550,000	25%	3,749,327	25%	12,921,953	25%	14,660,000	25%	23,482,610	100%	54,813,890	200%	123,143,890	200%	178%									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	731,000,000	100%	605,018,070	100%	49,630,000	25%	5,485,000	25%	9,015,000	25%	8,610,000	25%	20,115,840	100%	43,225,840	200%	648,243,910	200%	89%									
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	100%	40,250,000	100%	11,180,700	100%	6,660,000	25%	1,500,000	25%	3,230,000	25%	-	25%	1,900,000	100%	6,630,000	200%	17,810,700	200%	44%									
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi yang Aman, Nyaman dan Lancar																															
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelayakan Terminal Angkutan																													
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																														
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten/Kota	100%	321,000,000	80%	119,733,750	80%	869,191,681	0%	-	0%	-	0%	-	50%	413,276,500	50%	413,276,500	130%	533,010,250	130%	166%									
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Rambu, Traffic Light dan Lampu Jalan	80%	1,002,750,000	80%	19,025,000	80%	910,363,190	20%	24,195,450	20%	660,312,950	20%	91,652,227	20%	128,860,542	80%	905,021,169	160%	924,046,169	200%	92%									
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C																														
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Meningkatnya Operasional Penoperasi Terminal	70%	919,571,500	70%	198,425,000	70%	236,853,200	20%	43,641,600	18%	70,745,900	20%	61,014,900	12%	49,519,800	70%	224,922,200	140%	423,347,200	200%	46%									
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																														
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Berupa Kartu Uji dan Tanda Uji	80%	215,000,000	80%	93,366,500	80%	177,949,000	20%	34,810,435	20%	39,826,922	20%	38,911,722	20%	56,670,962	80%	170,220,041	160%	263,576,541	200%	123%									
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																														

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	70%	889,000,000	70%	679,613,650	70%	683,592,400	18%	119,960,000	18%	223,626,000	18%	169,976,000	16%	168,218,400	70%	681,780,400	140%	1,361,394,050	200%	153%	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																						
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kapal Pelayaran Rakyat	100%	690,000,000	100%	158,238,250	100%	240,389,984	25%	34,120,000	25%	64,440,000	25%	55,394,200	25%	67,169,000	100%	221,123,200	200%	379,361,450	200%	55%	
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																						
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan	70%	70,000,000	70%	11,390,100	70%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	70%	11,390,100	100%	16%	
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															0%	-						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Peningkatan Keterlibatan dan Peleyanan Lalu Lintas	80%	106,684,000	100%	44,616,600	80%	235,194,500	20%	43,863,400	20%	75,550,196	20%	57,608,100	20%	58,128,000	80%	235,149,696	180%	279,766,296	225%	262%	
							5,058,888,520		6,489,764,160															
Rata - Rata Capaian Kinerja																		90.53%	5,661,534,364	190.52%	10,720,422,884	208.16%	107.52%	
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	12,737,363,200	100%	2,217,327,731	100 Persen	2,328,750,732	40%	381,444,341	75%	1,055,137,530	87%	1,614,524,962	100%	2,248,844,309	100%	2,248,844,309	100%	4,466,172,040	100%	35%	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya penyusunan laporan kegiatan OPD	100%	146,295,700	100%	32,886,500	100 Persen	17,280,000	30%	3,250,000	55%	6,762,000	75%	12,658,500	100%	17,779,800	100%	17,779,800	100%	50,666,300	100%	35%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100%	8,218,567,500	100%	1,875,290,061	100 Persen	2,065,736,924	46%	344,387,341	65%	925,580,930	81%	1,393,232,402	100%	1,879,641,949	100%	1,879,641,949	100%	3,754,932,010	100%	46%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi barang Milik Daerah pada OPD	100%	51,250,000	0%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk Pengembangan SDM Aparatur	75%	428,500,000	0%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan persuratan	100%	1,180,500,000	97%	86,606,350	100 Persen	130,893,100	24%	16,970,000	48%	67,725,100	76%	121,338,560	100%	140,844,560	100%	140,844,560	99%	227,450,910	99%	19%	
		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	terpenuhinya Kebutuhan Barang dalam menunjang Urusan OPD	95%	1,555,750,000	0%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan operasional Dinas secara optimal	100%	442,750,000	100%	41,961,920	100 Persen	43,801,808	24%	5,485,000	48%	14,062,000	73,5%	27,088,000	100%	39,316,500	100%	39,316,500	100%	81,278,420	100%	18%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan operasional Dinas secara optimal	100%	713,750,000	100%	180,582,900	100 Persen	71,038,900	24%	11,352,000	48%	41,007,500	66,666,666	60,207,500	100%	171,261,500	100%	171,261,500	100%	351,844,400	100%	49%	
1	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mendukung pelayanan publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Informasi, Komunikasi Publik dan Pengaduan Masyarakat secara Elektronik	100%	15,114,215,400	100%	2,255,652,650	100 Persen	1,483,420,000	40%	373,653,500	66,666,666	1,008,885,500	89,785%	1,344,546,050	100%	1,877,765,850	100%	1,877,765,850	100%	4,133,418,500	100%	27%	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	100%	15,114,215,400	100%	2,255,652,650	100 Persen	1,483,420,000	40%	373,653,500	66,666,666	1,008,885,500	89,785%	1,344,546,050	100%	1,877,765,850	100%	1,877,765,850	100%	4,133,418,500	100%	27%		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik	3.60	35,839,575,000	2.28	1,286,109,600	2,5 Indeks	2,377,055,113	-	375,532,200	-	916,410,766	-	1,583,412,566	2.29	2,413,095,476	2.29	2,413,095,476	2.29	3,699,205,076	63%	10%		
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Saluran Data/Informasi yang tepat, cepat dan akurat	100%	20,613,387,500	95%	77,113,500	60 Persen	81,020,000	18%	5,116,000	34%	17,707,166	46%	22,649,166	60%	144,593,396	60%	144,593,396	78%	221,706,896	78%	1%		
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Kualitas tata kelola penyelenggaraan e-Government daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	100%	15,226,187,500	99%	1,208,996,100	80 Persen	2,296,035,113	24%	370,416,200	45%	898,703,600	65%	1,560,763,400	80%	2,268,502,080	80%	2,268,502,080	90%	3,477,498,180	90%	23%		
2	Terwujudnya ketersediaan data statistik yang berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase tersedianya Data Statistik Daerah Yang Lengkap Dan Akurat	85%	1,535,250,000	85%	46,404,650	40 Persen	49,999,650	25%	6,930,400	30%	13,393,400	36%	25,174,200	40%	48,321,200	40%	48,321,200	63%	94,725,850	74%	6%	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan data statistik daerah yang lengkap dan akurat	85%	1,535,250,000	85%	46,404,650	40 Persen	49,999,650	25%	6,930,400	30%	13,393,400	36%	25,174,200	40%	48,321,200	40%	48,321,200	63%	94,725,850	74%	6%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	Terwujudnya aplikasi yang aman	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Komunikasi daerah yang Memanfaatkan Persandian	100%	2,895,169,525	97%	126,211,000	40 Persen	120,422,730	10%	10,618,100	20%	21,223,100	30%	72,215,600	40%	99,684,600	40%	99,684,600	69%	225,895,600	69%		8%	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi	100%	2,252,363,908	93%	100,099,450	100 Persen	105,053,230	26%	9,140,700	50%	17,888,600	80%	61,764,100	100%	84,675,100	100%	84,675,100	97%	184,774,550	97%		8%	
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengamanan berita dan informasi	100%	642,805,618	100%	26,111,550	100 Persen	15,369,500	26%	1,477,400	50%	3,334,500	80%	10,451,500	100%	15,009,500	100%	15,009,500	100%	41,121,050	100%		6%	
					68,121,573,125		5,931,705,631		6,359,648,225		1,148,178,541		3,015,050,296		4,639,873,378		6,687,711,435		6,687,711,435		12,619,417,066				
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN																									
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD		40,000,000				10,371,000.00	23%	2,421,000.00	22%	2,257,000.00	43%	4,493,000.00	12%	1,200,000.00	100%	10,371,000	100%	10,371,000.00	20%	2,074,200.00		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pokok yang disusun		45,000,000																				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Pokok yang disusun tepat waktu		35,000,000																				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Pokok yang disusun tepat waktu		35,000,000																				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun tepat waktu		35,000,000																				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja PD	100%	40,000,000	100%	20,519,000.00		10,726,000.00	31%	3,326,000	9%	1,000,000	37%	4,000,000.00	22%	2,400,000.00	100%	10,726,000	200%	31,245,000.00	40%	6,249,000.00		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD		40,000,000															0%	-	0%	-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu																	0%	-	0%	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3,000,000,000	83%	2,017,961,799	100%	2,573,365,300.00	11%	286,818,109	33%	852,136,627	31%	797,742,498.00	15%	385,226,628.00	90%	2,321,923,862	173%	4,339,885,661.00	35%	867,977,132.20		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		25,000,000															0%		0%	-		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	100%	30,000,000	100%	12,889,400.00	1	9,119,900.00	27%	2,491,400.00	15%	1,410,600.00	42%	3,850,000.00	15%	1,360,400.00	100%	9,112,400	200%	22,001,800.00	40%	4,400,360.00		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		25,000,000															0%		0%	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1	20,000,000	1	7,167,900.00	1	3,907,900.00	100%	3,907,900.00	0%						100%	3,907,900	200%	11,075,800.00	40%	2,215,160.00		
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		25,000,000															0%		0%	-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran yang tersusun		35,000,000													0%		0%		-		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		25,000,000													0%		0%		-		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan															0%		0%		-		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang milim daerah SKPD		30,000,000													0%		0%		-		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dikelola		30,000,000													0%		0%		-		
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		30,000,000													0%		0%		-		
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		30,000,000													0%		0%		-		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang milik daerah pada SKPD		35,000,000													0%		0%		-		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen barang milik daerah Perangkat Daerah		40,000,000													0%		0%		-		
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		30,000,000													0%		0%		-		
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															0%		0%		-		
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		30,000,000													0%		0%		-		
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		30,000,000													0%		0%		-		
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		30,000,000													0%		0%		-		
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		30,000,000													0%		0%		-		
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah		30,000,000													0%		0%		-		
		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		30,000,000													0%		0%		-		
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah		55,000,000													0%		0%		-		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Kepegawaian pada Perangkat Daerah															0%		-	0%		-	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		30,000,000													0%			0%		-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia		30,000,000													0%			0%		-	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaian		30,000,000													0%			0%		-	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		30,000,000													0%			0%		-	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring dan Penilaian Kinerja Pegawai		30,000,000													0%			0%		-	
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegai yang Pensiun		30,000,000													0%			0%		-	
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		30,000,000													0%			0%		-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										I				II											III				IV			
										8		9		10		11									12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15								
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang Pindah Tugas	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi		30,000,000															0%		0%	-									
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Pertauran Perundang-undangan		150,000,000															0%		0%	-									
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-undangan		40,000,000															0%		0%	-									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		75,000,000			2,430,000.00	0%	0	0%	-						-	0%	-	0%	0%	-									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang tersedia		30,000,000			4,054,000.00	39%	1,579,500.00	61%	2,474,500.00			-			100%	4,054,000	100%	4,054,000.00	20%	810,800.00									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		35,000,000															0%		0%	-									
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		50,000,000															0%		0%	-									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia		50,000,000															0%		0%	-									
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		25,000,000															0%		0%	-									
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	25,000,000	73%	10,805,000.00	9,360,000.00	33%	3,060,000	34%	3,160,000	0%			34%	3,140,000.00	100%	9,360,000	173%	20,165,000.00	35%	4,033,000.00									
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material		20,000,000															0%		0%	-									
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi		60,000,000															0%		0%	-									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Perjalanan Dinas	12	550,000,000	100%	143,944,000.00	193,416,000.00	23%	43,900,000	28%	54,609,600	19%	36,117,039.00	30%	58,755,480.00	100%	193,382,119	200%	337,326,119.00	40%	67,465,223.80										
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Yang tersedia		50,000,000															0%		0%	-									
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		42,500,000															0%		0%	-									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	0%	-	0%	-									
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan		600,000,000															0%		0%	-									
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas		70,000,000															0%		0%	-									
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Peralatan Besar		50,000,000															0%		0%	-									
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan darat Tak Bermotor		40,000,000															0%		0%	-									
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		25,000,000															0%		0%	-									
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang diadakan	2	80,000,000	100%	45,378,000.00	4,317,100.00	100%	4,317,100.00	0%							100%	4,317,100	200%	49,695,100.00	40%	9,939,020.00									
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan		50,000,000															0%		0%	-									
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya yang diadakan		35,000,000															0%		0%	-									
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumah Pengadaan Gedung		50,000,000															0%		0%	-									
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia		70,000,000															0%		0%	-									
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung Kantor		70,000,000															0%		0%	-									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintahan																	0%	-	0%	-									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar		6,500,000															0%		0%	-									

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	150,000,000	63%	52,875,880.00		91,408,000.00	19%	17,227,743.00	16%	14,206,077.00	25%	23,234,061.00	16%	14,729,252.00	76%	69,397,133	139%	122,273,013.00	28%	24,454,602.60	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		70,000,000														0%		0%	-		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	120,000,000	100%	80,654,848.00		54,783,050.00	25%	13,725,050.00	16%	8,525,000.00	40%	21,753,000.00	20%	10,780,000.00	100%	54,783,050	200%	135,437,898.00	40%	27,087,579.60	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																0%	-	0%	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya pajak kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1	49,630,000	99%	49,380,000.00		49,630,000.00	17%	8,408,016.00	44%	21,627,180.00	27%	13,484,907.00	12%	6,050,000.00	100%	49,570,103	199%	98,950,103.00	40%	19,790,020.60	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	5	70,000,000	0.527785635	27703468	5	51,996,000.00	18%	9,429,000.00	25%	12,873,683.00	38%	19,912,596.00	17%	8,987,524.00	98%	51,202,803	151%	78,906,271.00	30%	15,781,254.20	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		35,000,000														0%		0%	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		22,500,000														0%		0%	-		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel		25,000,000														0%		0%	-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	32	25,000,000	99%	5,430,000.00		4,820,000.00	25%	1,200,000	0.07	350,000.00	0%		68%	3,270,000.00	100%	4,820,000	199%	10,250,000.00	40%	2,050,000.00	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang terpelihara		30,000,000														0%		0%	-		
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang terpelihara		20,000,000														0%		0%	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	250,000,000	95%	15,274,500.00	1	15,202,500.00	0	0		0	100%	15,202,500.00		-	100%	15,202,500	195%	30,477,000.00	39%	6,095,400.00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30,000,000														0%		0%	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		40,000,000														0%		0%	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		40,000,000														0%		0%	-		
	Meningkatnya Keaktifan, kinerja dan Produktivitas Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam																0%		0%	-		
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																0%		0%	-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		85,000,000													0%		0%		-		
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															0%		0%		-		
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		80,000,000													0%		0%		-		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Diawasi dan Diperiksa															0%		0%		-		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota															0%		0%		-		
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100,000,000													0%		0%		-		
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		100,000,000													0%		0%		-		
	Meningkatnya Keaktifan, kinerja dan Produktivitas Koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Kriteria Sehat															0%	-	0%		-		
																		0%	-	0%		-		
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															0%	-	0%		-		
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Kop	200,000,000	75%	33,019,000.00	30	18,537,800.00	11%	2,096,500.00	24%	4,377,700.00	51%	9,443,600.00	13%	2,400,000.00	99%	18,317,800	174%	51,336,800.00	35%	10,267,360.00	
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Kop	200,000,000	45%	32,155,850.00	30	43,040,000.00	5%	2,342,000.00	12%	4,975,000.00	33%	14,083,000.00	50%	21,640,000.00	100%	43,040,000	145%	75,195,850.00	29%	15,039,170.00	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi Aktif Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian															0%	-	0%		-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola dan Pengurus Koperasi Yang Dilatih															0%	-	0%	-			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	25 Kop	500,000,000	100%	412,045,350.00		400,800,000.00			50%	199,254,200.00	0%		50%	201,545,800.00	100%	400,800,000	200%	812,845,350.00	40%	162,569,070.00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Koperasi															0%	-	0%	-			
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota															0%	-	0%	-			
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Kop	200,000,000	83%	31,201,250.00											83%	31,201,250.00	17%	6,240,250.00			
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM Yang di Berdayakan															0%	-	0%	-			
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan															0%	-	0%	-			
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		350,000,000	94%	467,961,350		30,393,600.00			6%	1,800,000.00	41%	12,438,600.00	53%	16,155,000.00	100%	30,393,600	194%	498,354,950.00	39%	99,670,990.00	
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		300,000,000													0%		0%	-			
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UKM Yang Difasilitasi Perizinan	10 UKM	270,000,000	81%	150,575,000.00		63,268,500.00			3%	1,800,000.00	3%	1,800,000.00	57%	35,938,500.00	62%	39,538,500	144%	190,113,500.00	29%	38,022,700.00	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2 Kali	400,000,000	87%	486,184,400.00	75 ukm	168,734,600.00	0%		12%	20,110,000.00	32%	54,728,700.00	21%	35,795,900.00	66%	110,634,600	152%	596,819,000.00	30%	119,363,800.00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		500,000,000													0%	-	0%	-			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah UKM Yang Mengikuti Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	25 UKM					200,000,000	0%		0%		0%		100%	199,922,376.00	100%	199,922,376	100%	199,922,376.00	20%	39,984,475.20	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Terfasilitasi Pengembangan Usaha															0%	-	0%	-			
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil															0%	-	0%	-			
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah yang Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	64 UKM	5,500,000,000	80%	3,449,775,650.00	95%	3,012,638,700.00	0.3%	8,604,800.00	7%	224,195,720.00	6.4%	193,010,280.00	85%	2,551,127,900.00	99%	2,976,938,700	178%	6,426,714,350.00	36%	1,285,342,870.00	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		0%	-	0%	-	
		Perdagangan																		0%	-	0%	-	
	Meningkatnya Pertumbuhan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi																	0%		0%	-	
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan																	0%		0%	-	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250 Reko	200,000,000	42%	36,095,950.00	95%	58,687,500.00	12%	6,765,100.00	9%	5,450,000.00	0.52383216	30,742,400.00	0.131715	7,730,000.00	86%	50,687,500	128%	86,783,450.00	26%	17,356,690.00	
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang																	0%		0%	-	
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang	3 TDG	150,000,000	0.546682412	12059650	3 TDG	25,120,300.00	0%		52%	13,138,550.00	29%	7,364,250.00	2%	530,000.00	84%	21,032,800	138%	33,092,450.00	28%	6,618,490.00	
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba																	0%		0%	-	
		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Secara Elektronik		40,000,000															0%		0%	-	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		40,000,000															0%		0%	-	
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba																	0%		0%	-	
		Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Tersedianya Sistem Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Secara Elektronik		40,000,000															0%		0%	-	
		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba		40,000,000															0%		0%	-	
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat																	0%		0%	-	
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		70,000,000															0%		0%	-	
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	0%		0%	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pemantauan Penyimpanan Bahan Berbahaya		150,000,000													0%		0%	-			
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Pemantauan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2		120,000,000													0%		0%	-			
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		85,000,000													0%		0%	-			
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)															0%		0%	-			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		80,000,000													0%		0%	-			
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan Dalam Keadaan Baik															0%		0%	-			
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan sarana Perdagangan dan Yang Dikelolah															0%		0%	-			
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan dibangun/Revitalisasi	1 Unit	2,000,000,000	40%	309,289,138.00	95%	591,259,200.00	2%	14,530,000.00	5%	28,407,900.00	12%	73,510,550.00	80%	474,699,600.00	100%	591,148,050	140%	900,437,188.00	28%	180,087,437.60	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Pasar	650,000,000	83%	274,653,870.00	95%	268,444,200.00			19%	50,561,600.00	54%	145,536,600.00	13%	33,940,000.00	86%	230,038,200	169%	504,692,070.00	34%	100,938,414.00	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya															0%		0%	-			
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		300,000,000													0%		0%	-			
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		80,000,000													0%		0%	-			
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting															0%		0%	-			
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan/Pengecekan Ketersediaan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Agen															0%		0%	-			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan/Pengecekan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		150,000,000													0%		0%	-			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pemanauan Peningkatan Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		90,000,000													0%		0%	-			
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Paket Murah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 8 Kecamatan		500,000,000													0%		0%	-			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I		II		III		IV											
							8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota															0%		0%		-		
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga Barang dan Kebutuhan Penting Lainnya Tingkat Distributor	12 Bapok	120,000,000	52%	63,371,550.00	95%	128,175,400.00	14%	17,396,100.00	18%	22,894,250.00	26%	33,649,250.00	42%	53,750,000.00	100%	127,689,600	152%	191,061,150.00	30%	38,212,230.00	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pengendalian Harga Barang dan Kebutuhan Penting Lainnya Pada Pasar Rakyat		130,000,000													0%		0%		-		
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		80,000,000													0%		0%		-		
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															0%		0%		-		
		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		80,000,000													0%		0%		-		
		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pemantauan Ketersediaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		150,000,000													0%		0%		-		
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pemantauan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		90,000,000													0%		0%		-		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pengembangan Ekspor															0%		0%		-		
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															0%		0%		-		
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		200,000,000													0%		0%		-		
		Pameran Dagang Nasional	Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional		600,000,000													0%		0%		-		
		Pameran Dagang Lokal	Pelaksanaan Pameran Dagang Lokal		100,000,000													0%		0%		-		
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaksanaan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		100,000,000													0%		0%		-		
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor		100,000,000													0%		0%		-		
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		75,000,000													0%		0%		-		
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen															0%		0%		-		
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan															0%		0%		-		
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP Yang Bertanda Tera Sah Pada Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1 Unit	850,000,000	0.152271112	111,680,213.00	95%	562,947,790.00	1.5%	8,716,360.00	39%	219,462,810.00	6%	34,482,600.00	53%	299,879,040.00	100%	562,540,810	51%	674,221,023.00	10%	134,844,204.60	
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pasar/Pedagang Yang diawasi/diberikan Penyuluhan Metrologi Legal		90,000,000													0%		0%		-		
		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Penyidikan Metrologi Legal		60,000,000													0%		0%		-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi dalam Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri															0%		0%	-			
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri															0%		0%	-			
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		700,000,000													0%		0%	-			
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		700,000,000													0%		0%	-			
					300,000,000													0%		0%	-			
JUMLAH				25,576,130,000		21	8,360,052,016	76	8,660,954,340	5	462,261,678	6	1,771,057,997	8	1,550,579,431	9	4,430,953,400	27	8,214,852,506	48	16,574,904,522	10	3,314,980,904	-
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)						78%		541%		21%		19%					95%		28%		6%			
Predikat Kinerja																								
A	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							
B	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																							
C	tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																							
D	tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya																							
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur penanaman modal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26,879,000,000		12,212,111,270		7,209,637,593		948,176,073		2,675,811,614		1,296,437,043			5,861,443,620		18,073,554,890				
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% capaian perencanaan yg tersusun dalam Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	95	1,650,000,000		142,654,300		84,019,610		14,310,000		33,207,880		19,422,180			83,217,610		225,871,910				
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan IKU	5	325,000,000	3	26,782,300	1	9,999,950	1	2,000,000	-	7,922,250		-	-	-	1	9,922,250	4	36,704,550	80	11.29	
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5	500,000,000	3	48,290,000	1	32,144,900	-	3,000,000	1	12,294,200	-	10,211,900	-	6,634,500	1	32,140,600	4	80,430,600	80	16.09	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Rka Perubahan	20	325,000,000	8	50,082,000	4	35,874,760	1	3,310,000	1	12,991,430	1	9,210,280	1	9,643,050	4	35,154,760	12	85,236,760	60	26.23	
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJ, Perjanjian Kinerja	5	500,000,000	2	17,500,000	1	6,000,000	1	6,000,000		-		-	-	-	1	6,000,000	3	23,500,000	60	4.70	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi Keuangan Daerah	95	13,835,000,000		4,504,490,341		2,353,014,560		400,974,492		655,840,948		526,708,969			2,161,926,328		6,666,416,669				
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya dokumen administrasi Gaji dan Tunjangan	60	12,900,000,000	36	4,422,087,341	12	2,250,645,700	3	379,227,312	3	627,155,358	3	505,598,029		547,577,119	9	2,059,557,818	45	6,481,645,159	75	50.25	
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pengelola keuangan SKPD	60	340,000,000	36	57,733,000	12	33,734,150	3	3,600,000	3	9,687,790	3	9,730,360	3	10,716,000	12	33,734,150	48	91,467,150	80	26.90	
2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	5	250,000,000	0	-	1	21,964,850	1	900,000		6,782,200		600,000		13,682,650	1	21,964,850	1	21,964,850	20	8.79	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5	95,000,000	3	24,670,000	1	12,335,000	1	6,615,000	-	5,720,000	-	-	-	-	1	12,335,000	4	37,005,000	80	38.95	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	5	250,000,000	0	-	1	34,334,860	1	10,632,180		6,495,600		10,780,580		6,426,150	1	34,334,510	1	34,334,510	20	13.73	
2		Administrasi Barang Milik daerah Perangkat Daerah	Tersedianya sarana umum	85	319,000,000		-		100,937,350		21,000,000		26,063,100		26,244,250			100,937,350		100,937,350				
2		Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah Barang Milik daerah	12	240,000,000	0	-	12	78,177,500	3	18,000,000	3	20,217,250	3	18,000,000	3	21,960,250	12	78,177,500	12	78,177,500			
2		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik daerah	10	79,000,000	0	-	2	22,759,850	-	3,000,000	1	5,845,850		8,244,250	1	5,669,750	2	22,759,850	-	22,759,850			
2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya sarana umum	85		-			30,000,000		12,007,450		5,817,850		8,410,600			30,000,000		30,000,000				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Pegawai	170	105,000,000	0	-	35	30,000,000	-	12,007,450	15	5,817,850	20	8,410,600	-	3,764,100	35	30,000,000	-	30,000,000	-	-	
2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana umum	85	1,415,000,000		280,256,364		331,195,000		61,099,000		69,787,558		92,617,764		296,785,332		577,041,696					
2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75	80,000,000	49	25,000,000	49	42,530,000	21	9,000,000	10	8,326,000	10	10,035,000	8	9,836,500	49	37,197,500	98	62,197,500	131	77.75	
2		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	50	30,000,000	0	-	20	34,760,000	5	600,000	5	1,900,000	-	-	10	6,900,000	20	9,400,000	20	9,400,000	40	31.33	
2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	200	1,305,000,000	120	255,256,364	120	253,905,000	10	51,499,000	25	59,561,558	65	82,582,764	20	56,544,510	120	250,187,832	240	505,444,196	120	38.73	
2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90	750,000,000	48	2,639,127,750		1,044,154,580		334,840,000		99,720,000		243,978,000		678,538,000		3,317,665,750					
2		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yg tersedia	50	750,000,000	36	854,222,500	36	75,005,100	-	-						-	-	36	854,222,500	72	113.90		
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	-	-	12	1,784,905,250	12	969,149,480	-	334,840,000	1	99,720,000	9	243,978,000	-	10	678,538,000	22	2,463,443,250	-	-		
2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pelayanan penunjang pemerintahan	90	3,369,000,000	572	842,672,958		771,519,970		84,125,078		188,727,184		167,200,879		604,362,154		1,447,035,112					
2		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	550	117,000,000	500	23,922,000	500	44,542,500	110	6,807,500	110	-	200	-	80	37,734,900	500	44,542,400	1,000	68,464,400	182	58.52	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan, telepon, air dan listrik	60	2,395,000,000	36	484,464,758	36	354,345,560	3	32,822,998	3	91,233,974	3	45,975,879	27	66,999,193	36	237,032,044	72	721,496,802	120	30	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	60	857,000,000	36	334,286,200	36	372,631,910	3	44,494,580	3	97,493,210	3	121,225,000	27	59,574,920	36	322,787,710	72	657,073,910	120	76.67	
2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	95	5,541,000,000		3,782,909,557		2,488,796,523		13,820,053		1,596,647,094		211,854,401		1,899,676,846		5,682,586,403					
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan yg tersedia	95	600,000,000	86%	153,028,253	86%	101,741,000	9	9,550,053	10	15,395,763	35	16,094,151	32	18,220,298	86	59,260,265	87	212,288,518	92	35.38	
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yg tersedia	95	390,000,000	86%	26,560,000	86%	47,580,000	15	4,270,000	20	6,700,000	35	7,455,000		6,235,000	70	24,660,000	71	51,220,000	75	13.13	
2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung yg tersedia	90	4,551,000,000	81%	3,603,321,304	81%	2,339,475,523	5	-		1,574,551,331	45	188,305,250	20	52,900,000	70	1,815,756,581	71	5,419,077,885	79	119.07	
2		Penataan Organisasi	Jumlah laporan kinerja yg tersusun	5	-	3	20,000,000		6,000,000		6,000,000		-		-		6,000,000		26,000,000					
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kinerja yg tersusun	5	-	3	20,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000						6,000,000	4	26,000,000	80	-			
2	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal yang berdampak saling	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kajian pemetaan potensi sektor prioritas, profil proyek yg siap ditawarkan		4,110,000,000		270,864,950		487,104,000		124,607,640		106,591,360		107,805,496		483,808,996		543,006,950					
2		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiayai Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemberian insentif/ fasilitas	90	2,000,000,000		43,780,000		277,104,000		79,308,900		68,570,600		107,805,496		275,924,996		108,038,000					
		Penetapan Kebijakan daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah pemberian insentif/ fasilitas	90	1,000,000,000	0%	-	85%	212,104,000	50	57,630,900	20	68,570,600	10	74,665,496		10,800,000	80	211,666,996	-	-			
2		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah pemberian insentif/ fasilitas	90	1,000,000,000	86%	43,780,000	85%	65,000,000	50	21,678,000	20	-	10	33,140,000		9,440,000	80	64,258,000	81	108,038,000	90	10.80	
2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya peta potensi Kab. Bantaeng	90	2,110,000,000	170	227,084,950		210,000,000		45,298,740		38,020,760				207,884,000		434,968,950					
2		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUP	90	1,110,000,000	86%	90,918,350	85%	150,000,000	30	30,401,140	15	32,152,360	35	74,043,000		11,392,500	80	147,989,000	81	238,907,350	90	21.52	
2		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha	90	1,000,000,000	86%	136,166,600	85%	60,000,000	30	14,897,600	15	5,868,400	35	35,329,000		3,800,000	80	59,895,000	81	196,061,600	90	19.61	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatnya daya tarik, minat investasi penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah minat Investasi		4,700,000,000		1,148,868,808		951,601,870		153,927,170		134,825,636		221,299,400				863,899,406		2,012,768,214			
2		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kerjasama investasi antar pemerintah dan dunia usaha baik dalam dan luar negeri	90	4,700,000,000		1,148,868,808		951,601,870		153,927,170		134,825,636		221,299,400				863,899,406		2,012,768,214			
2		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana prasarana promosi yg disiapkan	90	1,000,000,000	10%	168,804,400	75%	356,602,000	10	103,137,300	10	14,977,600	20	31,723,300		194,502,000	40	344,340,200	40	513,144,600	45	51.31	
2		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran investasi	90	3,700,000,000	10%	980,064,408	75%	594,999,870	10	50,789,870	10	119,848,036	20	189,576,100		159,345,200	40	519,559,206	40	1,499,623,614	45	40.53	
2	Terpenuhinya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan responsif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah izin yg diterbitkan sesuai SOP		4,350,000,000		722,336,510		622,296,100		129,047,820		29,674,300		219,472,130				510,290,450		1,232,626,960			
2		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin yg diterbitkan sesuai SOP, indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan	90	4,350,000,000	14,179	722,336,510		622,296,100		129,047,820		29,674,300		219,472,130				510,290,450		1,232,626,960			
2		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	terlaksananya administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan	10,000	2,350,000,000	7064	578,810,037	2000 izin dan non izin	449,999,700	920	99,530,810	100	25,369,900	1,335	172,534,690		80,762,650	2,355	378,198,050	9,419	957,008,087	94	40.72	
2		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan	8	500,000,000	24	30,679,400	8 Kec	31,998,660	-	8,537,160	3	996,600	2	7,800,900		2,580,000	5	19,914,660	29	50,594,060	363	10.12	
2		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terselesaikanya pengaduan penanaman modal	50	500,000,000	27	67,301,173	10 pengaduan	44,999,980	2	9,829,530	2	1,167,900	2	16,327,550		1,300,000	6	28,624,980	33	95,926,153	66	19.19	
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	10000	1,000,000,000	7064	45,545,900	2000 izin dan non izin	95,297,760	920	11,150,320	100	2,139,900	1,335	22,808,990		47,453,550	2,355	83,552,760	9,419	129,098,660	94	12.91	
2	Meningkatnya realisasi investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkat kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal		3,000,000,000		1,111,125,600		823,274,450		67,913,582		150,959,700		197,730,236				744,838,018		1,855,963,618			
2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		3,000,000,000		1,111,125,600		823,274,450		67,913,582		150,959,700		197,730,236				744,838,018		1,855,963,618			
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya laporan realisasi investasi PMDN dan PMA	150	1,000,000,000	197	220,698,800	25 Perusahaan	118,563,750	5	23,800,000	5	-	10	59,946,050		28,679,500	20	112,425,550	217	333,124,350	145	33.31	
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yg akan diberikan pembinaan PM	150	1,000,000,000	180	555,202,400	25 Perusahaan	427,890,700	5	33,533,682	5	82,404,000	10	67,614,186		200,955,600	20	384,507,468	200	939,709,868	133	93.97	
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yg diawasi atas kepatuhan perusahaan dan jumlah perusahaan yg telah difasilitasi terkait masalah yg dihadapi	150	1,000,000,000	252	335,224,400	25 Perusahaan	276,820,000	10	10,579,900	30	68,555,700	30	70,170,000		98,599,400	70	247,905,000	322	583,129,400	215	58.31	
2	Terpenuhinya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan responsif	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan jumlah izin yg diterbitkan		750,000,000		120,508,200		50,000,000		13,214,850		1,503,200		18,701,400				35,825,000		156,333,200			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data perizinan dan non perizinan	90	750,000,000		120,508,200		50,000,000		13,214,850		1,503,200		18,701,400			60	35,825,000	60	156,333,200	12	20.84	
2		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya data perizinan dan non perizinan	90	750,000,000	86%	120,508,200	80%	50,000,000	20	13,214,850	20	1,503,200	20	18,701,400	2,405,550	60	35,825,000	61	156,333,200	68	20.84		
JUMLAH					43,789,000,000		15,585,815,338		10,143,914,013	14	1,436,887,135		3,099,365,810		2,061,445,705			84	8,500,105,490	55	23,874,253,832	11	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD Kab. Bantaeng berikutnya :																								
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Peresentase bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantoran		142,960,130,000	1 Dok	32,402,000	12	16,782,280		2,724,430		6,060,000		3,560,000		3,637,850		3,560,000		35,962,000		0	Dispora
		Penyediaan Gaji dan tunjangan	Alokasi gaji dan tunjangan ASN		17,579,130,000	12 Bulan	1,765,036,300	100	1,719,543,300		592,670,124		381,470,654		291,454,591		287,787,876		291,454,591		2,056,490,891			
		Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun	1PAKET	275,000,000	12 Bln	42,691,500	1	5,228,300		4,428,300		800,000								42,691,500		0	Dispora
		Kordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Penyusunan LaporanKeuangan OPD keuangan dan pembiayaan dan jasa penyusunan administrasi Keuangan OPD	3 DOK	390,000,000,000		26,074,000	3	15,688,100		3,328,100		2,730,000		4,100,000		2,900,000		4,100,000		30,174,000		0	Dispora
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa koran/harian umum		15,000,000	3 Exp	4,880,000	36	3,600,000		600,000		900,000		900,000		900,000		900,000		5,780,000		0	Dispora
		Penyediaan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsultasi dalam daerah dan luar daerah/ provinsi	1 Paket	1,000,000,000		49,905,000	50	106,924,000		10,670,000		10,347,818		13,158,500		55,985,343		13,158,500		63,063,500		0	Dispora
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Penyediaan dan pembiayaan jasa listrik dan Wifi kantor		20,000,000	12 Bln	1,258,800	4	1,719,311		257,613		322,651		347,827		457,972		347,827		1,606,627		0	Dispora
		Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Penyediaan dan pembiayaan jasa pelayanan umum dan jasa lainnya		595,000,000	12 Bln	52,177,980	8	38,865,570		8,148,320		9,150,000		9,367,250		9,150,000		9,367,250		61,545,230		0	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	400,000,000	1 Unit	49,430,000	1	49,086,000		6,915,500		14,268,000		8,815,000		12,797,735		8,815,000	1 Unit	58,245,000		0	Dispora
		Penyelengraan seleksi dan peletihan pasukan pengibar bendera	Terlaksananya Seleksi TIM PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten	74 orang	46,500,000,000	74 orang	517,916,350	20	842,250,000				277,456,500		6,500,000		377,900,000		6,500,000		524,416,350		0	Dispora
			Terselenggaranya Pembinaan Pemuda dan OKP			10 Keg		74															Dispora	
		Peningkatan Fasilitas Pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/kota	Terbinanya pemuda dan Organisasi Kepemudaan	1 Keg.	36,000,000,000	6 Keg	239,080,000	6 keg	386,635,900		136,000,000						358,935,900				239,080,000		0	Dispora
		Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten /Kota	Konsistensi sarana/prasarana olahraga di bantaeng yang layak pakai	100%	14,000,000,000	5 Venue	1,496,355,100	5	397,153,700				55,442,040		99,403,320		138,525,900		99,403,320		1,595,758,420		0	Dispora
		Penyelenggraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat kabupaten/ kota	Terselenggaranya Turnamen Olahraga Prestasi 1 Kegiatan		6,300,000,000	1 Keg	111,509,500	100	395,843,050				6,455,000				186,495,000				111,509,500		0	Dispora
		Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten /Kota	Terselenggaranya Kompetensi olahraga antar pelejar 1 Kegiatan		3,300,000,000			70	200,000,000		1,054,000		106,246,000								-		-	
		Pengembangan Oraganisasi keolahragaan			4,500,000,000			2	1,549,000,000						500,000,000		1,049,000,000		500,000,000		500,000,000		0	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		partisipasi dan keikutsertaan Dalam kegiatan kepemudaan			11,700,000,000		63,608,750	4 Kali	315,423,110				68,410,390		20,145,000		139,546,380		20,145,000		83,753,750		0	Dispora
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendukung keberhasilan Kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian Kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwuan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota berikutnya																								
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																								
A		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100	-	-	100	2,264,174,238		383,168,937		906,080,631		1,461,910,965	3,761,062,478									
I		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100	31,926,200	-	26,062,660	100	34,510,050	6	2,000,000	1,303	11,155,600	309	16,943,200	34,519,050								
1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	100%	7,505,900	-	26,062,660	100	10,867,550	0	-	-	-		10,876,550	1	3,560,000					-		
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA	100%	5,093,400	-	26,062,660	100	5,093,400	0	-	13.40	3,493,400		3,493,400	5,093,400	1					-		
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100%	19,326,900	-	26,062,660	100	18,549,100	10.8	2,000,000		7,662,200		13,449,800	18,549,100	1					-		
II		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu	100	1,861,493,944	-	-	100	1,811,259,450	16.7	302,477,137	44.61	808,086,481		1,213,056,715	1,666,641,704								
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan setiap Bulannya selama 1 Tahun	100	1,834,633,844	-	-	100	1,785,203,000	16.667994	297,557,537	44.44	793,386,881		1,194,918,615	1,640,939,604	100		100			-		
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	100	20,360,100	-	-	100	20,360,100	16.795595	3,419,600	44.22	9,003,250		12,441,750	20,005,750	2					-		
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	100	6,500,000	-	-	100	5,696,350	26.332652	1,500,000	100.00	5,696,350		5,696,350	5,696,350	2					-		
III		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Terpenuhinya dokumen Administrasi barang Milik Daerah	100%	-	-	-	100	52,675,300	41.442574	21,830,000	8.77	4,621,700		5,806,700	8,499,000								
1		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tertaksananya Rekonsiliasi dan Tersusunnya Laporan Barang	90%	-	-	-	100	8,615,900	0	-	18.88	1,626,700		5,806,700	8,499,000	4					#DIV/0!		
2		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan dalam Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD	90%	-	100	-	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-		-	-						#DIV/0!		
IV		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAEAH	Terpenuhinya dokumen Administrasi Umum	90%	-	-	-	100	44,059,400	49.546748	21,830,000	6.80	2,995,000		103,029,900	212,097,600								
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Listrik	90%	-	-	-	90	3,725,000	0	-	32.08	1,195,000		1,195,000	3,725,000	4					#DIV/0!		
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	90%	-	90	-	90	36,014,400	0	-	-	-		9,510,700	36,014,400						#DIV/0!		
3		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90%	-	-	-	90	4,320,000	17.592593	760,000	41.67	1,800,000		3,220,000	4,210,000	19					#DIV/0!		
4		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Peserta Kunjungan	100%	-	-	-	-	9,920,000	3.0241935	300,000	21.17	2,100,000		5,100,000	9,920,000	19					#DIV/0!		
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang Dikuti	100%	-	-	-	-	158,286,000	13.121817	20,770,000	41.12	65,094,200		84,004,200	158,228,200	19					#DIV/0!		
V		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Penyediaan Jasa Uarusan Pemerintahan	90%	-	-	-	90	186,095,038	11.679946	21,735,800	26.92	50,097,150		34,201,750	46,394,690								
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan yang Dibayarkan Setiap Bulannya selama 1 Tahun	100%	-	0	-	100	24,998,648	21.760377	5,439,800	45.29	11,320,850		17,872,350	21,121,350	4					#DIV/0!		
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non ASN yang dibayarkan Setiap Bulannya selama 1 Tahun	100%	-	-	-	100	25,521,390	11.754846	3,000,000	37.82	9,651,600		16,329,400	25,273,340	25					#DIV/0!		
VI		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentaase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengadaan barang milik Daerah	100%	-	-	-	100	135,575,000	9.8071178	13,296,000		29,124,700		88,872,700	126,268,730								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JumLah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara	-	-	-	-	100	96,422,000	13.218975	12,746,000	30.21	29,124,700		52,349,700		89,745,730							#DIV/0!	
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	100%	-	-	-	3 unit	10,520,000	5.2281369	550,000	-			7,890,000		7,890,000							#DIV/0!	
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor yang dipelihara	100%	-	-	-	3 unit	28,633,000	0	-	-			28,633,000		28,633,000	1						#DIV/0!	
B		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Konvensional dan Elektronik	90	-	-	-		144,419,360		14,009,900	17.908	430,135,310		84,314,960		157,076,860								
I		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan	100	-	-	-	100	142,189,360		14,009,900	21.99	31,273,360		82,084,960		154,846,860								
1		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	100	-	-	-	90	95,195,860	7.6779599	7,309,100	16.42	15,627,260		27,638,560		95,195,860	1						#DIV/0!	
2		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	100	-	-	-	90	22,780,500	29.414631	6,700,800	55.51	12,646,100		18,775,900		22,780,500	1						#DIV/0!	
3		Peningkatan Kapasitas Teanaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	100	-	-	-	90	24,213,000	0	-	12.39	3,000,000		23,000,500		24,200,500							#DIV/0!	
4		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Buku dalam Pengembangan Bahan Pustaka	100	-	-	-	90	12,670,000	20.994475	2,660,000	40.33	5,110,000		12,670,000		12,670,000							#DIV/0!	
II		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Konvesional dan Elektronik	100	-	-	-	100	2,230,000	0	-	17.886	398,861,950		2,230,000		2,230,000								
3		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupat/Kota	Jumlah orang dalam Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah/Kota	100	-	-	-	90	2,230,000	0	-	100.00	2,230,000		2,230,000		2,230,000							#DIV/0!	
C		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku	90	72,000,000	-	-		26,845,000	27.111821	2,970,100	1,775.36	226,832,500		22,657,750		26,603,450								
I		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	OPD yang diawasi	100	-	-	-	100	10,955,000	27.111821	2,970,100	1,550	169,799,450		6,987,750		10,933,450								
1		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diawasi	90	-	-	-	90	10,955,000	27.111821	2,970,100	30.32	3,322,100		6,987,750		10,933,450								
II		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Arsip dengan Baik		36,000,000	-	-	100	15,890,000	16.991819	2,700,000	1,019	161,977,350		15,670,000		15,670,000								
1		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip	100	36,000,000	-	-	100	15,890,000	16.991819	2,700,000	28.32	4,500,000		15,670,000		15,670,000								
D		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Dokumen Arsip Daerah yang diamankan dan dinLestarkan	90	-	-	-		70,784,730	-	-	270.71	100,444,300		175,151,750		205,204,362								
III		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Arsip yang dilindungi Akibat Bencana	0	-	-	-	100	25,304,850	-	-	225.38	57,033,050		95,974,800		115,192,658								
1		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dipulihkan Akibat Bencana		-	-	-	12	25,304,850	0	-	43.92	11,114,750		18,492,700		25,210,650		-						
IV		Penyelamatan Arsip Pereangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah	0	-	-	-	100	22,921,030	27.91803	6,399,100		33,185,200		58,959,000		67,501,354								
1		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah/Kecamatan	Jumlah Kabupaten/Kota		-	-	-	12	22,921,030	27.91803	6,399,100	55.55	12,733,100		18,523,100		22,480,654		-						
V		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Alih Media vano dikelola	0	-	-	-	100	22,558,850	0	-	45.33	10,226,050		20,217,950		22,510,350								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					I		II		III		IV				12			13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1		Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tertaksananya Penilaian dan penetapan autensitas Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan Arsip	-	-	-	12	22,558,850	0	-	45.33	10,226,050	20,217,950	22,510,350	-							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																						
kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan																						
kerjasama antar mitra CSR (swasta/BUMN/BUMD) dengan Pemda																						
komitmen Bupati dan Perangkat Daerah yang bersama-sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023																						
kerjasama antar perangkat daerah dan Bappeda																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja																						
Respon yang kurang dari mitra CSR																						
Belum konsistennya keterkaitan antar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah																						
Perangkat Daerah kurang memahami cara pengisian dalam pengendalian dan evaluasi																						
Perangkat Daerah Telambat dalam pengiriman data pelaporan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : percepatan kegiatan																						
Penyelesaian perbaikan lapooran akhir kegiatan pengembangan inovasi daerah																						
Penyusunan buku/dokumen data CSR/TJLSP																						
Penyusunan dan pembahasan perencanaan dilakukan lebih awal, agar proses perencanaan sesuai dengan ketentuan																						
Laporan evaluasi direkap per smester dan per triwulan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daeah Kabupaten/Kota berikutnya") :																						
Ada usulan CSR yang terealisasi																						
Perlunya konsolidasi capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah agar capaian sasaran strategis Perangkat Daerah dapat tercapai																						
Dalam evaluasi pelaporan renja sesuai dengan indikatornya renstra/RPJMD																						
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN																						
3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ton)	261334.84	2,923,528,493		87,108	870,000,000	100,000	40,728,900	150,000	78,944,400		776,290,100		1,084,948,600	250,000	1,980,912,000	250,000	222,632,200	96	8
3		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen usaha perikanan budidaya yang terbit (dokumen)	0	-		-	-		-		-					-		-			
3		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah dokumen persyaratan penerbitan izin usaha perikanan budidaya (dokumen)	0	-		-	-		-		-										
3		Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah pelayanan penerbitan izin usaha perikanan budidaya (orang)	0	-			-		-		-										
3		Kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan (kelompok)	90	866,714,300		30	95,000,000		4,128,600		14,476,700		403,908,200		103,207,100		525,720,600		72,912,300	-	8
3		Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah usaha budidaya yang diasuransikan (orang)	1500	393,050,700		500	60,000,000	-	4,128,600	-	11,578,500	-	224,235,200		54,562,900		294,505,200		294,505,200	-	75
3		Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	jumlah revitalisasi kelompok pembudidaya (Kelompok)	120	87,468,300		40	15,000,000		-		-		-		-		-		-	-	
			jumlah pembentukan kelompok pembudidaya (Kelompok)	130	-		40			-		-		-		-		-		-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok pembudidaya yang terfasilitasi bantuan pendanaan/ bantuan pembiayaan/ kemitraan usaha (Kelompok)	28	231,302,300			13	10,000,000		-		2,898,200		179,673,000		48,644,200		231,215,400		231,215,400			
	3	Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta	Jumlah pembudidaya yang dibina (orang)	225	154,893,000			75	10,000,000		-		-		-		-		-		49,678,100		32	
			Jumlah sosialisasi penerima bantuan pemerintah (orang)	150				50																
	3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil yang terbit (dokumen)	0	-			-	-		-		-		-		-		-		-		-	
	3	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) (Dokumen)	0	-			-	-															
	3	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) (dokumen)	0	-			-	-															
	3	Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Persentase Pengelolaan pembudidayaan ikan	45	2,056,814,193			15	775,000,000		36,600,300		64,467,700		372,381,900		981,741,500		1,455,191,400		149,719,900		-	7
	3	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Jumlah rebusk pembudidaya (orang)	400	4,620,000			150	15,000,000		900,000		1,760,000		900,000		-		3,560,000		3,560,000			77
			Jumlah data statistik perikanan budidaya (Dokumen)	3				1																
	3	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Jumlah prasarana perikanan budidaya (Unit)	16	861,610,834			6	150,000,000		11,564,500		26,752,700		209,554,700		604,447,050		852,318,950		852,318,950		-	99
	3	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan (Unit)	13	1,048,984,309			4	450,000,000		4,267,900		11,028,300		138,374,600		336,242,600		489,913,400		489,913,400		-	47
	3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan kesehatan ikan (Pemantauan)	0	-			0	0		-													
	3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembinaan/ pemantauan pembudidaya ikan (kali)	10	31,500,000			5	15,000,000		-													
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah lahan budidaya yang dilindungi (Ha)					0	-		-													
	3	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah produksi benih ikan unggul (ekor)	3,966,498	110,099,050			1,317,391	145,000,000		19,867,900		24,926,700		23,552,600		41,051,850		109,399,050		109,845,850		-	100
	3	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (Ton)	19094.13	3,241,690,050			6341.6	835,000,000	-	16,711,200	-	129,426,400		507,364,730	-	2,059,479,052	-	2,149,287,930		79,561,000	-	2	
	3	Kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai , danau, waduk, rawa dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan penangkapan ikan (Persen)	30	2,526,928,450			10	650,000,000		5,033,900		23,352,200		401,576,230		1,989,836,652		1,856,105,530		7,879,050	-	0	
	3	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data statistik perikanan tangkap (Dokumen)	0	-			0	0		-		-		-									
	3	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap (Unit)	2	564,301,450			1	150000000		-		3,000,000		11,979,700		548,713,752							
	3	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap (Unit)	51	1,962,627,000			17	500,000,000		5,033,900		20,352,200		389,596,530		1,441,122,900		1,856,105,530		1,856,105,530	-	95	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%		15					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)	90	542,439,300			30	85,000,000		1,258,800		87,924,200		90,490,000		51,542,400		231,215,400		30,637,950	-	6	
	3	Pengembangan Kapasitas nelayan kecil	Jumlah nelayan yang dibina (orano)	1100	89,945,800			500	10,000,000		-		-		-		-		-		-	-	-	
	3	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan Pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah rebusk nelayan (Kali)	1500	221,191,200			500	65,000,000		-		-		-		-		-		-	-	-	
jumlah revitasi kelompok nelayan (Kelompok)			160			55																		
jumlah pembentukan kelompok nelayan (Kelompok)			165			55																		
	3	Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Jumlah kelompok yang terfasilitasi bantuan pendanaan/ bantuan pembiayaan/ kemitraan usaha (Kelompok)	75	231,302,300			850		1,258,800		87,924,200		90,490,000		51,542,400		231,215,400		231,215,400		-	100	
			Jumlah nelayan yang diasuransikan (Orano)	2600			25	10,000,000							27,902,500									
	3	Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Pengelolaan UPTD TPI (Unit)	3	172,322,300			1	100,000,000		10,418,500		18,150,000		15,298,500		18,100,000		61,967,000		61,967,000	-	36	
	3	Penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	jumlah surat persetujuan berlayar (SPB)	150	105,027,400			50	15,000,000		-		-		-		-		-		-	-	-	
	3	Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah TPI yang beroperasi (unit)	6	67,294,900			2	85,000,000		10,418,500		18,150,000		15,298,500		18,100,000		61,967,000		61,967,000	-	92	
	3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen tanda daftar kapal perikanan berukuran 10 GT yang terbit (Dokumen)	0	-			0	0		-		-				-		-		-			
	3	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	jumlah dokumen persyaratan penerbitan tanda daftar kapal perikanan yang memenuhi syarat berukuran sampai dengan 10 GT (dokumen)	0	-			0	0		-													
	3	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	jumlah Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT (Dokumen)	0	-			0	0		-													
	3	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan ukuran sampai dengan 10 GT yang terbit	0	-			0	0		-		-					-		-				
	3	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	jumlah dokumen persyaratan penerbitan tanda daftar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang memenuhi syarat berukuran sampai dengan 10 GT (dokumen)	0	-			0	0		-													
	3	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	jumlah Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Berukuran sampai dengan 10 GT (Dokumen)	0	-			0	0		-													

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15							
1	2	3	4	5		6		7		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
	3	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang terbit (Dokumen)	0	-			0	0		-		-					K	Rp	K	Rp	-	-	
	3	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT (dokumen)	0	-			0	0		-													
	3	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	jumlah Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT (Dokumen)	0	-			0	0		-													
	3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kelompok pengawasan yang dibina (Persen)	31	66,364,600			12	23,000,000		-		-		-		-				2,413,000	-	-	4
	3	Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota	persentase pengawasan sumber daya perikanan (Persen)	24	66,364,600			8	23,000,000		-		-		-		-				2,413,000	-	-	4
	3	Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota	Jumlah pengawasan usaha perikanan tangkap (kecamatan)					0	-															
	3	Pengawasan usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota	jumlah pengawasan usaha perikanan budidaya (kecamatan)					8	23,000,000		-		-		-		-				2,413,000	-	-	4
	3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	77.19	1,266,342,350			25.7	490,000,000		10,968,200		27,776,800		228,175,430		491,217,900		758,138,330		8,293,374	-	-	1
	3	Kegiatan penertiban tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	jumlah promosi produk hasil olahan perikanan (produk)	95	278,153,000			30	85,000,000		-		-		-		-				-	-	-	
	3	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah pameran produk hasil perikanan yang diikuti (pameran)	18	278,153,000			6	85,000,000		-		-		-		-				-	-	-	
	3	Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang dibina (Kelompok)	41	193,240,300			13	40,000,000		-		-		-		-				-	-	-	
			Jumlah kelompok pemasaran perikanan yang dibina (Kelompok)	41				13																
	3	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah pelatihan kelompok pengolah hasil perikanan (kelompok)	41	193,240,300			13	40,000,000		-		-		-		-				-	-	-	
			Jumlah pelatihan kelompok pemasar perikanan (kelompok)	41				13																
			Persentase peningkatan SDM kelompok pengolah hasil perikanan (%)	60				20																

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah sarpras pengolah pemasaran (Unit)	41	794,949,050			13	365,000,000		10,968,200		27,776,800		228,175,430		491,217,900		758,138,330		8,293,374	-	1	
	3	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	174.2	31,000,000			57.37	15,000,000															
	3	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah alat pengolah yang dihibahkan ke kelompok pengolah (Unit)	52	763,949,050			17	350,000,000		10,968,200		27,776,800		228,175,430		491,217,900		758,138,330		8,293,374	-	1	
	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	300	2,766,005,740			100	2,836,611,000	25	327,055,064	25	723,527,469		625,248,346		767,606,350	50	2,437,117,229	50	1,168,868,037	17	42	
	3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	13	18,482,660			5	47,000,000		3,568,660		4,795,100		4,285,500		3,733,400		16,382,660		3,547,850	-	19	
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	0	-			0	0															
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA -SKPD (dokumen)	2	1,050,000			1	500,000															
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	0	-			0	0				-		-									
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD (dokumen)	0	-			0	0															
	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA- Perubahan SKPD (dokumen)	2	1,050,000			1	500,000															
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan (dokumen)	9	16,382,660			3	46,000,000		3,568,660		4,795,100		4,285,500		3,733,400		16,382,660		3,547,850	-	22	
	3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu (%)	300	2,294,896,250			100	2,249,411,000		250,257,125		620,924,111		526,392,977		668,659,633		2,066,233,846		960,787,897	-	42	
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN (Orang)	73	2,288,317,700			24	2,245,411,000		248,829,325		620,924,111		526,392,977		668,659,633		2,064,806,046		958,373,147	-	42	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	3	5,150,750			1	2,000,000				-		-		-		-		950,750	-	18	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan triwulan/ semesteran	12	1,427,800			4	2,000,000		1,427,800		-		-		-		1,427,800		1,464,000	-	103	
	3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase aset dinas (%)	300	16,399,900			100	25,000,000		3,542,800		4,843,700		4,322,400		3,656,000		16,364,900		4,523,500	-	28	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Kebutuhan Barang milik daerah SKPD (dokumen)	0	-			0	0															
	3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset dinas terinventarisir (dokumen)	201	16,399,900			100	25,000,000		3,542,800		4,843,700		4,322,400		3,656,000		16,364,900		4,523,500	-	28	
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	200	-			100	0		-		-		-		-		-		-			
	3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN (orang)	0	-			0	0		-													
	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data ASN (Dokumen)	0	-			0	0		-													
	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	0	-			0	0		-													
	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan (kali)	0	-			0	0		-													

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-undangan (orang)	0	-			0	0		-													
	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian kantor (Person)	300	177,466,000			100	161,000,000		34,611,000		38,557,195		47,581,541		43,092,000		163,841,736		95,926,450	-		54
	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik (unit)	36	2,998,000			12	3,000,000		796,000		796,000		959,000		447,000		2,998,000		2,702,000	-		90
	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	8	10,500,000			6	5000000		-													
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga (unit)	0	-			0	0		-													
	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/ majalah (exemplar)	17	3,000,000			5	3,000,000		500,000		1,000,000		1,500,000		-		3,000,000		2,405,000	-		80
	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi/ konsultasi SKPD (kali)	180	160,968,000			50	150,000,000		33,315,000		36,761,195		45,122,541		42,645,000		157,843,736		90,819,450	-		56
	3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip (Dokumen)	0	-			0	0		-													
	3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Person)	20	6,956,600			9	5000000		-		2,750,000		-		-		-		-			
	3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas (unit)	0	-			0	0		-													
	3	Pengadaan Mebel	jumlah mebel (Unit)	11	4,200,000			5	2000000		-													
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor (unit)	9	2,756,600			4	3000000		-		2,750,000		-		-							
	3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset lainnya (Unit)	0	-			0	0		-													
	3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	jumlah aset tak berwujud (Unit)	0	-			0	0		-													
	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang kantor dinas (Person)	3	140,401,980			1	253,000,000		21,788,622		29,314,431		26,148,339		29,947,521		103,628,913		59,646,195	-		42
	3	Penyediaan Jasa Surat Menawar	jumlah surat keluar dan surat masuk (Lembar)	550	4,200,000			250	2,000,000		-													
	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (Rekening)	24	63,276,800			8	125,000,000		9,273,062		8,832,031		10,271,259		12,150,201		40,526,553		26,609,495	-		42
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	4	3,570,000			2	2,000,000		-		1,190,000		690,000		1,690,000							
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor (orang)	27	69,355,180			9	124,000,000		12,515,560		19,292,400		15,187,080		16,107,320		63,102,360		33,036,700	-		48
	3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan aset dinas (unit)	97	111,402,350			32	96,200,000		13,286,857		22,342,932		16,517,589		18,517,796		70,665,174		44,436,145	-		40
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (unit)	54	68,772,100			18	80,000,000		13,286,857		19,292,932		16,517,589		18,517,796		67,615,174		40,326,145	-		59
	3	Pemeliharaan mebel	Jumlah pemeliharaan mebel (Unit)	10	6,300,000			4	3,000,000		-													
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diperbaiki (unit)	30	3,050,000			9	5,200,000		-		3,050,000		-		-		3,050,000		3,310,000	-		109
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehab kantor (unit)	3	33,280,250			1	8,000,000		-													
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	0	-			0	0		-		-		-		-		-		800,000	0	-	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	0	-			0	0		-													
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	1	73,700,000	140.2528597	187,938,832	1	73,690,000.00	0.21 Paket	15,830,000	0.21 Paket	23,642,710	0.78 Paket	18,340,000	1 Paket	15,137,000	99	72,949,710	120	260,888,542	11,962	353.99	Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan	1	50,287,230	79.82000351	76,455,750	1	50,284,750.00	0.06 Paket	300,000	0.06 Paket	2,060,000	0.09 Paket	2,390,000	1 Paket	2,375,000	14	7,125,000	47	83,580,750	4,699	166.21	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket unit pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja	1	40,841,118	-	-	1	5,260,000.00	0.19 Paket	1,050,000	0.19 Paket	3,050,000	1 Paket	900,000	1 Paket	3,140,000	20	8,140,000	10	8,140,000	997	19.93	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung	1	76,844,250	39.72359676	40,700,400	1	15,334,500.00	0.19 Paket	2,943,000	0.19 Paket	5,174,250	0.77 Paket	3,783,600	1 Paket	3,433,650	20	15,334,500	30	56,034,900	2,984	72.92	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Perlengkapan	11	12,120,334	249.4331066	57,585,000	11	9,760,000.00	3 Unit	2,175,000	3 Unit	3,235,000	9 Unit	2,450,000	11 Unit	3,120,000	91	10,980,000	170	68,565,000	1,546	565.70	Dinas Pariwisata
2	Meningkatnya Sarana dan Prasaran Objek Wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah objek wisata yang berdaya saing	3	9,052,061,266	3	10,300,587,218	3	2,008,072,930	3	373,764,496	3	452,867,164	3	313,407,555	3	637,645,851	3	1,790,235,114	3	12,090,822,332	100		Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	100	9,052,061,266	114	10,300,587,218	100	2,008,072,930	19	373,764,496	23	452,867,164	16	313,407,555	31.75412	637,645,851	20	1,790,235,114	67	12,090,822,332	67		Dinas Pariwisata
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi pengembangan/ penunjang daerah tujuan wisata	1	593,141,250	0.387765983	4,000,000	1	162,662,200.00	0 Paket	-	0 Paket	4,550,200	0 Paket	1,500,000	0 lokasi	6,499,848	2	12,550,048	1	16,550,048	125	2.79	Dinas Pariwisata
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	8,399,626,516	19.11415347	10,296,587,218	4	1,785,410,900.00	4 Lokasi	373,764,496	4 Lokasi	452,867,164	4 Lokasi	307,077,755	4 Lokasi	585,055,851	20	1,718,765,266	20	12,015,352,484	495	143.05	Dinas Pariwisata
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi, penerapan serta pengawasan standarisasi	1	59,293,500	0	-	1	59,999,830.00	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	6,329,800	1 Paket	52,590,000	99	58,919,800	50	58,919,800	4,968	99.37	Dinas Pariwisata
3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	78864	506,113,750	96615	463,126,654	78864	106,083,600	31764	13,469,840	26718	54,523,134	20222	4,139,779	11510	275,675,224	90,214	347,807,977	93,415	810,934,631	118		Dinas Pariwisata
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase kegiatan pemasaran pariwisata	100	506,113,750	92	463,126,654	100	106,083,600	13	13,469,840	51	54,523,134	4	4,139,779	259.866	275,675,224	69	347,807,977	80	810,934,631	80	160.23	Dinas Pariwisata
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah paket Sistem Teknologi Informasi / Media Informasi dalam pemasaran pariwisata	1	55,125,000	6.564285714	6,892,500	1	46,146,400.00	0.715 Paket	3,299,600	0.715 Paket	30,597,300	0.79 Paket	2,639,779	1 Paket	1,433,550	69	37,970,229	38	44,862,729	3,772	81.38	Dinas Pariwisata
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah paket promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	1	156,279,375	58.34868699	173,689,454	1	38,707,200.00	0.18 Paket	7,215,900	0.18 Paket	14,784,334	0.59 Paket	900,000	1 Paket	211,228,474	150	234,128,708	104	407,818,162	10,408	260.95	Dinas Pariwisata
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data dan informasi kepariwisataan yang disebar	3	93,170,000	140.4668241	237,950,800	3	14,131,300.00	1 Paket	2,276,100	1 Paket	6,394,500	3 Paket	600,000	3 Paket	61,813,200	76	71,083,800	108	309,034,600	3,613	331.69	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Kerja Sama dan Kermitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi dan Investasi Pariwisata	1	201,539,375	0	44,593,900	1	7,098,700.00	0.095 Paket	678,240	0.48 Paket	2,747,000	0.48 Paket	-	1 Paket	1,200,000	4,625,240	-	49,219,140	-	24.42	Dinas Pariwisata	
7		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia / Kepariwisataan	5	1,208,817,500	7	2,694,280,120	5	1,420,152,490	4	653,707,215	2	293,585,430	-	13,089,000	9	1,081,370,745	15	2,041,752,390	11	4,736,032,510	220	391.79	Dinas Pariwisata
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	100	1,208,817,500	223	2,694,280,120	100	1,420,152,490	46	653,707,215	21	293,585,430	1	13,089,000	76.14469	1,081,370,745	169	2,041,752,390	196	4,736,032,510	196	391.79	Dinas Pariwisata

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan/kerjasama pariwisata	1	81,033,750	43.97735666	67,879,050	1	600,152,915.00	1 Paket	600,152,915	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	200,000,000	987	800,152,915	516	868,031,965	51,570	1,071.20	Dinas Pariwisata
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelatihan dasar SDM Kepariwisataa	1	133,100,000	509848.2919	2,253,529,450	1	679,934,575.00	0 Paket	-	0 Paket	271,973,830	0.4 Paket	-	1 Paket	707,560,745	736	979,534,575	255,292	3,233,064,025	#####	2,429.05	Dinas Pariwisata
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi/Konsumsi dan KonsevasiEkonomi Kreatif	Jumlah event yang difasilitasi / dilaksanakan	1	994,683,750	7.989985884	372,871,620	1	140,065,000.00	0.38 Paket	53,554,300	0.53 Paket	21,611,600	0.63 Paket	13,089,000	1 Paket	173,810,000	26	262,064,900	17	634,936,520	1,717	63.83	Dinas Pariwisata
Rata - rata Capaian Kinerja (%)																		Predikat Kinerja		28.96453775		31		
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																						#DIV/0!		
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *):																								
*) di isi oleh kepala Bappeda																								
DINAS PERTANIAN																								
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Menunjang pelaksanaan urusan sekretariat Dinas Pertanian																					
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya proses penyusunan perencanaan pembangunan pertanian																					
		Penyusunan dan dokumentasi perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Pertanian Kab bantaeng dan terlaksananya evaluasi kegiatan DAK bidang pertanian tahun anggaran 2022	100	Rp 200,000,000	99.63	Rp 234,746,900	100%	Rp 318,744,100	3.42	Rp 10,894,000	6.18	Rp 19,684,100	52.26	Rp 166,576,000	37.91	Rp 120,845,000	99.77	Rp 317,999,100	199.40	Rp 552,746,000	199.40	2.76	Dinas Pertanian
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	100	Rp 54,121,608	99.63	Rp 15,781,200	100%	Rp 14,668,100	28.01	Rp 4,108,100	16.36	Rp 2,400,000	14.73	Rp 2,160,000	40.91	Rp 6,000,000	100.00	Rp 14,668,100	199.63	Rp 30,449,300	199.63	0.56	Dinas Pertanian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Dinas Pertanian																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN Dinas Pertanian	100		100	Rp 9,936,134,900	100%	Rp 10,480,904,077	17.08	Rp 1,790,296,776	25.84	Rp 2,708,048,439	22.61	Rp 2,369,318,986	21.60	Rp 2,263,939,236	87.13	Rp 9,131,603,437	187.13	Rp 19,067,738,337	187.13		Dinas Pertanian
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Administrasi keuangan SKPD	100	Rp 34,637,829	100	Rp 20,772,900	100%	Rp 8,840,400	16.58	Rp 1,465,500	37.73	Rp 3,335,700	18.54	Rp 1,639,200	27.15	Rp 2,400,000	100.00	Rp 8,840,400	200.00	Rp 29,613,300	200.00	85.49	Dinas Pertanian
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpeliharanya aset Dinas Pertanian																					
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan BMD Dinas Pertanian	100	Rp 43,297,286	100.00	Rp 19,380,000		Rp 9,767,900	20.29	Rp 1,981,550	26.68	Rp 2,605,600	19.77	Rp 1,930,750	33.27	Rp 3,250,000	100.00	Rp 9,767,900	200.00	Rp 29,147,900	200.00	67.32	Dinas Pertanian
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya SDM aparat Dinas Pertanian																					
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Meningkatnya SDM aparatur Dinas Pertanian berdasarkan tugas dan fungsi	100	Rp -	100.00	Rp -		Rp 7,290,000	58.98	Rp 4,300,000	41.02	Rp 2,990,000	-	Rp -	-	Rp -	100.00	Rp 7,290,000	200.00	Rp 7,290,000	200.00		Dinas Pertanian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan rapat koordinasi																					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelayanan perjalanan Dinas Pertanian	100	Rp 270,608,049	100.00	Rp 96,768,000	100%	Rp 100,152,000	15.09	Rp 15,115,000	26.61	Rp 26,651,800	40.55	Rp 40,612,714	17.69	Rp 17,720,000	99.95	Rp 100,099,514	199.95	Rp 196,867,514	199.95	99.95	Dinas Pertanian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancarnya pelayanan pada Dinas Pertanian																					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik Dinas Pertanian	100	Rp 135,304,020	81.56	Rp 126,782,520	100%	Rp 102,982,400	23.57	Rp 24,271,145	21.28	Rp 21,913,905	19.19	Rp 19,760,835	23.00	Rp 23,686,167	87.04	Rp 89,632,052	168.60	Rp 216,414,572	168.60	159.95	Dinas Pertanian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100	Rp -	76.92	Rp 52,462,990	100%	Rp 65,646,810	24.59	Rp 16,140,555	34.63	Rp 22,733,930	15.43	Rp 10,132,500	25.16	Rp 16,516,361	99.81	Rp 65,523,346	176.73	Rp 117,986,336	176.73		Dinas Pertanian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berfungsi optimalnya aset Dinas Pertanian																					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya kebutuhan pajak kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas	100	Rp 75,770,251	76.92	Rp 43,815,000	100%	Rp 28,655,400	15.65	Rp 4,483,918	22.54	Rp 6,457,943	30.16	Rp 8,641,121	27.61	Rp 7,911,074	95.95	Rp 27,494,056	172.87	Rp 71,309,056	172.87	94.11	Dinas Pertanian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin Dinas Pertanian	100	Rp 13,530,402	76.92	Rp 1,000,000	100%	Rp 2,440,000	-	Rp -	100.00	Rp 2,440,000	-	Rp -	-	Rp -	100.00	Rp 2,440,000	176.92	Rp 3,440,000	176.92	25.42	Dinas Pertanian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung/bangunan kantor	100	Rp -	76.92	Rp -	100%	Rp 296,472,497	5.36	Rp 15,884,300	26.35	Rp 78,123,943	4.72	Rp 14,000,000	60.67	Rp 179,855,400	97.10	Rp 287,863,643	174.02	Rp 287,863,643	174.02		Dinas Pertanian
2		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penggunaan Teknologi Pertanian																					
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan pelatihan pupuk organik, pengawasan pupuk pestisida (KP3), pengawasan Alsintan dan Teknologi spesifik lokasi pertanian																					
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian spesifik lokasi	100	Rp 125,000,000	100.00	Rp 62,192,150	100%	Rp 26,105,700	36.97	Rp 9,651,200	8.72	Rp 2,277,000	14.81	Rp 3,865,000		Rp 4,012,500	75.87	Rp 19,805,700	175.87	Rp 81,997,850	175.87	65.60	Dinas Pertanian
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dukungan operasional KP3	100	255,000,000	100.00	Rp 2,794,269,900	100%	Rp 2,034,513,900	0.39	Rp 8,000,000	1.79	Rp 36,514,000	23.15	Rp 470,899,500		Rp 703,208,200	59.90	Rp 1,218,621,700	159.90	Rp 4,012,891,600	159.90	1,573.68	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan pemeliharaan dan pelestarian SDG melalui teknologi bujang seta pada tanaman buah, SL hortikultura,SL perkebunan (kopi dan kakao) dan SL tanaman pangan (padi in hibrida)																					
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya sosialisasi perbenihan tanaman pangan dan terlaksananya monitoring peredaran benih APBN komoditi tanaman pangan	100	Rp 425,000,000	100.00	Rp 385,005,100	100%	Rp 214,470,300	1.98	Rp 4,251,150	94.22	Rp 202,070,800	2.08	Rp 4,470,300	1.71	Rp 3,678,050	100.00	Rp 214,470,300	200.00	Rp 599,475,400	200.00	141.05	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu produk olahan tanaman pangan dan terlaksananya pembinaan kelompok usaha tanaman pangan	100	Rp 425,000,000	100.00	Rp 38,651,120	100%	Rp 2,099,850,000	-	Rp -	5.10	Rp 107,162,000	7.97	Rp 167,302,300	82.70	Rp 1,736,475,000	95.77	Rp 2,010,939,300	195.77	Rp 2,049,590,420	195.77	482.26	
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan produksi tanaman pangan, terlaksananya AUIP dan operasional pelaksanaan AUIP	100	Rp 350,000,000	100.00	Rp 54,709,500	100%	Rp 407,682,600	10.00	Rp 40,777,000	41.86	Rp 170,650,720	9.07	Rp 36,996,700	35.46	Rp 144,558,180	96.39	Rp 392,982,600	196.39	Rp 447,692,100	196.39	127.91	
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya pembibitan ayam DOC, terlaksananya penangkaran benih tanaman pangan dan terlaksananya pengembangan bibit kentang G0 dan bawang merah																					
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Terlaksananya pengembangan perbenihan di Kabupaten Bantaeng	100	Rp -	-	Rp 68,220,325	100%	Rp 400,000,000	-	Rp -	25.00	Rp 100,000,000	49.99	Rp 199,949,000	-	Rp -	74.99	Rp 299,949,000	74.99	Rp 368,169,325	74.99		
		Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Terlaksananya pengembangan bibit kentang G0 dan bawang merah	100	Rp -	-	Rp 464,581,850	100%	Rp 50,007,850	24.78	Rp 12,391,000	47.23	Rp 23,616,850	14.00	Rp 7,000,000	14.00	Rp 7,000,000	100.00	Rp 50,007,850	100.00	Rp 514,589,700	100.00		
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pengembangan perbenihan tanaman pangan	100		-	Rp 935,390,050	100%	Rp 152,627,774	26.36	Rp 40,228,500	21.30	Rp 32,510,450	47.94	Rp 73,168,824	3.93	Rp 6,000,000	99.53	Rp 151,907,774	99.53	Rp 1,087,297,824	99.53		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya pembibitan ayam DOC	100		92.06	Rp 719,218,184	100%	Rp 124,999,500	31.49	Rp 39,360,000	32.71	Rp 40,889,000	20.60	Rp 25,750,500	14.08	Rp 17,600,000	98.88	Rp 123,599,500	190.94	Rp 842,817,684	190.94		Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian																					
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan Action Plan peternakan dan tersedianya data perencanaan pengembangan kawasan pertanian																					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya sosialisasi pengembangan tembakau	100	Rp 175,000,000	93.10	Rp 107,000,000	100%	Rp 126,591,000	-	Rp -	27.28	Rp 34,528,300	30.79	Rp 38,975,000	41.72	Rp 52,810,000	99.78	Rp 126,313,300	192.88	Rp 233,313,300	192.88	133.32	
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Tersusunnya Master Plan pembangunan pertanian				Rp 138,411,665		Rp 337,209,160	1.47	Rp 4,950,000	-	Rp -	88.73	Rp 299,196,300	6.76	Rp 22,812,000	96.96	Rp 326,958,300	96.96	Rp 465,369,965			
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya Prasarana Pertanian																					
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangunnya irigasi tanah dalam/dangkal dan jaringan irigasi pertanian	100	Rp -	64.56	Rp 2,873,184,000	100%	Rp 7,660,614,576	-	Rp -	10.79	Rp 826,349,220	8.38	Rp 641,913,800	54.61	Rp 4,183,545,380	73.78	Rp 5,651,808,400	138.34	Rp 8,524,992,400	138.34		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung	Terbangunnya embung pertanian				Rp 1,745,398,510		Rp 410,740,249	-	Rp -	46.86	Rp 192,456,000	25.08	Rp 102,996,000	25.76	Rp 105,823,750	97.70	Rp 401,275,750	97.70	Rp 2,146,674,260			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya jalan pertanian dan jalan produksi pertanian				Rp 2,032,514,058		Rp 4,060,669,938			23.06	Rp 936,429,832		Rp 84,404,675		Rp 1,457,029,400	61.02	Rp 2,477,863,907	61.02	Rp 4,510,377,965	#DIV/0!	#DIV/0!	
4		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangunnya prasarana pertanian	100	Rp 285,000,000	80.00	Rp 6,256,235,723	3%	Rp 2,440,442,935	-	Rp -	76.95	Rp 1,877,832,673	13.37	Rp 326,347,900	5.45	Rp 133,051,262	95.77	Rp 2,337,231,835	175.77	Rp 8,593,467,558	175.77	3,015.25	
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Populasi Ternak																					
		Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	100	Rp 630,000,000	-	Rp 585,123,000	3%	Rp 624,999,800	2.46	Rp 15,375,166	1.48	Rp 9,218,800	26.28	Rp 164,259,300	48.70	Rp 304,365,983	78.92	Rp 493,219,249	78.92	Rp 1,078,342,249	78.92	171.17	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan di Kabupaten Bantaeng																					
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan vaksinasi																					
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terkendalinya penyakit hewan/ternak	100	Rp 247,847,738	-	Rp 115,973,412	80%	Rp 905,139,000	0.07	Rp 608,000	6.31	Rp 57,083,000	61.11	Rp 553,153,599	26.33	Rp 238,352,589	93.82	Rp 849,197,188	93.82	Rp 965,170,600	93.82	389.42	Dinas Pertanian
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya pendampingan pada kelompok pengolahan hasil peternakan																					
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pendampingan produk hewan	100	Rp 155,000,000	-	Rp 121,588,900	80%	Rp 23,665,800	20.85	Rp 4,935,300	29.16	Rp 6,900,000	19.44	Rp 4,600,000	30.51	Rp 7,219,800	99.95	Rp 23,655,100	99.95	Rp 145,244,000	99.95	93.71	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Melindungi Petani dari Gagal Panen																					
5		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan Kamis OPT, pemantauan harga pasar pertanian dan pelaksanaan pengendalian pasca bencana alam TPH-RUM																					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya pengendalian OPT lingkup Dinas Pertanian, terlaksananya kebun bibit percontohan perkebunan dan terlaksananya SL (PTT/GAP/PHT)	100	Rp 350,000,000	-	Rp 72,226,500	80%	Rp 31,000,000	65.55	Rp 20,320,000	0.97	Rp 300,000	3.87	Rp 1,200,000	29.48	Rp 9,140,000	99.87	Rp 30,960,000	99.87	Rp 103,186,500	99.87	29.48	Dinas Pertanian
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Penanganan dampak perubahan iklim di sektor pertanian	100	Rp -	99.13	Rp -	100%	Rp 49,586,000	56.27	Rp 27,904,000	31.62	Rp 15,681,290	5.75	Rp 2,850,000	6.35	Rp 3,150,000	100.00	Rp 49,585,290	199.13	Rp 49,585,290	199		Dinas Pertanian
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pemantauan harga komoditi pertanian dan pengendalian pasca bencana alam pertanian TPH-BUN dan peternakan	100	Rp -	99.13	Rp -	100%	Rp 31,058,900	1.93	Rp 600,000	20.75	Rp 6,443,900	47.59	Rp 14,780,000	29.61	Rp 9,195,000	99.87	Rp 31,018,900	199.00	Rp 31,018,900	199		Dinas Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Layanan Rekomendasi Perizinan Pertanian																					
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Laporan harga pasar pertanian, penerapan teknologi hasil pertanian (TPH-BUN), terlaksananya bimtek pengolahan hasil hortikultura dan terlaksananya sosialisasi izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan																					
		Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya pelatihan perbanyak tanaman angrek dan terlaksananya pameran, lomba angrek dan lomba merangkai bunga	100	Rp 175,000,000	100.00	Rp 26,343,000	30%	Rp 81,706,700	5.87	Rp 4,800,000	15.82	Rp 12,925,000	31.85	Rp 26,023,225	44.78	Rp 36,586,700	98.32	Rp 80,334,925	198.32	Rp 106,677,925	198	60.96	Dinas Pertanian
7		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Sosialisasi izin usaha pertanian hortikultura dan terlaksananya bimtek pengolahan hortikultura	100	Rp 275,000,000	100.00	Rp 51,580,000	30%	Rp 40,073,000	4.49	Rp 1,800,000	13.42	Rp 5,377,000	30.34	Rp 12,160,000	44.05	Rp 17,652,000	92.30	Rp 36,989,000	192.30	Rp 88,569,000	192	32.21	Dinas Pertanian
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan perbaikan manajemen penangkaran hortikultura dan terlaksananya pelatihan ekuliasi	100	Rp 1,750,000,000	100.00	Rp 89,781,400	30%	Rp 27,340,500	69.61	Rp 19,030,500	9.39	Rp 2,566,800	13.17	Rp 3,600,000	4.39	Rp 1,200,000	96.55	Rp 26,397,300	196.55	Rp 116,178,700	197	6.64	Dinas Pertanian
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pendampingan perbaikan manajemen penangkaran hortikultura																					
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi berbasis GAP pada usaha tani hortikultura, terlaksananya penerapan teknologi dan terlaksananya pendampingan Gedor Horti Bawako Merah	100	Rp 150,000,000	-	Rp 96,202,525	30%	Rp 26,500,000	58.68	Rp 15,551,100	20.27	Rp 5,372,700	10.19	Rp 2,700,000	10.19	Rp 2,700,000	99.34	Rp 26,323,800	99.34	Rp 122,526,325	99	81.68	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Pertanian																					
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Lancarnya pelayanan pelaporan berbasis IT di BPP, meningkatnya kapasitas kelembagaan petani, terlaksananya Demplot di masing-masing wilayah kerja BPP, terlaksananya penyusunan program penyuluh pertanian dan terlaksananya Tudang Sipulung																					
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya penyusunan program penyuluhan pertanian dan operasional penyuluh kontrak daerah	100	Rp 750,000,000	-	Rp 750,987,350	90%	Rp 2,403,336,660	0.20	Rp 4,800,000	19.66	Rp 472,387,060	36.28	Rp 871,821,790	35.13	Rp 844,382,589	91.26	Rp 2,193,391,439	91.26	Rp 2,944,378,789	91	392.58	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Tudang Sipulung tk Kabupaten, penilaian kelas kemampuan kelompok dan pelatihan manajemen kelompok tani	100	Rp 250,000,000	-	Rp 83,663,850	100%	Rp 65,104,500	4.46	Rp 2,904,500	2.92	Rp 1,900,000	2.76	Rp 1,800,000	5.07	Rp 3,300,000	15.21	Rp 9,904,500	15.21	Rp 93,568,350	15	37.43	Dinas Pertanian
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Peyuluhan Pertanian	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan BPP, terbangunnya Puskesmas dan terbangunnya prasarana infrastruktur pertanian	100	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 56,800,000	39.44	Rp 22,400,000	35.92	Rp 20,400,000	14.08	Rp 8,000,000	10.56	Rp 6,000,000	100.00	Rp 56,800,000	100.00	Rp 56,800,000	100		Dinas Pertanian
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan SL di BPP	100	Rp -	-	Rp 127,260,500	100%	Rp 31,002,900	30.10	Rp 9,333,000	35.71	Rp 11,069,900	23.22	Rp 7,200,000	10.97	Rp 3,400,000	100.00	Rp 31,002,900	100.00	Rp 158,263,400	100		Dinas Pertanian
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										1805.10%		2662.05%		2299.58%		2466.50%		9167.01%		15060.87%				
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *) :																								
*) di isi oleh kepala Bappeda																								
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																								
A		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100	20,816,233,835	-	-																	
I		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100	2,922,338,000	-	-	100	80,884,450		-		31,199,500		55,363,200		88,068,950							
1		Penyusunan Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	165,000,000	-	-	2 Dok	24,651,150			1	9,235,750	1	17,856,250		33,836,000	1	17,856,250	1	17,856,250			11
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pokok yang disusun	2	145,000,000	-	-	2 Dok	37,000,000		-	1	14,975,000	1	24,481,600		34,999,850	1	24,481,600	1	24,481,600			16.88
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	9	200,188,000	-	-	3 laporank	19,233,300			3	6,988,750	6	13,025,350		19,233,100	6	13,025,350	6	13,025,350			6.51
II		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu	100	8,611,515,835	-	-	100	2,701,759,038		-		1,045,157,634		1,549,400,025		2,067,211,055							
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan	100	8,143,352,000	-	-	100	2,653,009,138			38	1,027,893,584	57	1,512,653,675		2,020,301,805	57	1,512,653,675	57	1,512,653,675			18.58
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36	300,382,500	-	-	12 Laporan	48,749,900			6	17,264,050	12	36,746,350		46,909,250	12	36,746,350	12	36,746,350			12.23
III		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai Peraturan Perundang - Undangan	100	341,500,000	-	-	100	30,304,300		-		10,580,900		18,862,700		30,089,700							
1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada KPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD	6	105,000,000	-	-	1 Laporan	28,304,450				9,674,800		17,337,200		28,304,450		17,337,200		17,337,200			16.51
2		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	10,000,000	-	-	1 Laporan	1,999,850				906,100		1,525,500		1,785,250		1,525,500		1,525,500			15.26
V		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	2,250,328,000	-	-	100	262,072,150		-		151,322,800		177,879,980		290,383,448							
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan yang Tersedia	75	55,000,000	-	-	20 Buah	11,894,150			3	1,746,000	5	2,506,000		9,981,000	5	2,506,000	5	2,506,000			4.56
2		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	108Eks	75,000,000	100	6,000,000	36 Eks	15,000,000		-	15	6,200,000				10,200,000	15	6,200,000	15	6,200,000			8.27

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang Diikuti	100%	1,345,328,000	-	-	100%	235,178,000			75%	143,376,800	92%	175,373,980		270,202,448	92%	175,373,980	92%	175,373,980		13.04		
VI		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,710,000,000	-	-	100	77,251,800																
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di adakan	35 unit	480,000,000	-	-	2 Unit	77,251,800			-	-				38,300,000			-		#VALUE!			
VII		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,104,052,000	-	-	100	297,213,460			-		112,360,606		180,073,770		280,987,160							
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yng terbayar	4 Rek	525,000,000	100	57,976,800	4 Rek	106,608,000			4	35,927,566	4	53,053,570		75,863,600	4	53,053,570	4	53,053,570		10.11		
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	1,414,052,000	-	-	100	190,605,460			40	76,433,040	66	127,020,200		205,123,560	66	127,020,200	66	127,020,200		8.98		
VIII		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi baik	100%	1,580,000,000	-	-	100	84,209,130			-		28,012,804		51,647,664		85,332,514							
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Kendaraan yang pajaknya terbayar	4 Unit	215,000,000	-	-	4 Unit	47,702,000			2	23,962,804	3	38,415,914		55,625,514	3	38,415,914	3	38,415,914		17.87		
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	65 Unit	90,000,000	-	-	10 Unit	14,297,080			-		3	4,050,000	5	6,500,000		15,010,000	5	6,500,000	5	6,500,000		7.22
3		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	700,000,000	-	-	1 Unit	22,210,050					1	6,731,750		14,697,000	1	6,731,750	1	6,731,750		0.96		
B		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tepat waktu dan Terintegrasi	100	7,740,000,000	-	-																		
I		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Persentase Dokumen Penyusunan dan Pendanaan yang disusun tepat waktu	100	7,740,000,000	-	-	100	676,596,800			-		336,773,021		477,922,321		597,981,658							
1		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	9	450,000,000	-	-	3 Kali	28,116,850			3 Kali	23,846,850				23,846,850	3 Kali	23,846,850	3 Kali	23,846,850		5.30		
2		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD	Jumlah Rapat Forum SKPD / Lintas SKPD yang dilaksanakan	9	450,000,000	-	-	1 Kali	26,140,400			1 Kali	25,740,400				-	1 Kali	25,740,400	1 Kali	25,740,400		5.72		
3		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	2	1,115,000,000	-	-	2 Kali	220,325,100			2 Kali	141,545,721	2	176,830,721		-	2	176,830,721	2	176,830,721		15.86		
4		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Bahan Yang di Siapkan		121,000,000	-	-	8 Kec	19,999,950			8 Kec	19,999,950				-	8 Kec	19,999,950	8 Kec	19,999,950		16.53		
5		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan		4,400,000,000	-	-	2 Dok	382,014,500					2	301,091,600		574,134,808	2	301,091,600	2	301,091,600		6.84		
II		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	1,400,000,000	-	-	100	383,455,800			-		52,897,800		112,996,400		297,177,200							
1		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Data dan Informasi Pembangunan Daerah dalam SIIPD	38 Jenis	425,000,000	-	-	38 Data	231,455,900			-	6	33,249,900	20	61,224,000		229,435,900	20	61,224,000	20	61,224,000		14.41	
2		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah OPD yang dibina	1 Dok	550,000,000	-	-	39 OPD	69,999,900			-	39 OPD	19,647,900	39 OPD	51,772,400		67,741,300	39 OPD	51,772,400	39 OPD	51,772,400		9.41	
3		Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Profil Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	1 Dok	-	-	-	0	82,000,000			-		-		32,800,000		82,000,000							
		Perencanaan Pembangunan	Persentase Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100								-				83,883,400		354,970,486							

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
III		Pembangunan dan Pengembangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pelaksanaan RPJPD dengan RPJMN	1 Dok	1,902,000,000	-	-	100	398,721,400		-		300,916,986		-		244,541,186			-				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pelaksanaan Dokumen RPJMD	1 Dok																52,018,100		6.94		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian / Evaluasi Dokumen RKPD	1 Dok																-				
			Jumlah Laporan Triwulan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	4 Laporan					2		3	83,883,400		110,429,300	2									
			Jumlah Lporan Hasil Evaluasi DAK	4 Laporan						2		3				2								
			Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100		-	-																	
			Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	100		-	-																	
			Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100		-	-																	
I		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengn RPJMD	100	5,375,000,000	-	-	100	271,813,450		-		110,324,945		183,138,317		178,641,054							
1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koodinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakan	12	1,000,000,000	-	-	4 Kali	19,600,150			1 Kali	3,464,150	3	18,686,055		-	3	18,686,055	3	18,686,055			1.87
			Jumlah Rekomendasi hasil Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	3 Laporan	450,000,000	-	-								40,931,724		47,731,724						9.10	
2		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakan	12 Kali		-	-	1 Dok	50,000,000				21,778,775		24,696,838		-		40,931,724		40,931,724			1.37
			Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan	67 Desa/Kel		-	-										-						#DIV/0!	
5		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Pembangunan manusia	3 Laporan	425,000,000	-	-	1 Laporan	29,999,850				18,607,400	1	29,599,300		-	1	29,599,300	1	29,599,300			6.96
			Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Lporan		-	-							3	18,732,050		24,512,050						2.34	
			Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	67 kali		-	-																#DIV/0!	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi hasil Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia		21,000,000	-	-	1 Dok	112,214,700				43,486,650		50,492,350		106,397,280		50,492,350		50,492,350		240.44	
II		KOORDINASI PERENCANAAN DAN PEREKONOMIAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM (SDA)	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan RPJMD	100	3,950,000,000	-	-	100	329,917,880		-		102,617,130		165,101,050		174,996,360						-	
1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakan	12 kali	750,000,000	-	-	4 Kali	43,260,000		-	2 Kali	12,346,300	3	26,180,000		42,970,000	3	26,180,000	3	26,180,000		3.49	
2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	450,000,000	-	-	1 Laporan	20,000,000		-		8,149,850	2	17,380,000		19,975,000	2	17,380,000	2	17,380,000		3.86	
3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Mōnitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian	12 Laporan	300,000,000	-	-	4 Laporan	18,006,600			3 Laporan	15,335,800	4	18,006,800		-	4	18,006,800	4	18,006,800		6.00	
4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi hasil Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian		21,000,000	-	-	1 Dok	99,999,950		-		24,475,650		39,899,650		-		39,899,650		39,899,650		190.00	
5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakan	12 Kali	750,000,000	-	-	4 Kali	42,684,100		-	2 Kali	11,104,700	3	15,697,200		39,177,330	3	15,697,200	3	15,697,200		2.09	
6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Lporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang SDA	3 Laporan	450,000,000	-	-	1 Laporan	6,217,330		-		1,922,430				4,477,030		1,922,430		1,922,430		0.43	
7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA	12 laporan	450,000,000	-	-	4 Laporan	28,980,000		-	1 Laporan	7,415,900	2	13,275,900		24,307,000	2	13,275,900	2	13,275,900		2.95	
8		Koordinasi Pelaksanaan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Rekomendasi hasil Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		21,000,000	-	-	1 Dok	70,769,900		-		21,866,500		34,661,500		44,090,000		34,661,500		34,661,500		165.05	
III		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD	100	5,300,000,000	-	-	100	697,992,550													-		
	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakan		12 kali	-		-						3	93,895,750		32,191,850			7.82						
	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		6 Dok	-		-											#DIV/0!							
2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur	3 Laporan	400,000,000	-	-	1 Laporan	10,634,950		-		4,324,400	1	78,656,300		10,634,950	1	78,656,300	1	78,656,300		19.66	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur	12 Kali	650,000,000	-	-	4 Laporan	42,277,900	-	2	23,559,200	3	71,324,550		42,097,900	3	71,324,550	3	30,150,000		4.64		
4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi hasil Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	12 kali	21,000,000	-	-	1 Dok	78,587,600		-	69,980,100		72,748,700		78,586,600	72,748,700	72,748,700	72,748,700	72,748,700		346.42		
			Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakan			4 Kali		3 Kali		93,895,750			131,968,650		7.82									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	6 Dok		-	-	2 dok														#DIV/0!		
6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Kewilayahan	3 laporan	400,000,000	-	-	1 Laporan	85,516,700	-		76,212,200		78,656,300		85,511,700		78,656,300		78,656,300		19.66		
7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan	12 Kali	650,000,000	-	-	4 Laporan	192,330,100	-	2 laporan	48,034,400		71,324,550		184,330,100		71,324,550		71,324,550		10.97		
8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rekomendas hasil Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan		21,000,000	-	-	1 Dok	118,274,800	-		36,463,200		53,282,300		116,510,580		53,282,300		53,282,300		253.73		
C		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	100	23,675,000,000	-	-															-		
I		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dilaksanakan																			#DIV/0!		
1		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		10,500,000			1 Dok	154,364,630		1 Dok	152,822,330	1 Dok	154,364,630		154,364,630	1 Dok	154,364,630	1 Dok	154,364,630		1,470.14		
I		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan	32 Dok	6,650,000,000	-	-	100	765,774,860													-		
1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	6 Dok	1,200,000,000	-	-	2 Dok	155,111,030	-		110,111,030	1 Dok	155,111,030		155,111,030	1 Dok	155,111,030	1 Dok	155,111,030		12.93		
2		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Dok	650,000,000	-	-	1 Dok	99,850,000	-						-		10,881,500				-		
3		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan							175,000,000						175,000,000		-							
4		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	6 Dok	1,500,000,000	-	-	2 Dok	335,813,830	-		-		245,274,130		355,339,130		30,204,130		30,204,130		2.01		
II		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan		8,775,000,000	-	-	65	305,246,360													-		
1		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebungan, dan Pangan		10,500,000	-	-	2 Dok	119,464,400	-		-	1	119,464,400		-	1	102,664,530	1	102,664,530		977.76		
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		10,500,000	-	-	2 Dok	153,101,730	-		-	1	150,000,000		152,664,530	1	102,664,530	1	102,664,530		977.76		
											-		23,445,730				32,405,730		23,445,730		23,445,730		223.29	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV				12			13= 6 + 12		14 = 13/5x100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																									
kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan																									
kerjasama antar mitra CSR (swasta/BUMN/BUMD) dengan Pemda																									
komitmen Bupati dan Perangkat Daerah yang bersama-sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023																									
kerjasama antar perangkat daerah dan Bappeda																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja																									
Respon yang kurang dari mitra CSR																									
Belum konsistennya keterkaitan antar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah																									
Perangkat Daerah kurang memahami cara pengisian dalam pengendalian dan evaluasi																									
Perangkat Daerah Telambat dalam pengiriman data pelaporan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : percepatan kegiatan																									
Penyelesaian perbaikan lapooran akhir kegiatan pengembangan inovasi daerah																									
Penyusunan buku/dokumen data CSR/TJLSP																									
Penyusunan dan pembahasan perencanaan dilakukan lebih awal, agar proses perencanaan sesuai dengan ketentuan																									
Laporan evaluasi direkap per smester dan per triwulan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daeah Kabupaten/Kota berikutnya') :																									
Ada usulan CSR yang terealisasi																									
Perlunya konsolidasi capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah agar capaian sasaran strategis Perangkat Daerah dapat tercapai																									
Dalam evaluasi pelaporan renja sesuai dengan indikatornya renstra/RPJMD																									
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH																									
I.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100	3,175,920,359,029	79.44	12,456,078,717.00	100	15,095,931,747.00	15.04	2,270,074,812.00	37.58	5,673,711,270.00	56.41	8,515,858,330.00	-	13,731,516,563	56.41	13,731,516,563.00	90.71	26,187,595,280.00	90.71	0.43		
	1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	3,267,000,000	99.52	220,908,400.00	100	278,061,840.00	15.03	41,805,810.00	33.92	94,320,240.00	66.38	184,586,580.00	99.22	275,898,440	99.22	275,898,440.00	198.74	496,806,840.00	198.74	15.21	BPKD	
	2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	3,168,383,175,529	78.04	11,406,362,189.00	100	13,457,749,150.00	15.71	2,113,872,976.00	39.23	5,279,046,359.00	57.21	7,699,273,249.00	91.47	12,310,392,829	91.47	12,310,392,829.00	91.47	23,716,745,018.00	91.47	0.75	BPKD	
	3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	996,600,000.00	98.98	487,467,866.00	100	407,180,000.00	16.99	69,193,211.00	48.44	197,217,711.00	73.62	299,770,491.00	99.30	404,335,497.00	99.30	404,335,497.00	99.30	891,803,363.00	99.30	89.48	BPKD	
	4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah	100	2,699,823,500.00	98.76	181,584,000.00	100	209,397,500.00	0.00	-	-	-	89.97	188,392,900.00	100.00	209,392,900.00	100.00	209,392,900.00	98.76	390,976,900.00	98.76	14.48	BPKD	
	5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	189,200,000.00	95.57	26,940,340.00	100	558,532,470.00	3.89	21,737,300.00	8.30	46,377,150.00	11.52	64,320,350.00	62.47	348,894,350.00	62.47	348,894,350.00	158.04	375,834,690.00	158.04	198.64	BPKD	
	6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	384,560,000.00	96.89	132,825,922.00	100	185,010,787.00	12.68	23,465,515.00	30.67	56,749,810.00	42.98	79,514,760.00	98.70	182,602,547.00	98.70	182,602,547.00	195.59	315,428,469.00	195.59	47.48	BPKD	
II		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100	392,334,444,847.00	99.88	45,705,208,036.00	100	101,869,171,187.00	0.35	360,116,176.00	8.66	8,822,422,889.00	29.65	30,208,973,627.00	96.98	98,790,911,488	96.98	98,790,911,488.00	96.98	144,496,119,524.00	96.98	25.18		
	1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tercapainya persetujuan / penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	100	24,040,258,880.00	90.23	1,962,143,600.00	100	1,957,188,190.00	12.03	235,394,530.00	26.66	521,690,160.00	55.72	1,090,468,110.00	92.85	1,817,294,106.00	92.85	1,817,294,106.00	183.08	3,779,437,706.00	183.08	15.72	BPKD	
	2.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tercapainya koordinasi, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan	100	8,431,500,000.00	92.48	541,973,100.00	100	1,094,783,520.00	4.43	48,444,350.00	22.05	241,399,030.00	69.65	762,494,390.00	91.18	998,230,343.00	91.18	998,230,343.00	183.66	1,540,203,443.00	183.66	18.27	BPKD	
	3.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100	13,631,843,060.00	96.14	1,966,713,948.00	100	1,863,040,720.00	2.32	43,225,300.00	19.22	358,007,780.00	70.20	1,307,864,854.00	96.38	1,795,687,913.00	96.38	1,795,687,913.00	192.52	3,762,401,861.00	192.52	27.60	BPKD	
	4.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100	343,261,062,907.00	42.54	40,834,248,490.00	100	96,604,343,357.00	0.03	33,051,996.00	7.92	7,652,556,019.00	27.92	26,968,264,373.00	97.13	93,829,893,726	97.13	93,829,893,726.00	139.67	134,664,142,216.00	139.67	39.23	BPKD	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	100	2,969,780,000.00	81.37	400,128,898.00	100	349,815,400.00	-	-	13.94	48,769,900.00	22.84	79,881,900.00	100.00	349,805,400.00	100.00	349,805,400.00	181.37	749,934,298.00	181.37	25.25	BPKD
III		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100	21,269,050,000.00	94.29	965,287,041.00	100	1,179,436,054.00	14.87	150,375,830.00	21.97	259,157,730.00	45.43	535,858,760.00	99.51	1,173,628,664.00	99.51	1,173,628,664.00	193.80	2,138,915,705.00	193.80	10.06	
	1.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang milik daerah	100	21,269,050,000.00	94.29	965,287,041.00	100	1,179,436,054.00	14.87	150,375,830.00	21.97	259,157,730.00	45.43	535,858,760.00	99.51	1,173,628,664.00	99.51	1,173,628,664.00	193.80	2,138,915,705.00	193.80	10.06	BPKD
IV		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan yang berkelanjutan	100	123,011,913,750.00	59.90	2,904,729,590.00	100	4,974,078,980.00	3.33	162,061,660.00	13.76	684,586,580.00	17.27	859,000,730.00	53.99	2,685,619,839.00	17.27	2,685,619,839.00	53.99	5,590,349,429.00	53.99	4.54	
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan obyek dan potensi penerimaan daerah	100	123,011,913,750.00	59.9	2,904,729,590.00	100	4,974,078,980.00	3.33	162,061,660.00	13.76	684,586,580.00	17.27	859,000,730.00	53.99	2,685,619,839.00	53.99	2,685,619,839.00	53.99	5,590,349,429.00	53.99	4.54	BPKD
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										1445.35%		2165.07%		4702.75%		8954.26%		8543.36%		14149.83%				
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *) :																								
*) di isi oleh kepala Bappeda																								
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM																								
	Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara	Program Kepegawaian Daerah																						
		Pengembangan Kompetensi ASN																						
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Bimtek (2 orang)	100.00%	250,000,000	0.00%	-	100.00%	28,875,000	0.00%	0	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	Sub. Bid. Diklat dan Kompetensi
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Laki2 & Perempuan yang mendapatkan bantuan Pendidikan Tugas dan Izin Belajar (74 Orang)	100.00%	1,240,000,000	0.00%	-		85,029,100	2.59%	2,198,200	4.00%	3,398,200	64.55%	54,882,600	5.24%	4,458,950	76.37%	64,937,950	5.24%	64,937,950	5.24%	64,937,950	Sub. Bid. Diklat dan Kompetensi
		Program Kepegawaian Daerah																						
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																						
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Pendaftar Pendaftaran IPDN yang terfasilitasi (35 Pendaftar)	100.00%	230,417,200	0.00%	-		17,277,200	0.00%	0	5.90%	1,018,800	4.34%	749,800	0.00%	-	10.24%	1,768,600	0.77%	1,768,600	0.77%	1,768,600	Sub. Bid. Diklat dan Kompetensi
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
	Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar operasional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																						
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompotensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Calon PNS Daerah laki-laki dan perempuan yang mengikuti diklat prajabatan (orang), Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikuti DiklatpimTk. III dan IV dan Diklatpim Tk. II/pola pengriman. (134 orang)	100.00%	10,489,455,400	0.00%	-		1,389,566,000	0.88%	12,194,800	0.71%	9,865,700	94.52%	1,313,467,500	3.87%	53,789,500	99.98%	1,389,317,500	13.24%	1,389,317,500	13.24%	1,389,317,500	Sub. Bid. Diklat dan Kompetensi
		Program Kepegawaian Daerah																						
		Mutasi dan Promosi ASN																						
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Seleksi JPTP Eselon II (2 kali)	100.00%	1,449,880,100	0.00%	-		328,181,790	34.78%	114,129,630	12.65%	41,500,000	4.29%	14,064,700	34.01%	111,603,400	85.71%	281,297,730	19.40%	281,297,730	19.40%	281,297,730	Sub. Bid. Mutasi dan Promosi
		Program Kepegawaian Daerah																						
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	Penerimaan CPNS Formasi Umum dari Kemenpan tahun 2019-2023 (150 CPNS)	100.00%	865,000,000	0.00%	-		165,454,100	18.91%	31,284,130	1.45%	2,400,000	3.84%	6,345,480	9.08%	15,030,060	33.28%	55,059,670	6.37%	55,059,670	6.37%	55,059,670	Sub Bid. Pengadaan dan Pemberhentian
		Program Kepegawaian Daerah																						
		Mutasi dan Promosi ASN																						
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah pejabat eselon pada jabatan struktural dari jabatan yang tersedia (650 Pejabat)	100.00%	281,947,150	0.00%	-		47,334,900	0.00%	-	17.11%	8,100,000	22.92%	10,849,300	3.80%	1,800,000	43.84%	20,749,300	7.36%	20,749,300	7.36%	20,749,300	Sub. Bid. Mutasi dan Promosi
	Meningkatnya disiplin pegawai ASN	Program Kepegawaian Daerah																						
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																						
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNSD Laki2 & Perempuan (5 Kasus Berat/Sedang/Ringan)	100.00%	640,755,450	0.00%	-		119,161,850	37.02%	44,114,037	14.99%	17,859,500	15.62%	18,614,150	26.80%	31,936,950	94.43%	112,524,637	17.56%	112,524,637	17.56%	112,524,637	Sub Bid. Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur
	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN	Program Kepegawaian Daerah																						
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																						
		Pengelolaan Pemberiaan Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah pelayanan Pemberian Penghargaan kepada PNS Laki2 & Perempuan dan Fasilitasi Kartu Kepegawaian (774 orang)	100.00%	630,909,800	0.00%	-		80,487,400	40.05%	32,231,700	2.98%	2,400,000	14.83%	11,940,000	41.99%	33,795,700	99.85%	80,367,400	12.74%	80,367,400	12.74%	80,367,400	Sub Bid. Kesejahteraan dan Penghargaan
	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah																						
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																						
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah administrasi ASN yang memasuki masa pensiun (130 Orang)	100.00%	380,000,000	0.00%	-		56,996,810	9.34%	5,324,630	29.73%	16,947,630	6.23%	3,550,200	18.57%	10,582,800	63.87%	36,405,260	9.58%	36,405,260	9.58%	36,405,260	Sub Bid. Pengadaan dan Pemberhentian
		Program Kepegawaian Daerah																						
		Mutasi dan Promosi ASN																						
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang memperoleh SK Kenaikan Pangkat Otomatis Periode April dan Oktober (800 Orang)	100.00%	1,324,732,650	0.00%	-		214,717,750	27.55%	59,153,810	7.23%	15,532,000	29.07%	62,408,000	4.45%	9,547,500	68.29%	146,641,310	11.07%	146,641,310	11.07%	146,641,310	Sub. Bid. Mutasi dan Promosi
	Tersediany akurasi data kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah																						
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																						
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah update data Kenaikan Pangkat PNSD Laki2 & Perempuan (orang) dan Entry data PNS yang memasuki Pensiun (930 orang)	100.00%	213,222,300	0.00%	-		52,338,950	2.29%	1,200,000	13.18%	6,900,000	54.42%	28,483,020	9.88%	5,171,000	79.78%	41,754,020	19.58%	41,754,020	19.58%	41,754,020	Sub. Bid. Informasi Kepegawaian
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Data Kepegawaian (4200 Dokumen/Arsip)	100.00%	168,328,000	0.00%	-		21,648,550	5.54%	1,200,000	14.55%	3,150,000	8.31%	1,800,000	34.44%	7,456,400	62.85%	13,606,400	8.08%	13,606,400	8.08%	13,606,400	Sub. Bid. Informasi Kepegawaian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota																						
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 dok/ Laporan)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 dok/ Laporan)	100.00%	237,731,200	0.00%	-	30,556,450	18.87%	5,765,600	19.03%	5,815,700	20.90%	6,387,600	41.16%	12,578,550	99.97%	30,547,450	12.85%	30,547,450	12.85%	30,547,450	Sub Bag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (12 bulan)	100.00%	16,516,080,000	0.00%	-	1,826,554,800	19.70%	359,877,129	25.65%	468,450,140	21.12%	385,689,994	22.84%	417,257,407	89.31%	1,631,274,670	9.88%	1,631,274,670	9.88%	1,631,274,670	Sub Bag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (12 bulan)	100.00%	284,722,100	0.00%	-	39,892,800	17.75%	7,081,700	15.40%	6,142,550	24.56%	9,796,000	34.73%	13,854,950	92.44%	36,875,200	12.95%	36,875,200	12.95%	36,875,200	Sub Bag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Laporan/ Dokumen)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Laporan/ Dokumen)	100.00%	57,116,050	0.00%	-	9,249,900	99.99%	9,248,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	99.99%	9,248,800	16.19%	9,248,800	16.19%	9,248,800	Sub Bag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Administrasi Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (12 Bulan)	100.00%	38,947,500	0.00%	-	6,692,750	14.66%	981,350	15.11%	1,011,400	8.51%	569,650	61.59%	4,122,150	99.88%	6,684,550	17.16%	6,684,550	17.16%	6,684,550	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Administrasi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (12 bulan)	100.00%	90,200,000	0.00%	-	6,000,000	90.83%	5,450,000	6.67%	400,000	0.00%	-	0.00%	-	97.50%	5,850,000	6.49%	5,850,000	6.49%	5,850,000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keikutsertaan pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi (100%)	100.00%	647,316,000	0.00%	-	184,524,000	23.67%	43,675,800	20.03%	36,951,900	15.53%	28,655,180	40.53%	74,791,994	99.76%	184,074,874	28.44%	184,074,874	28.44%	184,074,874	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (7 Unit)	100.00%	748,199,800	0.00%	-	18,079,200	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	18,079,200	0.00%	-	100.00%	18,079,200	2.42%	18,079,200	2.42%	18,079,200	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Administrasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 Bulan)	100.00%	198,240,000	0.00%	-	48,234,000	25.40%	12,253,580	20.60%	9,935,102	21.04%	10,146,810	27.88%	13,446,136	94.92%	45,781,628	23.09%	45,781,628	23.09%	45,781,628	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Kebersihan Kantor dan pengamanan kantor (12 Bulan)	100.00%	166,579,100	0.00%	-	41,731,210	25.15%	10,495,250	24.84%	10,367,420	21.57%	9,000,000	28.44%	11,867,830	100.00%	41,730,500	25.05%	41,730,500	25.05%	41,730,500	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah																						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (3 Unit)	100.00%	182,710,000	0.00%	-	56,254,000	22.83%	12,844,330	32.61%	18,346,814	24.21%	13,616,768	19.08%	10,735,520	98.74%	55,543,432	30.40%	55,543,432	30.40%	55,543,432	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (18 Unit)	100.00%	70,720,000	0.00%	-	19,220,000	8.90%	1,710,000	15.82%	3,040,000	17.48%	3,360,000	57.70%	11,090,000	99.90%	19,200,000	27.15%	19,200,000	27.15%	19,200,000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (1 Unit)	100.00%	652,250,000	0.00%	-	119,757,000	0.00%	0	41.67%	49,900,000	0.00%	-	58.33%	69,850,000	99.99%	119,750,000	18.36%	119,750,000	18.36%	119,750,000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
	Meningkatnya kualitas laporan perencanaan, keuangan dan aset	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota																						
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 Dokumen/ Lap)	100.00%	242,342,000	0.00%	-		32,981,400	22.24%	7,334,200	22.44%	7,400,300	12.80%	4,221,900	42.43%	13,993,800	99.91%	32,950,200	13.60%	32,950,200	13.60%	32,950,200	Sub Bag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										21.07%		19.98%		22.11%		33.60%		99.06%		19.22%						
Predikat Kinerja																										
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *) :																										
*) di isi oleh kepala Bappeda																										
SEKRETARIAT DPRD																										
Meningkatkan Pelayanan Publik bagi anggota DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program : Indeks Kinerja Sekretariat DPRD			47,998,218,000		29,039,955,818		14,806,912,636	21%	3,143,796,454	37.97%	5,481,935,469	67.51%	9,747,711,800	100.00%	14,146,895,993	100.00%	14,146,895,993	0.90	43,186,851,811	0.90	43,186,851,811			
				100 Persen		60 Persen		100 Persen																		
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 Persen	401,000,000	60 Persen	155,295,000	100 Persen	105,878,000	48.31%	51,150,000	48.31%	51,150,000	89.58%	94,850,000	100.00%	10,537,000	100.00%	10,537,000	0.41	165,832,000	0.41	165,832,000		
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	7,097,118,000	60 Persen	4,502,333,450	100 Persen	1,784,222,320	14.73%	297,537,855	34.94%	705,761,183	54.59%	1,102,651,774	100.00%	1,547,637,541	100.00%	1,547,637,541	0.85	6,049,970,991	0.85	6,049,970,991		
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	1,416,000,000	60 Persen	801,128,760	100 Persen	372,913,460	26.28%	91,148,600	55.48%	192,372,600	65.63%	227,602,600	100.00%	357,135,000	100.00%	357,135,000	0.82	1,158,263,760	0.82	1,158,263,760		
			Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilayani	Persentase Administras Keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dilayani	100 Persen	32,750,000,000	60 Persen	20,795,045,200	100 Persen	10,761,694,700	23.28%	2,526,049,315	34.20%	4,204,925,781	70.32%	7,630,981,450	100.00%	10,413,865,102	100.00%	10,413,865,102	0.95	31,208,910,302	0.95	31,208,910,302		
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Bai	100 Persen	3,942,100,000	60 Persen	1,536,968,832	100 Persen	1,273,871,376	20.99%	155,335,092	34.20%	253,120,092	71.35%	528,059,792	100.00%	1,246,047,001	100.00%	1,246,047,001	0.71	2,783,015,833	0.71	2,783,015,833		
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	744,000,000	60 Persen	294,861,000	100 Persen	253,772,950	0	-	0	-	49.89%	38,050,000	100.00%	235,772,800	100.00%	235,772,800	0.71	530,633,800	0.71	530,633,800		
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Urusan Perangkat Daerah Berjalan Dengan Baik dan Lancar	100 Persen	1,243,000,000	60 Persen	690,766,176	100 Persen	215,479,200	7.87%	21,446,592	24.06%	65,608,813	41.41%	112,919,187	100.00%	201,960,839	100.00%	201,960,839	0.72	892,727,015	0.72	892,727,015		
			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	405,000,000	60 Persen	263,557,400	100 Persen	39,619,630	4.57%	1,129,000	36.40%	8,997,000	50.97%	12,597,000	100.00%	39,107,350	100.00%	39,107,350	0.75	302,664,750	0.75	302,664,750		
			Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indikator Program : Jumlah rancangan perda yang ditetapkan bersama (Legislatif dan Eksekutif)			38,512,400,000		19,192,684,200		12,031,616,820	25.78%	3,102,069,752	59.90%	7,207,097,135	80	10,194,014,123	100	13,939,866,438	100	13,939,866,438	0.86	33,132,550,638	0.86	33,132,550,638
	44 Perda	-				31 Perda		8 Perda													-	0.00	-			
Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD yang dilayani	Persentase Tugas Anggota DPRD yang dilayani	100 Persen				15,212,234,000	60 Persen	7,548,045,750	100 Persen	6,141,153,100	28.51%	1,414,855,800	60.17%	3,012,780,653	85.79%	4,255,591,000	100.00%	6,128,912,216	100.00%	6,128,912,216	0.90	13,676,957,966	0.90	13,676,957,966		
Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Ranperda Yang dibahas	44 Perda				7,897,056,000	31 Perda	4,262,297,300	8 Perda	2,652,077,800	17.32%	383,405,852	74.04%	1,638,676,152	6 Perda	2,158,188,817	100	2,643,348,039	100	2,643,348,039	0.87	6,905,645,339	0.87	6,905,645,339		
Kegiatan : Pengawasan	Tertaksananya Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen				4,750,000,000	60 Persen	2,094,675,300	100 Persen	1,568,209,200	29.67%	423,868,500	61.04%	871,944,630	94.50%	1,350,048,630	100.00%	1,566,497,601	100.00%	1,566,497,601	0.77	3,661,172,901	0.77	3,661,172,901		
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	100 Persen				5,463,000,000	60 Persen	2,070,080,850	100 Persen	2,403,524,160	23.18%	512,259,600	43.08%	951,920,200	74.22%	1,640,059,400	100.00%	2,394,767,582	100.00%	2,394,767,582	0.82	4,464,848,432	0.82	4,464,848,432		
Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	95 Persen				5,190,110,000	45 Persen	3,217,585,000	95 Persen	1,217,500,000	30.20%	367,680,000	60.10%	731,775,500	64.90%	790,125,500	100.00%	1,206,341,000	100.00%	1,206,341,000	0.85	4,423,926,000	0.85	4,423,926,000		
TOTAL					86,510,618,000		48,232,640,018		26,838,529,456	23.60%	6,245,866,206	47.94%	12,689,032,604	75.34%	19,941,725,923		28,086,762,431	47.94%	28,086,762,431	0.88	76,319,402,449	0.88	76,319,402,449			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																										

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *) :																								
*) di isi oleh kepala Bappeda																								
SEKRETARIAT DAERAH																								
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Pelaksanaan Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum					98	12,682,070,792.00	19	534,248,970.00	49	6,205,124,326.00	11	731,352,350.00	18	2,491,107,064.00	98	9,961,832,710.00	97	15,189,343,400.00	#DIV/0!	3,037,868,680.00	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Jenis Pelayanan Dasar Pemerintah dan Penegasan Tapal Batas Wilayah			179,851,090	100	146,568,950	43	13,810,500	14	70,905,000	9	27,000,000	33	34,058,450	100	145,773,950	95.00	325,625,040	#DIV/0!	65,125,008		
1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Dokumen SPM			44,560,400	100	12,370,500	100	11,760,500.00	0	-	0	0.00	0	0.00	100	11,760,500	100	56,320,900	#DIV/0!	11,264,180.00		
2		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Berdirinya Pilar Batas Daerah/Wilayah antar Kabupaten			89,869,290	100	99,990,000	30	2,050,000.00	43	70,905,000.00	27	27,000,000.00	0	0.00	100	99,955,000	100	189,824,290	#DIV/0!	37,964,858.00		
3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Daerah			45,421,400	100	34,208,450	-	-	0	-	0	0.00	100	34,058,450.00	100	34,058,450	100	79,479,850	#DIV/0!	15,895,970.00		
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan - Kegiatan di Bidang Keagamaan			3,699,649,750	100	11,552,062,342	3	430,702,670	73	5,812,896,826	4	597,827,050	11	1,992,075,714	90	8,833,502,260	88	12,533,152,010	#DIV/0!	2,506,630,402		
4		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tersedianya Data Keagamaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dibidang Keagamaan			855,982,000	100	970,675,310.00	3	19,046,600.00	74	406,890,240.00	6	30,031,700.00	17	514,691,070.00	100	970,659,610	100	1,826,641,610	#DIV/0!	365,328,322.00		
5		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Koordinasi dan Permusunan Kebijakan Pemerintah Dibidang Kesehatan, Penanganan Sosial dan Pendidikan serta Pemberian Bantuan Hibah Bidang Keagamaan			593,658,450	100	864,480,000.00	2	3,987,900.00	88	228,150,900.00	1	3,216,000.00	9	629,125,200.00	100	864,480,000	85	1,458,138,450	#DIV/0!	291,627,690.00		
6		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tersedianya Bahan Koordinasi dan Perencanaan Dibidang Kepemudaan, Budaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Informatika			2,250,009,300	100	9,716,907,032.00	4	407,668,170.00	56	5,177,855,686.00	4	564,579,350.00	8	848,259,444.00	72	6,998,362,650	80	9,248,371,950	#DIV/0!	1,849,674,390.00		
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terkoordinirnya Penataan / Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Terasilinasinya Bantuan Hukum			449,336,617	95	983,439,500	26	89,735,800	49	321,322,500	17	106,525,300	4	464,972,900	95	982,556,500	95	2,330,566,350	#DIV/0!	466,113,270		
7		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah, Jumlah Perda, Jumlah Keputusan Bupati yang Dianalisis, Jumlah Perjanjian Kerjasama MOU dan Kebijakan Lainnya			267,494,200	95	161,107,900.00	20	15,887,500.00	42	32,124,300.00	27	21,017,500.00	6	91,839,000.00	95	160,868,300	95	428,362,500	#DIV/0!	85,672,500.00		
8		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Aparatur Pemerintah dan Desa yang Menerima Bantuan Hukum terkait Tugasnya dan Masyarakat yang Menerima Bantuan Hukum			891,998,650	95	691,066,600.00	12	46,692,500.00	59	262,656,600.00	19	81,525,700.00	5	299,826,500.00	95	690,701,300	95	1,582,699,950	#DIV/0!	316,539,990.00		
9		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Hukum yang telah di Himpun			188,517,000	95	131,265,000.00	45	27,155,800.00	45	26,541,600.00	5	3,982,100.00	0	73,307,400.00	95	130,986,900	95	319,503,900	#DIV/0!	63,900,780.00		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Pelaksanaan Perekonomian, Pembangunan dan Pengelolaan Barang dan Jasa					99	1,182,336,140.00	23	266,183,160.00	44	359,750,140.00	17	243,684,160.00	14	301,167,100.00	99	1,170,784,560.00	99	2,045,301,858.00	#DIV/0!	409,060,371.60	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Perekonomian					99	221,149,890.00	21	39,298,030.00	47	88,010,910.00	19	36,672,700.00	12	56,801,000.00	99	220,782,640.00	99	482,722,588.00	#DIV/0!	96,544,517.60	
10		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kinerja BUMD dan BLUD lebih Maksimal				83,776,098	99	79,999,950.00	22	17,358,800.00	40	32,223,100.00	20	16,308,700.00	17	13,936,350.00	99	79,826,950	99	163,603,048	#DIV/0!	32,720,609.60	
11		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian Harga dan Sistribusi Bahan Pokok				134,700,850	99	95,533,090.00	16	10,490,630.00	51	33,624,310.00	20	12,338,000.00	12	38,990,650.00	99	95,443,590	99	230,144,440	#DIV/0!	46,028,888.00	
12		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Adanya Rumusan dan Regulasi UMKM Bagi Para Pelaku Usaha Orang Kecil				43,463,000	99	45,616,850.00	25	11,448,600.00	49	22,163,500.00	17	8,026,000.00	8	3,874,000.00	99	45,512,100	99	88,975,100	#DIV/0!	17,795,020.00	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan					100	199,049,860.00	23	40,076,800.00	36	77,917,330.00	18	36,302,860.00	22	44,619,670.00	100	198,916,660.00	100	386,662,360.00	#DIV/0!	77,332,472.00	
13		Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan				45,379,150	100	53,559,950.00	25	11,889,700.00	37	21,528,930.00	16	8,226,900.00	22	11,859,420.00	100	53,504,950	100	98,884,100	#DIV/0!	19,776,820.00	
14		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				64,130,800	100	75,490,000.00	20	12,845,100.00	34	27,741,000.00	21	16,335,900.00	25	18,496,400.00	100	75,418,400	100	139,549,200	#DIV/0!	27,909,840.00	
15		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Data Objek Evaluasi dan Pelaporan				78,235,750	100	69,999,910.00	25	15,342,000.00	38	28,647,400.00	17	11,740,060.00	20	14,263,850.00	100	69,993,310	100	148,229,060	#DIV/0!	29,645,812.00	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya Sistem Pelaksanaan dan Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa					97	583,889,900.00	31	155,605,800.00	24	107,254,800.00	15	132,282,300.00	26	177,862,000.00	97	573,004,900.00	97	868,245,900.00	#DIV/0!	173,649,180.00	
16		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pelayanan Proses Pengadaan Barang Jasa melalui UKPBJ				176,903,550	95	214,311,900.00	25	48,323,900.00	16	30,529,400.00	24	45,987,700.00	30	86,210,900.00	95	211,051,900	95	387,955,450	#DIV/0!	77,591,090.00	
17		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara Elektronik (e-Procurement)				58,885,450	95	194,500,000.00	32	43,783,800.00	31	51,855,400.00	13	50,937,200.00	19	43,743,800.00	95	190,320,200	95	249,205,650	#DIV/0!	49,841,130.00	
18		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan serta Penyelesaian Sanggah atas Proses Pengadaan Barang/Jasa				59,452,000	100	175,078,000.00	37	63,498,100.00	26	24,870,000.00	8	35,357,400.00	29	47,907,300.00	100	171,632,800	100	231,084,800	#DIV/0!	46,216,960.00	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pelaksanaan Pemantauan terkait Kebijakan Sumber Daya Alam					99	178,246,490.00	20	31,202,530.00	49	86,567,100.00	20	38,426,300.00	11	21,884,430.00	99	178,080,360.00	99	307,671,010.00		61,534,202.00	
19		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Struktur Pertanian, Kelautan, Kehutanan dan Perikanan				44,482,000	99	43,246,800.00	24	10,398,000.00	49	21,352,500.00	17	7,369,300.00	9	3,981,000.00	99	43,100,800	99	87,582,800	#DIV/0!	17,516,560.00	
20		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Hasil Pemantauan dan Kebijakan Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup				85,108,650	99	84,999,890.00	15	12,889,930.00	49	41,908,300.00	23	19,301,300.00	12	10,899,130.00	99	84,998,660	99	170,107,310	#DIV/0!	34,021,462.00	
21		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Wilayah yang memiliki energi dan air				-	99	49,999,800.00	16	7,914,600.00	46	23,306,300.00	24	11,755,700.00	13	7,004,300.00	99	49,980,900		49,980,900		9,996,180.00	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelaksanaan Penunjang Urusan dan Administrasi Pemerintah Daerah					#REF!	43,562,380,988.00	#REF!	6,851,174,594.00	#REF!	9,116,093,317.00	#REF!	10,075,264,309.00	20.46	13,504,054,278.00	#REF!	35,023,363,648.00	#REF!	73,674,965,229.00	#DIV/0!	#####	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja tepat Waktu					38	525,525,800.00	13	107,905,859.00	1	78,534,400.00	6	122,619,494.00	18	180,819,500.00	37	489,879,253.00	37	965,808,865.00		193,161,773.00	
22		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun dan ditetapkan/Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan				83,017,800	4	89,220,200.00	1	15,695,700.00	1	29,319,500.00	1	12,026,100.00	1	32,178,900.00	4	89,220,200	4	172,238,000	#DIV/0!	34,447,600.00	
23		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perubahan yang Tersusun				111,112,500	9	123,703,300.00	2	24,261,200.00	1	35,722,700.00	1	17,758,500.00	1	44,644,900.00	5	122,387,300	5	233,499,800	#DIV/0!	46,699,960.00	
24		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perubahan yang Tersusun				60,049,200	12	70,502,300.00	-	-	-	-	6	28,458,100.00	6	37,244,200.00	12	65,702,300	12	125,751,500	#DIV/0!	25,150,300.00	
25		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Sekretariat Daerah				49,823,300	4	42,100,000.00	1	7,466,700.00	1	13,492,200.00	1	7,652,300.00	1	13,488,800.00	4	42,100,000	4	91,923,300	#DIV/0!	18,384,660.00	
26		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen LKPJ yang Tersusun Dan dilaporkan - Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun Dan dilaporkan _ Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan				171,926,812	160	200,000,000.00	60	60,482,259.00	0	-	20	56,724,494.00	80	53,262,700.00	160	170,469,453	160	342,396,265	#DIV/0!	68,479,253.00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					39	8,943,363,390.00	8	1,429,439,185.00	10	2,384,928,300.00	6	1,965,850,645.00	15	2,105,788,135.00	39	7,886,006,265.00	39	15,647,455,121.00	#DIV/0!	3,129,491,024.20	
27		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan				7,590,611,666	12	8,765,117,950.00	4	1,376,621,635.00	3	2,343,303,940.00	3	1,942,604,525.00	2	2,050,830,725.00	12	7,713,360,825	12	15,303,972,481	#DIV/0!	3,060,794,496.20	
28		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan				136,427,000	100	143,835,240.00	15	22,407,350.00	26	37,624,360.00	16	23,246,120.00	43	54,957,410.00	100	138,235,240	100	274,662,240	#DIV/0!	54,932,448.00	
29		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun				34,410,200	5	34,410,200.00	5	30,410,200.00	0	4,000,000.00	0	0.00		0.00	5	34,410,200	5	68,820,400	#DIV/0!	13,764,080.00	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertatanya pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100	754,700,000.00	22	161,892,274.00	19	146,706,800.00	29	216,555,047.00	30	149,371,000.00	100	674,525,121.00	100	1,460,816,805.00	#DIV/0!	292,163,361.00	
30		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				786,291,684	100	754,700,000.00	22	161,892,274.00	19	146,706,800.00	29	216,555,047.00	30	149,371,000.00	100	674,525,121	100	1,460,816,805	#DIV/0!	292,163,361.00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian					13	678,866,350.00	2	29,285,050.00	6	35,345,300.00	0	3,440,000.00	5	380,602,500.00	13	448,672,850.00	7	656,186,100.00	#DIV/0!	131,237,220.00	
31		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas				54,598,000	13	570,350,000.00	1	13,272,000.00	2	26,238,000.00	0	3,440,000.00	10	310,147,500.00	13	353,097,500	13	407,695,500	#DIV/0!	81,539,100.00	
32		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta yang mengikuti Bimtek dan pendidikan				-	12	31,999,850.00	3	13,267,850.00	9	6,000,000.00	0	0.00	0	0.00	12	19,267,850		19,267,850		3,853,570.00	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13x5/100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
33		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kecamatan /Desa/Kelurahan dan Sekolah dalam Pembinaan Hukum melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum				152,915,250	95	76,516,500.00	6	2,745,200.00	29	3,107,300.00	0	0.00	60	70,455,000.00	95	76,307,500	95	229,222,750	#DIV/0!	45,844,550.00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administasi Umum Perangkat Daerah					100	9,691,045,150.00	14	1,687,027,078.00	18	2,288,430,064.00	46	2,255,966,096.00	17	2,252,670,849.00	95	8,484,094,087.00	95	16,068,320,185.00	#DIV/0!	3,213,664,037.00	
34		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan				237,961,591	100	224,392,400.00	3	52,069,400.00	3	50,872,908.00	87	45,133,576.00	7	76,316,516.00	100	224,392,400	100	462,353,991	#DIV/0!	92,470,798.20	
35		Facilitasi Kunjungan Tamu	Pelayan Tamu Pemb				4,859,260,412	100	5,160,198,750.00	25	1,110,082,552.00	34	1,535,450,756.00	30	1,356,875,168.00	11	1,149,912,681.00	100	5,152,321,157	100	10,011,581,569	#DIV/0!	2,002,316,313.80	
36		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas				2,487,004,095	100	4,306,454,000.00	13	524,875,126.00	17	702,106,400.00	21	853,957,352.00	34	1,026,441,652.00	85	3,107,380,530	85	5,594,384,625	#DIV/0!	1,118,876,925.00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Pemerintah Daerah					75	6,694,697,070.00		30,700,000.00	10	432,482,600.00	16	2,059,666,400.00	61	3,508,114,800.00	88	1,507,740,950.00	88	8,577,968,700.00	#DIV/0!	1,715,593,740.00	
37		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bertambahnya Jumlah Kendaraan				455,300,000	100	4,316,400,000.00	-	-	0	10,365,000.00	40	1,818,185,000.00	60	2,483,900,000.00	100	4,312,450,000	100	4,767,750,000	#DIV/0!	953,550,000.00	
38		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bertambahnya Jumlah Kendaraan				64,165,000	-	67,784,000.00	-	-	0	-	0	0.00	100	67,540,000.00	100.00	67,540,000	100.00	131,705,000	#DIV/0!	26,341,000.00	
39		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur pada Gedung kantor Dan Rumah Jabatan				331,851,300	100	946,928,900.00	6	30,700,000.00	6	34,997,600.00	7	35,850,000.00	74	777,750,800.00	93	879,298,400	93	1,211,149,700	#DIV/0!	242,229,940.00	
40		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Bertambah				1,695,688,600	100	1,363,584,170.00	-	-	33	387,120,000.00	18	205,631,400.00	9	178,924,000.00	60	771,675,400	60	2,467,364,000	#DIV/0!	493,472,800.00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71	7,133,904,006.00	14	1,438,740,915.00	13	1,456,700,439.00	18	1,771,297,075.00	22	2,249,506,752.00	68	6,916,245,181.00	68	13,037,286,980.00	#DIV/0!	2,607,457,396.00	
41		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pendukung Pelaksanaan Perkantoran				4,252,644,841	12	4,891,012,066.00	3	1,100,212,915.00	3	1,115,888,589.00	3	1,257,945,075.00	3	1,349,530,302.00	12	4,823,576,881	12	9,076,221,722	#DIV/0!	1,815,244,344.40	
42		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pendukung Pelaksanaan Perkantoran				627,075,000	100	504,425,000.00	29	146,300,000.00	24	121,620,000.00	30	149,705,000.00	17	86,250,000.00	100	503,875,000	100	1,130,950,000	#DIV/0!	226,190,000.00	
43		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia				1,241,321,958	100	1,738,466,940.00	11	192,228,000.00	13	219,191,850.00	22	363,647,000.00	45	813,726,450.00	91	1,588,793,300	91	2,830,115,258	#DIV/0!	566,023,051.60	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					100	3,207,328,000.00	25	452,789,800.00	26	810,112,642.00	20	541,421,360.00	21	1,109,583,669.00	91	2,913,907,471.00	91	6,172,600,981.00	#DIV/0!	1,234,520,196.20	
44		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelayanan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				427,053,863	100	506,100,000.00	31	124,369,800.00	27	109,777,842.00	22	90,663,000.00	12	162,644,219.00	92	487,454,861	92	914,508,724	#DIV/0!	182,901,744.80	
45		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelayanan dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan				1,113,908,970	100	1,301,280,000.00	23	232,590,000.00	31	304,141,000.00	29	289,483,000.00	11	397,488,500.00	94	1,223,702,500	94	2,337,611,470	#DIV/0!	467,522,294.00	
46		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				141,475,000	100	99,600,000.00	41	40,430,000.00	18	17,950,000.00	16	16,440,000.00	20	20,080,000.00	95	94,900,000	95	236,375,000	#DIV/0!	47,275,000.00	
47		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1,576,255,677	100	1,300,348,000.00	4	55,400,000.00	29	378,243,800.00	12	144,835,360.00	40	529,370,950.00	85	1,107,850,110	85	2,684,105,787	#DIV/0!	536,821,157.40	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					54	1,015,656,162.00	13	238,566,713.00	7	243,120,042.00	7	208,474,042.00	9	262,442,713.00	36	952,603,510.00	36	1,846,566,732.00	#DIV/0!	369,313,346.40	
48		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Menerima Gaji dan Tunjangan				166,502,909	12	171,291,162.00	4	35,677,713.00	3	47,078,042.00	3	47,078,042.00	2	35,677,713.00	12	165,511,510	12	332,014,419	#DIV/0!	66,402,883.80	
49		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas				106,557,500	4	169,565,000.00	2	43,242,000.00	1	43,342,000.00	1	9,596,000.00	0	73,165,000.00	4	169,345,000	4	275,902,500	#DIV/0!	55,180,500.00	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
50		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah	Jaminan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati				20,902,813	100	74,800,000.00	19	9,647,000.00	0	2,700,000.00	0	1,800,000.00	8	3,600,000.00	27	17,747,000	27	38,649,813	#DIV/0!	7,729,962.60	
51		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Bupati				600,000,000	100	600,000,000.00	25	150,000,000.00	25	150,000,000.00	25	150,000,000.00	25	150,000,000.00	100	600,000,000	100	1,200,000,000	#DIV/0!	240,000,000.00	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga					100	3,060,600,000.00	24	741,200,000.00	25	758,950,000.00	25	745,750,000.00	25	745,350,000.00	98	2,991,250,000.00	98	5,972,676,200.00	#DIV/0!	1,194,535,240.00	
52		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Tersedia				1,775,626,200	100	1,848,900,000.00	24	440,900,000.00	24	454,500,000.00	24	443,000,000.00	25	446,650,000.00	97	1,785,050,000	97	3,560,676,200	#DIV/0!	712,135,240.00	
53		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Tersedia				1,205,800,000	100	1,211,700,000.00	25	300,300,000.00	25	304,450,000.00	25	302,750,000.00	25	298,700,000.00	100	1,206,200,000	100	2,412,000,000	#DIV/0!	482,400,000.00	
		Penataan Organisasi	Terbentuknya Unit Kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Ketentuan Perundang - undangan					80	960,843,520.00	48	365,428,400.00	25	268,430,310.00	5	33,858,250.00	2	289,169,760.00	80	956,886,720.00	80	1,649,641,820.00	#DIV/0!	329,928,364.00	
54		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terselenggaranya Revisi Anjab sesuai Revisi Perubahan SOTK				227,796,300	80	435,697,000.00	48	119,337,600.00	25	104,556,280.00	7	17,544,000.00	0	190,959,211.00	80	432,397,091	80	660,193,391	#DIV/0!	132,038,678.20	
55		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Prosentase SKPD yang Melaksanakan Tertib Tata Naskah Dinas Sesuai Peraturan Bupati dan Inovasi terhadap Layanan Publik				154,232,000	80	195,670,520.00	59	91,599,900.00	19	55,658,730.00	0	3,275,250.00	2	44,794,000.00	80	195,327,880	80	349,559,880	#DIV/0!	69,911,976.00	
56		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Prosentase Pemkab Bantaeng dalam yang Menyusun Road Map dalam Pelaksanaan 8 Area Peubahan Reformasi Birokrasi				99,411,500	80	60,000,000.00	24	14,662,200.00	41	32,816,500.00	10	6,776,500.00	5	5,554,800.00	80	59,810,000	80	159,221,500	#DIV/0!	31,844,300.00	
57		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Prosentase SKPD yang Menyusun LKJ dan PK tepat waktu				211,315,300	80	269,476,000.00	61	139,828,700.00	14	75,398,800.00	4	6,262,500.00	1	47,861,749.00	80	269,351,749	80	480,667,049	#DIV/0!	96,133,409.80	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terselenggaranya Seluruh Kegiatan Pemkab Bantaeng					100	895,851,540.00	23	168,199,320.00	29	212,352,420.00	19	150,365,900.00	22	270,634,600.00	92	801,552,240.00	92	1,619,636,740.00	#DIV/0!	323,927,348.00	
58		Fasilitasi Keprotokolan	Terciptanya Pelayanan Keprotokoleran Pejabat dalam Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dengan tertib, aman dan lancar				565,039,500	100	599,898,500.00	20	119,037,600.00	24	146,205,700.00	20	113,170,900.00	21	133,680,000.00	85	512,094,200	85	1,077,133,700	#DIV/0!	215,426,740.00	
59		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terkoordinasinya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				253,045,000	100	295,953,040.00	25	49,161,720.00	33	66,146,720.00	18	37,195,000.00	22	136,954,600.00	98	289,458,040	98	542,503,040	#DIV/0!	108,500,608.00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										#REF!	7,651,606,724	#REF!	15,680,967,783	#REF!	11,050,300,819	17.78	16,296,328,442	#REF!	50,679,203,768	#REF!	90,909,610,487	#DIV/0!	18,181,922,097	
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya*:																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya*:																								
INSPEKTORAT DAERAH																								
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)																					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
			Keluaran :	20	63,083,108	20	52,134,800	20	52,136,300	32.3%	16,842,400	22.1%	11,536,200	24.8%	12,949,700	20.7%	10808000	100.00	52,136,300		104,271,100	0	20,854,220	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok		Dok		Dok																
			Hasil :	100		100		100																
			Persentase dokumen dan perencanaan evaluasi yang telah dibuat	%		%		%																
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran :	12	4,039,477,310	12	3,338,411,000	12	3,414,991,417	16.2%	553,856,817	27.5%	940,205,721					87.53	2,989,286,775		6,327,697,775	0	126,553,955,500	
			Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya	Bulan		Bulan		Bulan																
			Hasil :	100		100		100																
			Jumlah Dokumen SPJ dan SP2D Gaji dan Tunjangan ASN yang terbit	%		%		%																
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran :	12	51,779,530	12	42,793,000	12	42,790,620	27.8%	11,879,600	22.4%	9,580,000	25.3%	10,826,820	24.5%	10504200	100.00	42,790,620		85,583,620	0	1,711,672,400	
			Tersusunnya Jumlah SPJ dan Jumlah SP2D yg terbit selama 12 bulan	Bulan		Bulan		Bulan																
			Hasil :	100		100		100																
			Jumlah Dokumen SPJ dan SP2D GU, TU, LS yang terbit selama 12 bulan	%		%		%																
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran :	45	112,520,320	45	112,324,333	45	59,190,000	4.6%	2,700,000	3.0%	1,800,000	37.7%	22,340,000	27.5%	16304000	72.89	43,144,000		155,468,333	0	3,109,366,660	
			Jumlah APIP yang mengikuti PKS dan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional	Orang		Orang		Orang																
			Hasil :	100		100		100																
			Persentase terlaksananya Kegiatan PKS Inspektorat dan Terperuhinya Diklat Penjenjangan APIP	%		%		%																
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran :	105	527,376,660	105	397,576,000	105	581,149,850	0.0%	0	21.6%	125,323,350	0.0%	0	76.5%	444436000	98.04	569,758,350		967,334,350	0	19,346,687,000	
			Jumlah APIP yg mengikuti Diklat dan Jumlah pegawai OPD yang mengikuti Diklat	Orang		Orang		Orang																
			Hasil :	100		100		100																
			Persentase terlaksananya Diklat ASN OPD dan Diklat Substansial dan Non Substansial APIP	%		%		%																
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran :	97	337,953,000	97	268,034,008	97	279,295,300	16.6%	46,315,300	22.1%	61,593,600	34.0%	95,041,549	27.3%	76313638	99.99	279,264,087		547,298,095	0	10,945,961,900	
			Jumlah rapat dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali		Kali		Kali																
			Hasil :	100		100		100																
			Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	%		%		%																
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran :	5	121,000,000	5	0	5	33,892,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	99.6%	33770000	99.64	33,770,000		33,770,000	0	675,400,000	
			Jumlah kendaraan dinas roda dua yang tersedia	Unit		Unit		Unit																
			Hasil :	100		100		100																
			Tersedianya Kendaraan Dinas barang milik daerah	%		%		%																

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		7		8		9		10		11			12		13= 6 + 12			14 = 13/5x100%
1	2	3	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah peralatan kursi,meja lemari dan mebel lainnya yang tersedia	10	8,722,890	10	-	10	-		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	K	-	0	-
			Hasil : Tersedianya Peralatan Mebel Kantor barang milik daerah	unit		unit		unit															
				100		100		100															
				%		%		%															
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah peralatan laptop, printer dan mesin lainnya yang tersedia	15	60,984,000	15	100,800,000	15	126,138,500	78.2%	98,595,400	0.0%	0	7.5%	9,439,100	12.8%	16095400	98.41	124,129,900		224,929,900	0	4,498,598,000
			Hasil : Tersedianya Peralatan dan Mesin barang milik daerah	unit		unit		unit															
				100		100		100															
				%		%		%															
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Terpenuhinya kewajiban pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12	45,552,260	12	24,733,036	12	37,643,600	12.1%	4,541,059	30.4%	11,452,391	24.6%	9,246,082	32.8%	12334468	99.82	37,574,000		62,307,036	0	1,246,140,720
			Hasil : Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	Bln		Bln		Bln															
				100		100		100															
				%		%		%															
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Terpenuhinya peningkatan pelayanan administrasi umum kantor selama 12 bulan	12	89,653,967	12	68,094,188	12	74,092,140	22.8%	16,895,011	22.3%	16,525,941	22.0%	16,287,441	32.9%	24383747	100.00	74,092,140		142,186,328	0	2,843,726,560
			Hasil : Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	Bln		Bln		Bln															
				100		100		100															
				%		%		%															
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah pemakaian bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan termasuk sopir dan jumlah kendaraan yang dibayar naiknya	12	68,499,310	12	56,125,472	12	49,880,000	31.8%	15,855,000	24.8%	12,358,010	21.2%	10,550,000	41.1%	20486360	118.78	59,249,370		115,374,842	0	2,307,496,840
			Hasil : Persentase pelaksanaan dan ketersediaan barang milik daerah	Bln		Bln		Bln															
				100		100		100															
				%		%		%															
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	12	9,004,518	12	7,441,750	12	9,450,000	4.2%	398,000	14.8%	1,401,000	53.6%	5,065,000	27.4%	2586000	100.00	9,450,000		16,891,750	0	337,835,000
			Hasil : Persentase pelaksanaan dan ketersediaan barang milik daerah	Bln		Bln		Bln															
				100		100		100															
				%		%		%															
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung yang dipelihara dan direhabilitasi	1	272,335,426	1	218,952,668	1	351,093,578	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	96.0%	337090075	96.01	337,090,075		566,042,743	0	11,120,854,860
			Hasil : Persentase pelaksanaan dan ketersediaan barang milik daerah	Keg		Keg		Keg															
				100		100		100															
				%		%		%															
	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkinerja	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkinerja																				
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal																					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV							
									8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang diperiksa Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	8 Lap 100 %	246,324,540	8 Lap 100 %	88,220,000	8 Lap 100 %	155,000,000	0.6% 900,000	5.7% 8,850,000	13.5% 20,920,000	75.6% 117,250,000	95.43 147,920,000		236,140,000	0 4,722,800,000					
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang daudit dan diopname kas Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	40 Lap 100 %	1,019,243,500	40 Lap 100 %	1,206,139,000	40 Lap 100 %	1,120,696,000	11.9% 133,511,500	15.0% 167,924,000	31.2% 349,476,500	41.7% 467,259,000	99.77 1,118,171,000		2,324,310,000	0 46,486,200,000					
		Reviu Laporan Kinerja	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan yang direviu Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	1 Lap 100 %	20,530,070	1 Lap 100 %	15,122,000	1 Lap 100 %	16,999,800	3.9% 654,800	0.0% 0	0.0% 0	81.9% 139,200,000	85.74 14,574,800		29,696,800	0 593,936,000					
		Reviu Laporan Keuangan	Keluaran : Jumlah LKPD yang di reviu Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	1 Lap 100 %	40,912,520	1 Lap 100 %	18,947,000	1 Lap 100 %	36,999,800	55.6% 20,584,800	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	55.63 20,584,800		39,531,800	0 790,636,000					
		Pengawasan Desa	Keluaran : Jumlah desa yang diaudit Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	46 Lap 100 %	1,114,754,850	46 Lap 100 %	852,072,000	46 Lap 100 %	830,967,900	48.6% 403,599,250	50.2% 416,945,000	0.3% 2,760,000	0.1% 500,000	99.14 823,804,250		1,675,876,250	0 33,517,525,000					
		Kerjasama Pengawasan Internal	Keluaran : Jumlah dokumen kapabilitas APIP Jumlah tim telah sejawat antar irban Jumlah tim telah sejawat antar kabupaten Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	12 Bln 100 %	579,965,291	12 Bln 100 %	453,058,838	12 Bln 100 %	434,988,522	0.0% -	30.9% 134,466,522	23.8% 103,440,400	45.2% 196,531,600	99.87 434,438,522		887,497,360	0 17,749,947,200					
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Keluaran : Jumlah Inventarisasi dan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan APIP dalam satu periode anggaran Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	12 Bln 100 %	344,850,000	12 Bln 100 %	0	12 Bln 100 %	284,170,700	3.4% 9,648,100	38.1% 108,222,600	33.1% 94,005,000	25.3% 719,150,000	99.87 283,790,700		283,790,700	0 5,675,814,000					
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																				
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Keluaran : Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pengawasan Hasil : persentase penanganan penyelesaian tindak lanjut	90 Lap 100 %	26,498,516	90 Lap 100 %	57,239,600	90 Lap 100 %	15,000,000	12.4% 1,866,000	12.0% 1,807,000	17.6% 2,640,000	57.9% 868,7000	100.00 15,000,000		72,239,600	0 1,444,792,000					
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Keluaran : Jumlah Monitoring dan Evaluasi serta pengaduan yang dilaksanakan Hasil : persentase penanganan penyelesaian tindak lanjut	40 Lap 100 %	1,181,430,110	40 Lap 100 %	935,341,000	40 Lap 100 %	899,982,600	13.6% 122,700,000	10.0% 89,968,800	46.8% 421,273,800	20.8% 187,325,000	91.25 821,267,600		1,756,608,600	0 35,132,172,000					
	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkinerja	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkinerja																			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	tindak lanjut																					
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Keluaran :	90	22,000,000	90	45,595,000	90	9,800,000	29.6%	2,900,000	20.4%	2,000,000	50.0%	4,900,000	0.0%	0	100.00	9,800,000		55,395,000	0	1,107,900,000	
			Peningkatan Persentase koordinasi hasil pengawasan	Lap			Lap																	
			Hasil :	100			100																	
			Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	%			%																	
		Pendampingan dan Asistensi																						
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran :	1	22,000,000	1	1,500,000	1	9,200,000	50.6%	4,655,500	30.0%	2,762,500	0.0%		17.4%	1600000	98.02	9,018,000		10,518,000	0	210,360,000	
			Jumlah OPD yang di asistensi dan pendampingan	Keg			Keg																	
			Hasil :	100			100																	
			Terpenuhinya dokumen laporan dari pendampingan dan asistensi	%			%																	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Keluaran :	1	61,500,000	1	9,008,000	1	54,999,400	0.0%	-	78.5%	43,200,000	0.0%	0	21.5%	11799400	100.00	54,999,400		64,007,400	0	1,280,148,000	
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Keg			Keg																	
			Hasil :	100			100																	
			Terpenuhinya dokumen laporan dari pendampingan dan asistensi	%			%																	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keluaran :	8	220,000,000	8	43,807,600	8	367,505,940	1.9%	6,938,000	22.7%	83,398,570	21.4%	78,463,500	49.2%	180942370	95.17	349,742,440		393,550,040	0	7,871,000,800	
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keg			Keg																	
			Hasil :	100			100																	
			Terpenuhinya dokumen laporan dari pendampingan dan asistensi	%			%																	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Keluaran :	1	126,000,000	1	111,724,400	1	114,986,700	2.3%	2,682,300	88.7%	102,003,400	5.7%	6,518,000	0.4%	503000	97.15	111,706,700		223,431,100	0	4,468,622,000	
			Terlaksananya Pedampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Penegakan Integritas	Keg			Keg																	
			Hasil :	100			100																	
			Terpenuhinya dokumen laporan dari pendampingan dan asistensi	%			%																	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)										4.8	1,478,518,837	5.2	2,353,324,605	5.1	2,009,703,237	9.8	3,025,007,150	4.6	8,866,553,829					
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
KECAMATAN BANTAENG																								
I	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	6,711,586,000	87	5,491,776,157	100	6,611,631,020	17.6	1,111,312,568	45.6	2,884,761,717	65	4,309,772,699	88.4	5,842,365,523	17.6	1,111,312,568	104.7	6,603,088,725	1	98%	
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	21,500,000	100	14,414,750	100	15,088,900	12.0	1,815,200	50.0	7,551,650	75	11,379,100	100	15,088,900	12.0	1,815,200	111.9	16,229,950	1	75%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV										
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Terlaksananya Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	18,500,000	100	14,414,750	100	15,088,900	12.0	1,815,200	50.0	7,551,650	75	11,379,100	100	15,088,900	12.0	1,815,200	111.9	16,229,950	1	88%	Sub Bagian Program dan Keuangan
2	Terlaksananya Penyampaian Pelaporan Sakip Tepat Waktu	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD	100	3,000,000	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Program dan Keuangan
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Laporan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	6,273,360,000	88	5,278,988,368	100	6,219,860,600	17.7	1,084,741,868	45.4	2,788,538,667	67	4,176,579,099	88.4	5,499,776,123	17.7	1,084,741,868	105.2	6,363,730,236	1	101%	
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjanganannya	100	6,243,860,000	88	5,259,169,368	100	6,200,059,600	17.6	1,079,715,318	45.4	2,777,203,167	67	4,161,054,599	88.4	5,479,975,123	17.6	1,079,715,318	105.1	6,338,884,686	1	102%	
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	100	24,000,000	100	16,969,999	100	17,004,000	13.1	2,229,550	50.2	8,538,500	75	12,727,500	100	17,004,000	13.1	2,229,550	113.1	19,199,549	1	80%	Sub Bagian Program dan Keuangan
5	Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	100	5,500,000	100	2,850,000	100	2,797,000	100.0	2,797,000	100	2,797,000	100	2,797,000	100	2,797,000	100.0	2,797,000	200.0	5,647,000	2	103%	Sub Bagian Program dan Keuangan
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	177,800,000	85	118,926,000	100	241,612,000	21.6	15,780,000	56.0	40,900,000	23	56,205,000	97.5	235,529,400	21.6	15,780,000	106.5	134,706,000	1	76%	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	100	150,240,000	-	-	100	150,240,000	-	-	-	-	-	-	100	150,240,000							
6	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi/Bahan Bacaan Bagi ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang tersedia	100	1,800,000	100	1,560,000	100	1,560,000	25.0	390,000	50.0	780,000	75	1,170,000	100	1,560,000	25.0	390,000	125.0	1,950,000	1	108%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang diikuti	100	176,000,000	85	117,366,000	100	89,812,000	21.5	15,390,000	56.1	40,120,000	61	55,035,000	93.2	83,729,400	21.5	15,390,000	106.2	132,756,000	1	75%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	46,086,000	87	28,619,700	100	37,071,820	9.6	4,142,500	34.3	14,785,400	58	21,651,500	80	29,674,000	9.6	4,142,500	96.2	32,762,200	1	71%	
8	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	100	23,586,000	66	8,614,300	100	17,583,600	10.7	2,535,050	21.4	5,054,850	42	7,321,450	57.9	10,187,050	10.7	2,535,050	76.7	11,149,350	1	47%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	100	22,500,000	100	20,005,400	100	19,488,220	8.2	1,607,450	49.9	9,730,550	74	14,330,050	100	19,486,950	8.2	1,607,450	108.2	21,612,850	1	96%	Seksi Pelayanan Umum
E	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	77,000,000	-	-	100	42,887,700	-	-	-	-	-	-	16.8	7,188,700	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10	Pengadaan Kendaraan dinas	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Jumlah Kendaraan Roda Dua	100	27,000,000	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Pengadaan Mebel Kantor	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	100	30,000,000	-	-	100	35,699,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin kantor	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan/Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang diadakan	100	20,000,000	-	-	100	7,188,700	-	-	-	-	-	-	100	7,188,700	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
F	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kebutuhan sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	115,840,000	97	50,827,500	100	55,110,000	9	4,833,000	59.9	32,986,000	80	43,958,000	100	55,108,400	9	4,833,000	105.9	55,660,500	1	48%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
13	Kondisi Kendaraan Layak Pakai	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan kendaraan yang pajaknya terbayar	100	60,000,000	97	33,630,000	100	35,130,000	14	4,833,000	45.1	15,836,000	75	26,208,000	100	35,128,400	14	4,833,000	110.9	38,463,000	1	64%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14	Kondisi Peralatan dan Mesin Layak Pakai	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara		3,840,000	100	2,460,000	100	3,830,000	-	-	26.1	1,000,000	42	1,600,000	100	3,830,000	-	-	-	-	-	-	
15	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	100	52,000,000	100	14,737,500	100	16,150,000	-	-	100	16,150,000	100	16,150,000	100	16,150,000	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
II	Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan	100	1,721,000,000	85	1,650,082,467	100	1,336,961,598	31.0	351,469,679	47.9	542,486,474	66	885,515,552	84.8	1,133,294,197	31.0	351,469,679	116.0	2,001,552,146	1	116%	
G	Jumlah kelompok dan lembaga masyarakat yang aktif	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kelompok dan Lembaga Masyarakat yang difasilitasi	100	121,000,000	97	77,715,400	100	58,038,500	8.9	6,019,250	48.0	32,328,250	74	42,728,250	100	58,038,500	8.9	6,019,250	105.9	83,734,650	1	69%	
16	Jumlah kelompok dan lembaga masyarakat yang aktif	Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kelompok dan Lembaga Masyarakat yang difasilitasi	100	121,000,000	97	77,715,400	100	58,038,500	8.9	6,019,250	48.0	32,328,250	74	42,728,250	100	58,038,500	8.9	6,019,250	105.9	83,734,650	1	69%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
H	Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	100	1,600,000,000	85	1,572,367,067	100	1,278,923,098	32.4	345,450,429	47.9	510,158,224	66	842,787,302	84.1	1,075,255,697	32.4	345,450,429	116.9	1,917,817,496		120%	
17	Operasional Kelurahan	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	100	1,200,000,000	86	1,546,889,967	100	993,787,048	36.1	345,450,429	51.7	495,158,224	82	814,639,802	97.5	969,321,747	36.1	345,450,429	122.2	1,892,340,396	1	158%	Seksi Pemerintahan
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	100	400,000,000	40	25,477,100	100	285,136,050	-	-	13.9	15,000,000	10	28,147,500	37.2	105,933,950	-	-	-	-	-	-	Seksi Pemerintahan
III	Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah, Penyuluhan Keamanan	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	1,200,000,000	99	1,181,075,000	100	1,865,860,000	19.1	356,280,000	35.6	664,520,000	76	1,416,115,000	-	1,852,260,000	19.1	356,280,000	117.8	1,537,355,000	1	128%	
G	Keamanan dan Ketertiban Umum Yg Terkendali	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jenis Monitoring Keamanan dan Ketertiban Umum	100	1,200,000,000	99	1,181,075,000	100	1,865,860,000	19.1	356,280,000	35.6	664,520,000	76	1,416,115,000	99.3	1,852,260,000	19.1	356,280,000	117.8	1,537,355,000	1	128%	
19	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	Sub.Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian NRI, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dimonitoring	100	1,200,000,000	99	1,181,075,000	100	1,865,860,000	19.1	356,280,000	35.6	664,520,000	76	1,416,115,000	99.3	1,852,260,000	19.1	356,280,000	117.8	1,537,355,000	1	128%	Seksi Pemerintahan
IV	Kelurahan dan desa yang dimonitoring dan difasilitasi	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	99,000,000	100	89,217,000	100	90,284,100	15.7	14,173,350	50.0	45,133,600	75	67,710,150	100	90,284,100	15.7	14,173,350	115.7	103,390,350	1	104%	
H	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Kegiatan yang dimonitoring dan difasilitasi	100	99,000,000	100	89,217,000	100	90,284,100	15.7	14,173,350	50.0	45,133,600	75	67,710,150	100	90,284,100	15.7	14,173,350	115.7	103,390,350	1	104%	
20	Kelurahan dan desa yang dimonitoring dan difasilitasi	Sub.Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dimonitoring dan difasilitasi	100	63,000,000	100	57,126,200	100	58,471,700	16.0	9,373,800	49.9	29,205,450	75	43,797,400	100	58,471,700	16.0	9,373,800	116.0	66,500,000	1	106%	Seksi Tranlib
21	Kelurahan dan Desa yang dimonitoring dan difasilitasi	Sub.Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dimonitoring dan difasilitasi	100	36,000,000	100	32,090,800	100	31,812,400	15.1	4,799,550	50.1	15,928,150	75	23,912,750	100	31,812,400	15.1	4,799,550	115.1	36,890,350	1	102%	Seksi Ekxang
JUMLAH				100	9,731,586,000	88.2	8,412,150,785	100	9,904,736,718	19.5	1,833,235,597	43.9	4,136,901,791	67	6,679,113,401	90	8,918,203,820	19.5	1,833,235,597	107.7	10,245,386,382	1	105%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab Bantaeng berikutnya :																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
KECAMATAN BISSAPPU																									
1.	S1 : Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100	20,308,935,773	9.85	6,019,802,987	8.85	6,565,114,686	2.32	1,471,338,102	0.83	2,005,026,967	0.93	1,180,728,427	1.94	1,299,826,663	6.02	5,956,920,159	9.88	11,976,723,146	47.96%	58.97%		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	20,292,253,073	9.85	6,019,802,987	13.71	6,556,885,886	2.52	1,466,963,202	1.65	2,005,026,967	0.79	1,178,544,027	3.07	1,298,157,163	8.04	5,948,691,359	15.76	11,968,494,346	45.93%	58.98%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD	100	117,647,450	12.00	37,647,450	12.00	42,500,000	4.22	14,960,220	3.02	10,693,900	0.84	2,960,000	3.92	13,885,800	12.00	42,499,920	24.00	80,147,370	66.67%	68.13%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Bulan	112,147,450	12.00	37,647,450	12.00	42,500,000	4.22	14,960,220	3.02	10,693,900	0.84	2,960,000	3.92	13,885,800	12.00	42,499,920	24.00	80,147,370	66.67%	71.47%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD	3 Dokumen	5,500,000												-	-	-	-	0.00%	0.00%	OPD Kecamatan Bissappu		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	18,992,539,141	8.50	5,688,241,787	8.50	5,982,400,400	2.49	1,386,122,592	2.56	1,962,839,217	1.46	1,162,547,627	1.44	927,680,163	7.95	5,439,189,599	16.45	11,127,431,386	65.14%	58.59%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	12 Bulan	18,883,255,591	12.00	5,656,741,787	12.00	5,953,214,000	2.77	1,373,191,102	3.94	1,955,968,717	2.34	1,159,165,127	1.86	921,680,163	10.91	5,410,005,109	22.91	11,066,746,896	63.63%	58.61%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	15 Dokumen	92,186,400	5.00	31,500,000	5.00	29,186,400	2.22	12,931,490	1.18	6,870,500	0.58	3,382,500	1.03	6,000,000	5.00	29,184,490	10.00	60,684,490	66.66%	65.83%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Pengelola Keuangan dan Penatausahaan yang tersusun	12 Bulan	17,097,150	-				-							-	-	-	-	0.00%	0.00%	OPD Kecamatan Bissappu		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	276,309,310	11.65	64,916,600	12.25	80,279,510	3.35	33,114,600	1.53	11,381,950	1.08	8,072,800	1.63	14,737,450	7.59	67,306,800	16.32	132,223,400	38.77%	47.85%		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang tersedia	36 Bulan	23,146,900	12.00	6,189,300	12.00	7,688,200	4.14	2,652,300	3.30	2,113,750	2.34	1,497,800	2.22	1,424,350	12.00	7,688,200	24.00	13,877,500	66.67%	59.95%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	17 Unit	64,728,810	-	-	7.00	10,292,710	-	-	-	-	-	0.45	660,000	0.45	660,000	0.45	660,000	0.45	660,000	2.64%	1.02%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang tersedia	36 Bulan	8,635,000	12.00	2,640,000	12.00	2,995,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	2,640,000	33.33%	30.57%	OPD Kecamatan Bissappu		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	55 Kegiatan	179,798,600	10.96	56,087,300	18.00	59,303,600	9.25	30,462,300	2.81	9,268,200	2.00	6,575,000	3.84	12,653,100	17.90	58,958,600	28.85	115,045,900	52.46%	63.99%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	89,609,000	-	-	25.50	29,938,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	150 Unit	70,488,000		-	50.00	10,817,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang diadakan	2 Unit	19,121,000		-	1.00	19,121,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	93,922,372	8.82	30,805,750	12.00	31,920,176	2.76	7,577,190	1.31	3,550,000	1.07	2,863,600	4.98	13,192,050	10.13	27,182,840	18.94	57,988,590	52.62%	61.74%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	36 Bulan	31,420,476	5.63	5,262,300	12.00	15,160,776	0.97	1,227,100	0.83	1,050,000	1.03	1,298,875	5.42	6,847,500	8.25	10,423,475	13.88	15,685,775	38.57%	49.92%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	36 Bulan	62,501,896	12.00	25,543,450	12.00	16,759,400	4.55	6,350,090	1.79	2,500,000	1.12	1,564,725	4.54	6,344,550	12.00	16,759,365	24.00	42,302,815	66.67%	67.68%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100	722,225,800	8.30	198,191,400	12.00	389,847,800	2.31	25,188,600	1.50	16,561,900	0.29	2,100,000	6.45	328,661,700	10.55	372,512,200	18.85	570,703,600	52.36%	79.02%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	12 Bulan	24,807,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		OPD Kecamatan Bissappu	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang pajaknya terbayar	36 Bulan	161,661,450	10.32	49,931,875	12.00	47,845,300	3.32	13,248,600	2.39	9,521,900	0.15	600,000	1.79	7,139,200	7.65	30,509,700	17.98	80,441,575	49.94%	49.76%	OPD Kecamatan Bissappu
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	36 Bulan	64,386,700	11.15	26,079,025	12.00	25,130,000	3.43	7,190,000	2.00	4,190,000	0.72	1,500,000	5.85	12,250,000	12.00	25,130,000	23.15	51,209,025	64.31%	79.53%	OPD Kecamatan Bissappu
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	36 Bulan	471,370,350	3.42	122,180,500	12.00	316,872,500	0.18	4,750,000	0.11	2,850,000	-	-	11.71	309,272,500	12.00	316,872,500	15.42	439,053,000	42.82%	93.14%	OPD Kecamatan Bissappu
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	16,682,700	-	-	4.00	8,228,800	2.13	4,374,900	-	-	1.06	2,184,400	0.81	1,669,500	4.00	8,228,800	4.00	8,228,800	50.00%	49.33%	OPD Kecamatan Bissappu
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Yang Dimonitoring Dan Difasilitasi	100	16,682,700	-	-	4.00	8,228,800	2.13	4,374,900	-	-	1.06	2,184,400	0.81	1,669,500	4.00	8,228,800	4.00	8,228,800	50.00%	49.33%	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	8 Desa	16,682,700			4.00	8,228,800	2.13	4,374,900	-	-	1.06	2,184,400	0.81	1,669,500	4.00	8,228,800	4.00	8,228,800	50.00%	49.33%	OPD Kecamatan Bissappu
2.	S2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan		Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan Kinerja kecamatan	100	181,496,350	11.27	40,252,550	12.00	54,320,100	6.11	29,030,300	2.26	9,078,200	0.34	1,798,800	3.29	14,408,800	12.00	54,316,100	23.27	94,568,650	64.64%	52.10%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	94,488,300	12.00	20,206,100	12.00	31,496,100	8.02	21,048,500	0.69	1,800,000	0.69	1,798,800	2.61	6,848,800	12.00	31,496,100	24.00	51,702,200	66.67%	54.72%	OPD Kecamatan Bissappu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD	100	94,488,300	12.00	20,206,100	12.00	31,496,100	8.02	21,048,500	0.69	1,800,000	0.69	1,798,800	2.61	6,848,800	12.00	31,496,100	24.00	51,702,200	66.67%	54.72%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja yang tersusun	36 Dokumen	94,488,300	12.00	20,206,100	12.00	31,496,100	8.02	21,048,500	0.69	1,800,000	0.69	1,798,800	2.61	6,848,800	12.00	31,496,100	24.00	51,702,200	66.67%	54.72%	OPD Kecamatan Bissappu
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	100	87,008,050	10.54	20,046,450	12.00	22,824,000	4.20	7,981,800	3.83	7,278,200	-	-	3.97	7,560,000	12.00	22,820,000	22.54	42,866,450	62.60%	49.27%	OPD Kecamatan Bissappu
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kelompok Dan Lembaga Masyarakat Yang Difasilitasi	100	87,008,050	10.54	20,046,450	12.00	22,824,000	4.20	7,981,800	3.83	7,278,200	-	-	3.97	7,560,000	12.00	22,820,000	22.54	42,866,450	62.60%	49.27%	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan masyarakat dalam perencanaan yang terealisasi	12 Bulan	16,360,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Masyarakat yang difasilitasi	36 Bulan	70,648,000	10.54	20,046,450	12.00	22,824,000	4.20	7,981,800	3.83	7,278,200	-	-	3.97	7,560,000	12.00	22,820,000	22.54	42,866,450	62.60%	60.68%	OPD Kecamatan Bissappu
3.	S3 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah		Peningkatan Monitoring trantib pada wilayah tingkat bawah/ Desa dan Kelurahan	100	7,729,412,370	7.44	2,098,534,250	8.00	2,396,682,450	2.40	676,323,370	2.06	621,309,450	0.36	6,637,900	2.95	929,939,860	7.77	2,234,210,580	15.21	4,332,744,830	62.46%	56.06%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100	6,625,041,410	7.45	1,152,426,200	9.00	2,330,089,540	2.73	655,615,940	2.88	606,727,050	0.21	2,977,000	3.04	905,939,860	8.85	2,171,259,850	16.31	3,323,686,050	58.86%	50.17%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	100	181,107,560	10.69	58,689,200	11.00	78,369,160	3.48	24,797,730	3.14	22,352,400	0.42	2,977,000	3.96	28,241,950	11.00	78,369,080	21.69	137,058,280	65.74%	75.68%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capalan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
										8		9		10		11									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	33 Desa dan Kel.	181,107,560	10.69	58,689,200	11.00	78,369,160	3.48	24,797,730	3.14	22,352,400	0.42	2,977,000	3.96	28,241,950	11.00	78,369,080	21.69	137,058,280	65.74%	75.68%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang Difasilitasi		6,443,933,850	4.21	1,093,737,000	7.00	2,251,720,380	1.97	630,818,210	2.62	584,374,650	-	-	2.11	877,697,910	6.71	2,092,890,770	10.92	3,186,627,770	51.99%	49.45%		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	21 Kelurahan	2,241,997,000	2.40	254,046,000	7.00	350,911,000	1.99	100,000,000	3.79	190,000,000	-	-	1.22	60,911,000	7.00	350,911,000	9.40	604,957,000	44.75%	26.98%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	21 Kelurahan	4,201,936,850	6.02	839,691,000	7.00	1,900,809,380	1.95	530,818,210	1.45	394,374,650	-	-	3.01	816,786,910	6.42	1,741,979,770	12.44	2,581,670,770	59.24%	61.44%	OPD Kecamatan Bissappu	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	1,019,194,400	10.86	918,519,700	11.00	39,004,700	3.05	10,819,700	2.45	8,700,000	0.69	2,460,900	4.79	17,000,000	10.99	38,980,600	21.86	957,500,300	66.23%	93.95%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Monitoring Keamanan Dan Ketertiban Umum		1,019,194,400	10.86	918,519,700	11.00	39,004,700	3.05	10,819,700	2.45	8,700,000	0.69	2,460,900	4.79	17,000,000	10.99	38,980,600	21.86	957,500,300	66.23%	93.95%		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dimonitoring	33 Desa/ Kelurahan	1,019,194,400	10.86	918,519,700	11.00	39,004,700	3.05	10,819,700	2.45	8,700,000	0.69	2,460,900	4.79	17,000,000	10.99	38,980,600	21.86	957,500,300	66.23%	93.95%	OPD Kecamatan Bissappu	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	85,176,560	4.00	27,588,350	4.00	27,588,210	1.43	9,887,730	0.85	5,882,400	0.17	1,200,000	1.01	7,000,000	3.48	23,970,130	7.48	51,558,480	62.30%	60.53%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan yang dimonitoring dan difasilitasi	100	85,176,560	4.00	27,588,350	4.00	27,588,210	1.43	9,887,730	0.85	5,882,400	0.17	1,200,000	1.01	7,000,000	3.48	23,970,130	7.48	51,558,480	62.30%	60.53%		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	12 Desa	85,176,560	4.00	27,588,350	4.00	27,588,210	1.43	9,887,730	0.85	5,882,400	0.17	1,200,000	1.01	7,000,000	3.48	23,970,130	7.48	51,558,480	62.30%	60.53%	OPD Kecamatan Bissappu	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100.00%	28,219,844,493	9.52	8,158,589,787	9.62	9,016,117,236	3.61	2,176,691,772	1.71	2,635,414,617	0.54	1,189,165,127	2.73	2,244,175,323	8.60	8,245,446,839	16.12	16,404,036,626	58.35%	58.13%		
								Predikat Kinerja		SR			SR			SR			SR			SR	R		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya*:																									
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya*:																									
KECAMATAN TOMPOBULU																									
		KECAMATAN			17,606,144,680				7,185,260,150		907,363,196		1,453,125,445		1,279,641,457		1,281,629,454		4,921,759,552		4,921,759,552			Kec. Tompobulu	
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	13,041,699,320			100 %	4,443,763,150	34	709,842,421	12	1,120,399,685	12	936,556,727	0	882,931,269	58	3,649,730,102	58	3,649,730,102	5,800	27.99		
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	100 %	71,279,000			100 %	25,150,000	3	1,267,500	0	2,206,400	0	771,700	0	454,500	9	4,700,100	9	4,700,100	900	6.59		
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja PD	36	71,279,000			12 bln	25,150,000	3	1,267,500	3	2,206,400	3	771,700	0	454,500	9	4,700,100	9	4,700,100	25.00	6.59		
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	11,674,386,700			100 %	3,920,503,500	9	654,691,601	0	1,022,358,885	0	879,304,357	0	811,178,625	9	3,367,533,468	9	3,367,533,468	900	28.85		
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang diterima ASN	36	11,618,250,000			12 bln	3,897,967,000	3	641,342,321	3	1,017,460,585	3	863,565,727	0	803,568,025	9	3,325,936,658	9	3,325,936,658	25.00	28.63		
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan laporan keuangan yang dikerjakan setiap bulan	36	49,231,200			12 bln	19,870,000	3	11,202,780	3	4,898,300	3	15,738,630	0	7,610,600	9	39,450,310	9	39,450,310	25.00	80.13		
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	15	6,905,500			5 dokumen	2,666,500	3	2,146,500	3	-	3	-	0	-	9	2,146,500	9	2,146,500	60.00	31.08		
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Kepegawaian pada Perangkat	100 %	25,000,000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	50	25,000,000			0	0	0	0	12	-	12	-	-	-	24	-	24	-	48	-	
1.4		Administrasi Umum Peranokot Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	426,158,050			100 %	165,430,000	9	23,606,000	0	34,201,750	0	22,207,500	0	34,368,075	9	114,383,325	9	114,383,325	900	26.84	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	36	2,028,050			12 bin	655,000	3	-	3	651,250	3	-	0	-	9	651,250	9	651,250	25.00	32.11	
2		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	72	12,192,000			24 exp	4,060,000	3	-	3	1,128,000	3	854,000	0	970,000	9	2,952,000	9	2,952,000	12.50	24.21	
3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	930	411,938,000			290 kali	160,715,000	3	23,606,000	3	32,422,500	3	21,353,500	0	33,398,075	9	110,780,075	9	110,780,075	0.97	26.89	
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	198,232,000			100 %	97,068,000	0	-	0	14,797,700	0	-	0	-	0	14,797,700	0	14,797,700	-	7.46	
1		Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	2	35,000,000			-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	
2		Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	7	26,573,000			-	12,178,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	
3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	13	45,559,000			-	28,890,000	0	-	3	14,797,700	3	-	0	-	6	14,797,700	6	14,797,700	46	32.48	
4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dibangun	2	91,100,000			-	56,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	87,758,770			100 %	28,536,650	6	5,592,720	0	6,555,750	0	6,510,370	0	7,513,469	6	26,172,309	6	26,172,309	600	29.82	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	36	39,267,620			12 bin	13,078,000	3	2,227,020	3	3,279,650	3	3,135,890	-	4,183,529	9	12,826,089	9	12,826,089	25.00	32.66	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	48,491,150			12 bin	15,458,650	3	3,365,700	3	3,276,100	3	3,374,480	0	3,329,940	9	13,346,220	9	13,346,220	25.00	27.52	
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	558,884,800			100 %	207,075,000	7	24,684,600	2	40,279,200	2	27,762,800	-	29,416,600	9	122,143,200	9	122,143,200	900	21.85	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan kendaraan yang pajaknya terbayar	15	180,968,500			5 unit	65,200,000	5	6,960,000	3	8,695,000	3	6,605,000	0	9,037,000	11	31,297,000	11	31,297,000	73.33	17.29	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	6	266,649,000			2 Unit	89,645,000	2	17,724,600	2	20,264,200	2	17,407,800	0	19,419,600	6	74,816,200	6	74,816,200	100.00	28.06	
3		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10	5,550,000			-	3,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41	21,025,300			13 unit	6,780,000	0	-	0	2,200,000	0	450,000	0	960,000	-	3,610,000	0	3,610,000	-	17.17	
5		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	84,692,000			1 unit	42,100,000	0	-	1	9,120,000	0	3,300,000	0	-	1	12,420,000	1	12,420,000	33.33	14.66	
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100%	47,271,480			100%	17,648,000	3	1,800,000	0	4,163,600	0	4,744,800	0	3,111,300	3	13,819,700	3	13,819,700	300	29.23	
2.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	100 %	47,271,480			100%	17,648,000	3	1,800,000	3	4,163,600	3	4,744,800	-	3,111,300	9	13,819,700	9	13,819,700	900	29.23	
1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	36	47,271,480			12 bin	17,648,000	3	1,800,000	3	4,163,600	3	4,744,800	0	3,111,300	9	13,819,700	9	13,819,700	25.00	29.23	
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga yang aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan	100%	2,718,375,510			100%	2,594,500,000	7	50,770,775	0	101,764,560	0	165,494,230	0	143,133,235	7	461,162,800	7	461,162,800	700	16.96	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kelompok lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	100 %	176,515,500			100%	74,500,000	3	900,000	0	6,897,500	0	4,549,500	0	6,615,650	3	18,962,650	3	18,962,650	300	10.74	
1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelompok lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	36	176,515,500			12 bln	74,500,000	3	900,000	3	6,897,500	3	4,549,500	0	6,615,650	9	18,962,650	9	18,962,650	25.00	10.74	
3.2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	100 %	2,541,860,010			100%	2,520,000,000	4	49,870,775	0	94,867,060	0	160,944,730	0	136,517,585	4	442,200,150	4	442,200,150	400	17.40	
1		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	4	2,541,860,010			4 Kel.	2,520,000,000	4	49,870,775	4	94,867,060	4	160,944,730	0	136,517,585	12	442,200,150	12	442,200,150	300.00	17.40	
IV		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	100%	1,537,032,370			100%	45,655,000	3	126,330,000	0	204,562,550	0	152,640,800	0	232,068,200	3	715,601,550	3	715,601,550	300	46.56	
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jenis monitoring ketentraman dan ketertiban umum	100 %	1,537,032,370			100%	45,655,000	3	126,330,000	0	204,562,550	0	152,640,800	0	232,068,200	3	715,601,550	3	715,601,550	300	46.56	
1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa/Kelurahan yang di monitoring	36	1,537,032,370			12 bln	45,655,000	3	126,330,000	3	204,562,550	3	152,640,800	0	232,068,200	9	715,601,550	9	715,601,550	25.00	46.56	
V		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	261,766,000			100%	83,694,000	6	18,620,000	0	22,235,050	0	20,204,900	0	20,385,450	6	81,445,400	6	81,445,400	600	31.11	
5.1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis kegiatan yang dimonitoring dan difasilitasi	100 %	261,766,000			100%	83,694,000	6	18,620,000	0	22,235,050	0	20,204,900	0	20,385,450	6	81,445,400	6	81,445,400	600	31.11	
1		Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi tata pemerintahan desanya	36	121,581,000			12 bln	27,256,000	3	8,900,000	3	10,648,400	3	9,120,000	0	9,420,000	9	38,088,400	9	38,088,400	25.00	31.33	
2		Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desanya	36	140,185,000			12 bln	56,438,000	3	9,720,000	3	11,586,650	3	11,084,900	0	10,965,450	9	43,357,000	9	43,357,000	25.00	30.93	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana di Kasda																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan pencairan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : percepatan kegiatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daeah Kabupaten/Kota berikutnya*) :																								
KECAMATAN ULUERE																								
I	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	1,596,525,680	95	1,376,740,630	95	1,472,813,959	25	236,384,794	50	685,537,598	75	1,067,284,648	100	1,435,371,017	60	685,537,598	155	2,062,278,228	31	412,455,646	
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	100	34,116,050	95	34,116,050	95	19,685,110	25	3,008,000	50	9,725,000	75	14,847,000	100	19,631,000	60	19,631,000	155	53,747,050	31	10,749,410	
1	Terlaksananya Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyampaian laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Target Pelaporan Realisasi Keuangan Paling Lambat TGL 10 Bulan Berikutnya	100	11,514,300	95	11,514,300	95	10,283,360	25	1,919,000	50	5,260,000	75	8,241,000	100	10,230,000	60	10,230,000	155	21,744,300	31	4,348,860	Sub Bagian Program dan Keuangan
2	Terlaksananya Penyampaian Pelaporan Sakip Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Pelaporan Sakip Tepat Waktu	100	22,601,750	95	22,601,750	95	9,401,750	25	1,089,000	50	4,465,000	75	6,606,000	100	9,401,000	60	9,401,000	155	32,002,750	31	6,400,550	Sub Bagian Program dan Keuangan
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	1,187,328,500	95	1,182,933,500	95	1,154,175,800	25	212,385,044	50	565,739,348	75	854,382,798	100	1,126,911,767	60	1,126,911,767	155	2,309,845,267	31	461,969,053	
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Lancarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,165,262,000	95	1,165,262,000	95	1,136,504,300	25	211,229,294	50	558,033,348	75	844,189,798	100	1,113,710,267	60	1,113,710,267	155	2,278,972,267	31	455,794,453	Sub Bagian Program dan Keuangan
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Lancarnya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	100	19,317,000	95	14,922,000	95	14,922,000	25	1,155,750	50	7,706,000	75	9,577,000	100	10,452,000	60	10,452,000	155	25,374,000	31	5,074,800	Sub Bagian Program dan Keuangan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	100	2,749,500	95	2,749,500	95	2,749,500	25	-	50	-	75	616,000	100	2,749,500	60	2,749,500	155	5,499,000	31	1,099,800	Sub.Bagian Program dan Keuangan
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan Administrasi Umum	100	130,712,650	95	130,712,650	95	72,171,100	25	5,270,000	50	20,180,500	75	31,405,500	100	67,907,600	60	67,907,600	155	198,620,250	31	39,724,050	
6	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kebutuhan Rata-Rata Instalasi Listrik	100	2,779,650	95	2,779,650	95	862,100	25	-	50	420,500	75	655,500	100	811,500	60	811,500	155	3,591,150	31	718,230	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
7	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi/Bahan Bacaan Bagi ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Informasi/Bahan Bacaan Bagi ASN	100	1,560,000	95	1,560,000	95	1,560,000	25	-	50	780,000	75	1,170,000	100	1,560,000	60	1,560,000	155	3,120,000	31	624,000	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Persentase Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	100	126,373,000	95	126,373,000	95	69,749,000	25	5,270,000	50	18,980,000	75	29,580,000	100	65,536,100	60	65,536,100	155	191,909,100	31	38,381,820	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Jumlah Unit Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Pemerintahan	100	28,978,430	95	28,978,430	95	19,862,400	25	3,728,300	50	9,895,500	75	15,004,100	100	19,813,600	60	19,813,600	155	48,792,030	31	9,758,406	
9	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100	7,771,200	95	7,771,200	95	7,771,200	25	1,283,300	50	3,677,000	75	5,713,600	100	7,727,600	60	7,727,600	155	15,498,800	31	3,099,760	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
10	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	100	21,207,230	95	21,207,230	95	12,091,200	25	2,445,000	50	6,218,500	75	9,290,500	100	12,086,000	60	12,086,000	155	33,293,230	31	6,658,646	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
E	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kebutuhan sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		95		95	152,377,969	25	10,493,450	50	66,010,950	75	105,830,150	100	146,565,950	60	146,565,950	155	146,565,950	31	29,313,190	
11	Kondisi Kendaraan Layak Pakai	Sub.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kondisi Kendaraan Layak Pakai 1 Tahun	100	76,512,400	95	76,390,050	95	71,990,025	25	4,783,300	50	30,332,300	75	49,468,300	100	66,850,300	60	66,850,300	155	143,240,350	31	28,648,070	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
12	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kebutuhan Transportasi Masyarakat Wilayah Terpencil	100	80,407,650	95	80,407,650	95	80,387,944	25	5,710,150	50	35,678,650	75	56,361,850	100	79,715,650	60	79,715,650	155	160,123,300	31	32,024,660	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
E	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kebutuhan sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	215,390,050	95	215,267,700	95	54,541,580	25	1,500,000	50	13,986,300	75	45,815,100	100	54,541,100	60	54,541,100	155	269,808,800	31	53,961,760	
13	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Gedung 1 Tahun	100	58,470,000	95	58,470,000	95	54,541,580	25	1,500,000	50	13,986,300	75	45,815,100	100	54,541,100	60	54,541,100	155	113,011,100	31	22,602,220	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
II	Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan DiKecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Yg Sesuai Standar Pelayanan	100	1,222,000	95	1,222,000	95	18,433,500	25	2,429,500	50	9,933,250	75	13,383,750	100	18,399,750	60	18,399,750	155	19,621,750	31	3,924,350	
F	Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yg Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerinrah Daerah Yg ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan DiKecamatan	100	1,222,000	95	1,222,000	95	18,433,500	25	2,429,500	50	9,933,250	75	13,383,750	100	18,399,750	60	18,399,750	155	19,621,750	31	3,924,350	
	Masyarakat dan Administrasi Kecamatan	Sub.Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan DiKecamatan					95	1,222,000		222,000		762,750	75	762,750	100	1,190,750	60	1,190,750	60	1,190,750	12	238,150	
	Masyarakat dan Administrasi Kecamatan	Sub.Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan DiKecamatan					95	2,136,500		613,000		1,232,500	75	1,530,000	100	2,135,000	60	2,135,000	60	2,135,000	12	427,000	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
14	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan Dikecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan Dikecamatan	100	1,222,000	95	1,222,000	95	15,075,000	25	1,594,500	50	7,938,000	75	11,091,000	100	15,074,000	60	15,074,000	155	16,296,000	31	3,259,200	Seksi Pelayanan Publik	
III	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yg Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yg Aktif	100	28,061,500	95	28,061,500	95	19,000,000	25	2,781,000	50	10,020,250	75	14,612,250	100	18,968,250	60	18,968,250	155	47,029,750	31	9,405,960		
G	RPJM Desa dan RKPDesa	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yg Difasilitasi	100	28,061,500	95	28,061,500	95	19,000,000	25	2,781,000	50	10,020,250	75	14,612,250	100	18,968,250	60	18,968,250	155	47,029,750	31	9,405,960		
15	Jumlah Desa Yg Menyusun RKPDesa Yg Tepat Waktu	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Desa Yg Menyusun RKPDesa Yg Tepat Waktu	100	2,136,500	95	2,136,500	95	10,000,000	25	1,430,000	50	5,112,500	75	7,670,500	100	9,996,000	60	9,996,000	155	12,132,500	31	2,426,500	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
16	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Desa Yg Aktif	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yg Aktif	100	25,925,000	95	25,925,000	95	9,000,000	25	1,351,000	50	4,907,750	75	6,941,750	100	8,972,250	60	8,972,250	155	34,897,250	31	6,979,450	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
IV	Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah, Penyuluhan Keamanan	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	100	802,000	95	802,000	95	802,000	25	318,000	50	318,000	75	800,500	100	800,500	60	800,500	155	1,602,500	31	320,500		
H	Keamanan dan Ketertiban Umum Yg Terkendali	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah, Penyuluhan Keamanan	100	802,000	95	802,000	95	802,000	25	318,000	50	318,000	75	800,500	100	800,500	60	800,500	155	1,602,500	31	320,500		
17	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	Sub.Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian NRI, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	100	802,000	95	802,000	95	802,000	25	318,000	50	318,000	75	800,500	100	800,500	60	800,500	155	1,602,500	31	320,500	Seksi Trantib	
V	Jumlah Desa Yg Pengelolaan Keuangan Yg Sesuai Regulasi	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	59,831,000	95	59,831,000	95	48,631,000	25	4,278,000	50	21,958,000	75	36,717,000	100	48,522,500	60	48,522,500	155	108,353,500	31	21,670,700		
i	Administrasi Desa	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Yg Efektif	100	59,831,000	95	59,831,000	95	48,631,000	25	4,278,000	50	21,958,000	75	36,717,000	100	48,522,500	60	48,522,500	155	108,353,500	31	21,670,700		
18	Jumlah Desa Yg Menyeyor SPJ Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yg Menyeyor SPJ Tepat Waktu	100	24,227,000	95	24,227,000	95	18,627,000	25	1,970,000	50	8,924,000	75	14,041,000	100	18,519,500	60	18,519,500	155	42,746,500	31	8,549,300	Seksi Pemerintahan	
19	Jumlah Pos Kamling/Pos Ronda Yg Aktif	Sub.Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Pos Kamling / Pos Ronda Yg Aktif	100	35,604,000	95	35,604,000	95	30,004,000	25	2,308,000	50	13,034,000	75	22,676,000	100	30,003,000	60	30,003,000	155	66,607,000	31	13,121,400	Seksi Trantib	
			JUMLAH		1,686,442,180		1,466,657,130		1,559,680,459		246,191,294		727,767,098		1,132,798,148		1,522,062,017								
			Rata-rata capaian kinerja (%)								15.78		46.66		72.63		97.59								
			Predikat kinerja																						
			Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																						
			Faktor penghambat pencapaian kinerja :																						
			Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																						
			Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab Bantaeng berikutnya :																						
KECAMATAN SINOA																									
I	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	1,818,795,864	95	1,663,624,885	95	1,564,747,365	25	224,405,639	50	570,597,721	75	855,394,456	100	1,149,443,100	60	1,563,407,365	155	3,227,032,250	31	385,995,936		
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	100	15,774,000	95	15,135,500	95	10,570,530	25	3,025,130	50	5,872,730	75	8,222,930	100	10,570,530	60	9,230,530	155	24,366,030	31	4,873,206		
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Target Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	1,474,000	95	4,420,000	95	1,340,000	25	1,340,000	100	1,340,000	-	1,340,000	-	1,340,000	100	1,340,000	195	5,760,000	39	1,152,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Terlaksananya Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyampaian laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Target Pelaporan Realisasi Keuangan Paling Lambat TGL 10 Bulan Berikutnya	100	14,300,000	95	10,715,500	95	9,230,530	25	1,685,130	50	4,532,730	75	6,882,930	100	9,230,530	60	9,230,530	155	19,946,030	31	3,989,206	Sub.Bagian Program dan Keuangan
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	1,536,095,864	95	1,357,290,785	95	1,337,075,275	25	178,113,295	50	462,827,923	75	681,497,750	100	912,976,476	60	1,337,075,275	155	2,694,366,060	31	278,978,698	
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Lancarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,487,695,864	95	1,304,050,785	95	1,304,050,785	25	172,303,335	50	446,855,533	75	656,400,460	100	879,952,186	60	1,304,050,785	155	1,308,629,000	31	261,725,800	
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Lancarnya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	100	27,500,000	95	30,250,000	95	17,251,060	25	3,165,230	50	8,855,960	75	12,965,560	100	17,251,060	60	17,251,060	155	47,501,060	31	9,500,212	Sub.Bagian Program dan Keuangan
5	Penyampaian Laporan Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Persentase Penyampaian Laporan Tepat Waktu	100	20,900,000	95	22,990,000	95	15,773,430	25	2,644,730	50	7,116,430	75	12,131,730	100	15,773,230	60	15,773,430	155	38,763,430	31	7,752,686	Sub.Bagian Program dan Keuangan
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	116,006,000	95	127,606,600	95	106,539,750	25	21,250,000	50	45,710,000	75	77,700,000	100	116,288,330	60	106,539,750	155	234,146,350	31	46,829,270	
6	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik atau Penerangan yang tersedia	100	2,970,000	95	3,267,000	95	2,700,000	25	-	100	2,700,000	-	2,700,000	-	2,700,000	60	2,700,000	155	5,967,000	31	1,193,400	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
7	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi/Bahan Bacaan Bagi ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	3,036,000	95	3,339,600	95	2,760,000	25	500,000	50	1,250,000	75	2,050,000	100	2,700,000	60	2,760,000	155	6,099,600	31	1,219,920	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi yang diikuti	100	110,000,000	95	121,000,000	95	101,079,750	25	20,750,000	50	41,760,000	75	72,950,000	100	110,888,330	60	101,079,750	155	222,079,750	31	44,415,950	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	24,970,000	95	25,047,000	95	22,699,810	25	5,481,814	50	11,551,838	75	15,912,946	100	22,509,434	60	22,699,810	155	47,746,810	31	10,033,362	
9	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Terbayar	100	9,570,000	95	10,527,000	95	8,700,000	25	1,982,564	50	4,052,028	75	6,163,136	100	8,509,624	60	8,700,000	155	19,227,000	31	3,845,400	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
10	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan disediakan	100	2,200,000	95	2,420,000	95	2,000,000	25	-	50	-	75	-	100	2,000,000	60	2,000,000	155	4,420,000	31	884,000	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	13,200,000	95	14,520,000	95	11,999,810	25	3,499,250	50	7,499,810	75	9,749,810	100	11,999,810	60	11,999,810	155	26,519,810	31	5,303,962	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
E	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100	125,950,000	95	138,545,000	95	87,862,000	25	16,535,400	50	44,635,230	75	72,060,830	100	87,098,330	60	87,862,000	155	226,407,000	31	45,281,400	
12	Kondisi Kendaraan Layak Pakai dan Pajaknya terbayar	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan Kendaraan yang Pajaknya Terbayar	100	82,500,000	95	90,750,000	95	66,362,000	25	16,535,400	50	32,140,230	75	50,568,830	100	65,606,330	60	66,362,000	155	157,112,000	31	31,422,400	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
13	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100	2,750,000	95	3,025,000	95	2,500,000	25	-	50	2,500,000	75	2,500,000	100	2,500,000	60	2,500,000	155	5,525,000	31	1,105,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yag dipelihara	100	40,700,000	95	44,770,000	95	19,000,000	25	-	50	9,995,000	75	18,992,000	100	18,992,000	60	19,000,000	155	63,770,000	31	12,754,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
II	Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan Dikecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Yg Sesuai Standar Pelayanan	100	5,500,000	95	-	95	1,063,050	25	1,063,050	50	1,063,050	75	1,063,050	100	1,063,050	60	580,000	155	580,000	31	116,000	
F	Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yg Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerinrah Daerah Yg ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan Dikecamatan	100	5,500,000	95	-	95	1,063,050	25	1,063,050	50	1,063,050	75	1,063,050	100	1,063,050	60	580,000	155	580,000	31	116,000	
15	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan Dikecamatan	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Yg Tepat Waktu	100	2,750,000	95	-	95	483,050	25	483,050	50	483,050	75	483,050	100	483,050	60	483,050	155	483,050	31	96,610	Seksi Pelayanan Publik
16	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan Dikecamatan	Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan Dikecamatan	100	2,750,000	95	-	95	580,000	25	580,000	50	580,000	75	580,000	100	580,000	60	580,000	155	580,000	31	116,000	Seksi Pelayanan Publik
III	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yg Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yg Aktif	100	68,200,000	95	60,500,000	95	51,880,000	25	9,900,000	50	38,080,000	75	44,230,000	100	51,880,000	60	43,180,000	155	103,680,000	31	20,736,000	
I	RPJM Desa dan RKPDesa	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Yg Difasilitasi	100	68,200,000	95	60,500,000	95	51,880,000	25	9,900,000	50	38,080,000	75	44,230,000	100	51,880,000	60	43,180,000	155	103,680,000	31	20,736,000	
17	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Desa Yg Aktif	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Menyusun RKPDesa yang tepat waktu	100	13,200,000	95	-	95	8,700,000	25	8,700,000	50	8,700,000	75	8,700,000	100	8,700,000	60	8,700,000	155	8,700,000	31	1,740,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
18	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Desa Yg Aktif	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yg Aktif	100	55,000,000	95	60,500,000	95	43,180,000	25	1,200,000	50	29,380,000	75	35,530,000	100	43,180,000	60	43,180,000	155	103,680,000	31	20,736,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
IV	Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah, Penyuluhan Keamanan	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	11,000,000	95	-	95	9,999,700	25	411,400	50	4,911,400	75	7,749,700	100	9,999,700	60	4,911,400	155	4,911,400	31	982,280	
J	Keamanan dan Ketertiban Umum Yg Terkendali	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jenis Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	11,000,000	95	-	95	9,999,700	25	411,400	50	4,911,400	75	7,749,700	100	9,999,700	60	4,911,400	155	4,911,400	31	982,280	
19	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian NRI, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	100	11,000,000	95	-	95	9,999,700	25	411,400	50	4,911,400	75	7,749,700	100	9,999,700	60	4,911,400	155	4,911,400	31	982,280	Seksi Tranitib
V	Jumlah Desa Yg Pengelolaan Keuangan Yg Sesuai Regulasi	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	77,000,000	95	84,700,000	95	30,938,960	25	5,588,230	50	15,007,630	75	23,354,310	100	30,938,960	60	30,938,960	155	115,638,960	31	23,127,792	
K	Administrasi Desa	Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Yg Efektif	100	77,000,000	95	84,700,000	95	30,938,960	25	5,588,230	50	15,007,630	75	23,354,310	100	30,938,960	60	30,938,960	155	115,638,960	31	23,127,792	
20	Jumlah Desa Yg Menytor SPJ Tepat Waktu	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yg Menytor SPJ Tepat Waktu	100	38,500,000	95	42,350,000	95	20,539,000	25	3,494,200	50	10,153,500	75	15,418,950	100	20,539,000	60	20,539,000	155	62,889,000	31	12,577,800	Seksi Pemerintahan
21	Jumlah Pos Kamling/Pos Ronda Yg Aktif	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Pos Kamling / Pos Ronda Yg Aktif	100	38,500,000	95	42,350,000	95	10,399,960	25	2,094,030	50	4,854,130	75	7,935,360	100	10,399,960	60	10,399,960	155	52,749,960	31	10,549,992	Seksi Tranitib
JUMLAH					1,980,495,864		1,808,824,885		1,658,629,075		241,368,319	14,552278	629,659,801		931,791,516		1,243,324,810		1,658,629,075		3,446,931,210		429,975,728	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	8		9		10			11		12		13= 6 + 12		
1	2	3	4	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab.Bantaeng berikutnya :																									
KECAMATAN EREMERASA																									
I	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	1,989,895,929	95	-	95	2,528,438,000	25	424,267,017	50	654,069,699	75	537,878,301	100	532,917,656	80	2,149,132,673	175	2,149,132,673	35	429,826,535		
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	100	-	95	-	95	20,000,000	25	4,213,600	50	6,355,700	75	5,228,100	100	4,202,600	80	20,000,000	175	20,000,000	35	4,000,000		
1	Terlaksananya Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 100%	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyampaian laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Target Pelaporan Realisasi Keuangan Paling Lambat TGL 10 Bulan Berikutnya	100	-	95	-	95	20,000,000	25	4,213,600	50	6,355,700	75	5,228,100	100	4,202,600	80	20,000,000	175	20,000,000	35	4,000,000	Sub.Bagian Program dan Keuangan	
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	1,986,663,929	95	-	95	2,353,438,000	25	388,442,900	50	607,281,777	75	500,138,724	100	490,800,528	80	1,986,663,929	175	1,986,663,929	35	397,332,786		
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Lancarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,949,495,929	95	-	95	2,314,438,000	25	378,633,000	50	596,923,377	75	491,076,924	100	482,862,628	80	1,949,495,929	175	1,949,495,929	35	389,899,186		
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Lancarnya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	100	35,000,000	95	-	95	35,000,000	25	7,641,900	50	10,358,400	75	9,061,800	100	7,937,900	80	35,000,000	175	35,000,000	35	7,000,000	Sub.Bagian Program dan Keuangan	
4	Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	100	2,168,000	95	-	95	4,000,000	25	2,168,000	50	-	75	-	100	-	80	2,168,000	175	2,168,000	35	433,600	Sub.Bagian Program dan Keuangan	
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	3,232,000	95	-	95	75,000,000	25	17,260,000	50	10,989,000	75	10,783,000	100	23,572,000	80	62,604,000	175	62,604,000	35	12,520,800		
5	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik atau Penerangan yang tersedia	100	3,232,000	95	-	95	4,000,000	25	-	50	959,000	75	1,813,000	100	460,000	80	3,232,000	175	3,232,000	35	646,400	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	
6	Terpenuhiya Kebutuhan Informasi/Bahan Bacaan.Bagi ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	-	95	-	95	6,000,000	25	1,000,000	50	2,000,000	75	1,500,000	100	1,500,000	80	6,000,000	175	6,000,000	35	1,200,000	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	
7	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi yang diikuti	100	-	95	-	95	65,000,000	25	16,260,000	50	8,030,000	75	7,470,000	100	21,612,000	80	53,372,000	175	53,372,000	35	10,674,400	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	80	-	175	-	35	-		
8	Terpenuhiya Kebutuhan pengadaan Roda Dua	Sub.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang diadakan	100	-	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	80	-	175	-	35	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	
9	Terpenuhiya Kebutuhan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	100	-	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	80	-	175	-	35	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	
10	Tercapainya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	-	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	80	-	175	-	35	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
E	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	95	-	95	30,000,000	25	4,321,767	50	6,340,772	75	5,637,687	100	4,738,328	80	21,038,554	175	21,038,554	35	4,207,711	
11	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Terbayar	100	-	95	-	95	15,000,000	25	1,840,367	50	1,859,992	75	1,837,567	100	2,038,328	80	7,576,254	175	7,576,254	35	1,515,251	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	-	95	-	95	15,000,000	25	2,481,400	50	4,480,780	75	3,800,120	100	2,700,000	80	13,462,300	175	13,462,300	35	2,692,460	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
F	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100	-	95	-	95	50,000,000	25	10,028,750	50	23,102,450	75	16,090,790	100	9,604,200	80	58,826,190	175	58,826,190	35	11,765,238	
13	Kondisi Kendaraan Layak Pakai dan Pajaknya terbayar	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan Kendaraan yang Pajaknya Terbayar	100	-	95	-	95	50,000,000	25	10,028,750	50	23,102,450	75	16,090,790	100	9,604,200	80	58,826,190	175	58,826,190	35	11,765,238	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yag dipelihara	100	-	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	80	-	175	-	35	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
II	Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan Dikecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Yg Sesuai Standar Pelayanan	100	-	95	-	95	35,000,000	25	6,085,340	50	12,831,200	75	8,926,600	100	16,031,400	80	43,874,540	175	43,874,540	35	8,774,908	
F	Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yg Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerinrah Daerah Yg ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan Dikecamatan	100	-	95	-	95	35,000,000	25	6,085,340	50	12,831,200	75	8,926,600	100	16,031,400	80	43,874,540	175	43,874,540	35	8,774,908	
15	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan Dikecamatan	Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan Dikecamatan	100	-	95	-	95	35,000,000	25	6,085,340	50	12,831,200	75	8,926,600	100	16,031,400	80	43,874,540	175	43,874,540	35	8,774,908	Seksi Pelayanan Publik
III	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yg Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yg Aktif	100	-	95	-	95	60,000,000	25	8,800,000	50	3,600,000	75	10,125,000	100	6,938,500	80	29,463,500	175	29,463,500	35	5,892,700	
H	PKK, Safari Ramadhan dan MTQ	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Yg Difasilitasi	100	-	95	-	95	60,000,000	25	8,800,000	50	3,600,000	75	10,125,000	100	6,938,500	80	29,463,500	175	29,463,500	35	5,892,700	
16	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Desa Yg Aktif	Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yg Aktif	100	-	95	-	95	60,000,000	25	8,800,000	50	3,600,000	75	10,125,000	100	6,938,500	80	29,463,500	175	29,463,500	35	5,892,700	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
I	Administrasi Desa	Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Yg Efektif	100	-	95	-	95	141,000,000	25	19,200,000	50	45,932,350	75	31,200,000	100	30,475,850	80	126,808,200	175	126,808,200	35	25,361,640	
17	Jumlah Desa yang di Fasilitas Tata Pemerintahan Desanya	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitas Tata Pemerintahan Desanya	100	-	95	-	95	25,000,000	25	2,400,000	50	6,524,150	75	6,000,000	100	5,275,850	80	20,200,000	175	20,200,000	35	4,040,000	Seksi Pemerintahan
18	Jumlah Desa Yg Menytor SPJ Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yg Menytor SPJ Tepat Waktu	100	-	95	-	95	55,000,000	25	7,200,000	50	20,208,200	75	10,800,000	100	10,800,000	80	49,008,200	175	49,008,200	35	9,801,640	Seksi Pemerintahan
19	Jumlah Pos Kamling/Pos Ronda Yg Aktif	Sub.Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan keteriban Umum	Jumlah Pos Kamling / Pos Ronda Yg Aktif	100	-	95	-	95	61,000,000	25	9,600,000	50	19,200,000	75	14,400,000	100	14,400,000	80	57,600,000	175	57,600,000	35	11,520,000	Seksi Tranlib
JUMLAH				1,989,895,929	-	2,764,438,000	-	2,764,438,000	458,352,357	716,433,249	588,129,901	586,363,406	2,349,278,913	2,349,278,913	469,855,783									

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11				12			13= 6 + 12	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab.Bantaeng berikutnya :																								
KECAMATAN PA'JUKUKANG																								
I	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	2,344,546,100	95	2,192,786,703	95	1,884,919,190	25	370,981,399	50	512,648,721	75	403,853,589	100	365,529,434	60	1,884,919,190	155	4,056,779,893	31	811,355,979	
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	100	16,542,000	95	19,439,200	95	9,665,900	25	3,665,900	50	2,400,000	75	1,800,000	100	1,800,000	60	9,665,900	155	29,105,100	31	5,821,020	
1	Terlaksananya Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyampaian laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Target Pelaporan Realisasi Keuangan Paling Lambat TGL 10 Bulan Berikutnya	100	14,026,500	95	10,715,500	95	8,150,400	25	2,150,400	50	2,400,000	75	1,800,000	100	1,800,000	60	8,150,400	155	18,865,900	31	3,773,180	Sub Bagian Program dan Keuangan
2	Terlaksananya Penyampaian Pelaporan Sakip Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Pelaporan Sakip Tepat Waktu	100	2,515,500	95	8,723,700	95	1,515,500	25	1,515,500	50	-	75	-	100	-	60	1,515,500	155	10,239,200	31	2,047,840	Sub Bagian Program dan Keuangan
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	2,019,066,250	95	1,912,519,850	95	1,678,501,630	25	313,930,279	50	460,214,295	75	359,050,183	100	323,684,118	60	1,678,501,630	155	3,591,021,480	31	718,204,296	
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Lancarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,000,000,000	95	1,884,990,100	95	1,665,427,100	25	308,465,549	50	456,804,495	75	357,250,183	100	321,284,118	60	1,665,427,100	155	3,550,417,200	31	710,083,440	
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Lancarnya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	100	16,566,250	95	17,066,250	95	11,211,030	25	3,601,230	50	3,409,800	75	1,800,000	100	2,400,000	60	11,211,030	155	28,277,280	31	5,655,456	Sub Bagian Program dan Keuangan
5	Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	100	2,500,000	95	10,463,500	95	1,863,500	25	1,863,500	50	-	75	-	100	-	60	1,863,500	155	12,327,000	31	2,465,400	Sub Bagian Program dan Keuangan
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase Pengadministrasian Kepegawaian Pada PD	100	6,000,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	
6	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	100	6,000,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	146,807,177	95	129,197,000	95	97,962,000	25	28,275,000	50	21,970,000	75	24,075,000	100	17,117,660	60	97,962,000	155	227,159,000	31	45,431,800	
7	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik atau Penerangan yang tersedia	100	1,672,177	95	1,472,000	95	1,470,000	25	-	50	1,470,000	75	-	100	-	60	1,470,000	155	2,942,000	31	588,400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi/Bahan Bakar/Batu Aspal	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	4,500,000	95	6,240,000	95	3,120,000	25	675,000	50	780,000	75	675,000	100	675,000	60	3,120,000	155	9,360,000	31	1,872,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi yang diikuti	100	140,635,000	95	121,485,000	95	93,372,000	25	27,600,000	50	19,720,000	75	23,400,000	100	16,442,660	60	93,372,000	155	214,857,000	31	42,971,400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
E	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	28,286,000	95	20,926,000	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	
10	Terpenuhinya Kebutuhan pengadaan Roda Dua	Sub.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang diadakan	100	20,000,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									I		II		III		IV									
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	100	-	95	10,426,000	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	100	8,286,000	95	10,500,000	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
F	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	42,664,673	95	34,664,653	95	35,219,660	25	6,425,720	50	10,355,426	75	7,698,576	100	8,475,656	60	35,219,660	155	69,884,313	31	13,976,863	
13	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Terbayar	100	21,580,000	95	15,579,980	95	16,220,000	25	2,727,000	50	4,054,486	75	3,198,576	100	3,975,656	60	16,220,000	155	31,799,980	31	6,359,996	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	21,084,673	95	19,084,673	95	18,999,660	25	3,698,720	50	6,300,940	75	4,500,000	100	4,500,000	60	18,999,660	155	38,084,333	31	7,616,867	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
G	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100	85,180,000	95	76,040,000	95	63,570,000	25	18,684,500	50	17,709,000	75	11,229,830	100	14,452,000	60	63,570,000	155	139,610,000	31	27,922,000	
15	Kondisi Kendaraan Layak Pakai dan Pajaknya terbayar	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan Kendaraan yang Pajaknya Terbayar	100	60,010,000	95	52,010,000	95	52,010,000	25	11,574,500	50	13,259,000	75	11,229,830	100	14,452,000	60	52,010,000	155	104,020,000	31	20,804,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100	2,000,000	95	1,420,000	95	1,110,000	25	1,110,000	50	-	75	-	100	-	60	1,110,000	155	2,530,000	31	506,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yag dipelihara	100	23,170,000	95	22,610,000	95	10,450,000	25	6,000,000	50	4,450,000	75	-	100	-	60	10,450,000	155	33,060,000	31	6,612,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
II	Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan Dikecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Yg Sesuai Standar Pelayanan	100	2,500,000	95	-	95	8,200,000	25	2,224,800	50	2,681,600	75	1,800,000	100	1,800,000	60	8,200,000	155	8,200,000	31	1,640,000	
H	Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yg Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerinrah Daerah Yg ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan Dikecamatan	100	2,500,000	95	-	95	8,200,000	25	2,224,800	50	2,681,600	75	1,800,000	100	1,800,000	60	8,200,000	155	8,200,000	31	1,640,000	
18	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan Dikecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan Dikecamatan	100	2,500,000	95	-	95	8,200,000	25	2,224,800	50	2,681,600	75	1,800,000	100	1,800,000	60	8,200,000	155	8,200,000	31	1,640,000	Seksi Pelayanan Publik
III	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yg Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yg Aktif	100	70,373,900	95	68,193,900	95	52,463,050	25	18,478,950	50	18,484,100	75	7,150,000	100	8,050,000	60	52,463,050	155	120,656,950	31	24,131,390	
I	RPJM Desa dan RKPDesa	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Yg Difasilitasi	100	70,373,900	95	68,193,900	95	52,463,050	25	18,478,950	50	18,484,100	75	7,150,000	100	8,050,000	60	52,463,050	155	120,656,950	31	24,131,390	
19	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Desa Yg Aktif	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yg Aktif	100	70,373,900	95	68,193,900	95	52,463,050	25	18,478,950	50	18,484,100	75	7,150,000	100	8,050,000	60	52,463,050	155	120,656,950	31	24,131,390	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
IV	Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah, Penyuluhan Keamanan	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	3,750,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									I				II		III								IV	
									8		9		10		11								12	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
J	Keamanan dan Ketertiban Umum Yg Terkendali	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jenis Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	3,750,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	
20	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	Sub.Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian NRI, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	100	3,750,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Seksi Trantib
V	Jumlah Desa Yg Pengelolaan Keuangan Yg Sesuai Regulasi	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	102,567,500	95	89,039,800	95	79,836,930	25	19,343,780	50	21,793,150	75	19,350,000	100	19,350,000	60	79,836,930	155	168,876,730	31	33,775,346	
K	Administrasi Desa	Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Yg Efektif	100	102,567,500	95	89,039,800	95	79,836,930	25	19,343,780	50	21,793,150	75	19,350,000	100	19,350,000	60	79,836,930	155	168,876,730	31	33,775,346	
21	Jumlah Desa yang di Fasilitas Tata Pemerintahan Desanya	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitas Tata Pemerintahan Desanya	100	3,500,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Seksi Pemerintahan
22	Jumlah Desa Yg Menytor SPJ Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yg Menytor SPJ Tepat Waktu	100	45,767,500	95	41,970,200	95	37,567,350	25	9,065,000	50	10,202,350	75	9,150,000	100	9,150,000	60	37,567,350	155	79,537,550	31	15,907,510	Seksi Pemerintahan
23	Jumlah Pos Kamling/Pos Ronda Yg Aktif	Sub.Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Pos Kamling / Pos Ronda Yg Aktif	100	50,300,000	95	47,069,600	95	42,269,580	25	10,278,780	50	11,590,800	75	10,200,000	100	10,200,000	60	42,269,580	155	89,339,180	31	17,867,836	Seksi Trantib
24	Jumlah Desa yang di monitoring dan di Fasilitas	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang di monitoring dan di Fasilitas	100	3,000,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75		100	-	60	-	155	-	31	-	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
JUMLAH					2,523,737,500		2,350,020,403		2,025,419,170		411,028,929	20.293524	555,607,571	24,3	432,153,589	22.5	394,729,434	19.48877743	2,025,419,170		4,354,513,573		870,902,715	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab.Bantaeng berikutnya :																								
KECAMATAN GANTARANGKEKE																								
1	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	3,278,619,900	100	2,709,949,027	100	2,797,865,000	13	376,944,550	33	925,033,775	25	702,331,961	-	637,853,146	94	2,642,163,432	197	5,352,112,459	31	163	
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	100	20,086,900	100	20,086,873	100	17,686,700	19	3,415,500	32	5,590,000	21	3,662,600	-	5,000,000	100	17,668,100	188	37,754,973	31	188	
1	Terlaksananya Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Target Pelaporan Realisasi Keuangan Paling Lambat TGL 10 Bulan Berikutnya	100	20,086,900	100	20,086,873	100	17,686,700	19	3,415,500	32	5,590,000	21	3,662,600		5,000,000	100	17,668,100	188	37,754,973	31	188	Sub Bagian Program dan Keuangan
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	2,829,822,000	100	2,428,462,466	100	2,555,369,450	13	327,766,530	34	871,864,002	25	629,256,240	-	576,865,878	94	2,405,752,650	658	4,834,215,116	31	171	
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Lancarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,749,822,000	100	2,395,235,716	100	2,512,105,400	13	318,165,330	34	859,421,902	25	620,063,040		564,963,537	94	2,362,613,809	199	4,757,849,525		173	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Lancarnya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	100	50,000,000	100	16,650,000	100	31,164,450	22	6,851,200	29	9,120,100	22	6,870,800		8,306,791	100	31,148,891	287	47,798,891	31	96	Sub Bagian Program dan Keuangan
4	Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	100	30,000,000	100	16,576,750	100	12,099,600	23	2,750,000	27	3,322,000	19	2,322,400		3,595,550	99	11,989,950	172	28,566,700	31	95	Sub Bagian Program dan Keuangan
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase Pengadministrasian Kepegawaian Pada PD	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-		-		-		-	#DIV/0!	-	31	-	
5	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-		-		-		-	#DIV/0!	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	160,000,000	100	94,140,150	100	79,655,850	26	21,081,000	22	17,841,000	18	14,279,000	-	26,147,825	100	79,348,825	184	173,488,975	31	108	
6	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik atau Penerangan yang tersedia	100	5,000,000	100	1,362,650	100	2,378,000	40	940,000	25	600,000	35	838,000		-	100	2,378,000	275	3,740,650	31	75	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi/Bahan Bacaan Bagi ASN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	5,000,000	100	1,560,000	100	2,784,000	25	696,000	25	696,000	25	696,000		696,000	100	2,784,000	278	4,344,000	31	87	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi yang diikuti	100	150,000,000	95	91,217,500	95	74,493,850	26	19,445,000	22	16,545,000	17	12,745,000		25,451,825	100	74,186,825	181	165,404,325	31	110	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
E	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	70,000,000	-	-	-	-	0	-	-	-		-		-		-	#DIV/0!	-	31	-	
9	Terpenuhinya Kebutuhan pengadaan Roda Dua	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang diadakan	100	40,000,000	-	-	-	-	0	-	-	-		-		-		-	#DIV/0!	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	100	20,000,000	-	-	-	-	0	-	-	-		-		-		-	#DIV/0!	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	100	10,000,000	-	-	-	-	0	-	-	-		-		-		-	#DIV/0!	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
F	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	58,711,000	100	58,138,762	100	49,721,000	19	9,660,920	29	14,288,273	22	10,871,121	-	13,487,503	97	48,307,817	183	106,446,579	31	181	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Terbayar	100	8,000,000	95	3,827,846	95	11,310,000	15	1,722,720	24	2,719,773	28	3,191,112		2,317,144	88	9,950,749	360	13,778,595	31	172	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	50,711,000	100	54,310,916	100	38,411,000	21	7,938,200	30	11,568,500	20	7,680,009		11,170,359	100	38,357,068	171	92,667,984	31	183	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
G	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100	140,000,000	100	109,120,776	100	95,432,000	16	15,020,600	16	15,450,500	46	44,263,000	-	16,351,940	95	91,086,040	183	200,206,816	31	143	
14	Kondisi Kendaraan Layak Pakai dan Pajaknya terbayar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan Kendaraan yang Pajaknya Terbayar	100	90,000,000	95	80,076,880	95	63,702,000	24	15,020,600	24	15,450,500	23	14,783,000		16,351,940	97	61,606,040	177	141,682,920	31	157	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-		-		#DIV/0!	-	31	-		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yag dipelihara	100	50,000,000	100	29,043,896	100	31,730,000	0	-	-	-	93	29,480,000		-	93	29,480,000	202	58,523,896	31	117	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
II	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yang Aktif	100	1,073,000,000	100	425,258,981	100	677,812,475	9	62,623,858	38	259,421,200	25	167,138,157	-	185,576,712	100	674,759,927	259	1,100,018,908	31	103	
H	RPJM dan RKPD Desa/Kelurahan	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Yg Difasilitasi	100	73,000,000	100	91,811,750	100	60,011,550	28	16,620,672	38	23,070,000	10	6,272,000	-	14,042,000	100	60,004,672	165	151,816,422	31	208	
17	RPJM dan RKPD Desa/Kelurahan	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yang Aktif	100	73,000,000	100	91,811,750	100	60,011,550	28	16,620,672	38	23,070,000	10	6,272,000		14,042,000	100	60,004,672	165	151,816,422	31	208	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
I	RPJM dan RKPD Desa/Kelurahan	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Yg Difasilitasi	100	1,000,000,000	100	333,447,231	100	617,800,925	7	46,003,186	38	236,351,200	26	160,866,157	-	171,534,712	100	614,755,255	284	948,202,486	31	95	
18	RPJM dan RKPD Desa/Kelurahan	Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun	100	600,000,000	100	61,529,500	100	394,864,525	0	-	60	236,351,200	25	98,513,325		60,000,000	100	394,864,525	742	456,394,025		76	
19	RPJM dan RKPD Desa/Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yg terevaluasi penyelenggaraan operasional pemerintahannya	100	400,000,000	100	271,917,731	100	222,936,400	21	46,003,186	-	-	28	62,352,832		111,534,712	99	219,890,730	181	491,808,461		123	
III	Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah, Penyuluhan Keamanan	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	200,000,000	100	163,450,000	100	219,600,000	25	54,900,000	-	-	39	84,900,000	-	79,800,000	100	219,600,000	234	383,050,000	31	192	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
J	Keamanan dan Ketertiban Umum Yg Terkendali	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jenis Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	200,000,000	100	163,450,000	100	219,600,000	25	54,900,000	-	-	39	84,900,000	-	79,800,000	100	219,600,000	234	383,050,000	31	192	
18	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	Sinergitas dengan Kepolisian NRI, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	100	200,000,000	100	163,450,000	100	219,600,000	25	54,900,000	-	-	39	84,900,000	-	79,800,000	100	219,600,000	234	383,050,000	31	192	Seksi Trantib
IV	Jumlah Desa Yg Pengelolaan Keuangan Yg Sesuai Regulasi	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	105,000,000	100	71,135,950	100	41,599,950	21	8,783,000	33	13,757,000	20	8,314,000	-	10,665,600	100	41,519,600	158	112,655,550	31	107	
K	Administrasi Desa	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Yg Efektif	100	105,000,000	100	71,135,950	100	41,599,950	21	8,783,000	33	13,757,000	20	8,314,000	-	10,665,600	100	41,519,600	158	112,655,550	31	107	
19	Jumlah Desa Yg Menytor SPJ Tepat Waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yg Menytor SPJ Tepat Waktu	100	50,000,000	-	23,578,500	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	100	23,578,500	31	47	Seksi Pemerintahan		
1	Jumlah Pos Kamling/Pos Ronda Yg Aktif	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Pos Kamling / Pos Ronda Yg Aktif	100	30,000,000	100	28,498,700	100	22,599,950	18	3,991,500	37	8,385,000	18	4,136,500	-	6,022,300	100	22,535,300	179	51,034,000	31	170	Seksi Trantib
20	Jumlah Desa/Kelurahan yang di monitoring dan di Fasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang di monitoring dan di Fasilitasi	100	25,000,000	100	19,058,750	100	19,000,000	25	4,791,500	28	5,372,000	22	4,177,500	-	4,643,300	100	18,984,300	200	38,043,050	31	152	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
JUMLAH					4,008,878,881	-	3,622,347,452	-	3,736,877,425	13	503,251,408	32	1,198,211,975	26	962,684,118	24	913,895,458	96	3,578,042,959					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab.Bantaeng berikutnya :																								
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2,098,416,070.00		2,098,591,255.00		2,110,859,709.00	16.01	335,969,790.00	26.40	554,037,553.00		513,260,036.00		561,174,799.00		1,964,442,178.00		4,063,033,433.00			
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prasentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi		21,832,860.00		58,868,350.00		19,400,000.00	17.09	3,730,480.00	38.83	8,478,380.00		7,073,830.00		2,550,000.00		21,832,690.00		80,701,040.00			
I		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prasentase Capaian Penunjang Urusan Pemerinatahan daerah	90	4,850,000.00		-		-	10.31	500,000.00	42.27	2,050,000.00		2,050,000.00		250,000.00		4,850,000.00		4,850,000.00		100.00	
II		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prasentase Capaian Penunjang Urusan Pemerinatahan daerah	90	4,114,530.00		-		-	-	-	81.09	3,336,500.00		778,030.00		-		4,114,530.00		4,114,530.00			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan	0	-		-		-		-						-	-	-	-	0.00	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	0	-		-		-									-	-	-	-	0.00		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA	0	-		-		-		-							-	-	-	-	0.00		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DokumenPenyusunan DPA-SKPD	0	-		-		-		-							-	-	-	-	0.00		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	-		-		-		-							-	-	-	-	0.00		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	0	-	-	6,674,250.00		-		-							-		6,674,250.00				Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
8	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12,868,330.00	2.53	52,194,100.00	1 Paket	19,400,000.00	25.10	3,230,480.00	24.03	3,091,880.00	32.99	4,245,800.00	17.87	2,300,000.00	12,868,160.00	0.49	65,062,260.00				Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-		-		-		-							-	-	-				Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
IV	Tercapainya Perujung urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prasentase Capaian Penunjang Urusan Pemerinatahan daerah	100	1,746,567,100.00	7.33	1,605,323,130.00	8.60	1,644,489,600.00	15.46	269,941,468.00	27.60	482,059,074.00	23.90	417,355,127.00	24.71	431,508,013.00	1,600,863,682.00		3,206,186,812.00				
10	Tercapainya Perujung urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan setiap Bulannya selama satu Tahun	12 Bulan	1,733,041,920.00	7.21	1,605,323,130.00	12 bln	1,627,565,100.00	15.44	267,548,668.00	27.61	478,466,124.00	23.98	415,555,127.00	24.57	425,768,583.00	1,587,338,502.00	0.24	3,192,661,632.00				Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
11	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan	12 Bulan	11,295,230.00		-	1 Paket	13,101,250.00	21.18	2,392,800.00	21.23	2,398,000.00	15.94	1,800,000.00	41.65	4,704,430.00	5.46	11,295,230.00	0.18	11,295,230.00	0.04	100.00	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
12		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	0	-		-		-		-							-	-	-	-	#DIV/0!		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Pragnosis Realisasi Anggaran	12 Bulan	2,229,950.00		-	1 Paket	3,823,250.00	-	-	53.59	1,194,950.00	-		46.41	1,035,000.00	14.58	2,229,950.00	0.07	2,229,950.00	0.01	100.00	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
V		Administrasi Umum Perangkat Daerah			90,093,980.00	4.76	209,406,200.00	5.56	174,308,000.00	25.75	23,201,200.00	36.78	33,140,480.00	36.31	32,713,414.00	67.14	60,489,311.00		149,544,405.00		330,742,405.00			Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
14		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi Keuangan	0	-	-	27,356,300.00		-		-		-		-		-		-		27,356,300.00			Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
15		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	0	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Listrik	1 Paket	-	6.10	3,965,200.00		-		-		-		-		-		0.16		3,965,200.00			Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
17		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	0	729,980.00		-		-		-	100.00	729,980.00	-		-		729,980.00		729,980.00				Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
19		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	0	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
20		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
21		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang di Fasilitas	0	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
22	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta dalam Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket	89,364,000.00	3.68	149,876,500.00	1 Paket	174,308,000.00	25.96	23,201,200.00	36.27	32,410,500.00	36.61	32,713,414.00	67.69	60,489,311.00	6.30	148,814,425.00	0.43	298,690,925.00			Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
23		Fasilitas Pelayanan administrasi Kesekretariatan/tata usaha	Lancarnya Operasional kantor	0	-	-	28,208,200.00		-		-		-		-		-		-		-	-		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13,835,200.00	18.20	13,250,000.00	4.57	-		-		-	100.00	13,835,200.00	-	-		13,835,200.00		27,085,200.00		2,200,000.00	
		Pembangunan Gedung Kantor (Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir)		0			2,450,000.00												-		2,450,000.00			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
24		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	0	-	7.26	10,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	10,800,000.00	-	-	-	-	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan	
25	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Meubeleur	Jumlah mebel yang diadakan	0	-	-	-	5.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan	
26		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan	
27	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	1 Paket	13,835,200.00	-	-	0.33	-	-	-	-	-	100.00	13,835,200.00	-	-	13,835,200.00	-	13,835,200.00	-	100.00	-	100.00	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
VII		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah		76,144,930.00	3.76	66,606,065.00	3.25	77,064,344.00	20.93	15,938,142.00	19.05	14,502,119.00	19.70	14,998,148.00	25.71	19,580,209.00		65,018,618.00		131,624,683.00		25,772,591.00		
28		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan	
29		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan Kantor	-	-	20,859,321.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,859,321.00	-	-	-	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan	
30	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Langganan Listrik,Air dan Internet	100	56,736,000.00	3.23	45,746,744.00	3 Paket	57,654,000.00	20.16	11,438,142.00	17.06	9,681,529.00	18.50	10,498,148.00	24.89	14,123,869.00	3.31	45,741,688.00	0.61	91,488,432.00	0.12	161.25	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan	
31	Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non ASN yang dibayarkan setiap bulannya selama satu tahun	100	19,408,930.00	-	-	1 Paket	19,410,344.00	23.19	4,500,000.00	24.84	4,820,590.00	23.19	4,500,000.00	28.11	5,456,340.00	6.00	19,276,930.00	0.17	19,276,930.00	0.03	99.32	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan	
VIII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		149,942,000.00	2.01	145,137,510.00	1.24	195,597,765.00	15.44	23,158,500.00	10.58	15,857,500.00	18.20	27,284,317.00	31.38	47,047,266.00		113,347,583.00		258,485,093.00	0.23	64,889,250.20		
32	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang dipelihara	100	49,630,000.00	-	-	2 Paket	49,630,000.00	20.05	9,949,500.00	11.92	5,914,500.00	25.29	12,550,000.00	26.18	12,995,000.00	1.20	41,409,000.00	0.83	41,409,000.00	0.17	83.44	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan	
33	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara	100	99,412,000.00	0.98	-	3 Paket	119,590,000.00	12.68	12,609,000.00	9.70	9,643,000.00	14.82	14,734,317.00	34.25	34,052,266.00	1.20	71,038,583.00	1.85	71,038,583.00	0.37	71.46	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional					4,320,500.00											-		4,320,500.00					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capalan Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
34	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara	100	900,000.00	-		1 paket	2,795,000.00	66.67	600,000.00	33.33	300,000.00	-		-		4.64	900,000.00	0.22	900,000.00	0.04	100.00	Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
35	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	100	-	16.81		1 Paket	23,582,765.00		-								-		-	0.09		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
		Pemeliharaan Rutin Berkala /Berkala Kendaraan Dinas Operasional			-		137,207,010.00				-								-		137,207,010.00			
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor			-		3,610,000.00				-								-		3,610,000.00			
35		Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	100	-			-			-								-		-	-		Kesekretariatan BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag Keuangan
IX		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Capaian Layanan Penanggulangan Bencana		5,860,589,457.00	1.90	4,026,120,292.00	1.88	4,256,543,116.00	5.36	314,108,130.00	10.65	624,248,300.00	7.88	461,796,780.00	34.32	2,011,157,824.00		3,411,311,034.00		5,620,552,542.00		1,124,110,508.40	
X		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		10,599,850.00		-		-					-		-			-		-		0.00	
37	Meningkatnya Informasi Pelayanan Publik	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	100	-			-			-								-		-	0.00		Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
38	Meningkatnya Pelayanan Publik	Sosialisasi ,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi ,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis bencana)	100	10,599,850.00			-			-								-		-	0.00	-	Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
XI		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		5,735,750,757.00	11.24	3,715,739,492.00	0.87	4,142,483,366.00	5.03	288,539,930.00	10.71	614,048,300.00	7.80	447,561,780.00	34.75	1,992,890,824.00		3,343,040,834.00		7,058,780,326.00		123.07	
39	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100	10,123,900.00			-	2 kali	5,000,000.00	-	-				-			-		-	0.004	-	Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
40	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100	1,081,815,282.00			1 tahun	1,947,394,202.00	7.84	84,780,030.00	15.57	168,400,000.00	21.21	229,407,000.00	36.03	389,813,746.00	0.215890694	872,400,776.00	4.63	872,400,776.00	0.926	80.64	Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
41	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	9,514,250.00			3 Paket	-		-					-			-		-		-	Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
42	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Resiko Bencana	100	4,785,000.00			1 Paket	7,185,000.00	-	-					4,785,000.00	-		4,785,000.00		4,785,000.00		100.00	Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
43	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan	100	-			-	1 Paket	35,646,500.00		-							-		-			Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
44		Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana		-			-			-								-		-			Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
45		Pemantauan Potensi Bencana	Jumlah Pemantauan Potensi Bencana		-		6,666,550.00		-		-								-		6,666,550.00			Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Operasionalisasi Pos Komando/Siaga Tanggap Darurat Bencana			-		3,392,701,142.00											K	-	K	3,392,701,142.00			
46	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	100	4,585,655,525.00	28.17	81,620,550.00	7 Paket	2,147,257,664.00	4.44	203,759,900.00	9.72	445,648,300.00	4.65	213,369,780.00	34.00	1,559,220,278.00	16.09271194	2,421,998,258.00	0.10	2,503,618,808.00	0.020	54.60	Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
47		Fasilitas Perbaikan (Rehabilitasi) Sarpras Umum, Fasilitas Pemerintah, Lingkungan dan Rumah Penduduk	Terlaksananya Fasilitas Perbaikan (Rehabilitasi) Sarpras Umum, Fasilitas Pemerintah, Lingkungan dan Rumah Penduduk		-	-	28,202,400.00		-		-								-		28,202,400.00			Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
48		Fasilitas Pembangunan (Rekonstruksi) Sarpras umum, fasilitas Pemerintah dan sarana sosial Pasca Bencana	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan (Rekonstruksi) Sarpras umum, fasilitas Pemerintah dan sarana sosial Pasca Bencana		-	-	206,548,850.00		-		-								-		206,548,850.00			Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
49	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Berkembangnya Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100	43,856,800.00	-	-	10.81	-		-					100.00	43,856,800.00		43,856,800.00		43,856,800.00	0.000	100.00	Bidan Kedaruratan dan Logistik
XII		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		70,004,700.00	0.08	185,815,900.00	2.93	101,192,750.00	36.52	25,568,200.00	14.57	10,200,000.00	20.33	14,235,000.00	14.57	10,200,000.00		60,203,200.00		3,812,003,092.00			
50	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	3,750,000.00	#DIV/0!	-	11.70	-		-					100.00	3,750,000.00	-	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	-	Bidan Kedaruratan dan Logistik
51	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	66,254,700.00	1.38	-	3 Paket	101,192,750.00	38.59	25,568,200.00	15.40	10,200,000.00	15.83	10,485,000.00	15.40	10,200,000.00	3.282360702	56,453,200.00	1.03	246,146,050.00	0.21	371.51	Bidan Kedaruratan dan Logistik
		Pengadaan Logistik dan Peralatan Perlengkapan PB			-		173,155,900.00												-					Bidan Kedaruratan dan Logistik
52		Program Kedaruratan dan Logistik penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Program Kedaruratan dan Logistik penanggulangan Bencana		-	-	-		-		-								-		3,565,857,042.00			Bidan Kedaruratan dan Logistik
53		Pengadaan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik	Jumlah Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik		-	-	-		-		-								-		0.00			Bidan Kedaruratan dan Logistik
54		Penyebartluasan Informasi Kebencanaan melalui media massa dan media sosial	Jumlah Penyebarluasan Informasi Kebencanaan melalui media massa dan media sosial		-		12,660,000.00		-		-								-		0.00			Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
XIII		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		44,234,150.00	5.07	124,564,900.00	11.45	12,867,000.00		-		-	-	-	18.24	8,067,000.00		8,067,000.00		130,331,900.00			
55	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Regulasi Penanggulangan bencana	100	11,594,200.00		-		-		-					-			-	0.00	0.00	0.00	-	Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
56	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	100	8,722,950.00		-	1 Dok	6,000,000.00		-					-			-	0.00	0.00	0.00	-	Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
57	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100	23,917,000.00	3.19	85,409,750.00	1 kali	6,867,000.00		-					33.73	8,067,000.00		8,067,000.00	0.33	91,176,750.00	0.07	381.22	Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
58		Penyusunan Profil BPBD	Jumlah Profil BPBD		-		14,061,100.00		-		-								-		14,061,100.00			Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
59		Penyusunan Perda, SOP dan SPM Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Perda, SOP dan SPM Penanggulangan Bencana		-		-		-		-								-					Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capalan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
60		Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana		-		25,094,050.00		-		-								-		25,094,050.00			Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
61	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana	100	-		-		-		-								-	0.00	0.00			Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
62	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100	-		-		-		-								-	0.00	0.00	0.00		Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Jumlah					7,959,005,527.00		6,124,711,547.00		6,367,402,825.00	8.17	650,077,920.00	14.80	1,178,285,853.00	12.25	975,056,816.00	32.32	2,572,332,623.00	0.675430265	5,375,753,212.00					
Rata-rata Capaian Kinerja																								
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD Kab.bantaeng Berikutnya																								
BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS																								
1		Program penunjang urusan pemerintahan	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran nya	100	2,234,900,000	100	1,093,362,625	100	2,026,591,628	0.17	349,862,963.00	42.59	863,050,373.00	65.74	1,332,259,277	87.73	1,777,902,721	42.76	4,323,075,334	142.76	5,416,437,959	-		
1		Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	terpenuhinya dokumen perencanaan,penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100	70,000,000	100	7,977,500	100	25,970,700	0.23	5,975,100.00	56.68	14,720,200.00	81.75	21,232,050	100.00	25,970,700	56.91	67,898,050	156.91	75,875,550	-		
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Terpenuhinya dokumen penyusunan DPA	100	20,000,000	0	0	100	4,831,000	0.61	2,933,900.00	100.00	4,831,000.00	100.00	4,831,000	100.00	4,831,000	100.61	17,426,900	100.61	17,426,900	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Terpenuhinya dokumen penyusunan perubahan DPA	100	20,000,000	0	0	100	3,907,800	0.00	0	30.87	1,206,200.00	90.73	3,545,400	100.00	3,907,800	30.87	8,659,400	30.87	8,659,400	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	100	30,000,000	100	7,977,500	100	17,231,900	0.18	3,041,200.00	50.39	8,683,000.00	74.60	12,855,650	100.00	17,231,900	50.57	41,811,750	150.57	49,789,250	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2		Administrasi keuangan perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan pada PD	100	1,723,900,000	100	942,517,025	100	1,622,454,878	0.16	299,811,553.00	40.95	746,300,693.00	64.14	1,168,923,472	86.50	1,576,338,171	41.11	3,791,373,889	141.11	4,733,890,914	-		
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	100	1,718,000,000	100	937,209,000	100	1,819,230,878	0.16	296,587,553.00	40.85	743,076,693.00	64.08	1,165,699,472	86.47	1,573,114,171	41.01	3,778,477,889	141.01	4,715,686,889	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen/ laporan	100	5,900,000	100	5,308,025	100	3,224,000	1.00	3,224,000.00	100.00	3,224,000.00	100.00	3,224,000	100.00	3,224,000	101.00	12,896,000	201.00	18,204,025	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3		Administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi umum	100	215,000,000	100	92,630,600	100	108,957,000	0.27	29,138,000.00	59.75	65,097,000.00	79.76	86,907,235	97.68	106,424,000	60.01	287,566,235	160.01	380,196,835	-		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik	100	15,000,000	100	9,844,600	100	2,300,000	0.29	668,000.00	61.39	1,412,000.00	83.04	1,910,000	100.00	2,300,000	61.68	6,290,000	161.68	16,134,600	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat / koordinasi yang diikuti dan dilaksanakan	100	200,000,000	100	82,786,000	100	106,657,000	0.27	28,470,000.00	59.71	63,685,000.00	79.69	84,997,235	97.63	104,124,000	59.98	281,276,235	159.98	364,062,235	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Luar provinsi

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan penyediaan jasa urusan pemerintahan	100	45,000,000	0	18,902,950	100	30,671,750	0.17	5,356,810.00	50.04	15,346,980.00	75.72	23,223,220	100.00	30,671,750	50.21	74,598,760	50.21	93,501,710	-		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan di adakan	100	20,000,000	0		100	13,679,750	0.18	2,520,110.00	51.58	7,055,780.00	77.09	10,545,120	100.00	13679750	51.76	33,800,760	0.00	33,800,760	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Layanan administrasi ketelausahaan kantor	100	25,000,000	0	18,902,950	100	16,992,000	0.17	2,836,700.00	48.79	8,291,200.00	74.61	12,678,100	100.00	16,992,000	48.96	40,798,000	48.96	59,700,950	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana pemeliharaan barang milik daerah	100	46,000,000	100	31,334,550	100	38,537,300	0.25	9,581,500.00	56.01	21,585,500.00	82.97	31,973,300	99.90	38,498,100	56.26	101,638,400	156.26	132,972,950	-		
		Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan	100	40,000,000	100	26,984,550	100	34,437,300	0.24	8,331,500.00	54.40	18,735,500.00	82.04	28,253,300	99.89	34,398,100	54.65	89,718,400	154.65	116,702,950	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor	100	6,000,000	100	4,350,000	100	4,100,000	0.30	1,250,000.00	69.51	2,850,000.00	90.73	3,720,000	100.00	4,100,000	69.82	11,920,000	169.82	16,270,000	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengadaan pengadaan barang milik daerah	100	100,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-		
		Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah aset kantor	100	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah paket pembangunan kantor	100	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah paket sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	100	60,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	100	35,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah bimtek	100	35,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Frekuensi kegiatan dibidang pengembangan ideologi pancasila dan bela negara	100	186,000,000	0	0	80	33,441,800	0.22	7,398,100.00	63.72	21,310,100.00	77.74	25,997,550	100.00	33,441,800	63.94	88,147,550	63.94	88,147,550	-		
		Perumusan Kebijakan teknis dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Frekuensi kegiatan forum pembaruan kebangsaan dan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan	100	100,000,000	0	0	80	15,078,800	0.25	3,781,700.00	65.88	9,934,500.00	81.00	12,213,750	100.00	15,078,800	66.13	41,008,750	66.13	41,008,750	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan koordinasi teknis dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Frekuensi kegiatan dibidang ideologi wawasan kebangsaan dan bela negara	100	86,000,000	0	0	80	18,363,000	0.20	3,616,400.00	61.95	11,375,600.00	75.06	13,783,800	100.00	18,363,000	62.15	47,138,800	62.15	47,138,800	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etnis serta budaya politik	Frekuensi kegiatan dibidang peningkatan stabilitas politik	100	815,000,000	0	804,150,850	85	724,717,430	0.01	7,898,450.00	2.37	17,166,650.00	3.32	24,025,150	91.77	665,072,660	2.38	714,162,910	2.38	1,518,313,760	-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										I				II											III				IV			
										K		Rp		K		Rp									K		Rp		K		Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Frekuensi kegiatan tim verifikasi bantuan keuangan parpol		700,000,000	0	804,150,850	85	649,785,000	0.01	7,898,450.00	2.64	17,166,650.00	3.50	22,746,650	90.82	590,140,230	2.65	637,951,980	2.65	1,442,102,830	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
		Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan pendidikan politik masyarakat		115,000,000	0		0	74,932,430	0.00		0	0.00	-	1.71	1,278,500	100.00	74,932,430	0.00	76,210,930	0.00	76,210,930	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
10		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	frekuensi kegiatan dibidang pengawasan ormas	100	215,000,000	0		0	152,372,000	0.00	14,694,500.00	0.00	36,498,500.00	29.32	44,678,500	100.00	152,372,000	0.00	248,243,500	0.00	248,243,500	-										
		Penyusunan program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Frekuensi kegiatan dibidang pendaftaran, pemberdayaan dan pengawasan ormas	100	95,000,000	0		0	7,484,000	0.00		0	100.00	7,484,000.00	100.00	7,484,000	100.00	22,452,000	100.00	22,452,000	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	frekuensi kegiatan dibidang pengawasan ormas		120,000,000	0		0	144,888,000	0.10	14,694,500.00	20.03	29,014,500.00	25.67	37,194,500	100.00	144,888,000	20.13	225,791,500	20.13	225,791,500	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
11		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Frekuensi kegiatan dibidang pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		388,500,000	0		0	116,557,200	0.11	12,364,200.00	34.87	40,643,100.00	50.59	58,960,500	100.00	116,557,200	34.98	228,525,000	34.98	228,525,000	-										
		Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Frekuensi kegiatan forum kerukunan umat beragama		115,000,000	0		0	43,653,200	0.03	1,434,700.00	11.50	5,022,100.00	25.99	11,343,500	100.00	43,653,200	11.54	61,453,500	11.54	61,453,500	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
		Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Frekuensi kegiatan dalam bidang ekonomi, sosbud dan peningkatan pengetahuan generasi muda dalam pencegahan narkoba		273,500,000	0		0	72,904,000	0.15	10,929,500.00	48.86	35,621,000.00	65.31	47,617,000	100.00	72,904,000	49.01	167,071,500	49.01	167,071,500	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
12		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Frekuensi kegiatan dibidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial		431,000,000	0	443,319,300	80	239,454,200	0.24	56,302,100.00	51.24	122,685,100.00	73.87	176,873,900	99.52	238,304,200	51.47	594,165,300	51.47	1,037,484,600	-										

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I	II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah frekuensi kegiatan pemantauan dibidang intelijen daerah		200,000,000	0	122,957,500	80	111,618,000	0.26	28,638,600.00	47.42	52,932,700.00	69.79	77,900,100	100.00	111,618,000	47.68	271,089,400	47.68	394,046,900	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah kegiatan tim forum radikal tingkat kabupaten	100	156,000,000	0	69,410,000	80	67,550,000	0.24	15,963,500.00	46.80	31,616,200.00	74.52	50,337,600	100.00	67,550,000	47.04	165,467,300	47.04	234,877,300	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah frekuensi kegiatan pemantauan forum kewaspadaan dini masyarakat	100	75,000,000	0	250,951,800	80	60,286,200	0.19	11,700,000.00	63.26	38,136,200.00	80.68	48,636,200	98.09	59,136,200	63.45	157,608,600	63.45	408,560,400	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH					4,270,400,000		2,340,832,775	75	3,293,134,258	0.14	448,520,313.00	33.44	1,101,353,823.00	50.49	1,662,794,877	90.60	2,983,650,581	33.58	6,196,319,594	33.58	8,537,152,369	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya aparat yang berkinerja yang bisa menunjang keberhasilan sebuah program/kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perlu bimbingan/pelatihan pada aparat terkait serta anggaran yang mencukupi																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten /Kota berikutnya :																								



KABUPATEN BANTAENG
